

## Merajut Senja di Panti Jompo

<http://www.media-indonesia.com/>

"ANGGAPLAH Ibu mati, kapan pulang jangan dipikir," ucap Lestari, 74, dengan ikhlas kepada anak-anaknya sekitar 13 tahun silam. Tidak ada keraguan dalam kalimat yang disampaikannya itu. Nada bicaranya tegas sama seperti keputusannya untuk menyimpan rapat-rapat kenangan bersama lima buah hatinya di Surabaya.

Sekarang, wanita bertubuh kurus dan berambut putih itu tinggal bersama rekan-rekannya berusia lanjut di sebuah rumah mungil di Jalan Kramat V Nomor 1 C Jakarta Pusat.

Di tempat yang bernama Panti Jompo Yayasan Waluya Sejati Abadi tersebut terdapat delapan wanita dan tiga pria lanjut usia (lansia). Mereka ini 'korban politik' -- mantan tahanan politik (tapol) kasus G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia)-- masa lalu.

Lestari, memilih tinggal di panti jompo itu lantaran tak ingin menyusahkan anaknya, sebab cap tapol PKI masih melekat.

Pada 1968 Dia dicokok aparat di Malang, Jawa Timur (Jatim) karena dituduh terkait dengan aktivitas Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)--underbow PKI--Jatim.

Begitu pula dengan Soedjinah, 78. Wanita ini malahan salah seorang pengurus Gerwani Pusat. Mantan wartawati Harian Rakjat dan Bintang Timoer itu, memilih hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia saat bergerilya melawan pendudukan Jepang. Lestari dan Soedjinah merupakan sahabat lama saat menghadiri kongres Gerwani di Surabaya, pada 1951.

Penghuni lainnya, Siti Komariah, 79, merasa betah tinggal di panti meski baru satu tahun. Sebelumnya nenek ini serumah dengan keponakannya di Kendal, Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tetapi merasa tertekan lantaran di tempat itu ia harus terkungkung dalam aturan sang keponakan yang melarangnya pergi ke mana-mana.

"Enakkan di sini, bebas ngomong apa saja," ujar Siti.

Setiap hari, mulai matahari terbit para penghuni panti ini mulai beraktivitas layaknya ibu rumah tangga. Urusan masak-memasak dikerjakan Lestari, sedangkan mencuci pakaian dilakukan mereka secara bergantian, begitu pula dengan membersihkan rumah dikerjakan secara gotong-royong.

Aktivitas lainnya, secara rutin mereka membaca koran pagi serta nongkrong di muka televisi menyaksikan sinetron, tidak lupa program berita sebagai acara favorit. Selebihnya para mantan aktivis politik ini melakukan diskusi dengan beragam tema, mulai sosial, budaya sampai politik. Bahkan ada pula di antara mereka yang rajin mengikuti seminar, maupun turun ke jalan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Untuk melakukan semua kegiatan di rumah jompo ini, Yayasan Waluya Sejati Abadi harus merogoh kocek Rp2 juta per bulan. Selain yayasan, tidak sedikit pula donatur yang menggelontorkan rupiah ke rumah itu.

Bagi warga sekitar, apa yang dilakukan di rumah bercat putih kusam itu lazimnya rumah tangga biasa. "Kami merasa tidak terganggu walau mereka mantan tapol," kata Saiful, 21, warga Kramat V. (\*M-3).

\*\*\*\*\*

## Pemberangusan Lagu Kemerdekaan Manusia

Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (23)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Taktik-trik «kill of hope », « rotten apple » dan « teori domino » dalam rangka global strategi dengan pengobaran Perang Dingin yang panas oleh kaum nekolim dengan kolaborator di negeri-negara bersangkutan memang kebiadabannya luar biasa. Seperti di bagian-bagian kawasan Dunia Ketiga lainnya, di negeri kita pun terjadilah apa yang disebut Noam Chomsky sebagai « gulag archipelago » yang bersimbah darah, keringat dan air mata.

Tindakan penghancur-binaan yang mereka lakukan terhadap yang dianggap musuh dan dijadikan sasaran itu bukan hanya secara politis, juga psikis dan bahkan fisik. Termasuk diantaranya tindakan pembungkaman dan pemberangusan terhadap beragam bentuk ekspresi kreativitas dan penggelapan ingatan sejarah. Sebagai kebalikannya, sang penguasa secara sewenang-wenang menyebarkan ketakutan, dusta, fitnah dan pembodohan. Semuanya dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan sarana media massa yang dihegemoninya dan jaringan pengajaran dari berbagai tingkat serta berbagai forum apa saja yang bisa menguntungkan atau mengamankan kekuasaannya.

Demikianlah yang dilakukan sang penguasa Orba dan kaum orbais – baik semasa jaya-jayanya maupun setelah sang Kepala lengser. Seperti contoh tipikalnya berupa kasus Pramodya yang masyhur secara nasional maupun internasional. Seperti juga macam kasus Ribka Tjiptaning Proletariati dengan bukunya yang menggemparkan berjudul « Aku Bangga Jadi Anak PKI ». Yang penerbitannya ditentang oleh elit politik yang tak kurang sedang berkedudukan sebagai RI-2. Yakni Wakil Presiden Hamzah Haz. meminta Kejaksaan Agung menyita dan menyelidiki karya Ribka sang Anak Tapol itu.

Kasus Ribka terjadi tahun 2002, sedangkan kasus Pramodya yang berkaitan dengan pengungkap-hidupan ingatan sejarah terjadi pada tahun 1995. Seperti diberitakan oleh Kompas Minggu 14 Mei tahun itu, berjudul : « Jaksa Agung Larang Buku 'Nyanyi Sunyi ' Karya Pramodya ».

Dalam Kreasi nomor 24 1995 saya turunkan catatan budaya berkenaan dengan penerbitan buku terbaru Pram sampai tahun itu. Sebagai suatu evenement yang berkaitan pula dengan hari ulang tahunnya yang ke-70 sekaligus sebagai kado ulang perkawinannya yang ke-40 dengan Maemunah Thamrin.

Buku yang berupa catatan-catatan dari Pulau Buru itu telah diterbitkan di Belanda dengan judul « Lied van een Stomme » (hasil penerjemah A. van der Helm dan

Angela Rookmaker) oleh penerbit Manus Amici--Het Wereldvenster pada tahun 1988-1989.

Pada hari ulang ke-70 dan peluncuran buku yang berlangsung di rumahnya sendiri itu, di antara para seniman, aktivis dan tamu-tamu asing yang hadir tampak Sitor Situmorang, Goenawan Mohamad, Rendra, Princen dan Mochtar Pabottinggi.

Pada kesempatan itu Pram menjelaskan, bahwa catatan dan surat-surat yang terhimpun dalam buku itu, ditulis terburu-buru tanpa diperiksa kembali. Kecuali beberapa bagian. Semua ditulis setelah 1973, tahun penulis mendapat izin menulis. Dan dia berterimakasih yang tak berhingga kepada semua dan tiap orang. Mereka yang karena solidaritas internasional dan manusiawinya memungkinkan adanya kelonggaran penulis dalam pembuangan sejak Juli 1973, khususnya Amnesty Internasional, Komite Indonesia, Prof. Dr WF Wertheim dan Carmel Boediardjo.

Dalam Catatan atas Catatan, Pram menandaskan, bahwa penerbitan buku itu, «didasarkan pada pertimbangan : apa dan bagaimana pun pengalaman indrawi dan batin seorang pribadi, apalagi dituliskan, ia jadi bagian dari pengalaman suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya.»

Sebagaimana lazimnya, tulis saya ketika itu, kaum intelegensia dan pers Indonesia telah membuta-tuli atas adanya penerbitan sebuah dokumen sosial sekaligus pembuktian dari korban kezaliman banditkrasi Orde Baru tersebut. Kecuali segelintir saja, di antaranya catatan ringkas di Kompas, artikel di Forum Keadilan dan Independen mewawancarai Pramoeodya. Sebaliknya, pers luarnegeri, terutama Asiaweek dan Far Eastern Economic Review menyebarkan komentar cukup panjang.

Pramoeodya dengan tegas menyatakan, bahwa maksud penerbitan buku «Nyanyi Sunyi Seorang Bisu» itu antara lain adalah agar «jangan sampai ada korupsi sejarah».

Tetapi arogansi kekuasaan yang memang korup, sekali lagi telah memperlihatkan watak kezaliman sekaligus ketakutan akan kebenaran dan keadilan dengan melakukan larangan atas buku tersebut. Sesungguhnya, karena arogansi yang teriring ketakutan sendiri itulah penguasa Orde Baru membuang sebanyak 10.000 tapol ke dalam kamp konsentrasi Pulau Buru. Termasuk di antaranya kaum, jurnalis, seniman, penyair dan sastrawan.

Dari kalangan sastrawan dan penyair, selain Pramoeodya Ananta Toer, juga HR Bandaharo, Boejoeng Saleh, Rivai Apin, S. Anantaguna, Samanjaya (Oei Haidjoen), Nusananta, Setiawan Hs, Amarzan Ismail Hamid, Sutikno Ws, JT Rahma, Benny Tjhung, James Kaihatu.

Dari kalangan wartawan, antara lain : M Naibaho, Hasjim Rahman, Tom Anwar, Habib Azhari, Sumartono Mertoloyo, Samodra, Hariyudi, Kadi.

Dari kalangan seni film dan seni drama : Basuki Effendy, Bachtiar Siagian. Dari kalangan ludruk dan ketoprak : Shamsuddin, Buwang, Dasul, Badawi.

Dari kalangan seni rupa : Permadi Lyosta, Gultom, Sumardjo.

Sedangkan dari kalangan seni musik : Subronto K Atmodjo, M Yunanta, Go Giok Liong. Sederetan nama-nama tapol Pulau Buru itu tertera dalam buku tipis susunan eks-tapol Hersri S alias Setiawan Hs berjudul «Dunia Yang Belum Sudah» (1993). Yang menunjukkan antara lain, bahwa dalam keadaan bagaimana pun sulitnya, kaum pekerja kebudayaan dan seniman, sastrawan dan penyair tetap bukan saja bisa bertahan dalam mengayomi hidup dan kehidupannya, tapi juga senantiasa melakukan aktivitas dan kreativitas seninya.

Bahkan, di dalam kamp Pulau Buru pun, Hersri : «sensor militer terhadap hasil daya cipta tapol, baik di atas panggung hiburan maupun di tengah tempat kerja, berlaku sangat keras. Dengan sekedar bertujuan untuk memperlihatkan kekuasaan, dan atas dasar itu menjatuhkan hukuman bagi tapol bersangkutan, terkadang sesuatu alasan terasa benar-benar di-ada-ada-kan belaka.»

Hersri dalam makalahnya itu mengutarakan beberapa contoh. Seperti yang dialami seorang aktor yang juga sutradara film Basuki Effendy yang disiksa hanya karena menyanyikan lagu «Come Back To Sorento». Sang penguasa mengartikannya bahwa Basuki sedang melakukan agitasi untuk «meng-kam-bek-kan PKI». Begitu juga Lie Bok Hoo yang ditempelengi militer hanya lantaran bernyanyi menyanyikan lagu «Larilah, Hai Kudaku», yang dicurigai memberikan isyarat kepada para tapol untuk melarikan diri dari Pulau Buru.

Selain itu, bahkan, juga di Pulau Buru pelarangan diberlakukan bagi lagu «Genjer-Genjer». Padahal lagu tersebut bukanlah semacam lagu perjuangan seperti «Maju Tak Gentar», «Nasakom Bersatu», «Resopim», «Darah Rakyat» atau «Internasional», melainkan lagu rakyat. Lagu yang hanya melukiskan keadaan sehari-hari rakyat biasa yang hidup sederhana dan menikmati tanaman berupa genjer. Tetapi toh lagu itu ditakuti dan oleh karenanya juga termasuk hasil karya yang terlarang.

Kenapa Orde Baru ketakutan ? «Orde Baru adalah orde yang sakit jiwa», kata Hersri kemudian dalam tulisannya di majalah Kreasi nomor 3, 2001. Pesakit kejiwaan itu, «timbul dari komunisto fobi yang amat parah, sehingga menjadi angst psychose yang traumatis terhadap bahaya komunis. Karena itu jika orang bertanya mengapa Orde Baru, yang memiliki perangkat militer 'gagah perkasa', takut pada lagu Genjer-Genjer, seribu satu alasan bisa dikemukakan.» Dan Hersri pun menunjukkan lagu lainnya yang menjadi momok para penguasa, yakni lagu «Hidup Di Bui». Oleh Kopkamtib, pada tahun 70-an lagu tersebut sempat dilarang baik di dalam penjara Tangerang, maupun di luar itu.

Kita pun kemudian mendengar khabar, bahwa menghadapi segala macam siksa dan penghinaan lainnya, ada masanya kaum wanita tapol di Penjara Bukit Duri menyanyi serentak dengan lantangnya lagu «Darah Rakyat». «Darah Rakyat masih berjalan» Yang membikin panik para penguasa penjara Orde Baru. Maka, bagaimanakah bila lagu « Internasional » pun dikumandangkan? \*\*\*

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai jilid 25)

\* A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-

an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetak dan elektronika a.l.Seri karya tulisan IMPRESI DARI EROPA

(<http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67>), Kolom

BUNG KOHAR

[http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat\\_id=1&rubrik\\_id=23&id=3808](http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808))

\*\*\*\*\*

Penghancur-binasakan Internasional

## Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (24)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Lagu-lagu perjuangan adalah lagu perjuangan. Disebut demikian lantaran kelahirannya dalam perjuangan kehidupan masyarakat manusia yang tak kunjung padam dari zaman ke zaman. Apakah kelahir-hadirannya secara lokal, nasional, regional ataupun internasional. Seperti contoh tipikalnya lagu «Internasional».

Akan tetapi, bisakah manusia menghancur-binasakan lagu-lagu perjuangan yang sebenar benarnya ? Bisakah juga manusia menghancur-binasakan lagu-lagu yang tiada lain kecuali kisah-kisah hidup dan kehidupan bersejarahnya sendiri ?

Lantas apa pula makna pribahasa : Patah tumbuh hilang berganti ? Mati satu tumbuh seribu ? Hilang sekali datang mengulang lagi? Tenggelam di sini timbul di sana sini ?

Ketika suatu ketika dalam rangkaian tukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswi progresip di Sprengelstrasse sebelah barat kota Berlin, Françoise lah yang paling antusias menyambut variasi petatah-petitih yang aku utarakan itu. Elke Herold dan Luth pun tambah antusias ketika aku kembali menyebut kasus komponis Subronto K Atmodjo. Komponis antara lain lagu-lagu

«Nasakom Bersatu» dan «Resopim» yang pernah mengiktui pendidikan seni musik di Jerman Timur itu, meski pun dikebloskan dalam penjara sampai di buang ke Pulau Buru pun semangat juangnya tak pernah patah. Begitu juga para musisi dan seniman serta sastrawan lainnya.

Akan tetapi memang sejak komunistofobi mendominasi Indonesia dengan tegaknya kekuasaan Orba pimpinan kaum militer, semua lagu-lagu yang bernada irama progresif revolusioner telah dibungkam. Apalagi lagu yang merupakan pemupuk tradisi revolusioner rakyat yang universal dan bersejarah seperti lagu Internasional.

Dalam sejarah seni musik, tak ada yang bisa mengungguli Internasional baik dari segi jumlah yang membawakannya maupun segi kemasyhurannya di seluruh dunia. Lagu tersebut benarbenar lagu rakyat yang diciptakan oleh penyair dari kalangan rakyat sendiri dalam gelora perjuangan revolusioner.

«Saking terkenalanya, kebanyakan orang tak peduli lagi siapa pencipta lagu Internasional itu,» ujar Françoise

«Mungkin juga Eugene Pottier, penyair yang menyusun sajak Internasional itu sendiri tak pernah memperkirakan kedahsyatan pengaruhnya,» sambut Elke.

Lantas Françoise menyitir sebagian dari baris-baris kata puitis Internasional dalam bahasa aslinya sebagai berikut:

C'est la lutte finale / Groupons nous et demain / L'Internationale / Sera le genre humain. Debout ! l'âme du prolétaire ! / Travailleurs, groupons-nous enfin / Debout ! les damnés de la terre ! / Debout ! les forçats de la faim ! / Pour vaincre la misère l'antré / Foule esclave, debout ! debout ! / C'est nous le droit, c'est nous le nombre / Nous qui n'étions rien, soyons tout.

S'est la lutte finale / Groupons-nous et demain / L'Internationale / Sera le genre humain.

Selanjutnya, lagu yang pada dasarnya mengumandangkan semangat Revolusi Perancis, khususnya mengapresiasi penegakan Komune Paris itu dinyayikan di segenap penjuru dunia. Seiring dengan itu juga menjadi momok kaum reaksioner. - lebih lagi sejak dikobarkannya Perang Dingin yang Panas. Maka dari itulah lagu perjuangan tersebut pun menjadi sasaran untuk diberangus-binasakan pula. Bersama kekuatan yang memang menjadi sasaran bidikannya. Di mana-mana. Termasuk di Indonesia.

Demikianlah, selagi Internasional berkumandang di belahan terbesar bola dunia, di kawasan-kawasan tertentu lainnya lagu tersebut diberangus. Pembawa lagunya pun diberangus-binasakan dalam beragam cara – dari upaya pelumpuhan sampai pencabutan nyawa.

Segala taktik-trik dilancarkan oleh pengobar peperangan yang secara hipokrit disebut sebagai

Perang Dingin di bawah pimpinan kaum nekolim Amerika Serikat itu. Segala macam cara pelancaran aksi subversi dan campurtangan untuk mengubah arah politik serangkaian negeri itu semata-mata demi penegakan imperium skala global. Secara kongkret dilakukan di Tiongkok (1945-1949). Italia (1947-1948). Yunani (1947-1949). Filipina (1945-1953). Korea Selatan (1945-1953). Albania (1949-1953). Jerman (1950-an). Iran (1953). Guatemala (1953). Timur Tengah (1956-1958). Indonesia (1957-1958 ; 1965). Guyana (1953-1964). Vietnam (1950-1973). Kamboja (1955-1973). Kongo (1960-1965). Brasil (1961-1964). Republik Dominika (1963-1966). Kuba (sejak 1959). Chili (1964-1973). Timor Timur (1975-1999). Nikaragua (1978-1989). Grenada (1979-1984). Libya (1981-1989). Panama (1989). Afghanistan (1979-1992). El Salvador (1980-1992). Haiti (1987-1994). Irak (1990-an dan 2003).

Segala macam taktik-trik pembusukan dan penghancur-binasakan tersebut telah menelan pembiayaan yang luarbiasa dahsyatnya. Begitu juga korban manusianya baik yang tewas dan luka-luka serta mengalami berbagai penderitaan yang tak terperiikan. Kobaran Perang Dingin yang Panas sudah tentu yang paling marak dan berkepanjangan adalah yang terjadi di Indochina, teristimewa sekali di Vietnam.

Betapa tidak. Selama 20 tahun lebih berlangsungnya peperangan yang biadab itu di Vietnam Utara korban dari kaum sipil yang tewas sebanyak 2.000.000 jiwa ; di

Vietnam selatan 2.000.000 jiwa. Sedangkan kaum militer yang jadi korban sebanyak 1.100.000 jiwa dan 600.000 jiwa yang luka-luka.

Oleh karena itulah di berbagai pelosok dunia – teristimewa sekali di Amerika Serikat sendiri – berkobar pula ekspresi kemarahan seraya mengutuk Perang Vietnam itu. Protes yang berlanjutan berupa Gerakan anti-Perang Vietnam yang mengutuk agresi Amerika Serikat sekaligus pernyataan solidaritas terhadap rakyat Vietnam. Dari kancah perjuangan mana lahir dan menggema beragam ekspresi seni, terutama sekali lagu-lagu perjuangan anti-perang Vietnam seperti yang dikumandangkan oleh sederetan musisi dan penyanyi seperti Woodie Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Lenon dan yang lainnya lagi.

Lagu-lagu berjudul «Blowin' in the Wind», «Eve of Destruction», «Master of War», «Machine Gun», «Vietnam», «Give Peace a Chance» dan yang semacamnya telah lahir dan turut menghayati gerlora perjuangan massa luas dalam bentuk arak-arakan atau rapat-rapat raksasa maupun konser-konser memprotes peperangan demi tercapainya perdamaian.

Selang-seling slogan berbunyi : «Yankee Go Home», «Stop War», «Make Love not War» dan sebagainya lagi. Baik yang diucap-teriakkan maupun tertuliskan dengan huruf-huruf raksasa yang menghiasi dinding dan tembok kota-kota di berbagai penjuru dunia. Termasuk di kota Berlin. Termasuk di atas Tembok Berlin yang merupakan simbol Perang Dingin yang Panasnya luar biasa. Bukan hanya yang tertumpu di situ, melainkan di berbagai pelosok dunia. Seperti disebutkan di atas.

Sekalipun korban kebiadaban peperangan sudah sedemikian dahsyat, namun sampai pun usainya Perang Vietnam, ledakan-ledakan kekerasan senjata masih terus terjadi di berbagai negeri. Semua ragam macam tindakan pembusukan sekaligus penghancur-binasakan itu tak sudi kunjung henti.

Korban-korban satu dua yang tewas pada tiap insiden di sepanjang Tembok Berlin itu sepertinya hanyalah juga mempertandakan korban peperangan yang berlangsung di berbagai penjuru dunia. Yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa yang tewas maupun yang luka-luka. Ratusan juta jiwa pula yang jadi korban segala macam derita sengsara dalam menjalani kehidupan yang dibawah penindasan dan penghisapan kaum penguasa zalim negara mereka masing-masing. Ratusan juta yang pada hakekatnya juga hidup di dalam kurungan-kurungan tembok penjara raksasa yang ditegakkan oleh arogansi kekuasaan yang rangkai-berangkai dari suatu lingkaran-setan mengelobal. Lingkaran-setan dominatris dan hegemonis. Persis seperti makna tersurat lagi tersirat dalam baris lirik lagu «The Wall» Pink Floyd : «All in all it was all just bricks in the wall / All in all you were all just bricks in the wall...»

Sesungguhnya lingkaran-setan dominatris-hegemonis itu timbul-datangnya dari masing-masing blok – Blok Barat maupun Blok Timur – yang saling bersitegang dalam kebiadaban peperangan itu sendiri. Perang Dingin yang Panas.

Maka pada saat terjadi perubahan situasi dengan lepasnya mata-rantai mata-rantai lingkaran setan secara lokal, di mana dan kapan-kapan saja, segera disambut oleh opini dunia yang mencintai perdamaian dunia. Seperti usainya Perang Vietnam.

Seperti juga lengsernya para penguasa diktator di berbagai negeri Asia, Afrika dan Amerika Latin. Hingga pada evenement yang paling spektakuler di ujung tahun 1989 : Runtuhnya Tembok Berlin ! \*\*\*

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai jilid 25)

\* A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetak dan elektronika a.l.Seri karya tulisan IMPRESI DARI EROPA

(<http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67>), Kolom BUNG

KOHAR ([http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat\\_id=1&rubrik\\_id=23&id=3808](http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808))

\*\*\*\*\*

## Yang Menang Sebelum Bertempur

Oleh: A. Kohar Ibrahim

SUDAH menjadikebiasaannya menerima tamu seperti menerima anggota keluarga sendiri. Dengan keramah-tamahan yang sewajarnya. Tapi untuk wawancara itu dia mengenakan seragam hijau. Padahal dia sudah tidak berdinias lagi.

"Silakan duduk, dik. Sebelah sini atau sana," ujarinya ramah. Terdengar desingan pluit. "Maaf, sebentar. Airnya sudah mendidih. Isteri saya masih di kamar mandi. Babu lagi belanja." Dan dia senyum ringan, beranjak melangkah ke ruang lain. Ke dapur. Jalannya pincang.

Kamar kerjanya tidak begitu mewah, tapi teratur rapih. Dinding temboknya berhiaskan beberapa gambar. Di atas sebuah dipan yang kududuki terpampang pemandangan alam karya pelukis Dulloh. Di belakang mejatulis tergantung poster dari kain batik Garuda Bhinneka Tunggal Ika, diapit potret besar Presiden RI pertama dan kedua. Dan di sebelah Presiden kedua itu potret dia sendiri: berpakaian seragam dengan bersenjata lengkap di samping kendaraan berlapis waja. Di bawahnya tertulis "1 Oktober 1965. Lapangan Merdeka. Djakarta".

Nama aslinya Goenawan. Tapi lelaki berperawakan sedang, berkulit sawo-matang, berwajah mirip pelawak Bagio itu senang sekali dipanggil Pak Ceplas. Sekalipun belum punya anak. Sekalipun sudah beristeri selama dua dasa warsa. Berusia 45 tahun.

"Jadi adik bermaksud menulis karangan memperingati Peristiwa 1 Oktober? Dengan kisah-kisah beberapa pelakunya?" tanyanya setelah kembali dari dapur, duduk di kursi empuk dekat meja-tulisnya. Dan seperti biasanya, kepada siapapun dia menegaskan alasannya kenapa dia suka dipanggil Bapak. "Bukan gila penghargaan. Dipanggil Bapak Ceplas, atau Pak Ceplas-Ceplos itu artinya tukang ngomong apa adanya. Tanpa diplomasi-diplomasian. Kapan dan di mana saja." Dan sambil melirik



buku catatan sang wartawan dia meneruskan: "Ini ciri penting, dik. Ini fakta. Tulis tuh..."

Ditanya, dia lancar memberi contoh atau yang baginya merupakan fakta. Seperti penentangannya atas aksi pemboikotan film-film Amerika di zaman Orde Lama, kerna dia penggemar film Cowboy. Tertuama yang dibintangi John Wayne. Dia menentang aksi-aksi sepihak kaum tani, kerna sendainya tuntutan BTI atas pelaksanaan Undang-undang Landreform secara konsekwen dijalankan, mertuanya akan kehilangan berbidang-bidang sawah-ladang. Dia tak suka PKI, kerna bapaknya tewas ketika bertugas menumpas pasukan komunis dalam Peristiwa Madiun 1948. Maka dari itulah tumbuh ketidakpuasannya terhadap kebijaksanaan Presiden sukarno.

Selagi aktif sebagai prajurit dia juga tidak merasa puas. "Sebagai lelaki, kita mesti membuktikan kejantanan kita," ujarnya, seperti ditujukan pada dirinya sendiri. Kepuasannya agak terpenuhi oleh kegiatannya sebagai usahawan. Dia punya perusahaan impor-ekspor perabot rumahtangga, terutama impor barang-barang plastik dari negeri Sakura. "Untung atau rugi, betul-betul saya rasakan.

Berusaha dan bersaing, itu seperti bertempur," katanya meyakinkan.

"Sebagai tentara tidak puas?" wartawan itu penasaran. Seketika pandangannya asyik ke potret besar yang tergantung di tembok. Pak Ceplas segera mengerti.

"Ah, itu!" ujarnya sembari senyum ringan. "Foto bersejarah. Hasil jepretan wartawan Amerika. Mister Ronny. Kartunamanya juga masih saya simpan baik-baik."

Sang wartawan kian tertarik. Dari bagian dokumentasi telah diketahuinya potret itu. Suatu snapshot yang begitu berhasil. Demikian kesannya. Dengan komentar: "tentara memporak-porandakan pemberontak", "penggempur benteng komunis" dan sebagainya lagi. Tiap koran dalam dan luar negeri menyiarkan potret itu dengan macam-macam komentar yang pada pokoknya membeberkan keheroikan. Tetapi ketika ditanya bagaimana perasaan dan pikirannya, di saat-saat yang genting itu,

Pak Ceplas malah ketawa.

"Wah, foto itu memang punya riwayatnya sendiri."

"Kami mau tahu lebih jauh," ujar wartawan. "Faktanya, Pak?"

"Faktanya?"

"Ya, faktanya."

"Faktanya saya disuruh berpose," katanya ringan dan polos. Dan dia ketawa lagi. "Wah, sungguh tak terlupakan saat itu. Saya disuruh berpose sedemikian rupa - seperti serdadu in action. Wah, dia memang lihai. Si Idungmancung itu!" Lalu dia mengangkat alis dan bahunya. Senyum tersipu. Diakuinya, potret itu amat membantunya dalam usaha. Yang menyebabkan dia dikenal sebagai prajurit berjasa, di bawah pimpinan Kolonel Dedi. Kolonel yang kemudian cepat mencuat pangkatnya dari perwira menengah menjadi Brigadir Jenderal. Orang yang berprawakan tegap berkumis lebat itu adalah pemuda Jenderal Romel dan Franco.

Tapi, seperti halnya ketika bertugas di Kalimantan dalam rangka melawan proyek Malaysia, di Jakarta pada awal Oktober itupun mereka hanya bersiap-siap belaka. Itulah yang membikinnya kecewa. "Di tempat-tempat strategismemang ada barikade-barikade," katanya menjelaskan. "Kendaraan berlapis baja, truk-truk penuh prajurit siap tempur berseliweran di jalan-jalan raya. Kami berusaha menciptakan suasana perang. Tapi tak bertempur."

"Tidak bertempur?" wartawan itu sungguh penasaran. Seketika teringat, di akhir tahun 1965 itu dia masih duduk di bangku kuliah di Bandung. Baru tahun berikutnya dia bermukim di Jakarta. Giat dalam aksi-aksi pemuda pelajar mengutuk Orde Lama. Dia bukan cuma turut berteriak-teriak di jalan-jalan raya, tapi juga menuliskannya di koran-koran. Terutama sekali di koran yang membawakan suara pemuda. Itulah sebabnya dia kemudian menjadi wartawan Harian Kita. Ketika dia mengulang tanya, betulkahpada hari yang bersejarah itu mereka tidak melakukan pertempuran, Pak Ceplas malah balik bertanya:

"Bertempur dengan siapa sih? Hari itu yang ada cuma pengumuman tentang Dewan Revolusi lewat RRI. Presiden Sukarno dan Ketua PKI Aidit beserta bapak-bapak pemimpin negara lainnya berada di Halim. Bersama Letkol Untung. Menlu Subandrio dan Wakil Ketua PKI Nyoto beserta beberapa Menteri lainnya berada di Medan. Menteri Chairul Saleh beserta pembesar lainnya sedang mengunjungi RRT. Ibarat rumah kosong tanpa orangtua, kita main perang-perangan di sekitar Istana Negara."

Dia menebarkan pandang ke potretnya, lalu ke potret Presiden RI yang pertama dan yang kedua. Dan dia ingat, banyaknya pasukan tentara yang datang dari daerah-daerah itu bukan untuk bertempur, melainkan untuk merayakan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober. Setelah tercenung sejenak, ditatapnya wajah sang wartawan muda di dekatnya itu. Seperti ada berkas-berkas awan mendung meliputi wajahnya, nada ucapannya agak berubah: "Ah, main perang-perangan, hasilnya bukan main-main..."

"Banyak korban jatuh, ya Pak?"

"Iya. Banyak korban jatuh. Setelah 1 Oktober itu. Setelah tersiar khabar enam Jenderal gugur. Bukan di medan tempur, tapi di temukan di sumur. Di Lubang Buaya," ujarinya datar. "Fakta-faktanya, dik," terusnya, "baik yang kalah maupun yang menang itu tanpa melalui pertempuran. Saya cedera lantaran jatuh terpeleset sendiri. Dari atas truk!"

Hening mencengkam seketika. Seperti disumbat perban berlapis-lapis, wartawan itu kehilangan suaranya. Tak mengajukan pertanyaan lagi. Karena tujuan utamanya untuk menulis kisah pahlawan tempur di awal Oktober yang bersejarah itu. Selain akan mempopulerkan lebih lanjut sang pahlawan, efeknya tentu bagi kepopuleran dirinya pula. Apa boleh buat. Betapapun juga rencana tulisannya tak boleh buyar. Diperhatikannya lagi potret bersejarah yang terpampang di tembok. Pak Ceplas segera paham. Bangkit dari duduknya. Membuka laci meja-tulis. Berkata dengan penuh kesungguhan:

"Foto yang itu tak boleh diganggu. Saya masih punya yang kecilan. Ini ambil."

"Wah, bagus sekali, Pak," ujar wartawan agak terhibur. Rautmukanya berseri-seri. Paling tidak, potret itu akan memperkuat tulisannya. Tetapi kegembiraannya dihambarkan oleh pesan Pak Ceplas, ketika menyudahi wawancara itu.

"Kalau dimuat, komentarnya jangan sensasionil, ya?"

"Oke," jawab wartawan pendek. Bangkit dan menyiapkan tustelnya. "Foto terbaru, Pak?"

"Silakan," sambut Pak Ceplas girang. "Sebelah sini atau sana?"

"Ya, tetap di bawah lambang itu."

Dan diapung berpose di bawah poster Garuda Bhinneka Tunggal Ika.

DUA hari kemudian, hasil-hasil wawancara disiarkan di bawah judul "1 Oktober 1965: Tentara menghancurleburkan G.30.S/PKI". Siang hari itu juga sang wartawan menerima telpon dari Pak Ceplas yang menyatakan kekecewaannya. Karena baik artikel maupun komentar atas potretnya tidak seperti yang dia harapkan. Lalu dia minta bicara langsung dengan pemimpin redaksi Harian Kita itu, menyemprotnya dengan kata-kata:

"Wartawan yang baik mesti memperhatikan fakta-fakta. Yang hitam bilang hitam yang putih putih. Faktanya gamblang: kita menang sebelum bertempur!"

Seketika suaranya terputus. (1980) \*\*\*

(Cerpen Yang Menang Sebelum Bertempur pernah terpajang di galeri cerpen Cybersastra 29 September 2002).

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Sang Praktis

Cerpen oleh A. Kohar Ibrahim

HENING. Keheningan yang amat menekan ruang pengap seperti hendak meledak. Seketika itu baik sang Interogator maupun tawanan diliputi bayangan serupa: seseorang yang pandai bersilat lidah. Seorang pintar yangmendapat sebutan pakar.

Beda sekali dengan yang seorang ini. Baginya pertanyaan-pertanyaan itu lebih menyiksa dari pada hujaman popor senapan atau alat penyiksa lainnya, seperti penggencet jeriji atau penyetrum kemaluan. Selama bermalam-malam dia sering tak mampu pejamkan mata. Bukan hanya lantaran badan dirasakan remuk-redam, tapi juga terutama kerna digeluti berbagai pertanyaan yang tak berjawab.

SangInterogator yang berbadan tegap dan usianya jauh lebih muda berusaha mengintai riwayat tawanan itu. Karyo.

KETIKA masih muda Karyo juga berbadan tegap dan sehat. Berkumis lebat bermacam panjang. Dikenal sebagai orang yang rajin melaksanakan tugas. Kesetiiaannya pada usaha yang dianggap mulia begitu luar biasa -- seperti meng-agama-kannya saja. Betapa merasuk kesetiaan dan keyakinannya itu diwujudkan dengan kepatuhan mutlak kepada atasan, instruksi dan pelaksanaannya.

"Kerja!" itulah kata yang memenuhi benaknya. Akan halnya ilmu pengetahuan atau hal-ehwal yang dapat disimak dalam buku tidaklah menarik perhatiannya. Baginya membaca itu membuang-buang waktu saja. Memang selagi badan segar-bugar, motor keyakinan dan kecekatannya sangat bermanfaat. Terutama pada saat-saat kesibukan luar biasa di zaman Nasakom Bersatu Sukarno.

"Saya ini orang praktis. Bukan teoretikus," ujarnya selalu dengan bangga. "Tugas apa saja saya tunaikan. Soal teori itu bukan urusan saya!"

SAMPAI berusia lanjut terus saja digayutinya pendapatnya itu. Teriring kegemaran-nya mengisahkan pengalaman pribadinya sendiri. Tak peduli sudah puluhan kali di depan orang yang sama. Sebaliknya setiap pertanyaan yang bersifat teori selalu dihindari.

Diupayakannya selalu lari menghindar pertanyaan yang mudah membikin kepalanya pusing.

Apalagi mengenai persoalan-persoalan yang timbul sekitar kudeta militer. Menghadapi huru-hara yang terjadi sebagai kelanjutan perebutan kekuasaan politik itu benar-benar dia merasa kebingungan. Tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Kecuali menanti instruksi dari atasan yang tak pernah lagi kunjung datang.

Kebiasaannya lalu meremas-remas rambut yang mulai banyak memutih. Atau memukul-mukul kepalanya sendiri. Kesal tak mampu menjawab pertanyaannya sendiri. Sebab orang-orang atasan maupun yang dikenalnya sebagai teoretikus tak dijumpainya lagi. Entah di mana adanya. Entah di penjara, entah diam-diam tapi bergerak di bawah tanah. Atau memang telah menyatu dengan tanah sungguhan.

Bila badan sudah tua semangat dan keyakinan dirinya tak mampu lagi menanggung beban kelewat berat. Apa lagi menghadapi todongan senapan berbayonet mengkilap. Dia mudah saja masuk perangkap dan diperlakukan seperti bola di kamar siksa Kopkamtib.

PADA saat diinterogasi dia memang lebih sering menggelengkan kepala. Seperti ketika ditanya mengenai apa dan bagaimana kaitannya dalam "teori dua aspek", "metode kombinasi tiga bentuk perjuangan" dan sebagainya. Dia bungkam. Dihajar. Terus bungkam saja. Terus pula dihajar. Sekalipun berulang kali jatuh pingsan, tapi begitu sadar kembali jawaban yang diberikannya cuma gelengkan kepala.

"Saya ini orang praktis," ulang ucapannya tiap kali ditodong pertanyaan sang Interogator dan ancaman alat penyiksa dalam genggamannya seorang algojo lainnya.

Antara pingsan dan sadar, berulang kali dia teringat dibenaknya seorang berkepala botak yang pernah memberi kuliah sewaktu dia mengikuti Sekolah Partai. Ketika sekali dia menggumamkan nama sang guru itu tanpa disadari sang Interogator mengejanya. Menekannya dengan ujung pistol di pelipis. Sulit baginya untuk menggelengkan kepala.

Terpaksa buka mulut: "Tanyailah dia..., " ujarnya gemetar, seakan-akan orang yang dimaksud -- si dia -- ada di ruangan itu.

"Siapa? Bilang!" ujar sang Interogator kasar.

"Itu... Pak Cahyo," ujarinya dengan nada berat. Seperti berbisik lagi menanggung rasa malu telah menyebut nama yang dipantangkan itu.

"Siapa?" sang Interogator tanya balik. Penasaran. "Pak Cahyo..."

"Iya, Pak Cahyo itu. Dia yang banyak tahu. Jago teori. Saya sih cuma orang praktis. Tanyailah dia."

Seketika itu sang Interogator yang menggeleng-gelengkan kepala. Menghela nafas panjang sembari memejamkan mata sejenak. Dalam benak dia juga teringat seorang sarjana bernama Cahyosuarso yang sesaat sebelum mati tersiksa di ruangan itu sempat mengumpat seraya meludah: "Laknat kamu! Aku anggap pelindung rakyat malah jadi algojo!"

Sang Praktis melempar pandang hampa dalam keheningan ruang yang pengap itu. Tercenung. Sang Interogator juga. Masing-masing digeluti kenangan yang menggelisahkan. (1990) \*\*\*

\*\*\*

- A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetakelektronika

\*\*\*\*\*

## Lelaki Tua dan Kurungan Burung

Cerpen: A. Kohar Ibrahim

BERANJAK dari ruang makan setelah sarapan pagi dia melangkah perlahan menuju beranda. Ke sudut sebelah kiri dimana terletak kurungan burung. Seketika mendekat, terdengar suara menyapa: "Pagé pa dé, pagé, pagé..." Burung beo itu mengangkat ceker kanan seraya menggoyang-goyang kepalanya sejenak. Mengulang ucap salaminya. Disambut senang oleh lelaki tua itu dengan nada berbisik: "Met pagi ..." Lalu dia menghenyakkan pantat di kursi rotan. Berhadapan dengan burung beo yang masih terus memandangnya seperti keheran-heranan. Padahal lelaki tua yang dipertuannya itu senantiasa tersenyum selaras sebutan masyhurnya sebagai "the smiling strong man". Orang kuat tukang senyum. Yang suka kurungan. Penggemar burung dalam sangkar. Sejak masa kecilnya. Hingga masa usia lanjutnya yang menurut istilahnya sendiri sudah "top". Yakni tua, ompong, pikun.

Begitulah dia tak pernah lupa bagaimana ketika untuk pertama kalinya berhasil menjebak dengan getah seekor gelatik dan menjebloskannya ke dalam sangkar yang sempit. Burung yang cukup bagus itu memprotes dengan terjangan ke sana-sini, tapi dia cuek saja. Senyum senang malah.

Kemudian, tidak puas menggunakan jebakan dengan getah, diapun menggunakan jepretan. Sekalipun luka-luka atau malah hampir tewas, burung itu dijebloskan juga

dalam kurungan. "Rasain lu!" umpatnya tiap kali, teriring senyum dan dengan sinar mata berbinar memancarkan perasaan puasny.

Kegemarannya akan burung dan mengurung burung dilanjutkan bukan lagi dengan hasil jebakan atau jepretannya sendiri, melainkan dengan hasil tukar-menukar dengan penggemar lainnya. Suatu kegiatan yang cukup banyak mendatangkan keuntungan bukan hanya kepuasan hati tapi juga berupa kekayaan harta benda dan simpanan uang. Burung-burung yang aneka ragam itu berasal dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke.

Untuk itu diperlukan ruang yang cukup besar, baik ruang yang tertutup maupun yang terbuka. Yang penting burung-burung itu tetap berada di dalam sangkar atau kurungannya masing-masing dan mudah untuk diawasi. Dengan ketajaman pandang mata-matanya. Teriring senyumnya. Betapalah kesibukan tukang-tukang burung yang dijadikan relasi atau yang dipekerjakan untuk melakukan pengurusannya. Di bawah pengawasan mata-matanya yang jeli.

Nampaknya segalanya berlangsung sedemikian rapihnya. Dalam suasana kesantiaian dan keamanan. Sampai pada saat datangnya angin perubahan situasi kerna kepengapan dan epidemi di satu sisi, di sisi lain bencana gangguan syaraf atas jiwaganya. Suasananya lantas berubah secara drastis: komando yang diberikan olehnya hanya mengakibatkan segalanya menjadi makin amburadul.

Burung-burung yang terkurung ada yang lepas beterbangan, ada yang naas tewas dan terlantarkan. Yang tinggal hanya satu sangkar dengan seekor beo sebagai penghuninya yang setia.

Perubahan itu membikin sebagian orang yang mengenalnya terheran-heran. Tapi sebagian lagi sama sekali bisa memahaminya. Bahkan sudah memprediksinya sejak jauh-jauh hari. Jika diingat kenyataan bahwa pada masa jaya-jayanya, ketika lelaki tua itu dijuluki "orang kuat tang tersenyum", dia memang telah melakukan tindakan yang dahsyat. Tat kala dengan santai saja memburu, menjebak dan menangkap ratusan ribu orang tak berdosa, lalu mengurungnya di kamp-kamp konsentrasi. Bahkan tak terbilang banyaknya yang tewas ditembak begini saja seperti menembaki burung. Atau orang-orang yang dijebaknya itu dipendam dalam kuburan besar yang digali oleh para korban itu sendiri.

itu dilakukan secara santai di bawah pengawasan mata-matanya yang jeli dan dengan iringan senyum selalu. Semata-mata untuk menunjukkan bahwa memang dialah orang kuat yang komandonya ditakuti dan oleh karenanya ditaati. Sederhana saja memang persoalannya.

Maka jikalau kemudian yang tinggal menemaninya hanyalah seekor burung beo saja, itu memang sudah sewajarnya demikian. sebagai simbol dari mereka yang patuh sekaligus sebagai penghiburnya yang setia. Setia? Tapi tetap tinggal dalam kurungan. Tak lebih dari itu. Nanti, kalau sudah sampai waktunya, dia pun takkan segan-segan untuk menghentikan nafasny. Sesaat menjelang tarikan nafas akhirnya sendiri.

DI DEPAN gedung besarnya yang berhalaman luas terdengar suara yang kian lama kian keras dan rusuh gemuruh. Suara yang sangat berbeda dari yang sudah-sudah.

Untuk pertama kali dia dengar sedemikian itu sejak dia pun tidak lagi bisa bergerak ke mana-mana semaunya sendiri. Rupanya dia kurang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan terkurung oleh lingkungan kehidupannya sendiri. Kerna dampak tingkah-ulahnya sendiri.

Kecuali berada di beranda dekat sangkar burung beo, jika hendak bergerak sekalipun semeter saja, ke ruang-ruang lain di dalam gedung besarnya, dia mendapat perhatian atau pengawasan sedemikian rupa ketatnya.

Lelaki itu tersenyum-senyum saja ketika mendengar suara burung beo: "Gaw-at, gaw-at ..." Apapun yang terjadi, dia memang masih merasa sebagai orang kuat yang senantiasa santai saja menghadapi situasi sembari tersenyum. Kerna masih merasa memiliki senjata terakhir yang paling ampuh. Yakni dusta. Dusta untuk menyembunyikan keadaan kesehatannya. Dia mengaku sakit. Dan orang sakit tak bisa diseret ke ruang pengadilan. Untuk memperkuat dan membuktikan sakitnya dia berlagak sakit beneran. Demi mempersetankan segala tuntutan pengadilan atas segala kejahatan yang telah dilakukannya seperti yang diteriak-teriakkan kaum demonstiran di jalanan sana itu.

Sampai detik-detik itu pun, di hadapan burung beo terkurung, dia terus berupaya sekuat bisa untuk membuktikan keadaan sakitnya. Suatu rekayasa yang hanya usai setelah Malaikat maut menjemputnya bersama Sangkala. Dua hakim yang tak terelakkan oleh siapapun. (Medio 2002) \*\*\*

Catatan : Cerpen Lelaki Tua Dan Kurungan Burung pernah disiarkan Sinar Harapan, Jakarta 2002

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://www.elsam.or.id/txt/buku/esai65.htm>

## Tahun yang tak Pernah Berakhir

### Memahami Pengalaman Korban 65

esai-esai sejarah lisan

Editor: John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid

Banyak buku mengenai peristiwa '65 telah terbit dengan menyajikan berbagai macam sudut pandang. Buku ini menawarkan suatu metode penelitian sejarah yang disebut sebagai 'sejarah lisan'. Sejarah lisan bukanlah istilah yang akrab di telinga banyak orang Indonesia. Mungkin istilah itu malah dianggap aneh karena pemahaman umum mengenai sejarah adalah studi tentang masa lalu berdasarkan dokumen tertulis. Ketika mendengar bahwa penelitian dalam buku ini dilakukan dengan cara wawancara lisan, banyak orang ragu, apakah tidak mungkin nara-sumber yang diwawancarai berkata benar?

Pertanyaan ini mencerminkan persepsi yang terdistorsi mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Jika dikatakan bahwa suatu penelitian sejarah dilakukan dengan

meneliti arsip, maka tidak akan muncul pertanyaan serupa yang meragukan kebenaran arsip yang bersangkutan.

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan esai-esai dalam buku ini mencoba untuk mengajukan ingatan sosial yang dimiliki oleh korban peristiwa '65. Yaitu ingatan sosial yang berbeda dengan ingatan sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Soeharto selama ini. Buku ini menjadi semacam dokumentasi ingatan sosial korban yang selama ini tercerai di dalam kegelapan kebohongan. Kebanyakan korban ingin menentang ingatan sosial yang menganggap mereka sebagai setan dan pengkhianat. Mereka ingin mengungkapkan cerita bahwa mereka adalah orang baik, bermartabat, patriotik yang kemudian dikorbankan. Buku ini tidak lantas ingin menampilkan mereka sebagai malaikat, karena merekapun tidak ingin terlihat seperti itu. Mereka ditampilkan sebagai manusia, yang tidak lebih baik atau lebih buruk daripada manusia yang lain, yang tidak pantas diperlakukan seperti apa yang mereka alami. Prinsip para penyusun dan penulis buku ini sederhana saja: tak seorangpun, terlepas dari latar belakang dan masa lalunya, boleh diculik, disiksa, diperkosa, dipaksa bekerja tanpa upah, ditembak mati, dan dikubur dalam kuburan massal atau ditahan tanpa pengadilan atas alasan apapun.

\*\*\*

"Andaikata buku ini hadir dalam satu sosok pribadi, aku akan menyongsongnya dengan rangkulan erat dan jabat tangan bangga, dan kemudian bergandeng tangan berjalan bersama ke depan. Berjalan untuk membangun sekaligus menghancurkan jembatan sejarah. Membangun jembatan sejarah antar generasi, sekaligus menghancurkan jembatan sejarah generasi tua yang lapuk.

Dalam hidup yang satu jadi berganda

Pada manusia yang satu jadi berganda

Dalam bahasa manusia tidak ada kata Satu

Dalam bahasa hidup yang satu jadi beribu"

Hersri Setiawan, penulis dan penyair

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

SUARA PEMBARUAN 22 Oktober 2005

## Ricoeur tentang Mengampuni

K Bertens

Indonesia kita masih sedang menunggu kedatangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut undang-undang yang mempersiapkannya - UU No 27/2004 - komisi ini sudah harus terbentuk paling lambat 6 April 2005. Menurut media massa, daftar nama calon anggota komisi dikirim oleh panitia seleksi ke kantor Presiden pada 2 Agustus yang lalu (jadi, meleset jauh juga dari tanggal batas). Tinggal Presiden memilih 21 anggota komisi dari daftar 42 nama itu.

Namun, sampai sekarang daftar nama anggota definitif tak kunjung keluar. Mudah-mudahan Presiden mempunyai alasan yang sah dan penting untuk cara kerja yang



lambat ini. Hanya muncul pertanyaan mengapa alasan itu (kalau memang ada) tidak dikomunikasikan juga?

### Kebenaran dan Keadilan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini sangat diharapkan dapat membantu menyembuhkan luka-luka dari masa lampau pra-demokratis yang disebabkan oleh berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kalau di Jakarta, kasus-kasus yang spontan teringat adalah Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan II.

Kendatipun sudah dilakukan banyak usaha, sampai sekarang keluarga dan komunitas para korban belum pernah boleh melihat terwujudnya kebenaran, apalagi keadilan. Namun, di Jakarta dan lebih-lebih di beberapa daerah (makin terpencil makin tragis) terjadi banyak peristiwa pelanggaran HAM lain lagi, yang sampai saat ini menghadapi tembok penyembunyian yang tidak mungkin ditembus.

Melihat kenyataan kompleks itu, tidak ada alasan kita merasa iri terhadap anggota-anggota KKR ini. Mereka menghadapi pekerjaan yang sungguh-sungguh berat dan sensitif. Sambil menunggu datangnya KKR ini, sebaiknya kita sudah berupaya berpikir tentang apa artinya kebenaran dan rekonsiliasi seperti diharapkan itu. Jika kita menyimak tulisan-tulisan dalam media massa akhir-akhir ini, kita dapat menyaksikan bahwa refleksi itu sebenarnya sudah dimulai. Orang yang mungkin dapat membantu dalam mendalami refleksi itu adalah ahli filsafat Prancis, Paul Ricoeur.

Bulan Mei yang lalu filsuf kawakan itu meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Sampai kira-kira setahun sebelum meninggalnya, ia masih aktif menulis dan mengomentari kejadian-kejadian aktual. Di antara banyak pikirannya ada juga yang berguna bagi kita dalam konteks rekonsiliasi. Pada tahun 1995, Ricoeur menulis artikel yang menarik tentang tema pengampunan dalam majalah *Esprit* dengan judul *Le pardon, peut-il guérir?* (Apakah pengampunan dapat menyembuhkan?). Inti analisis yang dilakukan Ricoeur tentang pengampunan dalam artikel itu adalah bahwa pengampunan mengambil posisi tengah antara mengingat dan melupakan. Baik mengingat maupun melupakan selalu perlu untuk mencapai pengampunan.

### Mengingat

Kita mulai saja dengan keperluan ingatan. Jika seseorang tidak mengingat lagi, itu belum berarti ia mengampuni. Misalnya, bisa terjadi seorang yang sudah uzur serta pikun sama sekali tidak ingat lagi pelaku yang pernah membuat kejahatan besar terhadap dia. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa dengan itu ia memberi pengampunan.

Untuk dapat mengampuni, perlu orang ingat kejahatan yang pernah terjadi dan pelaku yang mengerjakannya. Menurut Ricoeur, ada bangsa (atau komunitas) yang dalam hal ini mempunyai ingatan terlalu kuat, sedangkan bangsa lain mempunyai ingatan terlalu lemah.

Yang mempunyai ingatan terlalu kuat seolah-olah selalu dibuntuti oleh peristiwa-peristiwa yang terasa menghinakan di masa lampau. Mereka seperti diobsesi terus oleh kejadian-kejadian kurang enak yang pernah terjadi.

Sikap ini tentu bisa tampak juga pada taraf individual. Ada orang yang mengungkit-ungkit terus kesalahan orang lain di masa lalu. Dia selalu menyimpan dendam terhadap orang yang pernah berbuat salah (sekurang-kurangnya menurut anggapan-nya) terhadap dia dan tidak pernah bisa lepas dari rasa dendam kesumat itu.

Yang mempunyai ingatan terlalu lemah mengambil sikap tak acuh terhadap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting di masa lalu. Mereka menganggap masa silam kurang serius. Tetapi bangsa (atau orang) dengan ingatan lemah sebenarnya merugikan diri sendiri. Ia menutup dirinya terhadap dimensi yang potensial untuk memperkayanya.

### Melupakan

Di sisi lain, pengampunan tidak mungkin juga tanpa melupakan. Dengan melupakan kita mengambil distansi terhadap apa yang pernah terjadi. Tentu saja, apa yang pernah terjadi tidak mungkin diabaikan lagi. Fakta tetap tinggal sebagai fakta. Bila harta benda kita pernah dicuri atau dirusak, pengalaman pahit itu tidak pernah hilang lagi sebagai fakta. Dan, terutama hal itu terasa dalam kasus pembunuhan.

Orang tercinta yang dibunuh tidak pernah akan kembali lagi di tengah keluarga dan para sahabatnya. Dalam arti itu pembunuhan adalah kejahatan yang paling definitif. Tetapi, di sini pun orang dapat mengampuni, asal ia bersedia melupakan apa yang sebetulnya tidak mungkin dilupakan. Berarti, ia tidak melupakan kejahatan sebagai fakta, tapi ia melupakannya sebagai beban moral. Ia sanggup berdamai dengan fakta itu. Karena itu Ricoeur berpendapat bahwa kita harus membedakan dua macam melupakan: melupakan yang membebaskan dan melupakan yang melarikan diri. Untuk mengerti melupakan-yang-melarikan diri, Ricoeur menunjuk kepada pengalaman Freud dalam psikoanalisisnya. Pasien yang ditangani oleh Freud "melupakan" trauma psikis yang mengganggu dia sejak masa kecilnya. Tetapi, melupakan itu hanya sekedar membuang dari kesadaran atau - dengan istilah yang diciptakan Freud - "merepresi".

Pada taraf tak sadar, trauma itu mengganggu terus. Dengan melupakan-yang-mengelak ini masalahnya tidak pernah selesai. Lain halnya dengan melupakan-yang-membebaskan. Melalui melupakan macam ini, orang secara aktif menghadapi pengalaman traumatis dari masa lalu dan berhasil memecahkannya. Ia dapat "mencernakan" trauma ini, sehingga tidak mengganggu lagi. Ia dapat melepaskan kenangan akan fakta dari beban moralnya (atau kesalahannya).

Tentu saja, tercapai tidaknya pengampunan tidak bergantung pada pihak korban kejahatan saja. Ada juga syarat yang harus dipenuhi pada pihak pelaku kejahatan. Si pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaikinya sejauh hal itu mungkin.

Bila ia mencuri atau melakukan korupsi, tidak mungkin ia diampuni jika ia tidak mengembalikan dulu apa yang ia ambil. Bila ia membunuh atau mengakibatkan cacat badan, ia tidak bisa memulihkan keadaannya. Tapi paling sedikit ia dapat menyesal dan minta maaf kepada keluarga. No reconciliation without reparation menjadi pedoman dasar di Afrika Selatan, ketika mereka mencari rekonsiliasi sesudah periode traumatis yang panjang.

Tidak lama lagi, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Fitri. Di Tanah Air kita perayaan ini akan disertai lagi tradisi "minta maaf lahir batin". Kebiasaan itu bagus sekali. Terutama dapat dinilai positif bahwa di sini ditegaskan "lahir batin". Memaafkan secara lahiriah saja belum tentu menghasilkan maaf yang sejati. Maaf secara lahiriah mungkin sebatas main sandiwara. Maaf yang sejati tidak saja keluar dari mulut tapi berasal juga dari hati. Dan karena dimensi batin ini maaf memperoleh nilainya yang sebenarnya. Kalau nanti jutaan orang Indonesia mohon maaf lahir batin dengan ikhlas dan tidak sebagai formalitas saja, kiranya sudah tercipta suasana yang sangat kondusif untuk mewujudkan rekonsiliasi yang kita harapkan. \*

Penulis adalah anggota staf Pusat Pengembangan Etika, Unika Atma Jaya, Jakarta

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

JUDUL BUKU: Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965

PENGARANG: Victor M Fic

PENERBIT: Buku Obor, 2005 Saya tidak pernah menulis G30S/PKI

Terima kasih atas penyebaran resensi saya yang dimuat di Media Indonesia pada beberapa milis. Namun perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menulis istilah G30S/PKI. Demikian pula "China di balik pergolakan Oktober" berasal dari editor surat kabar. Judul yang saya kirimkan adalah "Imaginasi Profesor Gaek" karena saya menyimpulkan bahwa Victor Fic lebih mengandalkan imaginasi ketimbang melakukan kritik terhadap sumber yang dimilikinya. Sangat bagus bila ada dokumen China yang sudah bisa dibuka untuk dijadikan sumber, tetapi Vic hanya tergantung ada hasil pemeriksaan Mahmilub. Ada beberapa bagian yang terhapus dari tulisan saya yang aslinya, saya juga mengatakan bahwa tiga aspek kelemahan buku Fic itu saya peroleh dari Dr John Roosa yang telah membaca buku itu terlebih dulu di Kanada. Saya tulis bahwa dalam dokumen yang dilampirkan disebutkan Aidit tidak tahu-menahu mengenai G30S sebelumnya, tetapi kata "tidak" itu terhapus dalam surat kabar.

Salam,

asvi@cbn.net.id

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

On 10/2/05, Arif Harsana <[arif.harsana@t-online.de](mailto:arif.harsana@t-online.de)> wrote:

> > \*\* BUKU ini dapat diibaratkan berisi lagu lama yang diaransemen baru. Fic dua kali datang ke Indonesia dengan difasilitasi Nugroho Notosusanto, 1968 dan 1971. Ia memperoleh banyak dokumen antara lain dari Letkol Djiwo Soegondo dari Teperpu (Team Pemeriksa Pusat), Kopkamtib.

Pada 1996-1997 ia menjadi visiting fellow di CSIS. \*\*

.....perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menulis istilah G30S/PKI. Saya tulis bahwa dalam dokumen yang dilampirkan disebutkan Aidit tidak tahu-menahu mengenai G30S sebelumnya, tetapi kata "tidak" itu terhapus dalam surat kabar.

\*\*\*\*\*

Sabtu, 01 Oktober 2005 00:00 WIB

**Victor M Fic tentang G-30-S/PKI**

\* Ada China di Balik Pergolakan Oktober

BUKU ini dapat diibaratkan berisi lagu lama yang diaransemen baru. Penulisnya, Victor M Fic, adalah profesor emeritus ilmu politik pada Brock University, Kanada. Lahir di Cekoslovakia 1922, ia kemudian menjadi warga negara Kanada. Ia menulis mengenai komunisme di Uni Soviet, Cekoslovakia, China, dan India. Dokumen yang dimiliki Victor Fic tentang sejarah komunisme, pelanggaran HAM di Cekoslovakia, dan kopi dari arsip Departemen Luar Negeri AS mengenai laporan intelijen tentang Rusia dan Siberia 1918-1919 tersimpan pada Open Society Archives di Central European University.

Selain tentang komunisme, ia juga mengarang buku tentang tantra dan soal-soal mistik ala India. Fic dua kali datang ke Indonesia dengan difasilitasi Nugroho Notosusanto, 1968 dan 1971. Ia memperoleh banyak dokumen antara lain dari Letkol Djiwo Soegondo dari Teperpu (Team Pemeriksa Pusat), Kopkamtib. Pada 1996-1997 ia menjadi visiting fellow di CSIS Jakarta untuk merampungkan buku yang telah dimulai lebih dari 30 tahun sebelumnya. Buku bertujuan menjelaskan ancaman paling serius dari pemberontakan PKI terhadap pluralisme yang telah berkembang di Nusantara sejak dahulu kala. Buku ini ingin menjelaskan anatomi kudeta, psikologi para pemain, bagaimana mereka berinteraksi, sehingga drama kudeta ini seakan lakon wayang kulit.

Kata pengantar buku ditulis John O Suttter yang anehnya dalam edisi Inggris menulis 'the two chief conspirators behind G30S, Soekarno and Aidit'. Namun, dalam edisi Indonesia ia mengatakan, 'tiga konspirator utama di belakang G-30-S, Aidit-Mao-Presiden Soekarno'. Mana yang benar? Buku yang kontroversial ini diluncurkan di Jakarta, 30 September 2005, dengan pembahas Prof Taufik Abdullah.

Buku mencoba melihat konspirasi yang terjadi 30 September 1965 itu dalam rangkaian kejadian yang berlangsung dari waktu ke waktu di Halim Perdanakusuma melalui interaksi antara Soekarno, Supardjo, dan tokoh lainnya. Buku ini memang sangat banyak menyoroti peran Aidit seperti terlihat dalam daftar indeks yang menyebut Aidit lebih dari 75 kali, Untung dan Sjam masing-masing 40-an kali, dan Soeharto serta Latief masing-masing 20-an kali. Selain dokumen Supardjo itu, tidak ada yang baru di buku Fic. Tapi dari satu segi, buku Fic lebih imajinatif daripada buku-buku yang ditulis pada masa rezim Soeharto.

Menurut Fic, 1) Mao yang memerintahkan Aidit 5 Agustus di Beijing untuk melakukan kup dan 2) Aidit membicarakan perintah Mao itu dengan Soekarno di Istana Bogor, 8 Agustus 1965, 3) Soekarno setuju dengan usul Aidit--dia akan membiarkan PKI mengambil alih kekuasaan negara. Setelah Aidit diangkat menjadi perdana menteri dengan kabinet mayoritas PKI, Soekarno akan beristirahat di Danau Angsa di China.

Tiga klaim Victor Fic ini luar biasa. Tetapi persoalannya, mana dokumen atau arsip yang mendukung pernyataan tersebut? Apakah mungkin Mao memerintah Aidit?

Bagaimana mungkin Soekarno dengan sukarela melepaskan kursi presiden, untuk apa?

Menarik untuk memerhatikan dokumen yang dilampirkan oleh Fic. Entah benar atau tidak, Aidit menulis surat kepada Presiden Soekarno 6 Oktober 1965. Tetapi di dalam surat itu, Aidit mengakui bahwa ia tahu-menahu tentang G-30-S sebelumnya. Instruksi CC PKI pada 10 November 1965 tampaknya dokumen yang direkayasa. Di dalam dokumen itu, penulisnya menggunakan kode Sosro = Soekarno, Tjeweng = Subandrio, Tetangga = China, Mbah = Mao, Gatotkatja = Omar Dani, grasshopper = helikopter. Di dalam dokumen itu dikatakan bahwa Aidit akan berangkat ke China dengan helikopter yang disiapkan Omar Dani. Apakah bisa naik helikopter sampai ke daratan China? Sebelum berangkat menemui Mbah alias Mao Tje Tung, Aidit mengancam Soekarno dan Subandrio, mungkinkah itu?

Dalam wawancara sejarah lisan yang dilakukan oleh ISSI (Institut Sejarah Sosial Indonesia) disebutkan bahwa para pemimpin PKI yang masih hidup justru menyesali kenapa tidak menerima instruksi dari 'kawan ketua' setelah ia pergi ke Jawa Tengah. Mereka marah kepada Aidit karena tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi dokumen yang dilampirkan Fic itu perlu diragukan.

Dokumen mengenai Instruksi CC PKI 28 September 1965 kemungkinan besar palsu. Seakan-akan Biro Khusus memiliki cadangan rencana (plan B) seandainya rencana pertama gagal (plan A). Padahal Supardjo sendiri juga menyesalkan kenapa tidak ada plan B itu. Ada rencana untuk mengamankan senjata yang sudah dibagikan. Senjata yang mana? Bukankah senjata itu sangat terbatas dan diambil dari Gudang AURI seputar 1 Oktober 1965. Yang menarik pula, dilampirkan surat Victor Fic kepada Presiden Soeharto 1996 sambil mengirimin makalahnya dengan ucapan 'as an expression of my highest regards for you'.

Anatomi Kudeta ini diterbitkan di India oleh sebuah penerbit yang tidak terkenal, Abhinav Publications, 2004. Setahun kemudian, naskah ini seakan mendapat promosi dengan diterbitkan Obor dalam edisi Inggris dan edisi Indonesia. Buku ini telah melewati kurun waktu yang panjang hampir sama dengan usia peristiwa itu sendiri. Berbagai lembaga dan individu telah ikut berperan membantu seperti Nugroho Notosusanto dan CSIS.

Sayangnya, sebagai sejarawan Fic tidak melakukan kritik sumber, dokumen Mahmi-lub dan bahan lainnya langsung dicernanya tanpa diselidiki dan dicek silang lebih dahulu. Namun, penerbitan buku ini tetap berharga bagi pengembangan ilmu sejarah di Indonesia. Buku ini sangat penting untuk mengetahui dokumen sejarah Indonesia yang direkayasa dan proses mendaur ulang rekayasa sejarah tersebut. Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI

JUDUL BUKU: Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965

PENGARANG: Victor M Fic

PENERBIT: Buku Obor, 2005

## SUARA PEMBARUAN DAILY

---

### Tajuk Rencana II

## Melepas Belunggu Masa Lalu

ARI ini genap 40 tahun peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi tuduhan tindakan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan memicu serentetan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh partai tersebut, serta orang-orang yang dianggap terkait. Banyak di antara mereka kemudian dijejloskan ke penjara, termasuk di Nusakambangan dan Pulau Buru.

Selama ini, setiap kali menjelang 30 September atau 1 Oktober, selalu muncul pertanyaan dan perdebatan tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik pembunuhan para jenderal yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi. Dan tentu saja pertanyaan tentang siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa itu.

Peristiwa ini juga memicu berbagai gerakan yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno. Pertanggungjawaban Soekarno di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal sebagai Nawaksara ditolak, dan kemudian kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Era Soekarno segera disebut sebagai Orde Lama dan masa kekuasaan Soeharto memperoleh sebutan sebagai Orde Baru.

Memperhatikan suasana peringatan tentang peristiwa 40 tahun lalu, tertangkap kesan kuat bahwa yang muncul selalu pertanyaan tentang siapa aktor di balik peristiwa tersebut. Pertanyaan ini juga bernada tuntutan pertanggungjawaban atas peristiwa berdarah yang memakan banyak korban itu. Hal ini mencerminkan bahwa banyak hal dalam kehidupan bangsa ini di masa lalu yang masih samar-samar, tidak dipahami dengan baik dan penuh pertanyaan.

KASUS lain seperti ini membuat deretan panjang "kasus gelap" dalam kehidupan bangsa kita. Bahkan peristiwa yang tergolong belum lama terjadi juga tetap dalam misteri dan menebar pertanyaan, seperti kerusuhan pada Mei 1998, kerusuhan di Maluku, dan Maluku Utara, konflik di Poso, Sulawesi Tengah, atau kerusuhan di malam Natal 1999. Siapa di balik peristiwa itu dan motifnya, tidak pernah terungkap.

Deretan kasus gelap seperti itu membiarkan secara liar setiap individu atau kelompok memiliki persepsi dan penilaiannya sendiri. Hal ini akan membawa bagian bangsa ini terjebak dalam keadaan tidak memiliki pengalaman hidup bersama, tidak memiliki sejarah bersama. Akibatnya, usaha untuk menyelesaikan masalah kebangsaan selalu menghadapi kendala. Kerusuhan di Maluku, Maluku Utara dan Poso mungkin mereda, tetapi sebenarnya belum diselesaikan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang tengah dibentuk kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dalam mengungkap kebenaran, dan membangun rekonsiliasi bagi bangsa ini.

BANYAKNYA kasus yang tak diungkap menunjukkan bahwa masa lalu dan pengalaman belum menjadi guru yang memberi pelajaran bagi hidup kita. Sebab, banyak pertanyaan belum menemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang

muncul, bahkan tuntutan pertanggungjawaban atas kasus-kasus seperti peristiwa 1965, menyatakan kepada kita bahwa kehidupan bangsa ini masih dibelenggu oleh masa lalu. Hari ini kita masih diwarnai masa lalu yang membuat kita makin tidak mudah membangun hari depan karena belenggu ini.

Hal ini merupakan masalah serius, tetapi belum ada tanda-tanda usaha untuk mengatasinya. Menjelaskan kebenaran peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa 1965 adalah usaha untuk keluar dari belenggu masa lalu. Dengan begitu terbuka proses yang kita butuhkan, sebuah rekonsiliasi, agar kita bisa merintis masa depan yang lebih baik.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://www.gatra.com/artikel.php?id=88825>

Narasi Ikon Indonesia Modern

SUHARTO, SEBUAH BIOGRAFI BERIMBANG

Penulis: R.E. Elson

Penerbit: Pustaka Minda Utama, Jakarta, 2005, xix + 718 halaman

KETIKA Soeharto terlempar dari panggung politik pada Mei 1998, muncul paduan suara hujatan dan cemooh atas sepak terjangnya selama berkuasa. Keterpurukan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang muncul ditimpakan seluruhnya pada jenderal bintang lima itu. Kebijakan ekonominya dinilai salah strategi. Sedangkan caranya memerintah dituding membunuh demokrasi.

Jatuhnya Soeharto juga diwarnai gelombang eksodus orang-orang di lingkaran dalam kekuasaannya. Tokoh-tokoh yang dulu dikenal dekat dan menyokong Soeharto mendadak berganti haluan, lari mencari selamat sendiri. Suasana yang muncul ketika itu dan masih tersisa hingga kini adalah semangat yang meletup-letup untuk cuci tangan atas segala kekeliruan di masa lalu.

Penulisan sejarah pasca-Soeharto pun cenderung menghakimi dan "melupakan" Orde Baru. Orde ini dinilai sebagai masa gelap. Dan berbarengan dengan itu, muncul niat mengubur Orde Baru dalam-dalam. Namun, ketika reformasi tak segera memberikan hasil dan masa-masa sulit perekonomian terus melanda kaum miskin, bangkitlah nostalgia akan kembalinya era Soeharto.

Dalam suasana demikian, pada 2001 lahir buku Suharto: a Political Biography karya Robert Erward Elson. Suharto, Sebuah Biografi Politik adalah edisi Indonesia buku tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dalam konteks apakah edisi Indonesia ini bisa dinilai berharga dan memberikan kontribusi? Sebuah pengantar kritis diberikan oleh Asvi Warman Adam.

Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, sangat sulit untuk menilai Soeharto. "Dalam arus balik sejarah kala itu jelas sukar untuk menulis secara jernih mengenai Soeharto," tulis Asvi. Ia mengemukakan berbagai penilaian kontroversial dari sejumlah pengamat atas karya Elson. Ada pujian, namun tak sedikit pula yang mengkritisi kesimpulan Elson.

Salah satu yang kritis, menurut Asvi, adalah Peter Carey. Dalam Indonesia in Transition, Asian Affaires, Oktober 2002, Carey menolak kesimpulan Elson bahwa warisan Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Carey juga keberatan atas pernyataan Elson bahwa kerusakan karena krisis keuangan pada 1997-1998 hanya sedikit pengaruhnya pada keseluruhan pencapaian Soeharto.

Penilaian Carey ini, kala itu, sah-sah saja karena krisis ekonomi dengan cepat merusak sektor lain dan berubah menjadi krisis multidimensi yang sampai kini belum bisa tertangani. Belakangan tampak jelas bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme baru muncul dengan kadar lebih hebat dibandingkan dengan era Orde Baru. Sulit dimungkiri, KKN baru itu memang punya andil atas lambatnya pemulihan ekonomi.

Pertanyaannya, benarkah KKN di era reformasi adalah warisan Soeharto yang sesungguhnya? Setelah hampir tujuh tahun reformasi berjalan, apakah Soeharto masih akan terus dijadikan kambing hitam atas semua ketidakberesan? Pasalnya, sekarang ini para pelaku KKN adalah muka-muka baru. Reformasi yang salah kelola telah melahirkan modus-modus penjarahan lebih beragam.

Dalam kondisi sengkarut inilah buku edisi Indonesia Elson hadir. Sejak awal, ada pretensi dari Elson untuk menghadirkan Soeharto secara berimbang. Profesor sejarah di Universitas Queensland, Brisbane, Australia, ini ingin mengucapkan bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari keberhasilan dan kegagalan Orde Baru.

Di tengah pandangan negatif tentang Soeharto, Elson menuliskan bahwa "Bapak Pembangunan" itu merupakan tokoh Asia yang amat penting selama abad ke-20. Soeharto dinilai telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Agar keseimbangan terjaga, Elson mengeksplorasi semua literatur mengenai Soeharto, baik tentang asal-usulnya sampai saat ketika ia secara politik sudah ompong.

Jerih payah Elson untuk membuka arsip Belanda dan memakai berita media massa sebagai sumber sangat membantu narasi yang tengah dibangunnya. Elson juga melengkapi biografi politik ini dengan mewawancarai politisi dan akademisi yang tahu banyak tentang Soeharto. Jadilah buku ini penuh nuansa, detail, dan beragam dialektika sepanjang karier Soeharto. Sayang, Elson tak menuntaskannya dengan mewawancarai Soeharto secara langsung.

G.A. Guritno

[Buku, Gatra, Nomor 46 Beredar Senin, 26 September 2005]

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

DISKUSI " SIAPA DALANG G 30 S "

(Bagian I )

Sub Thema : **"Kejahatan Kemanusiaan 65-66 dan Keterlibatan Militer"**

Acara ini diselenggarakan oleh Forum for Human Rights [FRONT], Justice Fellowship Indonesia (JFI) dan Kelompok Studi Sosial Ekonomi dan Politik (KSSEP) - ITB pada tanggal 9 Oktober 2000 bertempat di Sunken Court ITB - Jl. Ganesha 10



Bandung. Pembicara pada saat acara ini adalah Rahlan dari PBHI-Jakarta, Coen Husein Pontoh seorang pengamat politik dan Ragil dari Komite Pengurus Pusat (KPP) PRD.

Acara ini berisi diskusi mengenai sejarah TNI dan situasi perpolitikan Indonesia pada saat terjadinya peristiwa G 30 S, kejahatan kemanusiaan dan proses penyelesaiannya dan posisi mahasiswa yang akhirnya disebut juga sebagai angkatan 66.

Dari diskusi yang dilakukan, adapun pembahasan yang dilakukan adalah :

#### Sejarah TNI dan Kondisi Perpolitikan

Dari awal berdirinya TNI ada tiga faksi yang cukup kuat di dalam tubuh TNI yaitu :

TNI yang berasal dari didikan KNIL

TNI yang berasal dan didik oleh PETA

Laskar Rakyat

Faksi TNI yang berasal dari KNIL adalah didikan yang dipengaruhi oleh militer di Eropa. Tapi disamping pengetahuan dari didikan militer ini, KNIL dibentuk untuk menjaga kedudukan kaum kolonialis Belanda dan bukan untuk perjuangan kemerdekaan.

Faksi PETA adalah tentara hasil didikan dan dipengaruhi oleh militer Jepang yang fasis. Di Jepang kedudukan Panglima Angkatan Bersenjata sama kedudukannya dengan PM, dan mereka hanya tunduk kepada Kaisar. Jadi mereka memang tidak mengakui kedudukan sipil diatas militer. Pemahaman diatas juga dibawa dan mempengaruhi para tentara hasil didikan Jepang dalam kedudukan mereka di Indonesia. Ketika Indonesi berlaku sistem parlementer mereka tidak pernah mau dibawah PM tetapi tunduk kepada Presiden. Padahal PM adalah simbol dari supremasi sipil. Disamping itu PETA didirikan bukan sebagai alat perjuangan kemerdekaan RI tetapi sebagai alat kolonial Jepang untuk menghadapi musuh-musuh Jepang.

Sedangkan Faksi Lasykar Rakyat adalah orang-orang yang berjuang dan berasal dari rakyat, mereka bergerak secara spontan dan mereka ini berada dibawah partai-partai politik yang ada. Dengan begitu kedudukan mereka dibawah pimpinan politik sipil.

Dari segi jumlah ketiga faksi ini maka Laskar Rakyat adalah yang terbesar tetapi dari segi kepemimpinan mereka yang terbawah. Dari pertarungan ketiga faksi ini, tentara yang berasal dari KNIL sebagian besar menjadi staf-staf di Militer dan mereka kebanyakan masuk Mabes. Sedangkan pemegang komando dipegang oleh tentara dari PETA. Sedangkan dari Lasykar Rakyat dengan proses penyingkiran yang dilakukan oleh kedua faksi yang lain akhirnya tidak mempunyai pengaruh lagi. Dimulai dengan pelucutan senjata-senjata mereka dan menyingkirkan para pemimpin mereka di tubuh TNI.

Dari sejarah berdirinya terlihat bahwa TNI bukanlah seperti tentara-tentara di negara lain yang memperjuangkan kemerdekaannya dan lahir dari perjuangan rakyat, tetapi

mereka adalah alat kolonial. Karena bila tadinya Belanda tetap bercokol di Indonesia, mereka adalah tentara kolonial yang menjaga kepentingan kolonial dan meneruskan karier militernya di sana. Demikian juga halnya dengan Jepang, bila mereka bercokol lebih lama di Indonesia maka semua tentara PETA adalah tentara yang menjaga kepentingan Jepang dan meneruskan kariernya sebagai tentara pembela Jepang. Sedangkan Lasykar Rakyat yang benar-benar berasal dari rakyat tersingkir oleh para tentara karir ini.

Pada 17 Oktober 1952, AH Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai KSAD melakukan kudeta dengan mengarahkan meriamnya ke Istana Negara. Tetapi kudeta tersebut gagal. Tapi setelah kejadian ini ada perubahan besar terjadi di tubuh TNI.

AH Nasution yang merupakan tentara didikan KNIL, menginginkan TNI mempunyai tentara kecil, profesional dan tunduk kepada kepemimpinan sipil. Ini terjadi kudeta '52 yang gagal itu, tetapi berubah setelah kudeta tersebut. Setelah kudeta yang gagal, AH Nasution tunduk kepada prinsip PETA, dimana tentara tidak tunduk pada kepemimpinan sipil, memberikan suatu konsep DWI Fungsi TNI dan terakhir melakukan aksinya dengan mendesak Soekarno membubarkan Konstituante.

Disamping itu setelah tahun 50-an mulai banyak perwira militer yang dididik dan meneruskan pendidikannya di Amerika Serikat. Pembubaran konstituante berarti menghilangkan dan tidak mengakui supremasi sipil. Ini akhirnya terjadi juga dengan dikeluarkannya Dekrit oleh Soekarno untuk membubarkan Konstituante. -satunya partai yang mendukung dekrit ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). ini adalah partai yang besar pada saat itu. Hal ini juga menjadikan PKI sebagai partai yang tidak demokrasi karena membenarkan delegitimasi Partai.

### **Fakta-fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI)**

Pembelaan Nyono dimuka Mahmilub pada tanggal 19 Februari 1966. Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.

Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa . kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian politik didalam Revolusi kita. Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dari dewan jenderal.

Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno.

Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presiden yang justeru kurang lebih dua minggu sebelumnya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandakan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan". Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya

adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokras, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.

Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya.

### **Kesimpulan:**

PKI berada dibalik G30S, dengan dalih membela presiden Soekarno, secara pribadi maupun untuk mengamankan "REVOLUSI" yang sedang dijalankan presiden Soekarno. Peristiwa G30S merupakan puncak dari aksi revolusi atau kudeta PKI di Indonesia, yang sebelumnya sudah didahului dengan berbagai aksi kekerasan (pembunuhan) terhadap warga masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, yang menentang keberadaan komunis (PKI).

Cuplikan Pengakuan Dr. Soebandrio Tentang Tragedi Nasional 30 September.

Saat G30S meletus saya tidak berada di Jakarta, saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba (turun kebawah). Pada tanggal 28 sept 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling ke Jawa Timur dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 Oktober 1965 pagi hari, Panglima AU Omar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya saya melaporkan kepada Bung Adnan tentang sekelompok Dewan Jenderal -termasuk bocoran dewan Jenderal membentuk kabinet.

Menurut Serma Bungoes (Komandan Peleton Kompi C Bataliyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemputan Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap dan hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakrabirawa Tawur dan Komandan Bataliyon Untung tangkap para jenderal itu, kata Bungoes setelah ia bebas dari hukuman. Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperkenankan masuk rumah oleh isteri MT Haryono, sang istri curiga suami dipanggil Presiden kok dinihari. Karena itu pintu rumah itu didobrak dan MT Haryono tertembak tidak jelas apakah Haryono Pondok Gede (lubang buaya).

Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan sejak awal oktober 1965 sampai Maret 1966 atau sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai Presiden, tapi sudah tidak punya kuasa lagi Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun dikalangan parpol-parpol besar dan kecil. Para pemimpin parpol umumnya

mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang mencoba memulihkan wibawa. Walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.

Lantas..mahasiswa melanjutkan demo turun kejalan..satu-satunya tuntutan mahasiswa yang murni menurut saya adalah bubarkan PKI. Setelah ditangkap saya langsung ditahan, saya diadili di Mahkamah Militer. Luar Biasa dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati.

Jelas saya sangat terpukul saat itu. dari posisi orang nomor dua di Republik ini saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Saya menjalani awal dipenjara Cimahi Bandung. Disana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S) diantaranya adalah Kolonel Untung yang memang Komandan G30S.

..kalau Aidit mendukung anggota Dewan Jenderal, memang ya dalam suatu saya dengar Aidit mendukung gerakan pembunuhan anggota jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden, sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka selanjutnya bakal sulit.

### **Kesimpulan:**

PKI berada dibalik peristiwa G30S, buktinya kesaksian Menlu Subandrio yang sekaligus kepala BPI (Badan Pusat Intelijen) mengatakan bahwa Aidit dan Untung terlibat dalam aksi G30S, dimana kedua orang tersebut adalah tokoh-tokoh PKI.

Tetap dengan dalih yang sama, seperti pengakuan Nyono, bahwa ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan kepemimpinan presiden Soekarno. Namun kalau Nyono jelas jelas mengatakan bahwa PKI yang membasmi Dewan Jenderal demi alasannya.

Mewaspada! Kuda Troya Komunisme Di Era Reformasi. (Drs. Markonina Hatisekar dan Drs. Akirin Ijani Abadi, Pustaka sarana kajian Jakarta Brat, cetakan ke 3 maret 2001, hal 116-118)

Kegagalan G30S/PKI merupakan pukulan yang paling telak bagi sejarah perjuangan kaum komunis di Indonesia. Kehancuran kekuatan militer G30S/PKI Kabur. DN Aidit lari ke Jawa Tengah, Sjam, Pono dan Brigjen Suparjo mundur kebasis camp didaerah perkebunan Pondok Gede. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Sjam dan Pono menghadap Sudisman untuk memberikan keterangan tentang gagalnya PKI di Kayu Awet, Rawamangun, Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, Sudisman memerintahkan Pono untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melaporkan situasi terakhir di Jakarta kepada DN Aidit.

Pada hari yang sama, DN Aidit di Jawa Tengah telah memerintahkan Pono kembali ke Jakarta membawa instruksi lisan kepada Sudisman dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno. Instruksi kepada Sudisman adalah agar anggota-anggota CC PKI yang masih ada di Jakarta melakukan upaya penyelamatan partai dan Nyono dapat mewakili DN. Aidit menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada tanggal 8 Oktober 1965. Aidit beralasan, dirinya tidak dapat menghadiri sidang itu karena tidak adanya transportasi ke Bogor dari Jawa Tengah.

Dalam Sidang Paripurna di Bogor tanggal 8 Oktober 1965, Nyono membacakan teks yang intinya menyebutkan bahwa bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam apa yang disebut gerakan 30 September 1965. Secara rahasia, beberapa pentolan PKI juga mengadakan rapat yang membahas serangkaian peristiwa terakhir setelah serangkaian G30S PKI dan melakukan konsolidasi partai. tanggal 12 Oktober 1965, di rumah Dargo, tokoh PKI Solo, dilakukan rapat gelap antara DN Aidit, Pono dan Munir (anggota PKI yang baru tiba dari Jawa Timur). Dalam rapat itu dikatakan bahwa kegagalan gerakan Sept akan membuka kedok keterlibatan PKI. Keberadaan PKI melakukan perjuangan secara parlementer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Munir melakukan usulan untuk dilakukan gerakan bersenjata, usulan Munir pada prinsipnya disetujui oleh peserta rapat. Aidit menugaskan Ponjo untuk meneliti daerah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan basis PKI guna melaksanakan perjuangan bersenjata, daerah yang diusulkan untuk ditinjau adalah : Merapi, Merbabu serta Kabupaten Boyolali, Semarang dan Klaten.

Belum lagi kegiatan itu direalisasikan, gerakan pasukan RPKAD telah memasuki kota Solo. Walau PKI berusaha melawan, namun pada operasi pembersihan yang dilakukan RPKAD di Boyolali, DN Aidit terbunuh. Kejadian demi kejadian berlangsung dengan amat cepat. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada PKI. Rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dan militer yang masih setia pada konstitusi negara merapatkan barisan dan bergabung dalam satu front melawan PKI. ahirnya legalisasi PKI sudah tidak mampu dipertahankan oleh pengikutnya. Lewat ketetapan MPRS-RI. NO.XXV/MPRS/1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bukan itu saja, lewat ketetapan yang sama, paham Komunis dan Marxis-Leninisme dinyatakan haram berada di negara Indonesia.

### **Aksi G30S/PKI Awal Dari Pelanggaran HAM.**

Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan sembilan Jenderal pada 1 Oktober 1965 oleh pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dari pasukan komunis Indonesia (PKI) dan dikenal sebagai Gerakan 30 September adalah tanggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. "Orang sekarang bicara pelanggaran HAM, sesungguhnya titik awal dari pelanggaran HAM adalah penyiksaan para jenderal. Itu apa yang kami rasakan, kata putra pahlawan revolusi Mayjen Anumerta Sutjiyo, Agus Wijoyo, di Jakarta, Senin (23/9). Pernyataan Wakil Ketua MPR itu disampaikan saat penjelasan pers rencana peluncuran buku bertajuk kunang-kunang kebenaran dilangit malam setebal 250 halaman pada tanggal 30 September nanti.

Buku tersebut berisi penuturan anak-anak dan keluarga Pahlawan Revolusi tentang kejadian yang disaksikan dan dialami 1 Oktober ini hari. Penuturan itu terdiri dari keluarga Jenderal Ahmad Yani, Letjen Purnawirawan Soeprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Penjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo Siswomiharjo, Lettu CZI Anumerta Piere Tendean dan Keluarga AH. Nasution.

### **Mengeluh**

Katerin Penjaitan mengeluh, dirinya orang tua yang bisa dihargai pengorbanannya, belakangan mereka seolah-olah dikaburkan, "saya tidak terima. Saya tahu peristiwa itu, karena bukan anak kecil lagi, waktu itu usia saya 17 tahun" katanya. Menurutnnya

orang tuanya mati secara sadis. "Kita sakit mengingat peristiwa itu, komunis memang sadis," katanya dengan terbata-bata.

Sedangkan Amelia yani menyayangkan, para tahanan politik yang keluar dari penjara, enak sekali bicara bagaimana membunuh para jenderal. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya putra-putri yang ditinggalkan. Ia membantah para pasukan Cakrabirawa yang tergabung dalam PKI tidak melakukan penyiksaan, orang tua kita diseret, ditembak, mereka bilang seenaknya, itu bukan penyiksaan tandasnya.

Amelia menyatakan siapa lagi yang mau membela para Pahlawan Revolusi kalau bukan anak-anaknya "Kita tidak pakai bedil, hanya pakai pena, kita menyatakan kudeta, penyiksaan itu terjadi jangan terulang kembali.

Putra D.I. Penjaitan mengatakan hal senada, bahwa pasukan PKI sadis, sebagai gambaran, selongsong peluru mencapai 360 biji yang ditemukan diarea pekarangan rumah seluas 800 meter pada peristiwa penculikan dan penembakan ayahandanya, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00-04.00 WIB, selain orang tuanya keponakan ayahnya, Albert Naibab ikut meninggal ditembak dan Viktor Naibab cacat seumur hidup.

### **Kunang-kunang**

Putri Suprpto, Nani Indah Sutojo menyatakan peristiwa yang diangkat tidak berkonotasi politik.

Harapannya dengan mengemukakan pengalaman, mata rantai kekerasan sejarah harus diputus, dibangun mata rantai baru dengan situasi yang damai dan harmonis.

menyadari, rekonstruksi peristiwa G30S/PKI berdasarkan pengalaman keluarga Pahlawan Revolusi bukan kesimpulan sejarah, sebab sejarah punya pendekatan, metode aliran tersendiri yang tidak mati, bisa mengungkap hal baru. "Itu milik akademisi. Tapi kebenaran yang kami sampaikan adalah realitas bersama.

Kunang-kunang sebagai judul buku bisa jadi dalam kegelapan ada cahaya baru yang mungkin redup, diganti dengan sejarah lain," tuturnya."Kami tidak bermaksud tetap pada tataran penderitaan, iba, belas kasihan, kami inginkan munculnya harapan baru pada tingkat kearifan sesuai kemampuan yang bisa kami sampaikan, tambahanya"

\*\*\*\*\*

### **DISKUSI " SIAPA DALANG G 30 S "**

(Bagian II)

#### **Sub Thema : "Kejahatan Kemanusiaan 65-66 dan Keterlibatan Militer"**

Dukungan partai ini juga yang membuat kedudukannya menjadi tambah kuat dan dekat dengan Soekarno. Disinilah dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Sehingga ada tiga kekuatan besar pada saat itu, yaitu : , dan

Dalam prakteknya, Soekarno menggunakan PKI karena mempunyai massa yang sangat besar, organisasinya sangat kuat dan sampai ke desa-desa untuk meng-

hambat TNI. Soekarno juga menggunakan TNI yang mempunyai organisasi yang kuat juga sampai ke desa-desa untuk menghambat PKI.

Disamping itu PKI juga sangat tergantung dengan Soekarno untuk menghadapi TNI karena di basis rakyat pertarungan antara TNI dan PKI juga sangat kuat. Juga TNI memakai Soekarno untuk menghambat PKI. Kondisi perpolitikan pada saat itu memang sangat rumit karena semua saling memanfaatkan dan posisi Soekarno adalah sebagai penyeimbang diantara kedua kekuatan besar ini. Disamping Soekarno juga memakai mereka untuk melangsungkan dan memperpanjang kekuasaannya. Sedangkan kondisi yang terjadi di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konstelasi pertarungan dunia. Seperti kita ketahui bahwa konstelasi pertarungan pada saat itu adalah pertarungan ideologi antara Amerika Serikat sebagai pengusung kapitalisme dan Uni Sovyet sebagai pengusung sosialisme.

Posisi Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh politik Soekarno merupakan ancaman yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Soekarno yang memang seorang anti kolonialisme, merupakan faktor penghambat masuknya modal-modal Amerika Serikat ke Indonesia dan dapat menjadi ancaman bagi wilayah sekitarnya yang memang tunduk kepada Amerika. Jadi perubahan yang ada di Indonesia sangat berpengaruh dan mempunyai kepentingan yang besar terhadap pertarungan yang ada.

Pada saat bersamaan juga setelah tahun 50'an banyak sekali perwira Indonesia dididik di Amerika Serikat. Ini menjadi satu tanda tanya yang besar, apakah ini mempunyai pengaruh terhadap posisi militer atas kedudukan kekuasaan Soekarno.

Kondisi perpolitikan inilah yang ada pada saat terjadinya peristiwa G 30 S. Baik pertarungan antara PKI dan TNI juga adanya pengaruh konstelasi pertarungan dari luar antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, sementara Soekarno pada saat itu lebih condong ke pihak Uni Sovyet bila dilihat dari Ideologi, walaupun sebenarnya dalam kenyataan lebih dekat dengan RRC, dibuktikan dengan adanya Poros Jakarta-Beijing.

Pada saat terjadinya peristiwa G 30 S, yang terbunuh adalah 6 Jenderal yang dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata. Dan setelah peristiwa ini yaitu 1 Oktober 65 pembersihan terhadap semua anggota PKI dan simpatisannya dengan sekali pukul. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakan mungkin sebuah organisasi yang sangat kuat secara organisasi dan mempunyai massa yang paling besar dapat dihancurkan dengan sekali pukul tanpa ada perlawanan ?

Hal inilah yang menjadi bukti bahwa secara organisasi PKI tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya gerakan tersebut, dan bisa dilihat dari kesiapan mereka di tingkat bawah. Sedangkan bila memang secara organisasi memang mau mengudeta maka kesiapan untuk menang dan kalah pasti sudah ada. Mereka pasti sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang ada bakal terjadi.

Bukti-bukti lain yang ditemukan adalah adanya keterlibatan pihak-pihak asing dan ini sangat berhubungan dengan konstelasi pada saat itu. Dengan dibukakannya dokumen mengenai keterlibatan CIA - Badan Inteligen AS dan MI6 - Badan Inteligen Inggris.

## Mahasiswa dan Peristiwa G 30 S

Pada saat diterapkannya demokrasi parlementer di Indonesia dan demokrasi terpimpin sedikit banyak mempengaruhi gerakan mahasiswa. Pada saat demokrasi parlementer, mahasiswa terlibat politik praktis, banyak organisasi mahasiswa berafiliasi dengan yang partai politik yang ada pada saat itu. Misalnya HMI berafiliasi dengan Masyumi, PMII dengan NU, GMNI berafiliasi dengan PNI, CGMI berafiliasi dengan PKI. Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap organisasi mahasiswa mempunyai ideologi masing-masing, sehingga terlihat bahwa pertarungan ideologi sampai ke dalam kampus.

Gerakan Mahasiswa ini kemudian berubah ketika diterapkannya demokrasi terpimpin. Ideologi terpimpin dimasukkan ke dalam kampus. Akibatnya organisasi mahasiswa yang sesuai dengan ideologi negara pada saat itu bisa berkembang sedangkan organisasi mahasiswa yang bersebrangan terkucilkan. Keadaan ini membuat dua kutub yang saling bertentangan antara yang pro ideologi negara dan kontra.

Pada saat setelah G 30 S, kekuasaan Soekarno jatuh dan diambil alih oleh militer dan ini berpengaruh atas kondisi di dalam kampus. Akibatnya gerakan mahasiswa yang pro ideologi Soekarno juga jatuh. Organisasi yang memenangkan pertarungan ini adalah yang selama ini kontra. Mahasiswa yang kemudian disebut Angkatan 66 ini tertipu oleh tentara dan dipakai oleh tentara untuk mempercepat proses pengambilan alihan kekuasaan dari Soekarno terhadap militer. Kepemimpinan mahasiswa pada saat itu adalah mahasiswa dibawah naungan bekas Partai Sosialis, PNI-kanan, partai-partai Islam dan partai kiri yang berkhianat.

Bisa terlihat dari kejadian ini adalah para mahasiswa cengeng yang tidak kuat dengan pertempuran politik dan ideologi ini mencari gantungan dan harapan dari unsur penindas yang lebih kuat dari kelompok penggempur yaitu MILITER. Dengan penampilan yang suci bersih dengan slogan gerakan moral mereka menggantungkan harapan demokrasi kepada Tentara.

Sebenarnya pada saat itu tentara akan kesulitan mendapatkan legitimasi dari rakyat mengenai tindakannya, tetapi mereka menurunkan para mahasiswa yang telah berkolaborasi dengan mereka untuk memprovokasi rakyat supaya turun kejalan - sementara rakyat dalam kondisi miskin dan pragmatis.

Setelah itu juga tentara bersama mahasiswa dan pemuda paling kanan untuk membantai saudara-saudara mereka sendiri sampai tiga juta orang. Terlihat dari tidak kuatnya suara-suara yang mengutuk perbuatan keji tersebut. Seakan-akan mereka melegitimasi terbantainya rakyat sendiri. Dan inilah yang demokrasi oleh para mahasiswa yang pengecut ini.

Terlihat juga bagaimana para mahasiswa ini setelah lulus, mengemis-ngemis mengetuk pintu kabinet, pintu-pintu birokrasi tinggi, pintu-pintu tender pemerintah agar mereka bisa masuk kedalamnya. Dengan kata lain, mengemis pintu-pintu belas kasihan tentara untuk apa yang mereka sembah-sembah : sayup-sayup dan tanggung-tanggung, "mimpi bebas dan modern" si borjuis kecil dalam kapitalisme kering dan kerontang. Mereka bodoh dan keji.



Sumber : [cari@egroups.com](mailto:cari@egroups.com)  
12 oktober 2000

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## DISKUSI " SIAPA DALANG G 30 S "

(Bagian III)

Sub Thema : **"Kejahatan Kemanusiaan 65-66 dan Keterlibatan Militer"**

### **Kejahatan Kemanusiaan**

Segera setelah G 30 S ini terjadi diikuti oleh pembantaian yang dilakukan oleh tentara dan para pemuda kanan serta mahasiswa yang mendukungnya terhadap rakyat yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), anggota organisasi underbow PKI, para simpatisannya dan pendukung Soekarno. Korban yang diakibatkan oleh pembantaian ini ada yang mengatakan sampai tiga juta orang tetapi yang pasti lebih dari satu juta orang.

Pembantaian ini sudah dianggap Holokaus dan dari segi jumlah termasuk salah satu dari tiga peristiwa pembantaian terbesar di dunia, yaitu pembantaian oleh Hitler terhadap orang-orang Yahudi dan kemudian pembantaian oleh Pol Pot di Kamboja.

Tetapi sayangnya sampai hari ini setelah terjadi Reformasi masih belum bisa diungkapkan dan mendapatkan tantangan dari banyak pihak. Terlihat dari ditolaknya usul Presiden Gus Dur untuk mencabut Tap MPRS No. XXV yang merupakan produk hukum pembenaran atas pembantaian yang terjadi dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara.

Juga sepertinya ada lingkaran misteri yang menutupinya dan hegemoni yang dilakukan oleh rejim Soeharto yg membenarkan pembantaian itu masih ada di kepala banyak orang termasuk oleh orang-orang yang menamakan dirinya kaum reformis. Mereka masih menganggap PKI sbg dalang G 30 S dan sudah wajar dilakukan pembantai oleh tentara dan para pendukungnya.

Disamping pembantaian yang terjadi juga dilakukan pemenjaraan terhadap orang-orang yang pada saat itu menjadi anggota PKI dan para simpatisannya tanpa melalui proses hukum. Tindakan yang dilakukan tidak hanya proses pemenjaraan tetapi juga dengan melakukan pembuangan ke Pulau Buru.

Sementara mereka mengalami pemenjaraan dan pembuangan keluarga mereka di diskriminasi dan seakan-akan tidak bisa hidup di tanah airnya sendiri. Mereka seperti orang-orang yang berpenyakit kusta yang harus disingkirkan dan dibuang. Semua hak-hak politik dan ekonomi mereka diberangus. Dan ini mereka alami sampai sekarang, berarti sampai 35 tahun lebih. Belum lagi perampasan harta kekayaan para anggota PKI dan simpatisannya oleh tentara.

Dan bukti ini sangat banyak, dimana gedung-gedung/rumah tentara banyak sekali adalah gedung dari anggota-anggota dan simpatisan PKI.

Segera setelah mereka dikeluarkan dari penjara dan sipulangkan dari pembuangan, teror tidak juga dihentikan, mereka harus tetap wajib lapor kepada pihak berwajib

dan setiap bulannya menerima indoktrinasi yang dinamakan Santiaji Pancasila. Tindakan ini juga dilakukan sampai sekarang, dan usaha-usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak asasi mereka terus di teror oleh para penguasa yang mendukung Tentara, dan ini didukung oleh organisasi-organisasi Islam reaksioner yang juga diperkirakan dibiayai oleh tentara.

### **Penuntasan Kasus 65-66**

Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya G 30 S, pembantaian yang dilakukan oleh tentara dalam hal ini dibawah komando Soeharto harus dibawa kemuka pengadilan. Memang para tentara yang mengatakan bahwa pembantaian itu tidak hanya dilakukan oleh tentara juga dilakukan oleh rakyat yang marah. Tetapi dari data yang ada dilapangan, pembantaian terjadi setelah militer memberikan daftar nama kepada para pemuda kanan yang dianggap anggota dan simpatisan PKI.

Ada banyak pihak yang mengusulkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Tetapi untuk kasus pemantaian 65-66 ini berbeda dengan apa yang terjadi di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan konflik yang terjadi memang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemerintahan Apartheid memang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang-orang kulit hitam Afrika Selatan, tetapi orang-orang kulit hitam Afrika Selatan juga melakukan hal yang sama terhadap orang-orang kulit putih. Jadi memang kedua belah pihak perlu melakukan rekonsiliasi.

Tetapi untuk kasus 65-66 ini, pengungkapan kebenaran harus tetap dilakukan tetapi rekonsiliasi tidak perlu dilakukan. Karena rekonsiliasi menghasilkan Amnesti. Sedangkan untuk kasus ini yang melakukan pelanggaran adalah negara, sementara yang memberikan Amnesti juga adalah negara. Ini adalah logika berpikir hukum yang salah. Rekonsiliasi dibutuhkan oleh pemerintah tetapi tidak dibutuhkan oleh korban.

Penuntasan kasus 65-66 ini harus dilakukan dimuka pengadilan. Harus diusahakan adanya pengadilan ad-hock untuk mengadili para pelaku pembantaian ini terutama para pemimpinnya. Karena KUHP tidak dapat mengakomodasi kasus ini.

Sedangkan kita ketahui juga bahwa hukum di Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan sehingga berharap untuk menuntaskan kasus ini adalah seperti sebuah mimpi. Hukum yang dapat menuntaskan hal ini membutuhkan Perjuangan Politik. Sedangkan perjuangan politik dapat dilakukan dengan menggalang kekuatan massa sehingga dapat mendesak penuntasan kasus tersebut.

### **Rekomendasi Diskusi**

Adapun rekomendasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan adalah :

Kondisi Eksternal Indonesia pada saat terjadinya peristiwa G 30 S adalah adanya pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, sementara Indonesia yang posisinya sangat kuat di Asia pada saat itu cenderung lebih kearah Uni Sovyet/RRC

Adanya tiga kekuatan besar yang berpengaruh yaitu Soekarno, TNI dan PKI dimana diantara ketiganya Soekarno adalah penyeimbang dan menggunakan kekuatan

kedua belah pihak tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya dan terjadinya pertarungan-pertarungan antara PKI dan Tentara.

Telah terjadinya pembantaian Rakyat Indonesia yang dianggap anggota PKI, simpatisannya dan pendukung Soekarno sebanyak lebih dari satu juta orang.

Menggantungkan harapan kepada Tentara sebagai alat menuju demokrasi adalah tindakan yang paling naif dan bodoh yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Angkatan 66 yang cengeng.

Penyelesaian kasus pembantaian manusia 65-66 ini harus dilakukan melalui hukum bukan melalui rekonsiliasi. Sehingga dibutuhkan sebuah pengadilan ad-hock untuk kasus ini.

Kondisi Hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan membuat penyelesaian kasus 65-66 ini diragukan untuk dituntaskan. Hanya melalui perjuangan politik dan bersama kekuatan massa rakyat akan dapat mendorong dan menekan dilakukan pengadilan atas para pelaku dan dalang pembantaian 65-66.

Sumber: [cari@egroups.com](mailto:cari@egroups.com)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

12 oktober 2000

**\*GELAPNYA JALAN MENUJU KE KEBENARAN DAN KEADILAN \***

**(Kajian kasus pelanggaran HAM berat masa lampau di Indonesia)**

Oleh M.D. Kartaprawira \*\*)\*

\*\*)

Penyelesaian secara tuntas dan adil kasus pelanggaran HAM berat masa lampau oleh rejim Suharto yang sudah bertumpuk-tumpuk jumlahnya mengalami hambatan serius. Padahal tokoh-tokoh penting yang terlibat sebagai pelaku, korban dan saksi dalam tindak pelanggaran HAM berat, yang seharusnya bisa diajukan ke pengadilan makin lama makin habis, karena meninggal dunia dan/atau menjadi pikun satu demi satu. Tentu saja timbul keheran-heranan dari banyak kalangan : Mengapa Suharto dan kawan-kawan sangat sukar diajukan ke pengadilan? Apakah keadilan sudah benar-benar menjadi barang langka di Indonesia, yang sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah negara hukum? Quo vadis hukum dan keadilan di Indonesia?

**\*\* Penghalang jalan ke pengadilan pelanggaran HAM berat masa lampau \* \***

dari titik pandang politik masalah sukarnya Suharto dan kawan-kawan diajukan ke pengadilan HAM adalah jelas, yaitu karena status quo peta politik dewasa ini tidak memungkinkannya hal itu terjadi. Sayang hal yang jelas tersebut dijadikan tidak jelas oleh kalangan-kalangan tertentu yang merasa terancam kepentingannya kalau masalah tersebut menjadi jelas. Bahwasanya turunnya Suharto dari panggung kekuasaan pada th.1998 tidak berarti jatuhnya orde baru tidaklah diragukan oleh

publik. Peristiwa tersebut hanya suatu pergantian pimpinan kekuasaan belaka, sedang papan bawahnya masih utuh di semua lapangan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena pada waktu itu gelombang semangat reformasi begitu dahsyat, maka mereka pun menyesuaikan diri ikut hanyut dalam arus gelombang reformasi, bahkan berteriak reformasi paling keras. Gebrakan-gebrakan pemerintahan Habibie di bidang politik dan perundang-undangan tidak lain hanyalah "upaya" agar mendapat pengakuan sebagai pemerintahan reformis. Hal itu diujakan di media massa sedemikian rupa, sehingga banyak kalangan terkecoh. Bopeng hitam orde baru dengan serta merta disulap menjadi tidak nampak. Tidak berhenti sampai itu saja, mereka menyebar dan menyelinap ke setiap organisasi politik dengan mudah. Akibatnya bisa kita lihat bagaimana kacau balaunya kehidupan parpol-parpol dewasa ini. Maka tidak mengherankan dalam situasi di mana peta politik didominasi kekuatan orba betapa sukar Suharto dan kawan-kawan diadili. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak tokoh-tokoh orba tersangkut dalam kasus pelanggaran HAM dan kasus kriminal KKN yang harus diadili. Itulah kesukaran pertama dari spektrum politik makro di Indonesia mengapa Suharto dkk sukar diajukan ke pengadilan.

Suharto sukar diajukan ke pengadilan adalah juga hasil skenario rekayasa yuridis orde baru. Memang diantara tokoh-tokoh orde baru terdapat perbedaan-perbedaan tertentu dalam strategi dan taktik untuk tetap berkuasa, tapi tidak dalam masalah menghadapi pengadilan HAM. Usaha menyelamatkan Suharto dari tanggung jawab hukum adalah suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka bersama juga. Karena RI adalah negara hukum, maka aspek yuridislah yang merupakan pilihan tepat dan penting mereka dalam penggarapan untuk membuat rambu-rambu agar pengadilan terhadap Suharto dapat dicegah. Kekuatan Orde baru yang praktis masih utuh di semua lembaga tinggi negara – terutama MPR -- dengan sangat lihay dan mulus memenangkan amandemen UUD 1945 dengan masuknya Pasal 28 (i) ayat 1, yang menetapkan penolakan asas RETROAKTIF. Bahkan pemberlakuan asas RETROAKTIF secara jelas dikwalifikasikan sebagai PELANGGARAN HAM

Dengan demikian kalau tuntutan tanggung jawab Suharto atas pelanggaran HAM berat masa lampau (misalnya yang berkaitan kasus tahun 1965-66, kasus Tanjung Priok dll) diajukan ke pengadilan HAM, para advokat orde baru telah siap dan akan dengan mudah menangkis tuntutan tersebut atas dasar Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945 (disyahkan 18 Agustus 2000).

aneh adalah munculnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, di mana Pasal 43 ayat 1 \*memberlakukan asas retroaktif \*, yang dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945\*.\*

\*) \*Bukankah UUD mempunyai kekuatan hukum tertinggi atas semua peraturan-peraturan hukum lainnya (UU, Peraturan Pemerintah, Perpu, Keppres dll)?

Jadi dengan demikian sesungguhnya semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum terbentuknya (disyakkannya) amandemen UUD 1945 tentang Pasal 28 (i) ayat 1, secara hukum tidak bisa diajukan ke pengadilan. Bahkan UU Pengadilan HAM tersebut ab ovo (dari permulaan) batal secara hukum, tidak tergantung apakah HAM tersebut sifatnya ad hoc atau bukan. Jadi Suharto tidak hanya sukar diadili atas kejahatan HAM berat masa lalu, tapi bahkan tidak bisa diadili di Pengadilan HAM. Tetapi mengapa sampai saat ini para peduli dan pembela HAM membiarkan atau

membuta adanya masalah kontraversial di dalam perundang-undangan berkaitan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi masa lampau? Seakan-akan kasus tersebut absolut bisa diajukan ke pengadilan HAM, padahal jelas hitam di atas putih pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945 mengganjalnya. Dengan demikian terkesan para korban dininabobokkan dengan nyanyian harapan penuntutan keadilan atas pelakunya, yang sesungguhnya secara yuridis sudah tidak mungkin.

Di sinilah suatu keanehan yang tidak aneh terjadi di Indonesia, di mana belum ada kepastian hukum, di mana hukum dijadikan sarana untuk menggaruk kekayaan (ingat ungkapan "UUD = ujung-ujungnya-duit"), di mana tindak tuna moral dan tuna keadilan secara politis dan yuridis ditunjang penguasa selama 32 tahun.

misterius sekali timbulnya Amandemen UUD (Pasal 28 i ayat 1) yang kemudian disusul lahirnya UU Pengadilan HAM. Pada hal proses pembuatan dua dokumen penting yang kontraversial tersebut terjadi di suatu kompleks bangunan MPR-DPR yang jaraknya hanya satu langkah.

\*\*) \* Apalagi semua anggota DPR berdasarkan UUD 1945 adalah juga anggota MPR. Mengapa kedua lembaga negara tersebut melahirkan peraturan perundang-undangan yang isinya bertolak belakang? MPR – menciptakan Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945, yang melarang azas Retroaktif, sedang DPR – menciptakan UU Pengadilan HAM, yang memperbolehkan azas Retroaktif. Apakah situasi "kacau" tersebut suatu kebetulan? Ataukah memang suatu rekayasa tingkat tinggi? Ataukah suatu kelalaian dari yang mulia para anggota MPR-DPR? Demikianlah antara lain pertanyaan-pertanyaan semrawut tapi wajar yang timbul di kalangan masyarakat.

juga mengherankan adalah tidak adanya kegiatan atau gerakan menentang RANCANGAN Amandemen yang menghasilkan Pasal 28 (i) ayat 1 tersebut ketika itu. Sepertinya lembaga-lembaga pembela HAM, pakar-pakar hukum peduli keadilan semuanya kena obat bius, teler dan tidak melihat keanehan yang muncul di lapangan hukum di Indonesia. Padahal Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945 secara riil bisa diterapkan untuk menghadang agar kasus pelanggaran HAM masa lalu (Pembunuhan dan penahanan massal 1965-66, kasus Trisakti, kasus Tanjung Priok, Kasus Jl. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan bersamaan dengan itu impunity terus berdominasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tentu saja rambu-rambu yuridis dari Pasal 28 (i) ayat 1 tersebut harus diletakkan pada posisi demi keadilan, sepanjang menyangkut masalah pelanggaran HAM BERAT. Maka perlu usaha gebrakan untuk mengadakan amandemen terhadap pasal 28 (i) ayat 1 tersebut: cukup dengan penambahan kata-kata "kecuali mengenai pelanggaran HAM berat, yang diatur selanjutnya dalam UU". Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara UUD (Pasal 28 (i) ayat 1) dan UU Pengadilan HAM ad Hoc dalam masalah azas retroaktif. Kalau hal ini tidak diterima oleh MPR, maka akan jelaslah di mana MPR berdiri menghadapi masalah keadilan bagi korban HAM masa lampau dan untuk kepentingan siapa MPR sesungguhnya melakukan fungsinya.

-rambu yuridis lainnya adalah ketentuan dalam Hukum Acara (Perdata maupun Pidana) di mana dikatakan bahwa tergugat/terdakwa dalam keadaan sakit tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Ketentuan demikian memang manusiawi dan

berlaku di banyak negara di dunia, apalagi sudah tercantum lama di dalam hukum acara kita. Masalahnya adalah terletak pada independensi dan obyektivitas dokter yang memberi visum tersebut. Inilah kuncinya. Tapi mengingat moral kebanyakan para birokrat sudah terperosok ke dalam kubangan budaya KKN, tentunya akan meragukan peranan positif "kunci" tersebut.

ini para pendukung orba \*tidak tergesa-gesa memanfaatkan Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945, sebab dengan Surat Keterangan Dokter saja sudah cukup untuk mencegah diajukannya Suharto ke meja hijau \*, di mana belum menyangkut materi kasus pelanggaran HAM. Kapan kasus pelanggaran HAM Suharto dan kawan-kawan bisa digelar benar-benar? Pasal 28 (i) ayat 1 akan diluncurkan kalau masalah substansi pelanggaran HAM sudah dibuka di pengadilan.

Tidak perlu heran kalau \*\*Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono memberi peringatan kepada Tim Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang Tahun 1997-1998 Komnas HAM bahwa "UU HAM tidak bisa berlaku surut karena UU itu lahir setelah peristiwa terjadi. Jadi menurut kita (Dephan pen.) dan Mabes TNI, baik Pak Sjafrie, Pak Prabowo maupun Pak Wiranto tidak akan terkena".

(<http://www.indomedia.com/bpost/062005/7/nusantara/nusa1.htm>)

Dalam peta politik yang penuh rekayasa dewasa ini pertanyaan pemimpi di siang bolong di atas tidak mungkin akan mendapat jawaban yang sesuai dengan keadilan, kecuali kalau penghalangnya diretool lebih dulu, yaitu Pasal 28 (i) ayat 1 diamandemen kembali lebih dulu sehingga asas retroaktif dapat diberlakukan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

dalam media massa atau dalam diskusi/seminar sering diserukan agar Suharto diajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Tentu saja seruan tersebut tidak tepat dan salah alamat. Sebab dari tiga mahkamah internasional di Den Haag tidak ada satu pun yang mempunyai kompetensi untuk mengadili kasus Suharto dan kawan-kawannya.

Mahkamah internasional yang pertama – "International Court of Justice", yang didirikan PBB setelah Perang Dunia II hanya mengadili perkara perselisihan antara negara dengan negara anggota PBB, antara organisasi-organisasi internasional atau antara suatu negara dengan organisasi internasional. Jelas mahkamah tersebut tidak bisa menangani kasus Suharto, sebab Suharto bukan negara dan bukan organisasi internasional.

Mahkamah internasional yang kedua -- "International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia", yang mengadili perkara-perkara kejahatan perang yang dilakukan oleh orang-orang bekas Yugoslavia. Jelas kasus Suharto tidak menjadi kompetensi mahkamah tersebut, sebab Suharto bukanlah orang Yugoslavia. Mahkamah internasional yang ketiga -- "International Criminal Court (berdasarkan Rome Statute)" juga tidak bisa mengadili kasus Suharto. Sebab pasal 24 Rome Statute of the International Criminal Court" menyatakan tidak berlakunya Asas Retroaktif.

\*)\* Kasus Suharto adalah kasus yang terjadi lama sebelum ICC berdiri. Jadi ICC tidak punya kompetensi mengadili kasus Suharto, di samping Indonesia sendiri belum meratifikasi Rome Statute.

Jadi dengan demikian, penanganan kasus Suharto dkk sebagai pelanggaran HAM berat masa lampau tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri menghadapi kesukaran yang serius.

Tidak sedikit orang beranggapan bahwa berdasarkan hukum internasional Mahkamah Internasional dapat mengadili kejahatan-kejahatan HAM berat. Perlu untuk diketahui saja, bahwa Mahkamah Internasional ada yang bisa mengadili kejahatan HAM masa lalu atas asas retroaktif ( Pengadilan Neurenberg, Pengadilan Yugoslavia dan Rwanda), tapi ada juga yang tidak bisa mengadili kejahatan-kejahatan HAM masa lalu atas dasar asas Non-retroaktif (International Criminal Court di Den Haag). Sedang hukum internasional sendiri tidak mesti berlaku di semua negara dan tidak harus mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi dari konstitusi negara bersangkutan. Mengenai tema ini perlu pembahasan tersendiri.

**\*\* Jalan lain penyelamatan pelaku pelanggaran HAM berat masa lampau \*\***

masalah penuntasan pelanggaran HAM berat tidak hanya terletak pada kemauan politik pemerintah atau presiden semata seperti dikatakan sementara kalangan, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya (DPR, MPR, Yudikatif) yang masih dikangkangi oleh kekuatan orba. Di dalam kabinet Gus Dur dan Mega pun kekuatan-kekuatan orba tidak kecil peranannya. Hal itu bisa dimaklumi, sebab tanpa mengakomodasi unsur –unsur dari partai lainnya (meskipun terindikasi orba) tidak mungkin eksis kabinet Gus Dur dan Megawati. Bahkan Gus Dur, ketika menjabat presiden berusaha untuk membela para korban pelanggaran HAM berat, sampai-sampai mengusulkan pencabutan TAP XXV MPR. Megawati meskipun tidak berkoar-koar, tetapi melalui fraksi PDIP (satu-satunya) di DPR berusaha keras membela orang-orang mantan PKI di dalam perdebatan mengenai UU Pemilu yang diskriminatif. Tapi semuanya mengalami kegagalan, sebab peta politik di MPR/DPR memang tidak memungkinkan.

, bahwa meskipun Suharto sudah istirahat di dalam kotak politik, toh peranannya terus dilanjutkan oleh para pemainnya yang masih aktif, baik pemain utama maupun figuran,. Mereka bahkan telah berhasil melakukan konsolidasi dan mimikri ke semua lembaga negara dan kepartaian, termasuk LSM dan lembaga HAM. Inilah kehebatan dan kelihaihan Orde Baru, yang secara substantif masih yang dulu-dulu juga, yang masih memikul dosa pelanggaran HAM.

Bahkan akhir-akhir ini timbul gejala aneh, yaitu banyak tokoh masyarakat dan politik yang antre menghadap Suharto dengan ciuman kemanusiaan diiringi curahan perasaan pemaafan atas dosa-dosanya selama 32 tahun terhadap bangsa dan negara Indonesia. Apakah gejala tersebut bukan suatu bentuk lain usaha-usaha agar perbuatan-perbuatan Suharto dkk. yang melanggar HAM tidak dipermasalahkan lagi?

Menurut pengamatan penulis, satu-satunya presiden yang sampai sekarang belum pernah sowan kepada Suharto hanyalah Megawati. Perjuangan Megawati terhadap orde baru jelas tidak pernah patah. Tetapi dapat dimaklumi kalau dalam zigzag gerak perjuangan politik memang tidak bisa berjalan dengan rumus matematik  $2 \times 2 = 4$ . Sehingga kalau tidak hati-hati orang dengan mudah terperosok dalam penilaian dan kesimpulan sesat, karena kepentingan sesaat yang pragmatis. Memang benar suatu

adagium bahwa politik adalah suatu seni. Tentunya diharapkan agar Megawati yang sekarang memimpin partai oposisi (PDIP) tetap pada garis anti orbanya. Ikut-ikutan sowan cium kening/tangan Suharto dengan meneteskan air mata bisa mengaburkan perjuangan terhadap orde baru, meskipun ciuman tersebut dipulas sebagai ciuman kemanusiaan sekalipun. Dengan program Partai hasil Kongres Bali 2005 di mana tercantum pemberdayaan rakyat di seluruh bidang kehidupan , a.l. hukum dan HAM, PDIP hendaknya mampu membuktikan keseriusannya.

uraian di atas jelas bagaimana beragamnya usaha-usaha kekuatan orba untuk menyelamatkan Suharto dkk dari jeratan tanggung jawab hukum. Tapi "kesuksesan" mereka di satu pihak, di pihak lain menimbulkan reaksi di tingkat nasional dan internasional, yang menuding Indonesia sebagai negara yang tidak menghiraukan keadilan, sebagai negara yang masih mempertahankan impunity bagi rejim otoriter orba, sebagai negara yang penuh dengan pelanggaran HAM. Maka dalam rangka menunjukkan "kepeduliannya" terhadap keadilan dan HAM, mereka – para pendukung orba - tidak menyia-nyiakan kesempatan melakukan jurus gerak zigzag di jalur rekonsiliasi sebagaimana tertuang dalam UU KKR, yang diijakan sebagai barang reklame di pasar HAM nasional dan internasional.

kasus Soeharto dan pelanggar HAM berat lainnya ditendang jauh keluar dari lapangan keadilan, maka secara "dipaksakan" melalui Dewan Perwakilan Rakyat

keluarlah UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai gantinya. Dengan mencermati apa yang tertuang di dalam UU KKR, tampak bahwa UU tersebut tidak merupakan panacea bagi penderitaan korban pelanggaran HAM masa lampau. Sebab dalam UU KKR terdapat ketentuan-ketentuan yang sangat merugikan para korban HAM. Misalnya, berdasarkan Pasal 7 UU KKR kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan kepada korban apabila permohonan amnesti pelaku dikabulkan \*.\*

\*) \*Jadi ketentuan pasal tersebut sangat tidak adil. Seharusnya dengan adanya pengakuan dari pelaku tentang telah dilakukannya tindak pelanggaran HAM, korban harus dengan sendirinya sudah berhak menerima kompensasi dan rehabilitasi. Dan lagi kalau pelaku dalam sidang komisi KKR mengakui kesalahannya tapi tidak mau minta maaf dan kemudian permohonan amnestinya ditolak, maka dia bisa diajukan ke Pengadilan HAM (Pasal 29 ayat 3 UU KKR).

\*)\* Kembali lagi persoalannya ialah apakah pengadilan HAM tersebut tidak akan terganjal oleh Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945, dengan demikian pelaku pelanggaran/kejahatan HAM akan selamat dari tanggung jawabnya? Dapat disimpulkan bahwa perspektif akibat Pasal 27 dan 29 ayat 3 UU KKR dapat menjurus kepada peniadaan kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu, sedang pelakunya tidak dapat diproses dalam Pengadilan HAM atas dasar asas non-retroaktif dari Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945.

harus mengungkapkan kebenaran tentang adanya pelanggaran HAM secara obyektif, tidak tergantung ada-tidaknya pengakuan, permintaan maaf oleh pelaku dan pemberian amnesty kepada pelaku. Bersamaan dengan diungkapkannya kebenaran tersebut di atas, Komisi harus menegakkan keadilan dengan memberikan



keputusan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban. Inilah esensi penting yang seharusnya terkandung dalam UU KKR.

**PENUTUP:** Meskipun jalan menuju kebenaran dan keadilan masih diliputi kegelapan, dengan secercah sinar harapan semoga 3 perjuangan berikut bisa menembus kegelapan:

: Pasal 28 (i) UUD 1945 harus di amandir kembali dengan menambahkan kata-kata: "kecuali mengenai pelanggaran HAM berat, yang diatur dalam UU".

: Pasal 27 dan 29 ayat 3 UU KKR perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review karena bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi di dalam UUD 1945.

: Mencabut semua perundang-undangan diskriminatif terhadap korban pelanggaran HAM dan membersihkan praktek penyelewengan pelaksanaannya.

- 
- \* ) Penulis adalah Anggota Indonesia Legal Reform Working Group, Negeri Belanda.
  - I) \*Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".\*
  - II) \* Pasal 43 ayat 1 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ad Hoc: "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc".
  - III)\* MD Kartaprawira, "Terbelenggu Sebelum Lahir", GAMMA No.4 3-2, 19.02.2000;\*
  - \*MD Kartaprawira, "Quo Vadis Reformasi Hukum di Indonesia", KREASI No.1/2001.\*
  - \*Rome Statute of the International Criminal Court, Article 24 Non-retroactivity *natione personae* (1): "No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute".\*
  - V)\* Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesty dikabulkan" \*
  - VI) \* Pasal 29 ayat 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: "Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesty dan diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc." \*

\*\*\* PS: Artikel ini dikirim ulang sebab yang dikirimkan oleh Sdr. Joseph terdapat beberapa penumpukkan kalimat-kalimat yang berakibat sukar dibaca. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. \*

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Buku Giebels tentang G30S

Kompas, 3 Oktober 2005

## **Mengkaji Peran Bung Karno pada 30 September 1965**

oleh Julius Pour

Wisma Yaso, Jakarta, Jumat pagi, 1 Oktober 1965. Bung Karno menghabiskan sarapannya sendirian. Istrinya, Ratna Sari Dewi, berada di kamar tidur. Bahkan, sampai saat suaminya berangkat ke Istana, Dewi tidak pernah keluar. Dengan demikian, Bung Karno, yang mungkin tidak tega untuk mengusik istrinya, terpaksa hanya pamit dengan meninggalkan sepucuk surat.

Lambert Giebels dalam buku bertajuk *De Stille Genocide, De fatale gebeurtenissen* yang terbit pertengahan tahun 2005, dengan cermat melukiskan suasana pada hari-hari panjang tahun 1965, ketika sekelompok perwira militer Angkatan Darat dengan dukungan massa komunis berusaha merebut kekuasaan dan akhirnya malah menyeret rontoknya kekuasaan Presiden Soekarno.

Apakah Bung Karno terlibat? Bagaimana peran DN Aidit bersama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpinnya? Siapa di balik Letnan Kolonel (Inf) Untung Samsuri, tokoh yang secara terbuka menyebut dirinya Komandan Gerakan 30 September serta menculik enam jenderal Angkatan Darat? Mengapa Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto berhasil memulihkan situasi dan bahkan akhirnya tampil menggantikan Bung Karno?

Bahan perdebatan sengit

Selama 40 tahun terakhir rentetan pertanyaan di atas menjadi perdebatan sengit dan spekulasi tidak pernah ada habisnya. Giebels, kelahiran tahun 1935, bekas anggota parlemen Belanda sekaligus doktor ilmu sejarah, pernah tinggal lama di Indonesia. Antara tahun 1970-an dan 1980-an dia menjadi konsultan di Departemen Pekerjaan Umum serta ikut menyusun pengembangan kota Jakarta. Rasa cintanya kepada Indonesia dia tuangkan dalam sejumlah buku. Sosok Bung Karno sangat akrab di mata Giebels karena tahun lalu dia juga telah menerbitkan biografi mengenai presiden pertama Republik Indonesia itu.

Berbagai langkah yang dilakukan Bung Karno, ketika krisis politik sebagai akibat aksi G30S, dengan mendadak menyergap serta menggoyang kekuasaannya, menunjukkan banyak sekali kecurigaan. Semisal dengan pidatonya pada 30 September malam di Istora Senayan. Bung Karno mendadak meninggalkan panggung sekitar sepuluh menit, kemudian tampil lagi dan melanjutkan pidatonya dengan mengutip kisah Bharatayudha. Adegan ketika Arjuna ragu-ragu maju perang melawan Kurawa, dan Kresna memberi nasihat. Bahwa kewajiban utama seorang ksatria adalah membasmi musuh. Mengapa Bung Karno tiba-tiba mengutip kisah perang yang

malam itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan acara pertemuan ahli teknik? Apakah ini isyarat kepada Untung, yang malam itu dalam posisi sebagai Komandan Yon I Tjakrabirawara dan mengawal Bung Karno juga hadir di Senayan, agar segera bergerak menyelamatkan revolusi?

Untuk melengkapi bukunya, Gibels mengkaji serta menggali bahan dari segala macam sumber. Dia juga mewawancarai sejumlah pelaku pada drama berdarah 30 September 1965 yang nantinya menyeret kematian sangat mengenaskan kepada lebih dari setengah juta jiwa massa komunis dan mereka yang sekadar dianggap komunis. Tokoh yang ikut memberikan keterangan kepada Gibels antara lain Soebandrio, Omar Dani, AH Nasution, Megawati, Hartini, Saelan, A Latief, Mochtar Lubis, dan Hoegeng, sehingga analisisnya bisa cukup berimbang. Sayangnya, tidak ada tokoh PKI yang sempat dia hubungi. Namun, beragam publikasi PKI, baik pada masa sebelum maupun setelah peristiwa G30S, banyak yang dia kutip.

Apa peran Soeharto?

Kolonel Latief dengan tegas menuduh Soeharto terlibat dalam peristiwa G30S. Tetapi Gibels, yang sempat mewawancarai Latief, menyebutkan bahwa Latief tidak mempunyai bukti jelas untuk bisa mengaitkan Soeharto. Bahwa kisah akan ada aksi dari sekelompok perwira muda untuk mem-bersih-kan revolusi, sebuah informasi waktu itu sudah menjadi bahan pengetahuan umum.

Bahkan Bung Karno sendiri juga sudah tahu karena Omar Dani, dengan mengutip sumber intelijen Angkatan Udara, pada tanggal 29 September telah melaporkan mengenai adanya perasaan tidak puas dari sejumlah perwira muda Angkatan Darat dan kemungkinan mereka melakukan langkah nekat. Persoalannya, kapan mereka bergerak dan berapa luas dukungannya?

Pada sisi lain, Bung Karno, yang sedang terobsesi oleh rumusan kebijakannya, Ganyang Malaysia, juga sedang tidak puas dengan kinerja sejumlah jenderal. Masalah tersebut semakin diperburuk karena impiannya untuk membentuk Kabinet Nasakom masih belum berhasil akibat munculnya tentangan dari para pendukungnya sendiri. Tentu saja, dalam posisi semacam itu, mungkin sekali Bung Karno lantas mengeluh dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi kemudian mewacanakan kepada para pembantu dekatnya keinginan untuk membersihkan revolusi.

Berbagai fakta serta keterangan baru menjadikan karya Gibels yang akan segera diedarkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno, menarik untuk disimak. Semisal, Bung Karno ternyata punya anak dengan nama Totok Suryawan, lahir di Nuerenberg, Jerman, Agustus 1966. Juga mengenai siapa perumus sebenarnya dari Surat Perintah 11 Maret dan tentang Prof Dr Mahar Mardjono yang kehilangan catatan medis kesehatan Bung Karno selama dia berada dalam tahanan. Termasuk kenyataan, sesungguhnya pada September 1965 Bung Karno justru sedang merencanakan perjalanan rahasia ke Meksiko.

Buku Gibels ditulis dengan sikap tidak memihak. Dia tidak menyanjung begitu saja semua langkah Bung Karno, tetapi juga tidak menyangkal peran Soeharto.

*Catatan:*

*Pak Jusuf Isak mungkin bisa berkomentar karena ia tentu tahu siapa dan bagaimana kualitas tulisan Lambert Giebels ?*

"Asvi Warman Adam" asvi@cbn.net.id

\*\*\*\*\*

Catatan laluta:

Tanggal 01 Oktober 2005 tepat waktu makan malam, empat ledakan berturut-turut mengguncang kawasan Jimbaran dan Kuta, Bali. Jumlah korban tewas akibat sejumlah ledakan di Bali sampai saat ini belum bisa dipastikan. Yang pasti, angka terus merambat naik.

Beberapa jam kemudian keluarlah pernyataan awal dari Alwi Shihab, yang menjawab pertanyaan wartawan di Surabaya a.l.: "Pemerintah tidak punya niat mengorbankan anak bangsa. Itu suatu imajinasi yang sangat distorsif, ... Jika pemerintah berniat mengalihkan isu kenaikan harga BBM, banyak hal bisa dilakukan tanpa mengorbankan pariwisata, pikiran, dan energi..." (berita selengkapnya: [www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/01/](http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/01/))

Tanggal 1 Oktober 1965 misteri dari penculikan, kematian yang disusul dengan pemburuan dan pembunuhan massal, diakhiri dengan hukuman pemenjaraan terhadap puluhan ribu anak bangsa tanpa proses pengadilan. Bahkan 40 thn lamanya pencarian dalang dari "Gerakan 30 September 1965" (G30S 1965) disebut pula sebagai "Gerakan 1-Oktober" yang disingkat GESTOK. masih merupakan lembaran hitam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka "Siapa yang merancang dan mengendalikan G30S1965 adalah satu sisi gelap sejarah yang hingga kini belum juga berhasil dibuat terang..." itu kusajikan Ekspresi dan Refleksi diri Eep Saefulloh Fatah melalui karya tulisannya berjudul "Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965 [Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita]" (sumber buku Antologi "Tragedi Kemanusiaan 1965 - 2005)

La Luta Continua!

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965

[Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita]

Oleh Eep Saefulloh Fatah  
Universitas Indonesia  
(eepsf@yahoo.com)

Salah satu episode sejarah kita yang masih remang-remang, bahkan gelap, dan karenanya mengundang kontroversi yang tak habis-habis hingga kini adalah "Gerakan 30 September 1965" (G30S1965) – atau "Gerakan 1 Oktober" (Gestok), atau apapun Anda mau menamainya \*[1]. Salah satu pertanyaan utama yang jawabannya hingga sekarang masih kabur dan menggantung adalah: Siapa sesungguhnya dalang dari gerakan itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), Sukarno, Soeharto, Angkatan Darat (AD), kekuatan(-kekuatan) asing, atau siapa?

Di masa Orde Baru, ketika negara memposisikan dirinya sebagai pemonopoli tafsir atas sejarah, kita hanya diperkenankan mengakses satu versi tunggal produk negara. Menurut versi ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas G30S1965 adalah PKI. Singkatan G30S/PKI pun dimassalkan sebagai penamaan resmi peristiwa itu.

Sepeninggal Soeharto, dalam rentang waktu lebih dari tujuh tahun ini, negara tak lagi berkuasa menjadi pemonopoli tafsir atas sejarah. Maka beragam versi tentang episode gelap sejarah ini pun mulai termasuk, bisa diakses secara leluasa oleh masyarakat. Berbagai literatur yang berusaha memotret peristiwa tersebut dengan perspektif yang beragam dan dalam beberapa hal saling bertentangan, diterjemahkan dan diterbitkan ulang. Belakangan, kekayaan pemahaman kita atas peristiwa itu bahkan diperkaya dengan terbitnya sejumlah memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang tokoh-tokoh yang sedikit banyak berkaitan – langsung maupun tidak – dengan peristiwa itu. Maka, sebetulnya secara otodidak siapapun bisa melakukan rekonstruksi atas episode sejarah yang belum juga terang itu.

Sekalipun demikian, sejatinya belum ada upaya resmi, terlembagakan yang sungguh-sungguh, sistematis, terorganisasi, seksama untuk melakukan rekonstruksi sejarah di seputar peristiwa tragis itu. Tulisan ini berusaha menggarisbawahi urgensi rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 untuk mendudukkan sejarah secara patut sebagai pijakan penting bagi perebutan masa depan yang lebih demokratis, adil, dan terbuka.

Memfokuskan diri pada diskusi soal dalang G30S1965, tulisan ini akan dibuka dengan pengungkapan kembali berbagai versi yang sempat beredar tentang G30S1965. Bagian berikutnya merekonstruksikan perdebatan yang terjadi di penghujung Orde Baru (akhir 1980-an hingga akhir 1990-an) yang dikristalisasi oleh terbitnya versi resmi Orde Baru yang lebih dikenal sebagai Buku Putih. Akhirnya, akan digarisbawahi unsur-unsur gelap dalam sejarah G30S1965 yang masih tersisa sepeninggal Soeharto hingga hari ini. Masih terus tersisanya sisi-sisi gelap ini menggarisbawahi betapa penting dan mendesaknya rekonstruksi sejarah atas peristiwa G30S1965 itu.

\*[1] Tulisan ini akan menggunakan istilah Gerakan 30 September (G30S) sebagai istilah yang netral, bertolak dari fakta sejarah bahwa geger berdarah di tahun 1965 ini memang bermula secara konkrit dari gerakan yang terjadi pada 30 September 1965. Istilah lain, misalnya G-30-S/PKI, akan digunakan sejauh memang tercantum dalam kutipan langsung dari literatur yang digunakan.

## Beragam Versi

Sebagai sebuah peristiwa besar, G30S1965 telah mengundang perdebatan politik dan akademik yang cukup ramai. Berikut adalah beberapa contoh analisis terkemuka mengenai peristiwa berdarah itu yang ditulis oleh beragam kalangan dengan beragam perspektif.

### [1] Artikel Hall dan Cornell Paper

Tak lama setelah peristiwa G30S1965, setidaknya ada dua analisis yang muncul dari pengamat asing yang, menariknya, keduanya bertentangan. Dalam Reader's Digest

edisi November 1966, Clarence W. Hall G30S1965 sebagai manuver PKI dan Sukarno untuk melanjutkan skenario politik yang telah mereka susun selama Demokrasi Terpimpin. Dalam versi Hall, PKI dan Sukarno adalah dalang di belakang peristiwa berdarah itu.

Nyaris bersamaan dengan publikasi tulisan Hall, muncul Cornell Paper; makalah Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McVey berjudul *A The October 1, 1965, Coup in Indonesia* (1966). Anderson dan McVey menyimpulkan G30S1965 adalah persoalan intern Angkatan Darat. PKI bukanlah dalang. Menurut versi ini keterlibatan PKI terjadi dalam saat-saat akhir, itupun karena PKI "dipancing untuk masuk" dan akhirnya benar-benar terseret masuk. Keterlibatan PKI, menurut Cornell Paper, hanya insidental belaka.

Banyak yang meragukan kesahihan Hall maupun Cornell Paper. Kedua analisis ini dibuat pada saat Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) masih menyidangkan para pelaku G30S1965 dan banyak dokumen belum terungkap. Wajar jika Cornell Paper -- yang memang lebih terkenal ketimbang artikel Hall -- pun mendapatkan reaksi dari pelbagai penjurur.

## [2] Bantahan terhadap Cornell Paper

Dari dalam negeri, dua tahun setelah publikasi Cornell Paper, muncul bantahan dari Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui buku *The Coup Attempt of The September Movement in Indonesia* (1968). Ismail Saleh dan Notosusanto membantah versi Anderson dan McVey dengan menunjukkan bahwa PKI lah yang mendalangi kup yang gagal di penghujung September itu.

Menurut versi ini, Angkatan Darat sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa berdarah itu. Dengan begitu, versi ini membantah analisis Anderson dan McVey bahwa peristiwa itu adalah ekspresi persoalan intern di dalam tubuh Angkatan Darat.

Pada tahun yang sama (1968) terbit pula buku John Hughes berjudul *The End of Soekarno. A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*. Buku ini menunjukkan G30S1965 lebih sebagai kup PKI daripada persoalan intern Angkatan Darat. Hughes -- sebagaimana Ismail Saleh dan Notosusanto -- melihat militer sebagai penyelamat keadaan, bukan dalang di belakang tragedi besar itu.

Bantahan terhadap Cornell Paper juga datang dari Anthonie C.A. Dake melalui dua karyanya: *In The of Red Banteng dan The Deviuos Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putch. Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko*. Dake menilai bahwa Sukarno lah dalang G30S1965. Sukarno -- menurut Dake -- tidak sabar menghadapi tokoh-tokoh Angkatan Darat yang tidak suka program revolusinya. Melalui konspirasinya dengan kekuatan komunis -- "musuh" Angkatan Darat sepanjang Demokrasi Terpimpin -- Sukarno merasa perlu untuk melakukan "pembersihan".

Versi Dake tersebut memperoleh dukungan antara lain dari David Lowenthal seorang profesor ahli Soviet-Jerman. Dengan mendasarkan diri pada dokumen-dokumen otentik pemeriksaan Widjanarko, Lowenthal menunjukkan secara eksplisit keterlibatan Sukarno dalam G30S1965. Menurut Lowenthal -- sebagaimana dikutip Soerojo

(1989; xxvii) -- Sukarno mengkreasi peristiwa itu untuk menghilangkan kerikil-kerikil yang mengganjal jalannya "revolusi yang belum selesai".

### [3] Keterlibatan Amerika

Versi lain mengungkapkan CIA sebagai dalang di belakang peristiwa G30S1965. Versi ini antara lain diungkapkan melalui sebuah tulisan Peter Dale Scott -- Guru Besar Universitas California, Berkeley -- yang dalam *Pacific Affairs* (1984).

Setelah publikasi versi Dale, pada Juli 1990, kontroversi soal keterlibatan CIA kembali diungkap oleh Kathy Kadane, wartawati kantor berita States News Service Amerika Serikat. Kadane menyatakan bahwa CIA lah yang memberikan daftar 5000 nama tokoh PKI kepada TNI Angkatan Darat pada 1965. Tokoh-tokoh yang ada dalam daftar itulah yang kemudian dihabisi seusai kegagalan G30S1965.

Sebelum muncul artikel Kadane, ada bahan lain yang mengungkapkan CIA, yakni buku CIA-KGB yang ditulis oleh Celina Beldowska dan Jonathan Bloch (1987). Dalam buku ini tertulis tegas: "pada 1965, CIA dengan sukses mengorganisir kampanye propaganda untuk menggulingkan Sukarno".

Dua belas tahun sebelum terbitnya buku Beldowska dan Bloch -- tepatnya April 1975 -- dalam Konferensi "CIA dan Perdamaian Dunia," Winslow Peck (analisis intelijen Dinas Keamanan AU Amerika) secara gamblang juga mengungkapkan keterlibatan CIA. Peck menyebut penggulingan Sukarno di akhir 1960-an adalah sukses CIA yang disokong oleh pelbagai pihak pro-Barat di Asia, terutama Asian Regional Organization.

Versi keterlibatan Amerika -- terutama melalui CIA -- tersebut ditentang oleh sejumlah kalangan. Dari kalangan resmi pemerintah AS, Marshall Green -- Duta Besar Amerika di Jakarta yang menyaksikan sendiri perpindahan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto -- mengajukan bantahan bukunya *Dari Sukarno ke Soeharto: G 30 S - PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar* (1992).

Dalam ulasannya -- dengan bahasa diplomasi yang kental -- Green menilai G30S1965 memiliki kaitan dengan gerakan komunis internasional yang saat itu memang sedang menggencarkan perluasan ideologi komunis di Asia tenggara, terutama melalui Vietnam dan Indonesia. Green bahkan menunjuk adanya sejumlah indikasi keterlibatan RRC di belakang manuver PKI yang gagal itu.

Howard Palfrey Jones, mantan Dubes Amerika untuk Indonesia sebelum Green, juga memaparkan versi yang serupa. Dalam bukunya *Indonesia: The Possible Dream* (1971) Jones menggambarkan G30S1965 sebagai kudeta abortif kekuatan komunis di Indonesia untuk melenyapkan teras Angkatan Darat serta lebih lanjut membangun pemerintahan kiri. Amerika, di mata Jones, tidak ikut serta mengkreasi kudeta itu atas nama kepentingan politik apa pun.

Dari kalangan akademisi, bantahan semacam itu pernah datang dari H.W. Brands, asisten profesor pada sebuah Universitas di Texas. Melalui artikelnya, "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno" (termuat di *Journal of History* edisi Desember 1989), Brands membantah keterlibatan Washington dalam penumbangan Sukarno.

Dengan menggunakan bahan yang sebagian besar diperoleh dari perpustakaan Lyndon B. Johnson, Brands misalnya mengungkapkan betapa Amerika "tidak mengenal Soeharto". Atas dasar itu, menurut Brands, adalah tak mungkin Amerika ada di belakang penggulingan Sukarno di penghujung 1960-an itu.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Debat di Penghujung Orde Baru:

Soegiarso, Manai, dan Buku Putih

Dalam rentang waktu sekitar satu dekade terakhir Orde Baru, ada setidaknya dua perdebatan besar yang terjadi mengenai dalang G30S1965. Pertama, perdebatan yang terus berlanjut hingga akhir tahun 1980-an di sekitar penerbitan buku Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai*. Kedua, kontroversi yang meramalkan terbitnya dua buku: karya Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi yang Berhak*, dan *Buku Putih* yang diterbitkan Sekretariat Negara (1996).

Pandangan Soegiarso tentang G30S1965 tertulis di halaman 391 bukunya: "Kudeta itu dilakukan PKI dengan dukungan dari luar dan dari dalam negeri, di samping dukungan diam-diam dari Kepala Negara yang kebetulan juga seorang Marxis konsekuen sejak muda."

Untuk mendukung pandangannya, Soegiarso menunjukkan argumen untuk mendukung teori berperannya PKI, adanya pelbagai dukungan terhadap PKI dan keterlibatan Sukarno. Dasar argumentasi Soegiarso kebanyakan didasarkan pada bukti-bukti yang tersertakan dalam keputusan-keputusan MPRS soal pidato Nawaksara Sukarno dan pelengkapannya maupun pada sejumlah indikasi yang ditemui Soegiarso dalam praktek Demokrasi Terpimpin.

Lebih jauh Soegiarso bahkan sampai pada kesimpulan: "Maka menurut penulis, segalanya memang sudah diatur rapi, bertahun-tahun sebelumnya, berdasarkan suatu skenario tertentu. Siapa sutradaranya, menurut nalarku ya Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri" (hal. 392).

Soegiarso menguatkan tesisnya ini dengan menunjukkan betapa Sukarno tidak bersikap tegas menghadapi pemberontakan PKI 1948, memberi angin bagi pembesaran PKI sehingga berhasil menjadi salah satu partai di antara empat besar dalam Pemilu 1955, membangun Demokrasi Terpimpin yang memberi peluang kepada PKI untuk berkembang melalui konsep "kabinet berkaki empat", selalu memihak dan melindungi PKI dalam Demokrasi Terpimpin. Peranan Sukarno dalam G30S1965, menurut Soegiarso, adalah puncaknya.

Buku Manai Sophiaan mengajukan versi yang bertentangan dengan versi Soegiarso. Manai secara gamblang menuturkan-ulang versi Sukarno sendiri tentang G30S1965. Bahwa peristiwa berdarah itu terjadi karena tiga faktor: (1) keblinger-nya pemimpin PKI; (2) lihai-nya kekuatan Barat atau kekuatan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme); dan (3) adanya "oknum yang tidak benar".

Menurut Manai, para pemimpin PKI menjalankan gerakan itu tanpa persetujuan dari bawah. Mereka terjebak oleh isu kudeta Dewan Jenderal. Berbeda dengan versi



resmi selama ini -- yang menganggap PKI sendirilah yang merekayasa isu Dewan Jenderal itu -- Manai mencurigai intelijen Barat sebagai perekayasa isu.

Para pemimpin PKI kemudian keblinger karena khawatir dengan kemungkinan kudeta yang akan dijalankan oleh para jenderal Angkatan Darat. Maka Biro Khusus PKI pun mendahuluinya dengan Gerakan 30 September. Karena kekhawatiran itu pula -- menurut Manai -- PKI kemudian menjadikan para jenderal AD sebagai sasaran utama dan pertama yang harus mereka bersihkan.

Lebih lanjut Manai juga menyebut soal kedekatan Amerika dengan pihak AD (A.H. Nasution adalah nama yang disebut Manai sebagai jenderal AD yang dekat dengan Amerika itu). Pihak-pihak yang dekat dengan Amerika inilah disebut Sukarno (dan juga Manai) sebagai "oknum yang tidak benar".

Dengan memaparkan kedekatan Amerika-AD ini, Manai sepertinya ingin menunjukkan bahwa Amerika memang memiliki peran dalam pemanasan suhu politik saat itu. Para pemimpin PKI kemudian terpancing untuk mempercepat sebuah gerakan untuk menyelamatkan kepentingan PKI di tengah suhu politik yang makin panas. Sementara Sukarno -- dalam pandangan Manai -- tidak terlibat dalam pergolakan yang terjadi sebagai akibat memanasnya hubungan PKI dengan Angkatan Darat itu. Sukarno tidak, apalagi menjadi dalang, gerakan yang dilakukan para pemimpin PKI yang keblinger itu. Sukarno -- simpul Manai -- tak terlibat G30S1965.

Jika Soegiarso dan Manai sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tegas dan eksplisit, Buku Putih menghindari penyimpulan semacam itu. Buku Putih memang secara gambling menunjuk PKI sebagai dalang G30S1965. Berbagai anasir yang terlibat dalam gerakan ini, menurut Buku Putih, merupakan bagian dari kudeta (gagal) yang dikendalikan oleh PKI. Namun, berbeda dengan buku Manai dan Soegiarso yang memposisikan diri secara tegas menunjukkan dengan terang ketidakterlibatan dan keterlibatan Sukarno dalam G30S1965, Buku Putih mengambil posisi yang lebih "tersamar".

Dari Buku Putih tidak akan kita temui tuduhan tegas soal keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S1965. Bab VII buku ini -- dengan judul "Sikap Presiden Sukarno terhadap Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia" -- hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah tentang ucapan dan tindakan Sukarno di seputar peristiwa itu.

Dalam konteks itu Ada tiga alinea penting dalam Bab ini. Yakni:

"Kenyataan yang terlihat dengan jelas adalah bahwa, baik pimpinan PKI maupun jajaran Biro Khusus PKI memanipulasikan secara cerdik untuk kepentingan PKI dan gerakan komunisme internasional seluruh peluang yang terbuka oleh kebijaksanaan politik Presiden Sukarno yang terpusat pada konsepsi Nasakom" (hal. 141).

"Pada periode epilog G-30-S/PKI, banyak sikap/tindakan Presiden Sukarno yang bernada membela atau menguntungkan G-30-S/PKI. Sikap dan tindakan Presiden Sukarno tersebut, bahkan identik dengan saran-saran D.N. Aidit yang disampaikan melalui suratnya kepada Presiden Sukarno, setelah D.N. Aidit melarikan diri dan bersembunyi di Jawa Tengah" (hal. 147).

"Apa yang dilakukan oleh Presiden Sukarno setelah gagalnya G-30-S/PKI adalah mengarah kepada menyelamatkan organisasi PKI dan paham komunisme sebagaimana diinginkan oleh D.N. Aidit" (hal. 150).

Dalam mengembangkan ketiga alinea penting itu, Buku Putih menyikapi keterkaitan Sukarno dengan G30S1965 dalam beberapa sikap berikut. Pertama, G30S1965 dinilai oleh Buku Putih sebagai klimaks dari manuver PKI untuk mengarahkan jalannya perpolitikan Demokrasi Terpimpin menuju "kemenangan PKI dan gerakan komunisme internasional". Dalam konteks ini, Sukarno tidak dinilai (secara eksplisit) sebagai aktor yang aktif dalam manuver itu.

Sukarno hanya dieksplicitkan sebagai seorang aktor politik yang pasif. Sukarno hanya memberi peluang kepada PKI untuk memenuhi ambisi politiknya itu melalui konsepsi Nasakom. PKI lah yang dengan cerdas memanfaatkan konsepsi Sukarno itu untuk tujuan dan ambisi politiknya.

Inilah yang membedakan Buku Putih dengan buku Manai dan Soegiarso. Jika Manai sama sekali membersihkan nama Sukarno, Soegiarso sebaliknya menempatkan Sukarno sebagai dalang, Buku Putih berhenti pada "kesimpulan yang mencari aman".

Kedua, Buku Putih hanya memberi informasi mentah tentang sikap Sukarno di seputar peristiwa G30S1965. Buku Putih tidak menuding Sukarno, melainkan hanya mengajukan sejumlah indikasi tegas yang betapa Sukarno bersikap sangat lunak terhadap pelaku G30S1965. Sukarno -- yang hanya menganggap peristiwa besar itu sebagai "kejadian biasa dalam revolusi" -- dinilai kompromistis terhadap para pelaku kudeta yang gagal itu.

Ketiga, Buku Putih menampilkan -- sambil menyalahkan -- tindakan Sukarno yang membela PKI dan paham komunis epilog peristiwa G30S1965. Buku Putih merepresentasikan sikap "pendukung Orde Baru" yang menyalahkan ketidakmauan Sukarno membunuh/mengusir PKI beserta kekuatan-kekuatan di seputarnya. Sebaliknya, Sukarno justru menunjukkan pembelaan yang tegas terhadap kekuatan komunis setelah kup PKI yang gagal itu.

Dalam kerangka itu, Buku Putih menyajikan sejumlah fakta yang menunjukkan sikap dan tindakan Sukarno lunak terhadap PKI bahkan menyelamatkan partai komunis dan paham komunismenya itu. (Lihat Tabel)

Tabel

Pernyataan Sikap dan Tindakan Sukarno yang Lunak terhadap PKI

- 1 Pidato kepada KAMI, 12 Desember 1965
- 2 Pidato 13 Desember 1965
- 3 Pidato 18 Desember 1965
- 4 Pidato HUT Dwikora, 21 Desember 1965
- 5 Pidato di depan Delegasi GMKI, 24 Desember

## Tindakan

- 1 Tidak menindak Men/Pangau Omar Dhani sebaliknya mengizinkan Omar Dhani menginap di Istana Bogor dan memberi penugasan ke luar negeri antara 19-10 s.d. 20-12-1965
- 2 Tidak mengambil tindakan hukum terhadap pimpinan pelaksanaan G-30-S/PKI, Brigjen Soepardjo
- 3 Tidak menindak Aidit bahkan memberi tanggapan positif terhadap surat Aidit dari persembunyiannya di Jawa Tengah
- 4 Mengizinkan Njoto (anggota Politbiro CC PKI) menyampaikan sikap PKI terhadap masalah G-30-S-PKI dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora (6-10-65). Bahwa G-30-S/PKI adalah gerakan intern AD dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat
- 5 Sukarno yang berjanji akan memberikan political solution terhadap masalah G-30-S/PKI malah membentuk Kabinet 100 Menteri di dalamnya terekrut orang-orang yang jelas pro PKI.
- 6 Membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966
- 7 Tat kala Sidang Umum IV MPRS memberi peluang kepada Sukarno untuk pengertian kepada rakyat tentang G-30- S/PKI, Sukarno justru menunjukkan keengganan dan kealpaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya; dan pertanggungjawaban Sukarno melalui pidato Nawaksara tidak cukup memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya G-30-S/PKI bahkan tidak menyinggung peranan PKI dalam tersebut.

## Urgensi Rekonstruksi Sejarah 1965

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Setelah kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998, jalan bagi rekonstruksi peristiwa G30S1965 mulai terbuka. Sejauh ini, telah terbentuk setidaknya tiga modus operandi bagi upaya rekonstruksi ini. Pertama, diskusi terbuka melalui media massa yang menghirup kebebasan baru setelah berbagai kebijakan liberalisasi pers dijalankan. Kedua, penerjemahan dan penerbitan ulang dalam bahasa Indonesia berbagai versi – yang antara lain diringkaskan di bagian terdahulu – yang sebelumnya tak diperbolehkan diakses oleh masyarakat. Ketiga, penulisan memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang para pelaku sejarah yang berkait langsung maupun tidak dengan peristiwa G30S1965.

Karena Soeharto sudah tak lagi berkuasa, maka salah satu spekulasi yang banyak didiskusikan melalui tiga modus operandi itu adalah kemungkinan keterlibatan Soeharto di dalam peristiwa berdarah itu. Di masa awal reformasi, misalnya, sejumlah diskusi mengarahkan fokusnya pada terbukanya kemungkinan bahwa Soeharto, tokoh yang selama ini dikenal sentral sebagai pembasmi PKI, bisa jadi terlibat atau paling tidak mengetahui tapi membiarkan kup berdarah tersebut.

Salah satu titik yang menjadi benang merah ke arah kesimpulan ini adalah kedekatannya mantan presiden tersebut dengan tokoh-tokoh G30S1965, seperti Letkol Untung, Kol. Latief, dan Brigjen Soepardjo. Selain itu, Soeharto juga dikenal aktif di sebuah kelompok diskusi politik yang dikenal sebagai "Kelompok Pathuk", Yogyakarta di masa awal kemerdekaan. Di kelompok inilah ia mengenal Sjam Kamaruzaman dan Untung, dua tokoh lain yang menjadi tokoh kunci peristiwa G30S1965.

Pengakuan Latief melalui pledoi pengadilan Mahmilub pada 1978, yang antara lain mengaku telah memberitahu Soeharto mengenai "Dewan Jenderal" serta rencana sekelompok perwira untuk mencegah percobaan kup untuk menyingkirkan Bung Karno, juga disinggung dalam laporan berbagai media. Tabloid Adil misalnya, mengutip Latief: "Saya sudah lapor kepadanya bahwa malam itu (30 September) sejumlah jenderal akan diculik."

Diamnya Soeharto (tidak melaporkan soal ini ke MenPangab Letjen Ahmad Yani), kedekatannya dengan tokoh-tokoh kunci G30S1965, membuat sejumlah orang membuat hipotesis mengenai kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut. Sebetulnya, ini bukan hipotesis baru. W.F. Wertheim, dalam *Whose Plot? New Light on The 1965 Events* yang pada 1979, telah menulis bahwa plot G30S1965 dirancang oleh sebuah komplotan dalam klik Angkatan Darat: Sjam, Kepala Biro Khusus Central PKI, yang (menurut Wertheim) bertugas membangun jaringan di tubuh Angkatan Darat.

Menurut Wertheim, Biro Khusus bekerja bebas dari PKI sebagai partai dan organisasi. Aidit, Ketua Komite Central tak melaporkan kegiatan Sjam ke organisasi. Menurut ini pula, klik antara Sjam dan Soeharto yang menyusup ke PKI itulah yang menjadi dalang dibalik peristiwa G30S1965.

Tentu saja diperlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut terhadap tesis itu. Tetapi, bagaimanapun, reformasi telah memberi peluang bagi upaya pembongkaran kembali data-data sejarah di seputar peristiwa penting ini. Dalam sebuah analisisnya, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mencatat bahwa ada enam sampai tujuh versi yang berkembang dalam diskusi di awal masa reformasi itu. Ada versi yang mengatakan PKI dalang peristiwa tersebut. Ada versi yang menyebut dalangnya Sukarno. Ada versi yang mengatakan peran Soeharto tidak bisa diabaikan begitu saja dalam peristiwa tersebut. Ada versi yang mengatakan dalangnya adalah satu klik di AD. Ada pula versi yang mengemukakan faktor eksternal, yakni keterlibatan CIA dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Siapa yang merancang dan mengendalikan G30S1965 adalah satu sisi gelap sejarah yang hingga kini belum juga berhasil dibuat terang. Dalam kerangka ini, dibutuhkan upaya rekonstruksi sejarah yang seksama sehingga bisa terbangun versi yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus secara politik.

Selain soal perancang dan pengendali G30S1965, sisi gelap lain yang perlu dibuat terang adalah mengenai jaringan pelaku, tentang mereka yang secara massif memang terlibat. Versi resmi pemerintah Orde Baru memposisikan siapa saja yang terkait dengan PKI atau bahkan sekadar gerakan kiri di masa itu, sebagai mereka yang terlibat dan mesti bertanggung jawab atas gerakan itu. Pendekatan gebyah

uyah (generalisasi serta merta) ini terbukti mendatangkan masalah.\*[2] sekali orang yang akhirnya diberi sanksi – yang bahkan berlapis-lapis hingga ke keturunan mereka secara bertingkat-tingkat – atas kesalahan yang tak mereka lakukan.

Sebagai akibat dari pendekatan yang tak bertanggung jawab itu, terparaktikkanlah perlakuan politik yang tak manusiawi terhadap mereka yang diberi stigma “komunis”. Maka, upaya rekonstruksi sejarah bukan saja dibutuhkan untuk mengklarifikasi siapa saja yang selayaknya dimintai pertanggungjawaban atas gerakan berdarah itu, melainkan juga untuk merehabilitasi status politik dan hukum dari banyak sekali orang yang telah dimintai pertanggungjawaban untuk peristiwa yang sejatinya mereka tak ikut terlibat di dalamnya.

Sisi gelap lainnya yang juga membutuhkan upaya rekonstruksi dan penjawaban-ulang tak main-main adalah soal jumlah korban. Sejauh ini tersedia data jumlah korban yang beragam.

Sumber-sumber resmi tentu saja menyebutkan jumlah korban yang minimal. Fact Finding Commission yang dibentuk segera setelah peristiwa G30S1965 terjadi, misalnya, menyebut jumlah korban 78.000 orang. Data itu jauh lebih kecil dari yang disebutkan oleh Kopkamtib – sebagaimana dikutip oleh Frank Palmos (“One Million Dead?”, *The Economist*, 20 Agustus 1966) dan Robert Cribb (ed., *The Indonesian Killings of 1965-1966*, 1990) – yang menyebutkan jumlah korban sebesar 1 juta jiwa.

Cribb (1999) sendiri menyebut 500.000 jiwa sebagai jumlah korban yang wajar. Sementara Iwan Gardono (dengan menjumlahkan dan merata-ratakan jumlah korban yang disebut oleh 39 literatur) menyebut angka 430.590 orang. Terlepas dari ketidaksepakatan mengenai jumlah korban itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk menelusuri kembali berbagai sumber sejarah yang tersedia guna memperoleh data jumlah korban yang kredibel.

Dalam konteks kontroversi peristiwa G30S1965 yang tak kunjung habis, Asvi Warwan Adam (2005) pun menyebut 1965 sebagai “tahun yang tak pernah selesai.” Pengaruh tahun 1965 hingga sekarang tak kunjung menyurut. Bukan hanya itu, implikasi peristiwa di tahun itu terhadap kehidupan sejumlah besar orang hingga saat ini masih terus berjalan. Sejumlah mantan tahanan politik akibat peristiwa 1965 itu, misalnya, masih terus mencari keadilan hingga sekarang.

Sejarah memang penting bukan ketika peristiwanya terjadi melainkan karena apa yang kemudian mengikutinya. Sejarah 1965 menjadi penting karena pengaruhnya terasa hingga waktu-waktu setelah itu, hingga saat ini. Celaknya, sejarah lazimnya dibuat oleh mereka yang menang. Setiap zaman pun akhirnya punya tuturan sejarah sesuai dengan pemegang kendali kekuasaan di masa itu. Lalu, bagaimana halnya dengan kita di hari ini, ketika demokratisasi terjadi dan semestinya kehidupan menjadi lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab?

Demokratisasi sejatinya adalah usaha untuk mereposisi para pemegang kekuasaan sehingga akhirnya penguasa sesungguhnya adalah orang banyak. Benar bahwa tak pernah ada sistem demokratis yang secara ideal menjadikan orang banyak sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi senyatanya dan sejatinya. Namun demikian,

sistem yang lebih demokratis seyogianya memfasilitasi perumusan ulang sejarah atas nama tingkat kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas yang lebih terjamin.

Maka, selayaknya, atas nama peningkatan kualitas demokrasi, upaya rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 dilakukan segera secara terlembagakan, seksama, dan terorganisir. Pemerintah selayaknya menugaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk segera membentuk tim yang independen secara politik dan kredibel secara akademik/intelektual yang beranggotakan para ilmuwan – khususnya sejarawan – yang kompeten. Tim ini selayaknya bekerja secara profesional dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber sejarah yang ada, mulai dari literatur yang sesungguhnya kaya hingga para pelaku sejarah yang terkait dengan peristiwa G30S1965 yang masih hidup.

Kita terlanjur mengenal peribahasa “bangsa yang besar adalah yang menghormati para pahlawannya”. Sesungguhnya, ada rumusan yang lebih tepat dan komprehensif: “Bangsa yang besar adalah yang pandai menghargai waktu sebagai tiga lipat masa kini: masa lalu sebagai alat peringatan dan memori bagi masa kini, masa kini sebagai tempat kerja keras dan memperbaiki diri, dan masa depan sebagai harapan masa kini.” Rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 adalah salah satu (dari sekian banyak) pembuktian sebagai bangsa yang besar itu.

\*\*\*

\*[2]Sejumlah karya sastra telah (dengan caranya sendiri yang khas) telah mengeritik pendekatan ini dengan memperlihatkan betapa banyak orang yang tak berdosa akhirnya terkena getah G30S1965 dan mesti menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak mereka buat. Untuk sekadar menyebut karya sastra itu: trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari dan Para Priyayi-nya Umar Kayam.

\* Biodata Singkat Penulis:

Eep Saefulloh Fatah lahir di Cibusah, Bekasi, 13 November 1967. Profesi staf pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, juga memimpin, pernah menjadi anggota MPR Utusan Golongan (1 Juli 1998 – 8 September 1998), anggota Tim 11 (Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum 1999, P3KPU), menulis dan menerbitkan sepuluh judul buku tentang politik dan demokratisasi di Indonesia serta aktif menulis di jurnal ilmiah dan media massa Indonesia, Anggota sastra-pembebasan@yahoo.com.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Wilson

September, 30 2005 @:20 pm

## Coup '65: Pembunuhan Atas Demokrasi

“Kemenangan dengan memakan korban besar adalah kekalahan dalam bentuk lain”. Demikian ucapan M.R Siregar pengarang buku “Tragedi Manusia dan Kemanusiaan” di Amsterdam bertemu penulis ditahun 1996. Ucapan itu untuk menggambarkan bagaimana peristiwa Gestok 1965 tidak mengakibatkan pembantaian dalam sejarah

Indonesia atas kemanusiaan, tapi lebih dalam lagi, terjadi suatu pembunuhan atas demokrasi.

Menjelang 40 tahun peristiwa Gestok, maka selayaknya, kita menuntut para pelaku utama yang melakukan ‘pembunuhan atas demokrasi’ secara berantai, sistematis dan berdarah-darah tersebut untuk dimintai keterangan tentang ‘motif’ atau ‘ideologi’ apa, siapa saja yang terlibat, untuk kepentingan siapa, dan siapa sekutu-sekutunya untuk melakukan suatu ‘skenario pembunuhan’ berantai atas demokrasi.

Pembunuhan demokrasi tahun 1965 dapat dilihat sebagai suatu awal dari pembunuhan berantai atas sendi demokrasi, karena sesudah itu, pembunuhan demokrasi dilegalisir serangkaian undang-undang, kebijakan, peraturan, Tap MPRS serta di institusionalkan dengan berbagai institusi seperti TNI, BIA, Bakorstanas, Dwi Fungsi ABRI, pengadilan, kejaksaan, pemenjaraan, pembunuhan politik dan bahkan kamp kerja paksa Pulau Buru.

Sekarang ini, setelah 7 tahun transisi demokrasi, semakin terlihat bahwa para pelaku pembunuhan demokrasi ditahun 1965 tersebut sudah tidak lagi secara ‘fisik’ alat-alat kekuasaan politik. Tapi ideologi, gagasan, perilaku dan watak pelaku utama hidup dan ‘dialih oper’ kedalam isi kepala dan praktek para pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Praktek dan gagasan yang revitalisasi para pelaku politik yang dulu membunuh demokrasi di tahun 1965 dapat kita lihat misalnya dari fakta;Kalahnya gugatan korban 65 di PTUN; Upaya kriminalisasi ideologi rencana revisi KUHP; Penolakan pencabutan Tap MPRS No 25 tahun 1966; dan UU KKR akan memberikan impunitas dan amnesti pada para pelanggar Ham kelas berat. . Dan masih banyak lagi perilaku, kebijakan dan gagasan anti demokrasi yang dipertahankan dengan memanfaatkan peristiwa Gestok. Sebetulnya penghancuran PKI hanyalah antara, sasaran utamanya adalah membunuh demokrasi. Sasaran utama itu terbukti selama 32 kekuasaan Soeharto.

Sekarang ini tampak terjadi upaya revitalisasi ‘membunuh’ bayi demokrasi yang baru lahir dengan cara-cara yang ‘pseudo-konstitusional’. Revitalisasi dan regenerasi para ‘pembunuh demokrasi’ transisi demokrasi sudah jelas tujuannya; menjadikan transisi demokrasi menjadi jalan buntu; Membunuh demokrasi dengan mendorong dan membiarkan anarkisme; Membunuh demokrasi dengan jalan membiarkan&n bsp; milisi sipil meneror gagasan pluralisme dan institusi yang mendukungnya; membunuh demokrasi dengan membiarkan institusi demokrasi menjadi busuk.

Tentu saja, kita tidak akan membiarkan demokrasi dinegeri ini dibunuh dua kali. Dari proses revitalisasi kekuatan ‘anti demokrasi’ didalam negara, tampak jelas salah satu sumber kekuatan mereka adalah karena ‘menguasai ruang politik seoptimal mungkin’. Dengan menggunakan partai-partai yang ada, birokrasi, DPR, DPD, DPRD dan berbagai prosedur dan politik . itu adalah sebuah ilusi besar bila kita keliwat banyak menggantungkan harapan kasus Gestok dan memberikan keadilan pada ‘para korban 1965’ pada institusi-institusi politik yang kita tahu berpura-pura demokratis dan tidak dibawah pengaruh, kontrol atau berpikir dibawah gagasan-gagasan demokrasi dan kepentingan para korban.

Karena Gestok 1965 adalah pembunuhan atas demokrasi maka tugas untuk mengungkap, mengadili dan meminta keterangan dari para pelaku dan institusi politik yang terlibat dalam kejadian tersebut ADALAH TUGAS SELURUH UNSUR GERAKAN DEMOKRASI.

Selama ini kesan demokrasi melihat peristiwa 1965 secara sempit sebagai persoalan para korban Gestok atau PKI dan negara orba (baca tentara). Gagal memahami bahwa kejadian gestok adalah sebuah perang terbuka antara demokrasi dan kekuatan anti demokrasi.

Setelah 40 tahun Gestok, sudah saatnya bagi kaum demokrat kita untuk keluar dari 'selubung sempit', bahwa urusan Gestok dan korban 65 adalah antara Orba/negara Orba dan para korban. Marilah kita berpikir lebih maju lagi bahwa soal korban 65 dan Gestok adalah soal pertarungan demokrasi versus demokrasi. Dengan berpikir seperti ini, maka SUDAH MERUPAKAN KEWAJIBAN bagi segenap kekuatan demokratis untuk memulai transisi demokrasi dengan meminta pertanggungjawaban PARA PELAKU terlibat, terutama pada jajaran keputusan politik, baik di sipil maupun militer.

Tentu saja tidaklah mudah untuk melakukan upaya itu semua, selain adanya ruang demokrasi ada syarat-syarat lain yang belum dipenuhi yaitu, belum adanya 'kekuatan riil' teroganisir dari elemen demokrasi dan belum ada 'alat-alat politik riil' yang dibentuk dan dikuasai oleh kekuatan demokrasi masih terserak.

By: Wilson | Category: Coup '65

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Yonathan Rahardjo <yonathanrahardjo@yahoo.com> wrote:

Date: Tue, 4 Oct 2005 21:06:26 -0700 (PDT)

From: Yonathan Rahardjo <yonathanrahardjo@yahoo.com>

Subject: Acara Bedah Buku Antologi 65 4 Oktober 2005

Acara Bedah Buku Antologi 65 4 Oktober 2005 termasuk Sukses.

Yonathan bacakan seluruh makalahnya (terlampir dengan gaya pembacaan sajak sambil berdiri). Sihar membaca seperti umumnya pembicara.

Penanya banyak. timbukan perdebatan seru, dan bisa dijawab dan dicari solusi oleh dua narasumber (Yonathan dan Sihar), dan moderator (panitia). Para penanya antara lain:

1. Bambang Asrini W (Penulis, Pelukis): soal buku, soal sastra
2. Bapak2: soal seni dan perjuangan
3. Dadang Ismawan, Jakar: soal Da Sign, Da Solen, nDasmu.
4. Martin Aleida (sastrawan): soal buku, soal kebenaran
5. lupa



6. Ipung (aktivis): soal fiksi, soal trauma

7. Budiman Sujatmiko (mantan Ka PRD, PDIP): optimisme rekonsiliasi.

Di jawab Yonathan dan Sihar dengan baik. Yonathan bisa mempertanggung-jawabkan buku Yang dieditori Heri Latief, Ratih Miryanti, dan Daniel Mahendra sebagai buku yang penting hadir di bumi Indonesia.

Di tutup pembacaan puisi Bu Sumini (korban 65, puisi Bayu Narcisxt), Sihar, dan Yonathan (puisi Buru, di Pulau).

Kita teruskan perjuangan ini.

Salam,

\*\*\*

## BEDAHLAH, KENANGANMU TAKKAN PERNAH HILANG

Yonathan Rahardjo, Bedah Buku Antologi Tragedi 65 (Puisi-Cerpen-Esai-Curhat Tragedi Kemanusiaan 1965-2005, Penerbit Malka-Sastra Pembebasan, Editor Heri Latief-Ratih Miryanti-Daniel Mahendra), Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki Jakarta, 4 Oktober 2005

Apa yang mau dikatakan untuk membedah buku setebal 350 halaman, berisi 12 cerpen, 16 curhat, 7 esai, 11 puisi, diapit semacam prolog dan satu epilog, ditulis oleh 37 penulis yang terserak, tersebar tempat di belahan-belahan bumi yang berbeda, dengan kehidupan berbeda, dengan pengalaman berbeda, dengan latar belakang berbeda, dengan umur-umur generasi yang tidak sama yang lahir terbelah dua bagian, sebelum 1965 dan sebagian sesudah tahun 1965, saat tragedi di tahun 1965 ini menyatukan perasaan, nasib, hati, kepedulian, kemanusiaan dan kegelisahan para manusia-manusia yang telah menulis karya-karya ini?

Bisakah dan untuk apa pisau bedah paling tajam mengiris, memotong, menguak, menguliti, memilah mengidentifikasi setiap kata, frasa, kalimat, paragraf dan bangunan utuh tulisan yang merupakan pembuluh darah, darah, anatomi, organ, sistem organ, nafas, rasa dan jiwa serta roh hidup manusia-manusia yang wujud, sosok, dan kehadirannya adalah cermin dari tubuh, pribadi, dan kemanusiaan kita sendiri?

Sungguh, para penulis ini punya suatu pesan yang hendak disampaikan, suatu denyut nadi yang telah diputus, detak jantung yang tak didengar, suara yang dibisukan, nurani yang dibutakan, memori yang disesatkan, cinta yang tlah dicampak dan dipisah, kasih yang tlah dibakar, sayang yang dihancurkan, dalam satu periode sangat gelap yang untuk meraba dan menjalar saja tangan dan kaki mereka harus berbenturan dengan senapan besi keras, leher putus dan tubuh mati, nyawa tidak kembali:

“Arloji itu bagi bunda seperti batu nisan,” tulis Ragil Nugroho tentang ingatan ibu tokoh Cerpen Arloji terhadap ayahnya yang pada tahun 1965 digaruk Koramil dan tak kembali sampai 40 tahun sampai entah kapan.

“Jangan berkata-kata lagi Klara. Menangis sajalah, karena air mata kita kali ini akan menghanyutkan segala duka nestapa yang pernah kita alami,” pasrah tokoh Ex Tapol tulisan T Iskandar AS dalam Cinta yang Memandang ke Depan yang untuk menjadi tukang sapu dan tukang sampah saja susah, karena diperlukan surat keterangan bebas G30S”, apalagi menjadi istri ‘gadis baik-baik saja’.

‘Dari mulut ke mulut,... entah pada turunan ke berapa, kisah tentang tapol eyang Kusumo ini akan berakhir untuk mereka riwayatkan,’ tulis Sihar Ramses Simatupang dalam Cerpen Dunia di dalam Jeruji Penjara.

‘Di layar televisi tampak berjejer para veteran dengan topi kuningnya dan lencana-lencana jasa menghias dadanya. Wayah Dalang masih terus mengusap air matanya yang meleleh. “Duh kenapa aku harus menyaksikan ini? Kenapa aku tidak segera mati?”’ tulis Putu Oka Sukanta tentang tokoh Cerpen Ia Menangis di depan Televisi.

‘Sampai pada tahun 80 an, ketika berkesempatan berkunjung kembali ke desa bawah bukit itu lagi, aku mendengar cerita ini langsung dari mulut Lek Kuntet sendiri,’ tulis Petra Dipantara dalam Cerpen Lek Kuntet yang tahun 1965 masih belum genap berumur 12, tahun 1967 dituduh anggota Lekra, ditahan, wajib lapor sampai tahun 1970-an.

Yang membuat ingatan tak bisa lepas dari peristiwa yang dialami para tokoh cerita dalam Antologi jelas, kejadian itu adalah suatu fakta, nyata, bukan sekedar fakta di pikiran, tapi fakta yang menggores kulit berdarah, jantung ambrol, menyedot mata pencaharian, menderitakan hidup, mencabut hak-hak hidup. Meski, ruang dan waktu dipagar tembok sangat tinggi agar yang menguasai segala kesadaran adalah yang dimai penguasa, pemerintah, militer:

‘Murni merah, jiwa, kebenaran. Bukan merah darah yang menggenangi mata sehingga terkaburkan semua pandangan mata dan akal sehatnya. Meski dalam genangan merah darah ini terbukti ayah bundanya tetap bisa bertahan dikepung Golkar kuning dan Golkar merah,’ tulis Yonathan Rahardjo tentang tokoh anak korban tragedi 1965 dalam Cerpen Merah Lurus Merah Liku.

‘Apakah dunia sudah akan berakhir? Kekejaman terjadi di mana-mana. Anak-anak kehilangan orang tua, orangtua kehilangan anak-anak, isteri kehilangan suami, suami kehilangan istri, adik kehilangan kakak, dan kakak kehilangan adik. Pembantaian kian marak.... Situasi makin mencekam. Mbah Putri selalu menasihati “Teguh cekelan waton”,’ tulis Utji Kowati Fauzia dalam Cerpen Natal Kelabu.

‘Melalui proses perkembangan perkawanku dengan aktivis politik yang diberi status oleh pemerintah setempat sebagai ‘Pelarian Politik’ itu, kemudian kusadari bahwasanya hasil pendidikan di bawah sistem pemerintahan rejim Soeharto ternyata semuanya bermakna kebohongan dan pembodohan bagi bangsanya,’ tulis MiRa dalam Cerpen Patty tiba...

‘Cipinang! Ya, gerbang pintu penjara Cipinang! Saat-saat di mana aku dan ibu harus menunggu giliran untuk menengok ayah. Seorang gadis muda selalu berdiri di seberang kami. Dengan pandangan dan senyumnya yang lembut itu. Seolah-olah ingin mengatakan padaku, jangan takut adikku, semua akan berlalu dan hari akan

lebih baik... Ah, kenangan yang takkan hilang, betapapun besar usaha buat menghapusnya,' tulis Satyaning dalam Cerpen Perjalanan.

Namun astaga! Kenangan-kenangan yang disimpan sesama manusia yang sama-sama manusia ternyata bisa dipandang dengan tatap mata berbeda oleh manusia-manusia lain yang sama-sama manusia. Terhadap kenangan fakta pembantaian, lihatlah cara manusia lain ini melihatnya:

'Sungai di belakang rumah kami yang membujur sepanjang desa, telah dilindungi negara, dan telah resmi menjadi Musium Bersejarah, juga dijadikan obyek wisata, di mana tempat wisata ini merupakan tempat terjadinya tragedi berdarah dari Gerakan 30 September tahun 1965 dengan ditandai monumen berupa gerbong Kereta Api "Kertopati". Dan gerbong tersebut dijadikan sebagai simbol, yang digunakan untuk mengangkut para korban keganasan PKI,' tulis Aguk Irawan MN dalam Cerpen Sungai yang Memerah.

'... bulan depan Bu Er akan pergi ke tanah suci. Lengkaplah sudah apa yang didamba Bu Er, tak dipedulikannyalagi bisikan "Gerwani itu sudah Taubatan Nasuha",' tulis Septi Wulandari dalam Cerpen Tuhan Punya Rencana.

kamu manusia? Sehingga menjadi hakim atas sesamamu manusia? Tidakkah ada sehelai kesadaran pada dirimu bilamana mata yang tidak kelihatan yang mengawasi dan tahu seluruh seluk-beluk dan tingkah-laku-polahmu menuliskan tentang dirimu sendiri masuk dalam cerita-cerita sedih itu? Dan kamu ditempatkan di situ karena di situ sejatinya kamu pun ada, bahkan ikut merubah warna sejarah karena ada sesuatu yang hati nuranimu sendiri tahu itu salah. Wahai, pihak-pihak yang telah merubah arah sejarah, kembalilah ke masa lalumu, kau temukan di situ ada kamu, akankah bila itu diubah kamu tetap merasa benar? Bahagiakah kamu dengan akibat tangan-tangan berdarahmu?

'..."Lu, mau ngarang cerita masa muda lu. Mbongkar rahasia pribadi, ya?"... "Lu juga masuk di dalamnya!".....' tulis A Kohar Ibrahim dalam Cerpen Yang Mencintai Cinta.

Bedahlah! Kenanganmu tidak akan pernah hilang. Bedahlah dan bukankah semua kenangan itu, sodorkan pada manusia-manusia yang lain, yang telah menutup mata menutup hati terhadap peristiwa itu, mengunci diri dalam ketakutan berdingkan kenyamanan pembangunan. Katakan, katakan pada sesamamu manusia, bukakan mata sesamamu manusia, bukakan mata hati mereka: buka. Kenangan mereka pun tak akan hilang, biar jadi teman kenanganmu.

Tidak kau rasakankah pandangan dari bola mata bening Ilham Aidit anak Aidit yang dipandang lain oleh rezim Orde Baru tentang Aidit, yang kala itu masih kecil dalam Curhat Bening Kaca di Bola Mata?

Tidak tahukah kau sesungguhnya kehidupan Arira, anak yang ibu dan ayahnya yang pejuang kemerdekaan 45 dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan dipenjarakan seumur hidup dan martabat keluarga sampai saat ini masih dinista dan dicerca oleh warisan sistim kekuasaan pemerintahan rezim militeristik Soeharto, dalam Curhat Cerita untuk Cucu-cucuku?

Tidak tersentuhkah kau terhadap Derita Tuti Martoyo ayahnya dicituk, disiksa dan mesti berjuang hidup dengan kesetiakawanannya dalam Curhat Deritaku-Kesetiawananku?

Tidak sama pendapatmu dengan Tari dalam Curhat Forty Years On yang menyuarakan kepergian mencari kesempatan yang lebih baik akibat tragedi 1965 tak akan pernah membuatnya melupakan dan mencintai Indonesia?

Tidak tahukah kau horor tak hanya mencekam Jenderal-Jenderal tapi juga ayah-bunda keluarga Omie Lubis dalam Curhat Horor Menjelang Subuh, Tragedi 65?

Tidak harukah kau terhadap pengakuan bangga sebagai bangsa Indonesia dua anak Mawie Ananta Jonie korban tragedi kemanusiaan dalam Curhat Kami Bangsa Indonesia?

Tidak terguncangkan kau terhadap Curhat Chiko Kisah Bogi, Beny dan Wawan yang tidak mau berbagi rasa, terbelakang mentalnya, apatis, karena trauma tak kuasa bersuara, menyuarakan kekejaman sebuah rezim yang zalim?

Tidakkah kau malu bahwa perubahan setapak demi setapak terhadap nasib para korban tragedi kemanusiaan dikatakan semua ini berkat perjuangan dan usaha Amnesty International dan badan-badan internasional lainnya yang tak henti-hentinya berusaha untuk membebaskan para Tapol demi penegakan HAM dalam curhat Hartinah Sareko Kisah Nyata Tragedi 30 September?

Tidak punya air matakah kau tahu seorang Iramani.id yang masih anak menyaksikan sendiri derita lelaki, perempuan dan keluarganya dalam penyiksaan tentara dalam Curhat Kodim,1966? bisa menangiskah kau melihat Svetlana seorang anak kehilangan ibunya yang ditahan paksa pindah-pindah Semarang, Jakarta dan Platangan, dalam Curhat Mama Tak Pernah Menangis?

Tidak terketuk nuranimukah pada kisah Mario yang kehilangan adik tanpa kubur pada Curhat Mengenang Adiku yang Sudah Tiada? Tidak merasa kehilangankah kau dengan berpulangnya pendidik yang tersingkir ke luar negeri namun tetap berdarah-darah memperjuangkan hak azasi manusia Indonesia korban pesta penggulingan pemerintahan Orba dalam Curhat Tom Iltas Mengenang DR Sophian Walujo?

Tidak miriskah hatimu kehilangan ayah yang dibantai bersama kawan-kawannya dengan kubur misterius seperti Pringgo Widagdo dalam Curhat Namaku Pringgo Seperti Ayahku?

Tidak gelisakah kamu tahu para korban di luar negeri seperti orang tua Fajar Sitepu tak bisa kembali ke tanah air sendiri karena tragedi berdarah itu dalam Curhat Korban Teror Suharto?

Tidak tergerakkan kemauanmu untuk mendukung perjuangan kaum terkorbankan itu seperti kesadaran berkesenian Madia Patra dalam Curhat Salam Gelisah dari Balik Kemuraman?

Tidak gelisakah kamu mengetahui perempuan Indraningrum selalu gelisah mencari kebenaran dan tidak pernah bertemu dengan ayahnya yang hilang sejak tragedi itu dalam Curhat Sebuah Wajah?

Kau boleh bersilat kata untuk membela kebenaranmu, namun kenangan-kenangan itu adalah kenangan abadi yang akan tetap menuntunmu pada kejernihan hati dan pikiranmu. Pada banyak bidang. Pada banyak hal. Pada banyak perkara. Pada banyak cita-citamu untuk menjadi manusia yang bermartabat, yang kau gaungkan dengan segenap kemuliaanmu, meski itu berbalutkan campuran darah, derita, air mata dan kematian.

Kau akan temukan jawaban atas kekacauanmu. Karena kekacauan pada dirimu adalah kekacauan fakta. Buka kenanganmu, luruskan faktamu, tidakkah kau akan punya pandangan lain tentang faktamu dengan Esai Nadir Attar Membengarus Buku sastra, Atas Nama Keamanan dan Ketertiban Umum?

Kau akan temukan jawaban kekacauanmu. Bukankah kekacauanmu adalah kekacauan fakta? Siapakah fakta di balik tragedi yang merenggut rampas nyawa-nyawa manusia-manusia saudara-saudaramu sendiri itu? Buka kenanganmu, cari faktamu dengan Esai Eep Saefulloh Fatah Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965 (Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita).

Kau akan temukan jawaban kekacauanmu. Bukankah kekacauanmu adalah kekacauan fakta? Kau adalah gadis dengan tahi lalat manis, kenapa harus kau cungkil ia dalam Esai Ferren Bianca Mencurigai Tahi Lalat: Apa? Kenapa?

Kau akan temukan jawaban kekacauanmu. Bukankah kekacauanmu adalah kekacauan fakta?

Bedah kenanganmu. Kenanganmu tak akan hilang, bahkan kau akan temukan faktanya dengan Esai Fransisca Fanggidaej Penilaian Terhadap Masakini atas Dasar Pengalamanku Masalampau.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu, kau akan katakan bahwa hal ini benar tentang negeri yang menembok kenanganmu ini, seperti yang Heri Latief puisikan Kolam Susu Racun Madu, Kepercayaan terhadap Ilmu Sesat Ide Pembodohan, dan bahwa Kemerdekaan itu Bukan Kado.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai Buru (di Pulau) puisinya Yonathan Rahardjo. Nyata benar kenangan dalam puisi-puisi Bayu Abdinegoro (Narcxist) Catatan Harian dan Mbaca Lagi Buku Catatan Sejarah.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai Buru 1971 (1) 1971 (2) Amarzan Ismail Hamid.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai puisi Prahara 1965 Zeta Rosa. Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai puisi Fadjar Sitepu Satir Budaya.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai puisi Daniel Mahendra Surat untuk Maemunah.

Bedah Kenanganmu, rangkai puisimu, katakan dengan kejujuranmu dan nuranimu menjumpai suatu keyakinan Pramoedya Ananta Toer Setelah 40 Tahun, Tuntutan itu Harus Tetap Dilakukan.

Bedah kenanganmu! Kau akan temui, kenanganmu tidak akan pernah hilang. Bertemulah dengan para korban dalam kenangan, hai para penikmat tragedi kemanusiaan 1965. Maka kau akan memandang secara seimbang dan benar terhadap tragedi kemanusiaan yang telah menyedihkan kebangsaan dan kemanusiaanmu. \*

Lembaga SASTRA PEMBEBASAN

Address: Postbus 2063, 7301 DB Apeldoorn – Netherlands

E-Mail: lembaga\_sastrapembebasan@yahoo.com

[http://geocities.com/lembaga\\_sastrapembebasan/](http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/)

Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65: <http://www.progind.net/>

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Dalam Karya-karya Itu, Telah Lama Disembunyikan Luka... \*)

Oleh: Sihar Ramses Simatupang

40 tahun luka itu terjelma dalam ratusan, mungkin ribuan karya sastra

Serupa protes Antonio Gramsci terhadap rezim Mussolini Italia, Serupa metafora Pablo Neruda dalam kumpulan puisi "Nyanyian Revolusi" untuk Fidel Atau novel Pramoedya Ananta Toer terhadap Soeharto.

"Walau sejarah belum tentu (dan tak perlu) menghadirkan para penulis buku ini menjadi tokoh di dalam perjalanan waktu. Sebuah catatan atas luka akan selalu ada..."

Sebutkan berapa generasi penulis yang ada di dalam kumpulan karya di buku "Tragedi Kemanusiaan 1965-2005"? Mau memakai pola pembedahan angkatan versi Ajip Rosidi atau HB Jassin, terserah. Walau itu perpendekan waktu. Kurang perlu untuk sebuah pemahaman atas fakta: hanya akan menghilangkan nama-nama, hanya menghilangkan sebuah fase, distorsi atas realitas, meminggirkan para sastra-wan marjinal secara angkatan, geografis, usia, kelompok.

Khusus untuk buku ini, tak begitu signifikan untuk memotret soal angkatan yang terulur seperti permen karet di tangan kita, ada kelahiran tahun 1930 (31,32,33, 34,35,36,37,38,39), 1940 (idem), 1950 (idem), 1960 (idem), 1970 (idem), 1980 (idem), 1990 (idem).

Sebab, terutama untuk tulisan ini, semua generasi itu punya ceritanya masing-masing. Walau jumlah korban tahun 1965-1966 adalah paling besar yang terbantai di era awal sebuah rezim (urutan kedua di dunia?), bisa dikatakan, bahwa generasi di tahun-tahun setelah itu memang tak kalah sakit dan deritanya.

Sama-sama ada yang pernah ditahan, ada yang pernah dikejar, ada yang pernah ditembak, ada yang pernah dipukul, ada yang pernah hilang. Ada apa dengan peristiwa tahun 1965, 1974, 1980, 1990-1998 atau tahun-tahun di antaranya?

Dari titik pikiran itulah, karya ini bisa dijelaskan. Bukan lagi hanya berbicara tentang generasi yang terlibat dalam organisasi yang dimomokkan secara sistematis bahkan genealogis (seperti ungkapan pengamat politik nan jernih Eep Saefulloh Fatah), tapi wacana ketakutan itu di luar bahasa kekuasaan negara, telah melahirkan juga luka pada generasi lain.

Generasi yang juga ditekan oleh bahasa kekuasaan negara. Generasi yang secara alamiah juga telah menghasilkan bahasa tandingan marjinal yang muncul dan mekar di dalam pikiran dan perasaan para korbannya. Lewat teater, lewat puisi, lewat cerpen, lewat novel, lewat orasi, lewat pamflet.

Kesamaan yang meyakinkan bahwa sebuah karya tak lepas dari sejarah masyarakat, ada trans-individual, kesadaran kolektif yang menggejala.

Bahkan pada generasi yang tak pernah diganduli dan dibekali oleh apa yang dinamakan realisme sosial-humanisme universal, lekra-manifestasi kebudayaan, seni untuk misi-seni untuk seni, art for art-art for mission.

Di zaman yang diganduli oleh trend anti oposisi biner, tetap saja bahasa kekuasaan itu telah terhalau oleh bahasa tandingan yang berada dalam posisi tertekan. Hingga bersuara ketika waktunya tiba. Tak hanya merasakan momok soal antek PKI, tapi juga momok Tanjung Priok, momok 27 Juli, momok Sampang, momok Nipah, momok Mei 1998, dari tragedy Semanggi hingga tragedy Rungkut-Surabaya.

Tema itu juga telah menyapa di dunia kesenian. Siapakah seniman yang dapat membaca momok? Lewat karya? Ya, lewat karya sastra. Begitu banyak!

Di tengah aturan estetika, struktural, nilai intrinsik dan ekstrinsik karya sastra yang dianut oleh tiap seniman dengan cara pandang dan kadar simpati dan referensi yang berbeda. Di antara berkarung buku pengetahuan dari ilmu hingga kesenian, yang berpengaruh pada tema dan muatan karyanya, siapakah yang mampu membendung dunia alam bawah sadar, defense orang ketakutan, yang berharap ada bahasa tandingan, bahasa yang memberikan dunia lain yang bebas dari temali jargon, jaring hukuman politik subversif, tempat kejujuran tak dipantau para monster kekuasaan.

Dari sinilah, kita dapat membaca dan memaklumi tiap generasi ketika berbicara 1965 – atau membaca peristiwa sejarah setelahnya. Dari sini, kita juga memahami, bagaimana generasi tahun 1990-an yang ada dalam represi pada masa itu mampu memindahkan kisahnya sehingga seolah para tokoh utama dan tokoh sampingan dalam karyanya hidup pada masa tahun 1965.

Tak jarang, pada masa tahun 1990-an, terjadi dialog generasi muda yang pernah menjadi pemberang dan bengal politik pada masa 1990-an, berdialog dengan generasi yang pernah mengecap tahun 1965. Dialog yang tak hanya terjadi di kampus – karena ketatnya pengawasan pada masa itu – tapi juga di warung, di kereta api, di terminal, di kos-kosan, di beranda sekretariat organisasi mahasiswa yang formal sekali pun.

Empati, atau imitasi yang dikenal oleh para psikolog sosial semacam Gabriel Tarde atau Carl Gustav Jung, muncul dan menggejala menjadi peristiwa psikologi personal yang mendapatkan bentuk sepanjang perjalanan dan sejarah hidupnya. Sesosok

biografi para tokoh idealis dan democrat, kerap diterima, diolah, pun ketika generasi itu tak lagi bertema. Generasi setelah mengalami perkembangan yang cepat dan cermat, belajar dan punya tujuan yang sama: yang terbenar, setidak-tidaknya bagi idealisme mereka.

Wajar jika tema pada kurun waktu itu bisa ditampilkan dalam rangkaian puisi oleh generasi yang berbeda, dari generasi tua secara usia, Amarnan Hamid, Zeta Rosa, Fadjar Sitepu, hingga Heri Latief, Daniel Mahendra, Bayu Abdinegoro, dengan nama, nick name, dunia maya, narcxist, yang aktif di dunia maya alias milis. (wow, telak, inilah wajah lain dari generasi pada fase yang berbeda...).

Jadi, jangan heran juga bila di dalam cerpen seorang Ragil Nugroho mampu ikut bersedih lewat tokoh seorang anak yang baru diberitahukan sang ibu kalau ayahnya terlibat organisasi (yang dicap) terlarang itu. Yonathan Rahardjo yang menghadirkan tokoh Joshua yang bersedih karena pamannya Djarwo yang PNI tapi dituduh PKI. Bahkan, seperti orangtua yang paham sejarah, “anak muda” Aguk Irawan mampu menafsir dan punya gugatan tentang tragisnya sebuah keberadaan Musium Bersejarah yang justru terletak di antara sungai yang pernah dijadikan tempat dan peristiwa berdarah.

Mereka, generasi ini bukan berada dalam sejarah itu, tak berada dalam paradoks yang kerap dijejalkan: kiri-kanan, tetapi berada dalam jaman yang serba varian dan variatif, lalu di tengah kondisi nilai yang bermetamorfosis menjadi entah apa ini, mencoba menangkap nilai sosialis, humanis (apalagi?) atas semua peristiwa yang pernah ada dan pernah terjadi.

Empati itu tentu tak berbeda dengan imajinasi dan pilihan kisah para penulis angkatan pra 1965. Semisal T. Iskandar AS yang memunculkan tokoh Agam yang dituduh terlihat PKI sehingga takut untuk mencintai Klara. Putu Oka Sukanta yang menampilkan komunitas budaya Bali dalam karyanya ada konflik psikologis terhadap tokoh Wayah Dalang yang ditampilkan dalam cerpennya, dimana si Wayah harus menguburkan satu kelompok ke makam pahlawan sementara harus membunuh kelompok yang lain karena diduga terlibat organisasi yang dicap terlarang. Utji Kowati Fauzia, yang mengisahkan keluarga yang ditekan dan berdo'a hingga membaca kitab Injilnya di tengah penangkapan para anggota PKI dan ormasnya yang bukan tidak mungkin terjadi juga pada keluarga mereka. A. Kohar Ibrahim, malah mengawali cerpennya dengan potret Brussel pada tahun 10 November 1998, generasi “tua” (usia dan karya) saat menyaksikan pasca reformasi di Indonesia lewat televisi. Isinya seputar perjumpaan para eksil politik tahun 1965 (yang nama tokohnya nyata alias benar-benar ada) di era kebebasan dan mengingat kisah masa silam mereka dengan seorang perempuan, berbicara namun para orangtua itu tak bisa pulang.

Buku yang selain puisi dan cerpen ini juga menghadirkan curhat dan esai. Fenomena cerpen dan puisi sesungguhnya tak jauh berbeda dengan fenomena tulisan antara lain berupa curhat oleh Ilham Aidit, Arira, Utji Kowati Fauzia, Tari, Omie Lubis, Mawie Ananta Jonie, Chiko, Hartinah, Pringgo Widagdo dan nama-nama lainnya. Juga pada fenomena esai yang ditulis oleh Nadir Attar, Eep Saefulloh Fatah, Ferren Bianca, Fransisca Fanggidaj.



Jakarta, 4 Oktober 2005

\*) Dipresentasikan pada 4 Oktober 2005 di Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki dalam acara bedah buku “Tragedi Kemanusiaan 1965-2005”, kumpulan cerpen-puisi-cerhat-esai, Penerbit Malka – Bandung.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0510/03/opini/2096542.htm>

Senin, 03 Oktober 2005

## Pancasila Sakti?

Oleh FRANZ MAGNIS-SUSENO

Selama Orde Baru, tanggal 1 Oktober dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mengapa?

tanggal 1 Oktober 1965 pagi-pagi Gerakan 30 September (G30S, nama yang dipilih mereka sendiri) menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat, Kapten Tendean, dan memaklumkan Dewan Revolusi sebagai penguasa tertinggi di Indonesia.

pada malam yang sama, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto, dengan mengabaikan perintah Presiden Soekarno yang ditampung incommunicado oleh G30S menumpas kekuatan G30S.

kejadian-kejadian ini dianggap membutuhkan kesaktian Pancasila?

Orde Baru, G30S merupakan kekuatan anti-Pancasila, dan kemenangan Soeharto dianggap membuktikan, setiap usaha untuk mendongkel Pancasila pasti gagal. Demikian menurut wacana Orde Baru.

Orang jarang membicarakan Pancasila. Seakan-akan kita malu atau segan.

ini dapat dimengerti. Selama puluhan tahun, Pancasila disalahgunakan guna membenarkan sistem Orde Baru yang kini dicela. Secara khusus Pancasila dipakai sebagai alat untuk membungkamkan segala tuntutan demokratisasi dan celaan terhadap pemerkosaan hak-hak asasi manusia.

, Pancasila tidak boleh kita diamkan. Bahwa Pancasila disalahgunakan, tidak berarti nilai dan fungsinya hilang. Malah tujuh tahun sesudah Orde Baru jatuh, penegasan kembali Pancasila semakin mendesak.

Perlu diingat untuk apa Pancasila dicetuskan. Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Soekarno untuk memecahkan konflik antara anggota BPU PKI yang mau mendasarkan Republik Indonesia atas nasionalisme sekuler dan mereka yang mau mendasarkannya pada agama Islam.

Hakikat Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa Indonesia menjadi jelas pada 18 Agustus 1945. Atas desakan Hatta, demi persatuan Indonesia, PPKI, termasuk tokoh-tokoh Islamis, sepakat menghapus tujuh kata yang mewajibkan syariat Islam kepada para pemeluk agama Islam.

perumusan dan pengesahan Pancasila ini menunjukkan, Pancasila tak lain adalah kesepakatan rakyat Indonesia untuk membangun sebuah negara, di mana semua warga sama kedudukannya, sama kewajiban, dan sama haknya. Jadi, semua warga masyarakat punya kedudukan sama, tanpa diskriminasi, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, sama-sama memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak dasar sebagai warga negara dan sebagai manusia.

kembali

atas dasar Pancasila yang menjamin identitas semua komponen bangsa, tanpa membedakan antara warga negara kelas satu dan kelas dua, kemajemukan masyarakat Nusantara, mau dan bisa membentuk satu bangsa Indonesia dalam satu negara Indonesia.

Pancasila, dasar kesepakatan ratusan etnik dan suku di Nusantara untuk membentuk Indonesia, juga tercabut. Pancasila adalah jaminan atas kemungkinan balkanisasi Indonesia.

kesepakatan dasar itu perlu ditegaskan kembali, berhadapan dengan intoleransi dan eksklusivisme yang makin tidak malu menunjukkan kepalanya.

menuntut kesediaan rakyat Indonesia untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing.

Implikasi Pancasila adalah negara dan kehidupan bangsa Indonesia harus ditata secara inklusif. Setiap kelompok dapat hidup menurut cita-citanya, tetapi setiap usaha untuk memaksakan cita-cita salah satu kelompok, entah dia mayoritas atau minoritas, semuanya pasti membatalkan kesepakatan Pancasila dan tekad untuk membentuk satu negara dan satu bangsa Indonesia.

Pancasila?

Pancasila? Tanggal 1 Oktober 1965 dan buntutnya membuktikan, Pancasila hanya sesakti tekad dan kesetiaan mereka yang komit padanya.

Tanggal 1 Oktober 1965 lebih tepat disebut Hari Pengkhiatan Pancasila. Pertama oleh mereka yang melakukan makar dan secara brutal membunuh sembilan perwira tinggi Angkatan Darat.

oleh mereka yang kemudian membunuh, atau membiarkan dibunuh, ratusan ribu saudara dan saudari sebangsa, yang menangkap, dan sering menyiksa jutaan orang, yang menahan puluhan ribu orang lebih dari 10 tahun lamanya, yang mencuri hak warga, dan sering juga hak miliknya, dengan dalih mereka terlibat PKI/G30S, padahal banyak yang tidak terbukti. Itu semata-mata karena orientasi politik mereka, salah satu kebiadaban terbesar di bagian kedua abad ke-20.

, kesaktian Pancasila tergantung dari kita. Dan jelas juga Indonesia hanya akan menghindari dari nasib seperti Yugoslavia, apabila kita kembali secara nyata pada komitmen yang terungkap dalam Pancasila.

Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

Source: <http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup1965.shtml>

## **Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia**

By Terri Cavanagh

### **BAB PERTAMA**

#### **Latar Belakang Sejarah**

Pada Bulan Oktober 1965 kaum buruh internasional mengalami salah satu kekalahan yang terbesar dalam period setelah Perang Dunia Kedua.

Sebanyak satu juta buruh dan petani dibantai dalam kudeta militer yang diatur oleh CIA dan dipimpin oleh Jenderal Suharto. Kudeta militer ini dilakukan untuk menyingkirkan rejim burjuis Sukarno yang sedang goyah, menindas pergerakan massa di Indonesia dan mendirikan rejim militer yang brutal.

Mantan-mantan diplomat Amerika Serikat and pejabat CIA, termasuk bekas duta besar AS untuk Indonesia dan Australia, Marshall Green, tahun ini telah mengakui bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto dalam pembunuhan ratusan ribu buruh dan petani yang dicurigai sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Mereka memberikan secara perorangan nama-nama dari ribuan anggota PKI dari arsip-arsip CIA, untuk daftar-daftar bantaian angkatan bersenjata.

Menurut Howard Federspeil, seorang ahli soal Indonesia yang sedang bekerja untuk Departemen Luar Negeri AS pada waktu kampanye anti-komunis itu: "Tak seorang pun peduli, asal saja mereka itu komunis, kalau mereka dijagal."

Kudeta itu merupakan hasil dari sebuah operasi panjang CIA, dengan bantuan agen-agen Dinas Intelijen Rahasia Australia (ASIS), untuk melatih dan membangun angkatan bersenjata Indonesia dalam persiapan untuk sebuah rejim militer yang akan menindas aspirasi revolusioner rakyat Indonesia.

Pada waktu kudeta militer itu, PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Cina dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3.5 juta; ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3.5 juta anggota dan pergerakan petani BTI yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Selama perjuangan kemerdekaan melawan Belanda di tahun empatpuluhan dan sepanjang tahun limapuluhan dan enampuluhan ratusan ribu orang buruh yang sadar akan kelasnya menjadi anggota PKI, mengira PKI masih mewakili tradisi-tradisi sosialis revolusioner Revolusi Bolshevik 1917.

Namun pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali.

Pembunuhan-pembunuhan itu sangatlah tersebar-luas, sampai sungai-sungai menjadi penuh dengan mayat-mayat para pekerja dan petani. Sewaktu regu-regu pembantai militer yang didukung CIA mencakupi semua anggota dan pendukung PKI

yang diketahui dan melakukan pembantaian keji mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbenam oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Bagaimanakah kekalahan bersejarah ini dapat terjadi? Jawabannya memerlukan sebuah penelitian dari sejarah pergerakan rakyat Indonesia, pengkhianatan oleh kelas burjuis nasional yang dipimpin oleh Sukarno, peranan kontra-revolusioner PKI dan peranan penting yang dimainkan oleh para oportunis Pablois dari "Sekretariat Tergabung" (United Secretariat)-nya Ernest Mandel dan Joseph Hansen dalam membantu pengkhianatan para Stalinis.

### **'Permata Asia'**

Kudeta berdarah di Indonesia merupakan hasil dari niat imperialisme AS untuk mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaan alam dan sumber-sumber strategis dari kepulauan yang sering dinamakan 'Permata Asia'itu.

Pentingnya Indonesia bagi imperialisme AS ditegaskan oleh presiden AS Eisenhower di tahun 1953, waktu ia mengatakan kepada konperensi gubernur negara-negara bagian bahwa pembiayaan oleh AS untuk perang kolonial pemerintah Perancis di Vietnam adalah sangat imperatif dan merupakan "jalan termurah" untuk tetap mengontrol Indonesia.

Eisenhower menerangkan:"Sekarang marilah kita anggap kita kehilangan Indocina. Bila Indocina hilang, beberapa hal akan langsung terjadi. Tanjung Malaka, sebidang tanah terakhir yang bertahan di sana, akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Timah dan tungsten yang sangat kita hargai dari daerah itu akan berhenti datang, dan seluruh India akan terkepung.

"Birma tidak akan berada di posisi yang dapat dipertahankan. Semua posisi di sekitar sana akan menjadi sangat tak menyenangkan buat Amerika Serikat, karena pada akhirnya jika kita kehilangan semua itu, bagaimanakah dunia bebas akan mempertahankan kerajaan Indonesia yang kaya?

"Jadi, entah dimana, ini harus diberhentikan dan harus diberhentikan sekarang, dan inilah yang kita usahakan.

"Jadi, bila AS memutuskan untuk menyumbang 400 juta dolar untuk membantu perang di Indocina, kita bukannya menyuarakan program bantuan gratis. Kita memilih jalan termurah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang akan berarti sangat buruk buat Amerika Serikat, keamanan, kekuatan dan kemampuan kita untuk mendapatkan barang-barang tertentu yang kita butuhkan dari kekayaan-kekayaan wilayah Indonesia dan Asia Tenggara."

Indonesia telah diperkirakan sebagai negara terkaya nomor lima di dunia di bidang sumber-sumber alam. Selain sebagai produser minyak yang nomor lima terbesar,

Indonesia mempunyai cadangan-cadangan timah, bauksit, batubara, emas, perak, berlian, mangan, fosfat, nikel, tembaga, karet, kopi, minyak kelapa sawit, tembakau, gula, kelapa, rempah-rempah, kayu dan kina yang sangat besar.

Pada tahun 1939, yang pada waktu itu masih dipanggil East Indies Belanda memasok lebih dari separuh konsumsi total bahan mentah yang penting bagi Amerika Serikat. Kekuasaan atas daerah penting ini merupakan masalah penting dalam perang AS-Jepang di Pasifik. Dalam masa setelah perang kelas penguasa AS bertekad bulat untuk tidak kehilangan kekayaan-kekayaan negara ini ke tangan rakyat Indonesia.

Setelah kekalahan Perancis di Vietnam di tahun 1954, AS menjadi khawatir bahwa perjuangan rakyat Vietnam akan menyulut pergolakan revolusioner di seluruh daerah Asia Tenggara, mengancam kontrol mereka atas Indonesia.

Di tahun 1965, sebelum kudeta di Indonesia, Richard Nixon, yang segera akan menjadi presiden AS, menyerukan untuk pengeboman saturasi untuk melindungi "potensi mineral besar" Indonesia. Dua tahun setelah itu, dia menyatakan bahwa Indonesia merupakan "hadiah terbesar Asia Tenggara".

Setelah kudeta 1965, kegunaan diktatur Suharto untuk kepentingan imperialisme AS telah tergarisbawahi dalam laporan Departemen Luar Negeri AS ke Kongres di tahun 1975, yang menyebut Indonesia sebagai "lokasi yang paling berwenang secara strategis di dunia":

"Memiliki populasi yang terbesar di seluruh Asia Tenggara.

"Merupakan penyuplai utama bahan-bahan mentah di daerah itu.

"Kemakmuran ekonomi Jepang yang terus berkembang, sangatlah tergantung pada minyak bumi dan bahan-bahan mentah lain yang dipasok oleh Indonesia.

"Investasi Amerika yang sudah ada di Indonesia sangatlah kokoh dan hubungan dagang kita sedang berkembang cepat.

"Indonesia mungkin secara meningkat akan menjadi penyedia yang penting untuk keperluan energi AS.

"Indonesia adalah anggota OPEC, tetapi itu mengambil sikap yang moderat dalam langkah-langkahnya, dan tidak ikut serta dalam embargo minyak bumi.

"Kepulauan Indonesia terletak pada jalur-jalur laut yang strategis dan pemerintah Indonesia memainkan peranan yang vital dalam perundingan-perundingan hukum kelautan, yang sangatlah penting untuk keamanan dan kepentingan komersial kita."

## **Perampasan Kolonial Selama Berabad-Abad**

Kolonial Belanda menjajah Indonesia tanpa ampun selama 350 tahun, merampok kekayaan alamnya, membuka perkebunan-perkebunan besar dan memeras rakyatnya secara kejam.

Pada tahun 1940 hanya ada satu dokter untuk setiap 60,000 orang (dibandingkan dengan India, di mana rasionya adalah 1:6,000) dan 2,400 lulusan Sekolah Menengah Atas. Pada akhir Perang Dunia Kedua, 93 persen dari populasi Indonesia masih buta-huruf.

Pada permulaan abad Kesembilan Belas, perkembangan kaum burjuis Inggris makin menantang dominasi Belanda atas daerah ini. Di tahun 1800 East Indies Company milik Belanda menjadi bangkrut dan Inggris mengambil-alih daerah kekuasaannya antara tahun 1811 dan 1816. Di tahun 1824, Treaty of London (Perjanjian London) membagi daerah ini antara keduanya: Inggris mendapat kontrol atas tanjung Malaka dan Belanda tetap menguasai kepulauan Indonesia.

Permulaan abad Keduapuluh, imperialisme Amerika yang baru sedang berkembang mulai menjadi tantangan untuk kekuatan kolonial Eropa, terutama setelah pendudukan Filipina oleh Amerika Serikat di tahun 1898. Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dagang dengan Belanda atas minyak bumi dan karet. Perusahaan minyak Standard mulai memperebutkan monopoli atas daerah-daerah pertambangan minyak di Indonesia oleh Royal Dutch company. Di tahun 1907, Royal Dutch dan Shell bergabung untuk menandingi kompetisi dari AS. Mengambil keuntungan dari situasi Perang Dunia Pertama, Standard Oil mulai mengebor minyak di Jawa Tengah, dan dalam tahun yang sama perusahaan-perusahaan AS mulai menguasai perkebunan-perkebunan karet. Goodyear Tyre and Rubber membuka perkebunan-perkebunan mereka dan US Rubber membuka perkebunan-perkebunan karet di bawah satu pemilikan yang terbesar di dunia.

Strategi AS di daerah ini sewaktu itu dapat diringkas oleh Senator William Beveridge:

"Filipina adalah milik kita selamanya...dan lewat Filipina adalah pasaran Cina yang tak terbatas. Kita tidak akan mundur dari keduanya. Kita tidak akan meninggalkan tanggung-jawab kita di kepulauan itu. Kita tidak akan meninggalkan tanggung-jawab kita di Asia Timur. Kita tidak akan meninggalkan bagian kita di dalam misi bangsa kita, kepercayaan Tuhan, untuk perdaban di dunia ini kita akan maju berkarya dengan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan kita yang Maha Besar karena Dia telah memilih kita sebagai orang-orang terpilihNya, dan selanjutnya memimpin dalam regenerasi dunia...Perdagangan terbesar kita mulai sekarang harus dengan Asia. Laut Pasifik itu adalah laut kita... dan Pasifik adalah laut perdagangan masa depan. Kekuatan yang memiliki Pasifik, adalah kekuatan yang menguasai dunia. Dan dengan Filipina, kekuatan itu adalah dan akan selalu menjadi Republik Amerika."

Berkembangnya imperialisme Jepang dan ekspansinya ke Korea, Manchuria dan Cina menimbulkan pertentangan dengan imperialisme Amerika atas penguasaan daerah-daerah itu, yang meningkat dan meletus dalam Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Keinginan kaum burjuis Jepang untuk merebut kekuasaan AS, Perancis dan Belanda membawa pentingnya Indonesia, sebagai gerbang ke Laut India dari Asia Tenggara dan sumber kekayaan alam, ke dalam fokus.

Di tahun 1942 para kolonialis Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia ke Jepang, daripada membiarkan rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan.

Semua kekuatan imperialis mempunyai alasan baik untuk menakuti rakyat Indonesia yang tertindas.

Sejauh tahun 1914 wakil-wakil terbaik dari kelas buruh Indonesia telah mengambil ajaran Marxisme ketika Assosiasi Sosial Demokrat Indies (Indies Social Democratic Association) dibentuk dengan inisiatip seorang komunis Belanda Hendrik Sneevliet. Di tahun 1921 itu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia sebagai tanggapan kepada Revolusi Bolshevik di Rusia.

PKI mendapatkan kewenangan besar di antara rakyat dengan memimpin perjuangan melawan kolonialisme Belanda, termasuk pergerakan-pergerakan besar yang pertama di Jawa dan Sumatra di tahun 1926 dan 1927. Ketika rakyat Cina sedang bergerak dalam Revolusi Cina yang kedua di tahun 1926-27, para pekerja dan petani Indonesia juga bergerak dalam sebuah pemberontakan, yang dipimpin PKI. Bagaimanapun juga, kewenangan kolonial Belanda berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu. Mereka menangkap 13,000 orang tertuduh, memenjarakan 4,500 dan mengasingkan 1,308 ke dalam kamp konsentrasi di Irian Barat. PKI dilarang.

### **Perjuangan Pembebasan Nasional Dikhianati**

Pada akhir Perang Dunia Kedua rakyat-rakyat tertindas di Indonesia, India, Sri Lanka, Cina dan di seluruh Asia Tenggara dan dunia maju bergerak dalam perjuangan-perjuangan revolusioner untuk membebaskan diri dari imperialisme.

Pada saat yang sama, kelas buruh di Eropa dan negara-negara kapitalis mengadakan perjuangan-perjuangan yang menggoncangkan. Itu hanya dapat dipadamkan melalui perkhianatan birokrasi Sovyet yang dipimpin oleh Stalin dan partai-partai Stalinis di seluruh dunia. Pengkhianatan pekerja-pekerja Perancis, Itali dan Yunani yang terutama, dan pendirian rejim-rejim yang dikendalikan secara birokratis di Eropa Timur memperbolehkan imperialisme untuk memantapkan diri.

Di tahun 1930an, munculnya sebuah kasta berhak istimewa dalam Uni-Sovyet, yang mengambil kekuasaan politis dari kaum proletar Sovyet, telah menghancurkan partai-partai Komunis. Dari partai-partai Internasional revolusioner, mereka berubah menjadi organisasi-organisasi kontra-revolusioner, yang menekan perjuangan-perjuangan mandiri kelas buruh.

Di negara-negara kolonial, partai-partai Stalinis ini, termasuk PKI, secara sistematisengebawahkan kepentingan rakyat ke kelas burjuis-nasional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gandhi di India dan Sukarno di Indonesia yang berusaha mencari penyelesaian dengan kekuatan-kekuatan kolonial untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis.

Perjanjian-perjanjian setelah Perang Dunia Kedua tidak menghasilkan pembebasan nasional yang sejati dari imperialisme, tetapi membebaskan kepada rakyat agen-agen baru kekuasaan imperialis. Ini adalah kasusnya di Indonesia di mana kelas burjuis nasional, dipimpin Sukarno, mengadakan perjanjian-perjanjian reaksioner dengan Belanda.

Sukarno, putra seorang guru sekolah Jawa yang berasal dari keluarga aristokratis, adalah lulusan arsitek, bagian dari lapisan sosial tipis kaum petit-burjuis yang berpendidikan. Dia adalah ketua Partai Nasional Indonesia saat itu dibentuk di tahun 1927 dan mengalami penjara dan pengasingan di tangan Belanda karena dia mengajarkan kemerdekaan nasional.

Dalam Perang Dunia Kedua Sukarno dan kelas burjuis nasional bekerja sama dengan pasukan pendudukan Jepang dengan harapan mendapatkan semacam kemerdekaan nasional. Dalam hari-hari terakhir perang itu Sukarno, dengan dukungan separuh-hati Jepang, mendeklarasikan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Arahan pemimpin-pemimpin kelas burjuis nasional ini bukanlah untuk memimpin sebuah gerakan proletar melawan imperialisme, tetapi untuk mendirikan sebuah administrasi dan memperkuat posisi mereka dalam tawar-menawar dengan Belanda, yang tidak mempunyai tentara di daerah itu.

Tetapi reaksi Belanda adalah mengadakan perang yang kejam untuk menekan rejim yang baru ini. Mereka memerintahkan Indonesia untuk tetap di bawah perintah tentara Jepang sampai tentara Inggris dapat mencapai sana. Inggris dan Jepang kemudian menggunakan tentara-tentara Jepang untuk menekan perjuangan bertekad para pekerja, pemuda dan petani Indonesia. Dengan begitu, semua kekuatan-kekuatan imperialis bergabung melawan rakyat Indonesia.

Ketika perlawanan bersenjata meletus di seluruh Indonesia terhadap tentara Belanda, Sukarno, dengan dukungan dari kepemimpinan PKI, menjalankan sebuah politik kompromi dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Linggarjati di bulan Maret 1947. Belanda mengenali secara formal kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra dan setuju untuk mengundurkan tentara mereka. Tetapi kenyataannya, Belanda hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengambil napas dan memperkuat dan mempersiapkan diri untuk sebuah serangan yang kebrutalannya tak tertandingi di bulan Juli dan Agustus 1947.

Selama waktu ini, ratusan ribu buruh dan petani menjadi anggota atau mendukung PKI karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin burjuis dan karena mereka memandang PKI sebagai partai revolusioner. Mereka juga terilhami oleh kemajuan-kemajuan Partai Komunis Cina Mao Tse Tung dalam perangnya melawan Chiang Kai-Shek. Dalam perang melawan Belanda, buruh dan petani menduduki tanah dan bangunan-bangunan berulang-ulang dan serikat-serikat buruh massa dibentuk.

Untuk menanggulangi perkembangan ini, pemerintahan Republik Sukarno, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang saat itu masih Perdana Menteri (juga seorang anggota PKI rahasia), menandatangani Perjanjian Renville di bulan Januari 1948 (dipanggil itu karena ditandatangani di atas USS Renville). Perjanjian ini memberi Belanda kekuasaan atas separuh pabrik-pabrik gula di Jawa, 75 percent dari karet Indonesia, 65percent perkebunan kopi, 95 percent perkebunan teh dan minyak bumi di Sumatra. Tambahan pula, penyelesaian yang diimposisi oleh AS ini menyebutkan penarikan mundur pasukan-pasukan gerilya dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda dan menciptakan kondisi untuk pembubaran "unit-unit rakyat bersenjata"



yang dipimpin oleh PKI, dan untuk pembentukan "Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia" yang dipimpin oleh Sukarno dan jendral-jendralnya. Di tahun 1948 aksi-aksi pemogokan menentang pemerintah Republik, yang sekarang dipimpin oleh Wakil Presiden sayap-kanan Hatta sebagai Perdana Menteri, dan menuntut sebuah pemerintahan berparlemen. Aksi-aksi ini dipadamkan oleh Sukarno yang mengimbau untuk penciptaan "kesatuan nasional".

Pada saat yang sama, pemimpin PKI Musso yang sebelumnya diasingkan, kembali dari Uni-Sovyet dan beberapa pemimpin-pemimpin penting Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah anggota-anggota rahasia PKI selama bertahun-tahun. Pernyataan ini menunjukkan basis dukungan untuk PKI yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya diperkirakan oleh kekuatan-kekuatan imperialis.

Di bulan Juli 1948 pemimpin-pemimpin burjuis, termasuk Sukarno dan Hatta mengadakan pertemuan rahasia dengan wakil-wakil AS di Sarangan di mana AS menuntut, sebagai bayaran bantuan ke pemerintah, pengadaan pemburuan anggota-anggota PKI dalam angkatan bersenjata dan pegawai-pegawai pemerintah. Hatta, yang juga masih Menteri Pertahanan, diberi \$10 juta untuk melakukan "pemburuan merah"

Dua bulan setelah itu, dalam sebuah percobaan untuk menghancurkan PKI, Peristiwa Madiun dilakukan di Jawa. Beberapa perwira angkatan bersenjata, anggota-anggota PKI, dibunuh dan yang lainnya menghilang, setelah mereka menentang rencana-rencana untuk membubarkan kesatuan-kesatuan gerilya angkatan bersenjata yang berada di garis depan perang melawan Belanda.

Pembunuhan-pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan di Madiun yang ditekan secara berdarah oleh rejim Sukarno. Perdana Menteri Hatta menyatakan hukum darurat. Ribuan anggota PKI dibunuh, 36,000 dipenjara dan pemimpin PKI Musso dan 11 pemimpin penting yang lainnya dihukum mati. Konsul-Jendral AS Livergood menelegram atasannya di AS mengatakan bahwa dia telah memberitahu Hatta bahwa "krisis ini memberikan pemerintahan Republik kesempatan untuk menunjukkan tekadnya untuk menekan komunisme."

Terbesarkan hatinya karena pogrom anti-komunis itu, Belanda menjalankan serangan militer baru di Desember 1948, menangkap Sukarno. Tetapi perlawanan yang meluas memaksa Belanda untuk menyerah dalam waktu enam bulan. Meskipun begitu, konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag membebankan pengkhianatan-pengkhianatan baru atas rakyat Indonesia, melibatkan konsesi-konsesi yang lebih besar dari kelas burjuis Indonesia.

Pemerintah Sukarno setuju untuk mengambil alih hutang-hutang koloni dan menjamin perlindungan untuk modal milik Belanda. Belanda mendapat Irian Barat dan Republik Indonesia tetap harus bekerja sama dengan imperialis Belanda dalam Netherlands-Indonesian Union. Pemerintah Sukarno tetap mempertahankan hukum-hukum kolonial. Angkatan bersenjata baru didirikan dengan menggabungkan tentara-tentara Belanda yang berasal dari Indonesia ke dalam "Angkatan Bersenjata Nasional". Dalam kata lain aparat dan hukum-hukum kolonial lama dipertahankan dibalik aling-aling pemerintahan parlemen di republik yang baru.

Kepemimpinan PKI mendukung pengkhianatan perjuangan pembebasan nasional itu dan berusaha untuk membatasi kelas buruh dan petani ke dalam perjuangan-perjuangan yang damai dan "demokratis". Ini adalah terusan dari posisi PKI selama Perang Dunia Kedua ketika kepemimpinan PKI (dengan Partai Komunis Belanda) mengikuti arahan Stalin untuk bekerja sama dengan imperialis Belanda melawan Jepang dan menyerukan untuk sebuah "Indonesia merdeka dalam Persemakmuran Belanda". Ini tetap menjadi politik PKI meskipun selama perjuangan setelah Perang Dunia Kedua melawan Belanda.

Untuk rakyat Indonesia, kepalsuan "kemerdekaan" di bawah dominasi imperialisme Belanda, Amerika dan dunia yang berlangsung makin menjadi jelas. Hasil-hasil alam, industri-industri penting, perkebunan-perkebunan dan kekuatan keuangan tetap dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing.

Contohnya, 70 percent lalu-lintas laut antar kepulauan masih dipegang oleh perusahaan Belanda KPM dan salah satu bank Belanda terbesar, Nederlandche Handel Maatschappij, memegang 70 percent dari semua transaksi keuangan Indonesia.

Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, di pertengahan tahun 1950an, modal Belanda di Indonesia berharga sekitar \$US 1 milyar. Pemerintah Sukarno mengatakan bahwa meskipun jika mereka ingin menasionalisasikan kemilikan Belanda, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk menggantikan kerugian bekas penguasa-penguasa kolonial itu. Dan untuk menasionalisasikan tanpa ganti-rugi adalah komunisme. Ketidakpercayaan rakyat tercermin di pemilihan umum 1955 ketika jumlah kursi yang dipegang PKI meningkat dari 17 ke 39. Dalam waktu dua tahun pergerakan rakyat akan meletus dalam penyitaan pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank, toko-toko dan kapal-kapal milik Belanda, Amerika dan Inggris.

## BAB KEDUA

### Para Stalinis Mengkhianati Pergerakan Massa

Pada bulan Desember 1957 dominasi imperialisme atas ekonomi Indonesia tergoncang oleh pergerakan massa kaum buruh dan petani. Pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank dan kapal-kapal laut banyak yang dirampas dan diduduki.

Rejim burjuis Sukarno bisa bertahan hanya karena pemimpin-pemimpin Stalinis Partai Komunis Indonesia (PKI) menyabot pergerakan massa itu, dengan menegaskan bahwa para buruh dan petani harus menyerahkan semua yang sudah mereka sita kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata yang dikirim oleh Sukarno, dengan dukungan AS, untuk mengontrol situasi itu.

Kabar di New York Times tanggal 8 Desember 1957 memberi gambaran tentang keluasan dan kekuatan pergerakan itu: "Pergerakan pekerja-pekerja di Jakarta, sejauh kita dapat menentukan, terjadi tanpa ijin pemerintah, dan berlawanan dengan kata-kata Perdana Menteri Djuanda, Kepala angkatan bersenjata Jendral Abdul Haris Nasution dan pejabat-pejabat pemerintah yang lainnya, yang mengatakan bahwa pergerakan itu tidak dapat diterima dan orang-orang yang terlibat akan dihukum berat...

"Ketiga bank milik Belanda di sini, the Netherlands Trading Society, the Escompto dan the Netherlands Commercial Bank, diambil-alih oleh delegasi-delegasi pergerakan itu. Mereka membacakan proklamasi di depan kawan-kawan seperjuangan yang penuh semangat dan kemudian di depan para administrator-administrator dari Belanda, mengatakan bahwa atas nama Asosiasi Pekerja Indonesia mereka merampas bank-bank ini dan mulai saat itu akan menjadi milik Republik Indonesia."

Surat kabar Belanda "Volksrant" mengabarkan dengan nada khawatir pada tanggal 11 Desember 1957: "Di Jakarta para Komunis terus mengibarkan bendera-bendera merah di atas perusahaan-perusahaan milik Belanda...Hari ini kantor pusat Philips dan Societe D'Assurances Nillmij di Jakarta diduduki oleh orang-orang Indonesia di bawah pimpinan perserikatan buruh Komunis."

Pergerakan ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Menurut "New York Herald-Tribune" tanggal 16 Desember: "Pekerja-pekerja di bawah SOBSI, perserikatan buruh sentral yang didominasi oleh para Komunis, merampas toko-toko roti Belanda dan bank-bank di Borneo (Kalimantan)." Koran "New York Times" pada hari yang sama mengabarkan bahwa di Palembang, ibukota Sumatra Selatan, "pasukan-pasukan keamanan menahan sejumlah pekerja, anggota serikat buruh yang dikontrol oleh para Komunis, karena mereka bertindak tanpa ijin menyita tiga perusahaan Belanda. Tigapuluh tujuh bendera merah yang mereka naikkan di depan rumah-rumah pegawai-pegawai Belanda perusahaan-perusahaan tersebut telah disita."

Surat-surat kabar kapitalis yang lain mengabarkan "situasi anarki di Bali" dan menurut pemilik perkebunan Belanda yang sedang melarikan diri, di Aceh dan Deli, di pantai selatan Sumatra, pergerakan rakyat bukan hanya ditujukan ke perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi juga ke perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika. Kabar-kabar serupa juga datang dari Sumatra Utara, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya.

Ada juga kabar-kabar bahwa pergerakan-pergerakan ini menimbulkan perlawanan di Papua New Guinea (Irian Timur) yang diduduki oleh Australia. Di Karema, duapuluh orang terluka ketika orang-orang pribumi melawan anggota-anggota pasukan keamanan setelah seorang jururawat pribumi mengatakan bahwa dia merasa dihina. Pemberontakan di Indonesia timbul sebagai reaksi terhadap panggilan dari Sukarno untuk mengadakan pemogokan umum terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Sebelum itu ia juga berbicara tentang penasionalisasian perusahaan-perusahaan milik Belanda pada sebuah pidato umum. Tujuan Sukarno adalah untuk menggunakan ancaman penasionalisasian sebagai cara untuk menekan Belanda untuk meninggalkan Irian Barat, yang tetap dibawah Belanda setelah Konperensi Meja Bundar di tahun 1949, supaya Indonesia dapat mengambil-alihnya.

Dalam usahanya untuk mengimbangkan keserakahan imperialisme Belanda, Amerika dan Inggris; ketidakpuasan massa yang tertindas dan berkembangnya kekuatan militer dengan dukungan Amerika - yang makin lama makin menjadi andalan rejimnya, Sukarno berusaha menggunakan tekanan dari rakyat untuk menekan imperialisme Belanda. Para buruh mulai merampas dan menduduki perusahaan-perusahaan Belanda tanpa suruhan. Sukarno sama sekali tidak mengharapkan tanggapan seperti ini. Ia langsung memberi anggota-anggota militernya ijin untuk mengambil-alih perusahaan-perusahaan itu dari para buruh.

Biro Politik PKI bergegas membantu Sukarno dengan mengeluarkan resolusi untuk mengimbuai rakyat untuk memecahkan secepatnya dengan perundingan perbedaan pendapat tentang cara-cara perjuangan melawan imperialisme Belanda, dengan demikian persatuan rakyat, antara rakyat, pemerintah dan angkatan bersenjata dapat diperkuat."

Bersamaan dengan itu, PKI mengimbuai para pekerja "jangan hanya menjalankan perusahaan-perusahaan yang diduduki, tetapi buat mereka bekerja lebih disiplin dan lebih baik dalam meningkatkan produksi. "Pemerintah harus mengambil keputusan yang mampu dan patriotis untuk perusahaan-perusahaan ini, dan para pekerja harus menunjung keputusan ini dengan seluruh kekuatan mereka."

Tambahan pula, PKI menegaskan bahwa pengambil-alihan itu hanya berlaku terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, mencoba menentramkan hati imperialisme AS dan Inggris dengan mengatakan bahwa kepentingan mereka tidak akan terganggu: "Semua pergerakan-pergerakan buruh, petani dan organisasi-organisasi pemuda ditujukan ke kapitalis-kapitalis Belanda. Negara-negara kapitalis yang lainnya tidak bersikap bermusuhan dalam perang antara Belanda dan Indonesia di Irian Barat. Karena itu, tidak ada aksi terhadap perusahaan kapitalis-kapitalis dari negara lain."

Mengenali usaha-usaha PKI untuk mematahkan pergerakan massa, Tillman Durdin menulis di "New York Times" tanggal 16 Desember: "Anggota-anggota Badan Penasehat Nasional yang berorientasi Komunis diketahui telah menentang dengan tegas penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh para pekerja dan mengatakan bahwa pergerakan-pergerakan itu adalah 'anarko-sindikalisme' tak berdisiplin. Para Komunis membela program penyitaan yang dilangsungkan oleh pemerintah seperti sekarang ini. Sukarno sendiri telah bersiap-siap meninggalkan negara untuk sebuah "liburan" di India, tetapi penyerahan perusahaan-perusahaan Belanda kepada pihak militer di bawah instruksi PKI telah menyelamatkan rejim burjuis Sukarno. Para pemimpin Stalinis dalam PKI tidak hanya menyelamatkan pemerintah Sukarno, mereka menimbulkan kondisi yang mengijinkan jendral-jendral militer dan penyokong mereka di AS untuk mempersiapkan kontra-revolusi berdarah mereka delapan tahun setelah itu.

Perspektif para pemimpin PKI adalah teori Stalinis "revolusi dua tahap" \_ yang mengatakan bahwa perjuangan untuk sosialisme di Indonesia harus pertama melalui tahap apa yang dinamakan kapitalisme "demokratis". Perjuangan revolusi massa untuk memperlakukan langkah-langkah sosialis harus ditekan dan kepentingannya dikebawahkan ke sebuah "persatuan" dengan kelas burjuis nasional.

Sejalan dengan perspektif reaksioner ini, birokrasi-birokrasi Stalinis di Uni-Sovyet dan Cina mengelu-elukan Sukarno dan rejimnya di dalam period ini. Sebagai contoh, Krushev mengunjungi Jakarta dan berkata bahwa ia akan memberi Sukarno semua bantuan dalam "segala kemungkinan". Kenyataannya, sebagian besar senjata-senjata yang digunakan dalam pembunuhan massa dalam kudeta 1965 adalah disediakan oleh Kremlin.

## Permulaan Persiapan Militer

Di tahun 1956 tentara Indonesia, dengan sokongan Amerika, sudah memulai persiapan-persiapan untuk diktatur militer untuk menekan pergerakan rakyat. Di bulan Agustus Komandan militer daerah Jawa Barat memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani atas tuduhan-tuduhan korupsi. Di bulan November, Wakil Kepala angkatan bersenjata Kolonel Zulkifli Lubis, mencoba dengan kegagalan untuk menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintahan Sukarno. Bulan berikutnya, ada kudeta militer di daerah Sumatra Tengah dan Utara.

Pada bulan Oktober 1956 Sukarno memperkuat kedudukannya terhadap rakyat dan menenangkan angkatan bersenjata dengan mengimbau partai-partai politik untuk membubarkan diri. Imbauan ini setelah itu diperluas dengan usaha untuk mendirikan Dewan Nasional yang mencakup semua partai, termasuk PKI, untuk mengatur negara. Bilamana para kepala daerah militer menolak rencana ini, dan mengambil-alih kekuasaan provinsi-provinsi mereka, Sukarno mengumumkan keadaan darurat. Akhirnya, kabinet "non-partai" yang baru dibentuk, termasuk dua pengikut PKI.

Sebagai reaksi terhadap pergerakan massa di Desember 1957 itu, operasi imperialisme Amerika segera ditingkatkan. CIA sudah aktif sejak tahun 1940-an, mengeluarkan jutaan dollar untuk menyubsidi elemen-elemen pro-Amerika di dalam kelas burjuis nasional, terutama Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin Sumiro, kolega Hatta, dan sekutu islamnya yang lebih besar, Partai Masyumi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara, dengan siapa Hatta juga mempunyai hubungan dekat.

Sepanjang tahun 1957 dan 1958 serangkaian pemberontakan sesesesionis dan sayap-kanan yang dibantu oleh CIA meletus di pulau Sumatra dan Sulawesi yang kaya minyak bumi, di mana PSI dan Masyumi mempunyai pengaruh dominan. Yang pertama adalah pemberontakan militer Permesta yang mulai di bulan Maret 1957 dan berlangsung sampai ke tahun 1958, yang berakhir dengan percobaan kudeta yang didukung oleh CIA di bulan February 1958.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan yang cukup besar, penasehat-penasehat militer, senjata dan angkatan udara kecil yang terdiri dari pesawat-pesawat pembom B-26, dipiloti dari basis-basis di Taiwan dan Filipina. Menteri Luar Negeri AS bahkan memberikan dukungan secara terbuka untuk pemberontak-pemberontak sayap-kanan ini. Kapal induk dari armada ketujuh Amerika dikirim ke Singapor dan sewaktu itu kelihatannya Amerika bakal campurtangan secara langsung di Sumatra dengan alasan melindungi pegawai-pegawai dan pemilikan-pemilikan Caltex Oil. Komando militer Indonesia akhirnya memutuskan bahwa pemberontakan itu, gagal mendapatkan dukungan massa, harus dihentikan. Pemerintahan Sukarno selamat. Tetapi, angkatan bersenjata menjadi lebih kuat. Selama enam tahun berikutnya, AS menuangkan uang untuk itu, meletakkan fondasi yang mengijinkan Suharto untuk mulai menempuh jalan ke kekuasaan setelah memimpin operasi militer untuk mengambil-alih Irian Jaya di tahun 1962.

Antara tahun 1959 dan tahun 1965 Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam rupa bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di Suara Pemuda Indonesia: "Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43

batalion angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap-kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Pada waktu yang sama, Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin"-nya. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, Islam dan komunisme yang dinamakan NASAKOM. Dalam mengejar front nasional mereka bersama dengan Sukarno dan kelas burjuis nasional, para pemimpin PKI menimbulkan ilusi-ilusi yang sangat berbahaya tentang angkatan bersenjata.

Hanya lima tahun sebelum kekalahan berdarah itu terjadi kepada para pekerja dan petani di tangan angkatan bersenjata, arahan politis PKI dinyatakan oleh kepemimpinan SOBSI, federasi serikat pekerja yang dipimpin oleh PKI, dalam sebuah pernyataan di Hari Buruh Internasional bulan Mei 1960:

"SOBSI menegaskan bahwa angkatan bersenjata Republik masih merupakan anak dari revolusi rakyat...dan dengan itu dari para perwira sampai ke bawahan mereka dan ke tentara-tentara...mereka tidak akan terlibat dengan aksi-aksi yang mengkhianati Republik. Selain itu, presiden Sukarno, yang memihak rakyat, mempunyai pengaruh besar atas pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata dan ia tidak berkehendak menjadi diktator militer."

### **Pergerakan Baru**

Di tahun 1962, perebutan militer Irian Barat oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan perlawanan penduduk Irian Jaya terhadap pendudukan itu. Di Indonesia sendiri, ketegangan ekonomi dan kelas yang mendasar, yang diakibatkan oleh berlanjutnya pemerasan rakyat oleh perusahaan-perusahaan imperialis dan kelas burjuis nasional, muncul kembali.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Dari tahun 1963 terus, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-

pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI D N Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Pada bulan April 1964, dalam interview dengan S M Ali dari "Far Eastern Economic Review" Aidit menetapkan untuk kaum burjuis nasional perspektif Stalinis untuk perubahan yang damai dan berangsur-angsur ke arah sosialisme yang terdiri dari "dua tahap" di Indonesia.

"Bila kita sudah mencapai tahap pertama dari revolusi kita, yang sedang berlangsung sekarang, kita akan bisa mengadakan konsultasi yang damai dengan elemen-elemen progresif lain di masyarakat kita dan tanpa perjuangan bersenjata kita akan membawa negara kita ke revolusi sosialis." Dia memberikan sebuah senario di mana rakyat akan terbatas dalam fungsi mempengaruhi kaum burjuis nasional: "Pengaruh dari tahap sekarang dari revolusi ini akan menetapkan pengaruh revolusioner atas kapitalis-kapitalis nasional Indonesia.

"Tidak akan ada perjuangan bersenjata kecuali bila ada intervensi asing memihak para kapitalis. Dan bila kita berhasil menyelesaikan tahap ini dalam revolusi demokratik nasional kita, kemungkinan satu kekuatan asing bercampur-tangan dalam urusan nasional Indonesia akan menjadi sangat kecil." Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbuu semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbuu semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Dalam sebuah pertemuan Komite Sentral PKI Aidit mendorong penindasan pergerakan para petani itu dan mencela kader partai yang "terbawa oleh semangat untuk menyebar-luaskan pergerakan petani dan menjadi tidak sabar dan melakukan tindakan heroisme individual, tidak berpikir untuk mengembangkan kesadaran para petani dan menginginkan suatu kejadian yang tertentu, tidak berhati-hati dalam memisahkan dan memilih target-target mereka."

Para pemimpin PKI menghalalkan pemberhentian perampasan tanah dan pengembalian ke pemilik-pemiliknya dengan menunjuk kepada "kemungkinan yang akan datang untuk pembentukan "kabinet NASAKOM". Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para tukang jagal militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat

Indonesia, termasuk para komunis". Dengan cara ini, para Stalinis dalam PKI melucuti para pekerja dalam PKI yang paling sadar akan kelasnya. Pengertian dasar Marxis tentang negara sebagai "badan orang-orang bersenjata" yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menjaga kekuasaannya telah disangkal secara kriminal.

Aidit berusaha secepatnya untuk menenangkan kaum burjuis dan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata bahwa PKI menentang mobilisasi revolusioner massa. "Hal yang penting di Indonesia sekarang bukanlah meruntuhkan kekuatan negara seperti halnya di negeri-negeri lain, tetapi memperkuat dan mendalamkan aspek pro-rakyat...dan menyingkirkan aspek anti-rakyat". Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama sebelum kudeta terjadi, PKI, mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.

Mereka bahkan menyembah di depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan mereka bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Sampai akhir, kepemimpinan PKI berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Meskipun di bulan Mei 1965, Politburo PKI masih mendorong ilusi bahwa aparat militer dan negara sedang dirubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara:

"Kekuatan dari aspek-aspek pro-rakyat (dalam aparat negara) sudah bertambah kuat dan mempunyai inisiatif dan ofensif, dan aspek anti-rakyat, walaupun masih cukup kuat, sedang terpojok. PKI berjuang supaya aspek pro-rakyat akan menjadi bertambah kuat dan akan berkuasa dan aspek anti-rakyat akan dikeluarkan dari kekuasaan negara." Kaum buruh Indonesia dan seluruh dunia membayar mahal untuk pengkhianatan Stalinis ini waktu Suharto dan jendral-jendral militer bergerak pada tanggal 30 September 1965.

### BAB KETIGA

#### 1965—Warisan Berdarah Stalinisme

Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan militer TNI yang dilatih oleh AS. Selama tahun 1965 perselisihan-perselisihan antara kelas meningkat. Tahun itu mulai dengan para petani merampas pemilihan para tuan tanah besar dan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan karet dan minyak bumi milik AS melakukan aksi pendudukan. Presiden Sukarno telah memasukkan jendral-



jendral militer, yang dipimpin oleh Jendral Nasution, dan kepemimpinan PKI ke dalam kabinetnya untuk menekan pergerakan ini.

Kepemimpinan PKI berhasil menekan aksi-aksi pendudukan, tetapi pergerakan massa ini menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kemarahan massa berkembang dengan dipenjaranya 23 petani, dengan hukuman antara 15 sampai 20 tahun, atas tuduhan memukul seorang tentara sampai fatal dalam mempertahankan diri mereka terhadap operasi militer untuk menghentikan aksi-aksi perampasan tanah di Sumatra.

Pada malam 30 September 1965, sebuah provokasi yang didalangi CIA dilaksanakan. Sekelompok perwira menengah, yang paling sedikit satu mempunyai koneksi dekat dengan Suharto, menahan dan membunuh komandan angkatan bersenjata Letnan-Jendral Ahmad Yani dan lima jendral tingkat atas yang lain, dan menyatakan pembentukan sebuah Dewan Revolusioner.

Penculikan jendral-jendral ini tidak mencakup dua orang penting. Yang pertama adalah Suharto, yang pada waktu itu adalah komandan Kostrad, yang terdiri dari tentara-tentara elit angkatan darat. Para pemberontak ini, yang dipimpin oleh Letnan-Kolonel Untung tidak berusaha sedikit pun untuk menangkap Suharto atau menyerang pusat komandonya di Jakarta walaupun ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hal ini. Menteri Pertahanan Jendral Nasution, juga tidak dicakup. Dia dikatakan sebagai calon korban pemberontakan ini, tetapi dapat menyelamatkan diri secara ajaib.

Pemberontakan oleh Untung ini adalah palsu. Dalam 24 jam Suharto dapat mengalahkan semua pemberontak ini, hampir tanpa ada peluru melayang, dan mengambil-alih kontrol di Jakarta, dengan dukungan dari Nasution. Di akhir minggu itu, komando yang dibentuk oleh Suharto membersihkan semua kantong-kantong perlawanan, dan melaksanakan pembantaian anti-komunis terbesar di sejarah yang didalangi oleh Kedutaan AS dan CIA. Pentagon dan CIA, yang pada waktu itu sudah terlibat dalam perang rahasia di Vietnam, bertekad untuk menenggelamkan revolusi Indonesia dalam darah.

Diplomat-diplomat AS dan perwira-perwira CIA, dipimpin oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto untuk membasmi setiap anggota dan pendukung PKI yang diketahui.

### **Bencana yang Didalangi CIA**

Dalam mempersiapkan kudeta ini, pejabat-pejabat AS sudah menghabiskan paling sedikit dua tahun untuk membuat daftar-daftar maut ini yang diberikan kepada angkatan bersenjata dengan instruksi yang jelas: bunuhlah semuanya. Anak-buah Suharto diperintahkan untuk melapor kembali setiap sejumlah pembunuhan telah dilaksanakan supaya nama-nama korban mereka dapat dicocokkan dengan nama-nama di daftar-daftar itu. Beberapa perwira-perwira AS yang berikut-serta mengatakan baru-baru ini apa yang terjadi. "Itu adalah bantuan yang besar untuk angkatan bersenjata," kata seorang bekas pejabat bagian politik di Duta Besar AS di Jakarta, Robert Martens. "Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya mungkin punya darah di tangan saya, tetapi itu tidak semuanya jelek."

"Suatu waktu kamu harus memukul keras pada waktu yang tepat."

Martens memimpin pejabat-pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri di kedutaan besar AS, yang dari tahun 1962, menyusun keterangan mendetil tentang siapa saja yang duduk di dalam kepemimpinan PKI. Itu termasuk nama-nama anggota komite-komite PKI di tingkat provinsi, kota dan lokal; dan pemimpin-pemimpin perserikatan-perserikatan kerja yang didukung PKI, dan perserikatan-perserikatan wanita dan pemuda. Operasi ini didalangi oleh bekas direktur CIA William Colby, yang pada waktu itu adalah direktur Divisi Asia Timur CIA, dan dengan itu menjadi bertanggung-jawab atas pengarah strategi rahasia AS di Asia. Colby mengatakan bahwa mencari pengetahuan tentang kepemimpinan PKI menjadi latihan untuk program Phoenix di Vietnam, yang merupakan usaha untuk memusnahkan semua pendukung Front Kemerdekaan Nasional di akhir dekade 1960-an.

Colby mengakui bahwa mengecek nama-nama di daftar-daftar maut itu dianggap sangat penting sampai itu diawasi oleh direktorat intelijen CIA di Washington. "Kita berkesimpulan bahwa dengan perlakuan secara keji seperti itu, PKI telah mengalami kemunduran yang besar." Wakil kepala pos CIA menggambarkan dengan rasa senang yang tak tersembunyi bagaimana markas Suharto di Jakarta memberikan kedutaan besar AS laporan secara berlanjut tentang pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. "Kita mendapatkan laporan yang jelas di Jakarta tentang siapa yang dicakup. Angkatan bersenjata mempunyai 'daftar penembakan' untuk sekitar 4,000 sampai 5,000 orang.

"Mereka tidak punya cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang masih berharga untuk diinterogasi. Rangka dasar organisasi mereka telah runtuh hampir seketika itu. Kita tahu apa yang mereka kerjakan. Kita tahu bahwa mereka akan menyelamatkan beberapa untuk pengadilan pura-pura mereka, tetapi Suharto dan penasehat-penasehatnya berkata bila kamu biarkan mereka hidup kamu harus memberi mereka makan."

Semua ini dijalankan dengan persetujuan Green yang setelah itu dilantik menjadi duta besar AS untuk Australia, di mana ia memainkan peranan penting dalam pembubaran pemerintah Whitlam di tahun 1975. Paling sedikit satu juta orang dibantai dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Ini adalah perkiraan dari sebuah kelompok lulusan Universitas Indonesia yang diperintah oleh angkatan bersenjata itu sendiri untuk menyelidiki kesebar-luasan pembunuhan-pembunuhan ini.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat". Laporan lain mengatakan bahwa di Batu di Jawa Timur banyak sekali yang dibunuh di halaman kecil kantor polisi di sana sampai mayat-mayat itu dikubur di bawah semen.

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35,000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesiannya Sukarno, adalah pelaku pembunuhan-

pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan anti-cina terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk beberapa dozen sejak tahun 1980-an. Baru-baru ini empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyono, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu, tanda jelas bahwa rejim Suharto masih menakuti kebangkitan kaum proletar Indonesia dan petani-petani yang miskin.

### **Pengkhianatan Stalinis mendalam**

Ketika ratusan ribu anggota dan pendukung PKI sedang diburu dan dibinasakan, kepemimpinan PKI dan rekan-rekannya di Kremlin, Beijing dan Partai Komunis Australia (CPA) menganjurkan kader PKI, pekerja dan massa petani untuk tidak melawan, memberikan lampu hijau untuk jendral-jendral militer untuk melakukan eksekusi massa itu.

Para Stalinis mendalamkan posisi reaksioner mereka yang meminta rakyat untukengebawahkan kepentingan mereka untuk kaum burjuis nasional dan Sukarno, yang digunakan oleh Suharto sebagai presiden boneka dan untuk angkatan bersenjata. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune":

"Setelah mempelajari seruan ke Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia, dari pemimpin revolusi Indonesia, presiden Sukarno, Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk seruan itu dan memohon kepada semua komite dan anggota partai dan para pendukung, juga organisasi-organisasi revolusioner massa yang dipimpin oleh anggota-anggota PKI untuk memungkinkan pelaksanaan seruan itu."

Sementara itu, Sukarno, "pemimpin revolusi Indonesia", sedang bekerjasama dengan penindasan militer itu berharap untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Dia memerintahkan pembasmian menyeluruh semua yang dianggap terlibat dalam "peristiwa 30 September" (percobaan kudeta yang dituduhkan dipimpin oleh Kolonel Untung), dan mengizinkan pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. Pada tanggal 15 Oktober ia melantik Suharto sebagai Panglima angkatan bersenjata.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dihukum mati oleh angkatan bersenjata pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto. Dalam sebuah interview dengan seorang koresponden koran Jepang dia menekankan:

"PKI hanya mengenal satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu pemimpin besar revolusi kita - Presiden Sukarno...Presiden Sukarno menyatukan semua kekuatan-kekuatan rakyat yang akan memutuskan nasib Indonesia." Semua anggota, kata Nyoto, harus "mendukung penuh perintah-perintah Presiden Sukarno dan berjanji untuk melaksanakan semua itu tanpa ragu...Partai kita berusaha dalam segala kemampuannya untuk mencegah perang saudara."

Dalam kata-kata lain, sementara tukang-tukang jagal militer dan penasehat-penasehat CIA mereka sedang melakukan likuidasi sistematis bukan saja pemimpin-pemimpin PKI, tetapi juga seksi-seksi masyarakat Indonesia yang paling sadar-kelas, PKI memerintahkan kader mereka untuk tidak melawan. Kebangkrutan dan kebusukan teori "dua-tahap" Stalinis yang bersikeras bahwa rakyat harus mengikat nasib mereka ke Sukarno dan kaum burjuis nasional tidak dapat ditunjukkan secara lebih jelas.

Pengkhianatan oleh PKI dipuji dan didukung oleh birokrasi-birokrasi Stalinis di Moskow dan Beijing. Kremlin menyalahkan elemen-elemen "pemberontak" dan "petualang" dalam PKI untuk kekalahan ini dan mengimbau berulang-ulang untuk "persatuan" revolusi Indonesia dalam NASAKOM-nya Sukarno. Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno:"Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."

Dalam sebuah Konperensi Tiga Benua di Havana di bulan February 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan teror kontra-revolusi yang sedang terjadi terhadap rakyat

Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralsir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Demikian, pengkhianatan para Stalinis adalah sangat jelas sampai parlemen piaraan junta militer ini dapat mengatakan bahwa kejadian yang diatur oleh CIA pada tanggal 30 September adalah percobaan kontra-revolusioner! Para Stalinis di Beijing juga mencuci tangan mereka dari nasib rakyat Indonesia. Mereka bahkan datang ke Jakarta untuk Konperensi Dunia melawan Pangkalan-Pangkalan Asing dan berdiri tanpa protes waktu kamerad-kamerad mereka dari Indonesia sedang dicakup di dalam ruang konperensi itu.

### **Warisan 'Blok Empat Kelas'**

Pengkhianatan Stalinis di tahun 1965 adalah puncak dari lebih dari duapuluh tahun pengkhianatan di mana PKI, bekerja berdasarkan teori Stalinis "dua-tahap" dan, khususnya, ideologi Maois "blok empat kelas", mengikat kelas pekerja dan para petani ke rejim burjuis nasionalis Sukarno. Aidit mengatakan susunan ideologi kekalahan berdarah revolusi Indonesia tidak lama setelah kembalinya dari 18 bulan di Cina di Juli 1950 dan merebut kepemimpinan PKI: "Kelas pekerja, para petani, kelas menengah dan kelas burjuis nasional harus bersatu dalam sebuah front nasional."

Aidit mengikuti dengan patuh jalan rejim Maois di Cina yang menindas pergerakan mandiri kelas pekerja dan berusaha untuk mendirikan sebuah "Demokrasi Baru", sebuah negara burjuis, dalam kerjasama dengan bagian-bagian dari kelas burjuis nasional dan kelas petit burjuis setelah runtuhnya diktatur Chiang Kai-Shek. Membeokan Mao, dia menyerukan untuk sebuah "demokrasi rakyat" dan sebuah "front gabungan semua elemen-elemen anti-imperialis dan anti-feodal dalam negeri. Yaitu, kaum pekerja, para petani, kaum petit-burjuis dan kaum burjuis nasional."

Sesuai dengan teori kontra-revolusioner "dua-tahap" Stalinisme, "Tugas dari persekutuan ini adalah untuk membawa keadaan untuk, bukan sosialisme, tetapi perubahan ke arah demokrasi." Aidit memminta para pekerja dan petani mendukung bukan hanya kelas burjuis nasional, tetapi juga "semua elemen patriotik dan anti-kolonial termasuk kelompok tuan-tanah sayap kiri (agak progresif).

Jurusan inilah, yang dikatakan oleh Aidit tanpa henti, yang digunakan untuk menekan pergerakan-pergerakan kaum pekerja dan para petani, mengikat kaum pekerja ke rejim Sukarno, dan menciptakan keadaan yang mengijinkan angkatan bersenjata untuk menyerang. Berkali-kali anggota-anggota dan para pendukung PKI diperintahkan untuk menahan perjuangan kelas dan semangat revolusi rakyat yang tertindas untuk mempertahankan "front bersatu nasional".

"Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional adalah membawahkan kepentingan rakyat untuk perjuangan nasional." Teori "dua-tahap"

Stalinisme bersikeras bahwa di negara-negara koloni dan semi-koloni seperti Indonesia, rakyat tidak boleh mengadakan pergerakan-pergerakan yang mengancam kelas burjuis nasional atau mengemukakan program revolusi sosialis. Perjuangan kelas harus ditahan untuk mendukung kelas burjuis nasional dan mendirikan sebuah demokrasi kapitalis nasional.

Akibat kontra-revolusi berdarah dari arahan Stalinis ini menunjukkan diri pertama kali di Cina di tahun 1926-27 ketika tukang jagal Chiang Kai-Shek menundukkan kelas pekerja di Cina setelah Partai Komunis di sana diberi perintah oleh Kremlin untuk menggabungkan diri dengan kaum burjuis nasionalis dalam Kuomintang. Pembunuhan-pembunuhan besar yang dilakukan oleh Chiang Kai-Shek menegaskan peringatan-peringatan Trotsky bahwa kaum-kaum burjuis yang lemah dan yang munculnya terlambat dalam sejarah, pada dasarnya tidak dapat untuk melancarkan perjuangan konsisten terhadap imperialisme dan feodalisme. Itu karena untuk melakukan perjuangan itu diperlukanlah penggerakan rakyat dalam sebuah perjuangan revolusioner dan perjuangan seperti itu akan segera menjadi berlawanan dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras kaum pekerja dan petani.

Seperti Trotsky jelaskan dalam tulisannya tentang pengkhianatan Revolusi Cina:

Penggerakan kaum pekerja dan petani terhadap imperialisme hanya dapat dicapai dengan menghubungkan isu-isu dasar dalam kehidupan mereka dengan tujuan kemerdekaan negara. Sebuah aksi mogok pekerja - besar atau kecil - sebuah pemberontakan agraris, pergerakan para rakyat tertindas di kota dan desa terhadap para lintah-darat, terhadap birokrasi, terhadap militer lokal, semua itu membangkitkan banyak hal, yang menghalang mereka bersama, yang mendidik, menguatkan, adalah merupakan sebuah langkah maju yang nyata di jalan ke pembebasan sosial dan revolusioner untuk rakyat Cina...Tetapi segala yang membuat rakyat yang tertindas dan tereksplotasi bertindak akan pasti akan mendorong kaum burjuis nasional ke dalam blok dengan para imperialis. Bentrokan kelas antara kaum burjuis dan para pekerja dan petani tidak akan diperlemah, tetapi sebaliknya akan diperkuat oleh penidasan imperialis, sampai ke perang saudara pada setiap ketegangan serius. (Trotsky, *Problems of the Chinese Revolution*, New Park 1969 p5).

Peranan kriminal PKI dalam mengikat rakyat Indonesia ke rejim burjuis Sukarno membuat analisa Trotsky bersifat ramalan secara tragis. Tugas-tugas untuk mengadakan kemerdekaan nasional yang sejati, pembagian kembali tanah, demokrasi dan perkembangan ekonomi yang tak terselesaikan di Indonesia dan negeri-negeri lain yang tertindas menurut sejarah, hanya dapat dilaksanakan dengan kelas pekerja memimpin para petani dalam revolusi sosialis. Yaitu, penentuan nasib sendiri hanya akan terjadi sebagai hasil tambahan dari revolusi sosialis yang dipimpin oleh kaum proletar.

Kemenangan perjuangan ini terikat erat dengan perkembangan revolusi sosialis dunia untuk menggulingkan imperialisme sedunia. Ini adalah dasar dari teori Marxis Revolusi Permanen yang dikembangkan oleh Leon Trotsky dan dibuktikan oleh kemenangan Revolusi Rusia Oktober 1917.

## BAB KEEMPAT

### Antek-Antek Kontra Revolusi Pablois

Dalam bulan-bulan setelah kudeta militer yang diatur oleh CIA tanggal 1-2 Oktober 1965, semua anggota dan pendukung PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk disiksa dan diinterogasi. Pemusnahan sistematis dan penindasan yang kejam oposisi kelas buruh ini semakin bertambah setelah 11 Maret 1966 waktu Sukarno, pemimpin nasionalis burjuis yang dipertahankan oleh aparat militer sebagai presiden, memberi Jendral Suharto kekuasaan tak terbatas.

Pengkhianatan pergerakan besar revolusioner rakyat Indonesia oleh kepemimpinan Stalinis PKI adalah sebuah kekalahan yang mendalam dengan implikasi-implikasi besar untuk kelas pekerja seluruh dunia. PKI berkali-kali menahan usaha-usaha para pekerja dan petani untuk menduduki pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan. Mereka mengikat pergerakan ini dengan rejim burjuis Sukarno dan pada akhirnya bergabung dengan aparat-aparat tingkat atas militer yang didukung AS, calon-calon tukang jagal massa, dalam kabinet Sukarno. Setelah kudeta itu, para Stalinis memerintah kader mereka untuk menjalankan imbauan Sukarno untuk menciptakan "persatuan" dengan para aparat militer dan untuk mencegah segala perlawanan terhadap pembantaian yang sedang dilaksanakan. Pukulan terhadap revolusi Indonesia bergema di seluruh Asia dan dunia. Khususnya itu memudahkan dan memungkinkan peningkatan penyerangan Vietnam oleh AS, menghancurkan harapan dan semangat revolusi rakyat di Malaysia, Thailand, Filipina dan memperkuat rejim-rejim burjuis yang sedang goyah di anak benua India.

### Mandel dan Hansen menutupi pengkhianatan Stalinis

Tetapi jawaban para revisionis Pablois dalam "Sekretariat Tergabung" (United Secretariat) yang dipimpin oleh Ernest Mandel dan Joseph Hansen, adalah untuk meremehkan akibat dari pengkhianatan di Indonesia itu, menutupi peran kontra-revolusioner para Stalinis dan, yang terpenting, menutupi tanggung-jawab mereka sendiri dalam pertumpahan darah ini.

Pada saat rakyat Indonesia sedang mengalami pembunuhan massa, Profesor Mandel berusaha untuk menggambarkan prospek-prospek yang cerah untuk revolusi Indonesia, untuk menumpulkan kesadaran kelas pekerja internasional. "Tentu saja perjuangan di Indonesia masih belum berhenti," tulisnya di dalam keenakkan kursi universitas Belgia-nya dalam artikel yang dicetak dalam jurnal Pablois "World Outlook" tanggal 11 Maret 1966.

"Sebagian dari kader komunis telah berhasil bersembunyi di bawah-tanah," dia teruskan. "Kemarahan rakyat yang kelaparan tumbuh setiap hari; perut-perut para pekerja dan petani yang kosong tidak akan terisi oleh pembunuhan-pembunuhan itu. Pemberontakan itu akan menyebar-luas melawan rejim yang korup itu. Sukarno mengerti masalah ini dan akan memulai pengimbangannya lagi; dia baru saja membasmi jendral-jendral yang paling ganas dari kabinetnya. Para rakyat akan kembali mendapat giliran mereka untuk beraksi."

Penutupan pengkhianatan besar rakyat Indonesia ini menunjukkan konsekuensi kontra-revolusioner oportunisme Pablois, yang muncul dalam jajaran gerakan Trotskyis mulai dari tahun-tahun 1940-an ke 1950-an. Dipimpin oleh Michel Pablo, elemen-elemen seperti Mandel berusaha menyesuaikan diri dengan stabilisasi kapitalisme setelah Perang Dunia Kedua dan keadaan dimana birokrasi-birokrasi Stalinis yang menekan pergerakan revolusioner kaum pekerja internasional tidak lama setelah akhir Perang Dunia Kedua, kelihatannya makin kuat. Mereka meninggalkan perjuangan Trotsky untuk mendirikan Internasional Keempat sebagai partai dunia revolusi sosialis dan mengajukan bahwa para birokrasi Stalinis seperti di Moskow dan Beijing akan didorong oleh rakyat untuk melakukan peranan progresif. Dengan dasar ini, mereka berusaha melikuidasi Internasional Keempat ke dalam segala bentuk Stalinis atau Demokrat sosial yang sedang memegang kendali pergerakan pekerja dalam tiap negara, mengatakan bahwa jalan ke sosialisme terdiri dari pendirian dari negara-negara pekerja yang cacat sejak lahir, seperti yang didirikan di Eropa Timur dan Cina, yang berlangsung selama beberapa abad.

Pada tahun 1953 arah likuidasi ini dilawan dengan pembentukan Komite Internasional Internasional Keempat (International Committee of the Fourth International) sebagai jawaban kepada sebuah Surat Terbuka yang ditulis oleh pemimpin Partai Pekerja Sosialis (Socialist Workers Party) Amerika James P Cannon yang memanggil untuk pemertahanan "Trotskyisme ortodox". Bagaimanapun juga, pada permulaan tahun 1960-an para pemimpin PPS sendiri mulai terpengaruh oleh berkepanjangannya pertumbuhan ekonomi setelah perang. Mereka menganjurkan elemen-elemen burjuis dan petit-burjuis nasional seperti Castro di Kuba yang kelihatannya dapat meraih sukses, sebagai pengganti pengambilan kekuasaan oleh kelas pekerja yang dipimpin oleh partai-partai Marxis revolusioner. Mereka mengajukan bahwa sosialisme dapat dicapai dengan "senjata tumpul". Ini adalah arah yang menyatukan mereka kembali dengan para Pablois di tahun 1963 yang menjadi "Sekretariat Tergabung".

Dasar dari penolakan para Pablois kepada revolusi kaum proletar adalah metoda obyektifis yang bersifat reaksioner yng menggambarkan perjuangan sosialisme sebagai "proses sejarah" quasi-otomatis yang dicapai dengan pergerakan massa spontan yang dipimpin oleh pergerakan politik apa saja, tidak penting apa program dan komposisi kelasnya.

Dengan begitu "rakyat" Indonesia akan menang bagaimanapun buruknya krisis pimpinan yang telah diakibatkan oleh kebusukan partai Stalinis itu. Sukarno, yang diperalat oleh Jendral Suharto tanpa perlawanan, dianggap telah mengontrol jendral-jendral yang paling ganas. Dan setelah pengkhianatan yang tak tertanding itu, Mandel masih memanggil PKI partai "komunis".

Penipuan oleh Mandel ini disahkan oleh "Sekretariat Tergabung" dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1966. Pernyataan itu menyimpulkan bahwa kenaikan Suharto sebagai "orang kuat" dari gerakan kontra-revolusi tidak berarti banyak, karena "Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil bahwa para kontra-revolusionis yang berkuasa di Jakarta sekarang akan dapat menciptakan kestabilan yang dapat tahan lama." Duapuluh lima tahun setelah itu, dengan junta militer Suharto masih duduk tanpa kasihan di atas punggung jutaan rakyat Indonesia



yang tertindas, itu sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana para oportunis Pablois memberikan PKI dan Sukarno kerudung politik yang sangat mereka perlukan.

Pernyataan "Sekretariat Tergabung" itu menciptakan ilusi yang berbahaya yang mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh dibawah Suharto pun, yang dilatih oleh AS, akan terdorong untuk melaksanakan kepentingan rakyat Indonesia dalam "konfrontasi" palsu Sukarno dengan Malaysia, negara yang pada saat itu baru dibentuk: "Para pemimpin militer sendiri tidak akan menanggalkan ke-anti-imperialisme-an dan ke-nasionalis-an mereka yang menunjukkan konflik kepentingan yang nyata dengan imperialisme Inggris dan kaum burjuis komprador dan tuan tanah semi-feodal yang berkuasa di Malaysia.

Ketika rakyat Indonesia tidak punya pemimpin dalam menghadapi penjagalan keji Suharto, para Pablois menyatakan dengan angkuh bahwa entah bagaimana rakyat akan menang. "Rakyat, walaupun tanpa pemimpin dan tergoncang secara mendalam, belum kehilangan semua potensi perlawanan, khususnya di desa-desa. Mengusir para pemogok dari perkebunan-perkebunan milik imperialis atau yang sudah "dinasionalisasi" dan dijalankan oleh perwira-perwira militer yang korup, atau memaksa para pekerja perusahaan minyak bumi dan perkebunan untuk menerima kembali kondisi kerja jaman kolonial akan terbukti sulit terjadi." Yang terpenting, para Pablois terus bersikeras bahwa rakyat harus percaya kepada para pemimpin Stalinis PKI, mengajukan bahwa mereka dapat dipengaruhi untuk memainkan peranan revolusioner, meskipun mereka sudah menahan setiap pergerakan massa terhadap rejim Sukarno.

"Jika mereka berhasil bergabung kembali dan mendapat kembali dukungan massa di beberapa daerah pedesaan dengan mengimbuai para petani untuk segera menyita tanah milik para tuan-tanah, perkebunan dan administrasi militer, mereka dapat mencapai keuntungan secara bertahap karena ketidak-mampuan dari reaksi Indonesia untuk memecahkan nasib ekonomi dasar negara dan karena perselisihan dalam jajaran angkatan bersenjata yang tanpa ragu akan dibangkitkan oleh ketidak-mampuan itu."

Di tahun 1957, dan sekali lagi di tahun 1964-65, PKI telah mengarahkan para pekerja dan petani untuk menyerahkan pabrik-pabrik, bank-bank, instalasi-instalasi minyak, perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan lain yang mereka duduki, yang membantu kedudukan Sukarno dan kaum burjuis Indonesia. Sekarang, para Pablois mengatakan bahwa mereka dapat memainkan peranan progresif.

Artikel Mandel dan pernyataan "Sekretariat Tergabung" dicetak bersama dengan artikel oleh seorang anggota PKI Pablois, oleh Partai Pekerja Sosialis AS dalam sebuah pamflet bernama "Bencana di Indonesia" tertanggal Desember 1966. Lengkap dengan sebuah kata awal oleh Joseph Hansen, seorang pemimpin PPS yang memainkan peranan busuk dalam pergabungan kembali dengan para Pablois. Hansen, yang setelah itu diungkapkan sebagai agen Stalinis yang menjadi alat FBI dalam PPS, merupakan penghasut utama dalam perpecahan PPS dari KIIK di tahun 1963. Hansen berusaha untuk menenangkan para pembaca pamflet ini bahwa "salah satu ciri politik dunia sekarang" adalah "kecepatan rakyat untuk dapat memulihkan

diri dari kekalahan-kekalahan yang dulunya akan membuat mereka tunduk selama puluhan tahun."

Ketidakperdulian para Pablois kepada nasib rakyat Indonesia bukan hanya hasil dari ketebalan kulit dan sikap merendahkan kelas pekerja mereka, yang merupakan ciri-ciri golongan petit-burjuis, tetapi juga merupakan usaha mereka untuk menutupi faktor kritis dalam pengkhianatan di Indonesia - peranan yang dimainkan oleh para Pablois dan wakil-wakil mereka di Indonesia sendiri.

Itu adalah ukuran dari sinisme para Pablois dan sikap tunduk mereka kepada para Stalinis dan kaum burjuis nasional bahwa tidak satupun dari artikel-artikel dan pernyataan-pernyataan yang dicetak dalam pamflet mereka di tahun 1966 menyebut keberadaan sebuah badan anggota dari "Sekretariat Terpadu" di Indonesia, apalagi menerangkan peranan badan itu dalam kejadian-kejadian sebelum kudeta.

Hanya ada satu pernyataan pendek untuk pelegalisasian dan pembebasan semua anggota PKI, Partai Murba dan Partai Acoma, meskipun Partai Acoma mempunyai hubungan dengan para Pablois sedikitnya mulai tahun 1953 dan disahkan sebagai seksi "Sekretariat Terpadu" di tahun 1960, ketika PPS Amerika sedang meningkatkan manuver-manuver tak berprinsip mereka untuk bergabung kembali dengan para Pablois. Penyebutan pendek tentang anggota-anggota mereka ini adalah pernyataan bersalah oleh para Pablois untuk menyembunyikan peranan yang mereka dan anak-anak didik mereka mainkan dalam memberi Stalinis-Stalinis PKI kepercayaan yang sangat mereka perlukan di tahun-tahun 1950an dan 1960an.

### **Bagaimana Munculnya Pabloisme di Indonesia**

Partai Acoma berasal sebagai pecahan dari PKI di tahun 1948. Dengan memanggil diri mereka Trotsyis tanpa kebenaran, mereka menjadi pengalih dan pengebak oposisi kelas pekerja dan para petani terhadap dukungan yang diberikan PKI untuk rejim burjuis nasional Sukarno. Dipimpin oleh seorang anggota parlemen bernama Ibnu Parna, dokumen-dokumen program mereka menggambarkan PKI sebagai sebuah partai "Marxis-Leninis seperti kita." Sebagai kita akan tunjukkan, ini adalah sebuah kebohongan dalam hal PKI dan Partai Acoma. Kebutuhan atas sebuah katup pengaman "Trotskyis" palsu seperti itu, ditunjukkan oleh kejadian-kejadian di tahun 1948.

Keterlibatan PKI di dalam administrasi Sukarno setelah akhir Perang Dunia Kedua dan dukungan mereka untuk perjanjian-perjanjian busuk kaum burjuis Indonesia dan para kolonialis Belanda menimbulkan oposisi kuat di kalangan kelas pekerja.

Dari 5 Juli 1947 sampai 23 Januari 1948 administrasi Republik di bawah Sukarno dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang berjabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Syarifuddin adalah anggota rahasia PKI, juga Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Tambahan pula, dua menteri lain adalah anggota PKI secara terbuka. Administrasi ini menandatangani Perjanjian Renville dengan Belanda yang menetapkan kekuasaan Belanda atas sebagian besar dari industri gula, karet, kopi, teh dan minyak bumi; menentukan pengunduran semua kesatuan-kesatuan perang gerilya dari semua daerah yang dikuasai Belanda dan melikuidasikan

kesatuan-kesatuan rakyat bersenjata yang dipimpin PKI ke dalam ABRI yang di bawah Sukarno dan jendral-jendralnya.

Begitu kuatnya oposisi terhadap penandatanganan pakta yang diadakan oleh AS ini sampai pemerintah turun dan diganti oleh pemerintahan sayap-kanan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta sebagai Perdana Menteri. Aksi-aksi pemogokan meletus, menuntut pemerintahan parlemen. Kepemimpinan PKI mendukung penekanan pergerakan ini oleh Sukarno, yang mengimbau untuk pengadaan "kesatuan nasional". Ketika pengkhianatan ini dilawan oleh sebuah bagian PKI, pemimpin-pemimpin PKI menjawab dengan kejam, mengeksekusi pemimpin-pemimpin dari faksi oposisi ini.

Partai Acoma muncul dari grup yang menentang ini. Walaupun mereka tidak menyetujui tindakan kepemimpinan PKI, Partai Acoma tetap berpendapat bahwa revolusi Indonesia harus dilakukan oleh PKI sebagai sebuah "partai Marxis-Leninis". Selanjutnya pemimpin-pemimpin Partai Acoma menjalin hubungan dengan "Sekretariat Terpadu" yang mendorong posisi pro-Stalinis dan ilusi-ilusi tentang Maoisme mereka. Itu jelas bahwa Partai Acoma mengarahkan para pekerja dan petani yang mencari jalan lain ke program kolaborasi antar-kelas PKI.

Dari tahun 1953 sampai 1955 misalnya, kekuatan pengaruh Acoma dalam SAKTI, Asosiasi Petani Indonesia yang beranggotakan 200,000 orang, membuat kepemimpinan PKI menunda sampai dua tahun rencana mereka untuk menggabungkan SAKTI dengan dua organisasi petani lainnya yang di bawah pengaruh PKI, RTI dan BTI.

### **Para Pablois mempersiapkan pengkhianatan**

Sebuah artikel yang dicetak bulan Februari 1958 dalam jurnal Pablois "Quatrieme International" mengajukan sebuah tuduhan yang jelas atas peranan yang dimainkan oleh Pabloisme dalam melawan perjuangan untuk sebuah kepemimpinan Marxis Revolusioner dalam kelas pekerja. Artikel itu, "Revolusi Indonesia Bergerak Maju", oleh Sal Santen, seorang kolega dekat Pablo, ditulis pada puncak pergerakan-pergerakan revolusi di bulan Desember 1957, ketika para pekerja dan petani merampas perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan negara imperialis lainnya.

Artikel itu merupakan kerudung kriminal untuk peranan-peranan kontra-revolusioner PKI, yang memerintahkan rakyat untuk mengembalikan rampasan-rampasan mereka kepada angkatan bersenjata untuk mendukung pemerintahan Sukarno. Menurut Santen: "Itu mesti ditambahkan bahwa para pejuang komunis, kader dasar dan biasa PKI dan SOBSI, organisasi besar pekerja Indonesia, tidak memiliki sifat birokratis Aidit dan kawan-kawan. Mereka ada di garis depan; mereka adalah yang mengambil alih inisiatif dalam menduduki pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank dan kapal-kapal laut. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang paling sadar-kelas antara mereka terbakar oleh api keberanian revolusioner Tan Malaka, oleh ide-ide revolusi permanen Leon Trotsky."

Bertindak menurut arah ini, para Pablois Indonesia melucuti secara politis puluhan ribu pekerja dan petani yang bergerak maju untuk berjuang, hanya untuk menyadari

bahwa jalan mereka dilintangi oleh PKI. Pada saat di mana tugas yang paling penting adalah mendidik para pekerja yang paling sadar-kelas dalam pentingnya sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan teori "dua tahap" dan "blok empat kelas" Stalini PKI, dan pentingnya sebuah penguatan mendalam teori Revolusi Permanen, para Pablois bekerja sebaliknya.

Oportunis secara mendalam, mereka menyamakan Trotsky dengan Tan Malakka, pemimpin PKI yang menentang rencana untuk sebuah pemberontakan di tahun 1926 dan meninggalkan PKI untuk mendirikan organisasinya sendiri. Mereka memalsukan teori Revolusi Permanen Marxis, merubah itu dari sebuah strategi sadar untuk memandu perjuangan-perjuangan untuk diktatur kaum proletar menjadi sebuah perspektif yang terjadi secara spontan.

Ajaran utama teori Revolusi Permanen Trotsky adalah kekhianatan kaum burjuis nasional dan ketidak-mampuannya untuk memimpin perjuangan sejati melawan imperialisme. Hanya kelas pekerja lah yang dapat membebaskan rakyat dari penekanan atas kelasnya dan penekanan nasional, dengan mengadakan revolusi sosialis dan menyatukan diri mereka dengan saudara-saudara sekelas di seluruh dunia dalam sebuah perjuangan untuk menggulingkan imperialisme secara internasional.

Perjuangan itu hanya dapat dilakukan secara sadar di bawah panji-panji Internasional Keempat dalam sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan para Stalini dan kekuatan-kekuatan petit-burjuis, seperti para Pablois, yang mencoba melucuti kelas pekerja secara politis dan mengikat kepada kaum burjuis mereka. Di tangan para Pablois, program Revolusi Permanen menjadi alasan untuk penyesuaian diri mereka kepada kaum burjuis nasional dan para Stalini. Kelas pekerja tidak memerlukan partai revolusioner mereka sendiri untuk mengambil-alih kekuasaan karena PKI sedang merupakan instrumen melalui apa Revolusi Permanen itu sedang dinyatakan, walaupun secara tidak sadar.

Dengan demikian, Santen, berbicara untuk Pablo dan Mandel, menyatakan: "Bagaimanapun juga itu adalah jelas bahwa Indonesia secara menyeluruh sedang bergerak. Pergerakan rakyat sudah tidak bisa dimundurkan -- walaupun proses itu tetap bertentangan -- dan sudah mencapai tahap kekuasaan rangkap di sebagian besar Indonesia, terutama di Jawa. Pendudukan perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan, armada dan bank-bank oleh rakyat hanya berarti satu: Itu adalah tentang permulaan klasik revolusi proletar. Revolusi Indonesia sedang dalam proses membobol batas-batas revolusi nasional di bawah pimpinan kaum burjuis nasional. Itu berkembang menurut hukum-hukum revolusi permanen." (Tekanan di dalam dokumen asli). Para Pablois mengulurkan prospek sebuah perubahan secara damai ke "kekuasaan pekerja dan petani":

"Sebuah kemenangan yang damai dan cepat revolusi itu ke kekuasaan pekerja dan petani (terutama di Jawa) dapat dicapai, bila PKI, pada saat pertama terdorong semangat rakyat, tidak berusaha mengebiri aksi rakyat dengan meletakkannya di bawah kontrol pemerintah." Apa yang dimaksudkan oleh para Pablois dengan "kekuasaan pekerja dan petani" adalah bertentangan dengan perjuangan untuk diktatur kaum proletar. Para Pablois berjajar sebagai penyorak untuk perspektif

kontra-revolusioner Stalinis "dua-tahap" yang menuntut kaum proletar untuk menghentikan perjuangan untuk revolusi sosialis.

Untuk menghalalkan pertentangan mereka terhadap penggerakan mandiri kelas pekerja dan penempatan sebuah kepemimpinan revolusioner proletar, yaitu, partai Trotskyis, para Pablois bersikeras bahwa PKI, meskipun sudah mengkhianati aksi-aksi pendudukan di bulan Desember 1957, akan terdorong ke kiri oleh rakyat: "Pada saat yang sama, pada setiap perkembangan situasi, rakyat mempunyai kecenderungan untuk mendorong SOBSI dan PKI lebih jauh. Banyaklah yang sekarang tergantung pada keberanian, pada pengertian Marxis revolusioner, kader-kader Komunis. Kita merasa solider sepenuhnya dengan mereka, terilhami dan terantusias oleh inisiatif mereka, keberanian mereka yang -- kita harap dengan penuh semangat -- tidak akan berhenti karena tabu-tabu para Aidit. Kita memberi hormat untuk kader-kader Trotskyis Indonesia yang bergabung ke dalam PKI dengan perspektif revolusioner yang benar bahwa radikalasi rakyat akan terjadi terutama melalui PKI dan SOBSI." Ini adalah kejahatan terbesar Pabloisme -- pelikuidasian kader Trotskyis, dan semua yang tertarik ke Trotskyisme, ke dalam kamp Stalinisme.

Santen menambahkan sebuah catatan untuk menekankan bahwa sikap khianat ini dinyatakan dalam pertentangan secara langsung terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Komite Sedunia Internasional Keempat sejak pembentukannya di tahun 1953 untuk mempertahankan Trotskyisme terhadap likuidasionisme Pablois. Santen secara khusus mencela perjuangan KSIK untuk pendirian badan-badan bagian Internasional Keempat untuk mengalahkan Stalinisme kontra-revolusioner: "Bertentangan dengan beberapa orang 'ortodoks' yang picik, Internasional ini tidak membiarkan dirinya untuk terpesona oleh politik reaksioner Stalinisme, tetapi mengarahkan dirinya, terutama ke dinamisme situasi itu sendiri, sebuah dinamisme yang mendorong rakyat dan melalui rakyat, PKI sendiri ke dalam pertentangan dengan keadaan di Indonesia saat ini."

Kata-kata ini perlu dicapkan di pikiran setiap pekerja sebagai ringkasan dari pekerjaan licik pro-Stalinis Pabloisme. Dalam pertentangan langsung dengan KSIK, para Pablois secara sadar mendorong ilusi-ilusi fatal dalam Stalinis-Stalinis PKI, tepat pada saat di mana masalah yang sangat penting saat itu adalah untuk membeberkan peranan kriminal para Stalinis dan berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan rakyat secara mantap dari PKI untuk mendirikan sebuah kepemimpinan Trotskyis revolusioner.

Perjuangan yang berkepanjangan dan yang berkeras Komite Internasional Keempat (International Committee of the Fourth International) melawan para oportunis Pablois, yang bertahun-tahun tampak sebagai perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil terpencil dalam Internasional Keempat, menjadi masalah hidup mati untuk jutaan buruh dan petani Indonesia.

### **Pembantu-pembantu kontra-revolusioner**

Dalam waktu beberapa minggu dari penulisan kata-kata Santen, buah-buah busuk dari pengkhianatan PKI atas pergerakan di bulan Desember 1957 mulai muncul. Sebuah pemerintah kontra-revolusioner dibentuk di Sumatra Tengah di bulan

Februari 1958 oleh pemimpin kudeta Kolonel Achmed Hussein dan dipimpin oleh Dr Syafruddin Prawiranegara. Operasi yang didukung CIA ini, yang dimungkinkan oleh pengebirian pergerakan Desember 1957 oleh PKI, merupakan percobaan untuk kudeta yang akan terjadi tujuh tahun setelah itu.

Mengerti bahwa ini adalah percobaan untuk kontra-revolusi, tanggapan para Pablois adalah untuk menambah pembesaran mereka atas PKI. Editor *Quatrieme Internationale* menambahkan sebuah catatan yang ber klimaks dengan kata-kata ungu berikut:

Karena tujuan utama para 'pemberontak' adalah untuk menghancurkan 'demokrasi' terpimpin Sukarno, dalam mana PKI termasuk, maka kompromi akan merugikan PKI. Dalam kasus ini, arahan jangka-pendek adalah PKI di bawah tekanan rakyat, akan terpaksa melakukan pemutaran-balik politik besar, seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina dalam situasi yang mirip di tahun 1949, dan untuk melewati tahap nasionalis-burjuis dan langsung ke tahap sosialis kekuasaan pekerja. Ini, sesungguhnya, tetapi sekali lagi tanpa pemberitahuan, bergerak menurut dan membuktikan teori revolusi permanen Trotskyis."

Di situ, PKI, tukang gantung revolusi Indonesia digambarkan sebagai instrumen tak sadar Revolusi Permanen! Ditambahkan di situ, adalah kebohongan bahwa para Stalinis Cina, guru Aidit dan pemimpin PKI yang lain, telah melakukan "tahap sosialis dari kekuasaan pekerja" di tahun 1949. Kenyataannya tentara-tentara petani para Maois menekan secara brutal pergerakan proletar di tahun 1949, membunuh semua oposisi Trotskyis, dan mendirikan sebuah negara pekerja yang cacat sejak lahir yang berdasarkan atas perspektif Stalinis pengadaan kerjasama dengan kaum burjuis nasional, kaum petit-burjuis urban dan para petani. Ini adalah model yang merupakan dasar bagi kepemimpinan PKI sendiri.

Tidak puas dengan menganjurkan para Stalinis, catatan spesial editor itu kemudian menunjukkan kemungkinan kelas burjuis-nasional merubah diri secara progresif juga. Itu mengusulkan senario lain yang berdasarkan atas pemerintah Sukarno memimpin perjuangan melawan "pemberontak-pemberontak" yang diatur oleh CIA.

Dalam kemungkinan lainnya dimana pemerintah Sukarno memberikan perlawanan dan pertahanan yang lebih kuat terhadap 'para pemberontak', pemisahan yang lebih jauh antara kekuatan-kekuatan burjuis dan kontra-revolusioner semi-feodal akan tampak; menghadapi sebuah pemerintah bayangan nasionalis-burjuis dan rakyat. Konfrontasi antara rakyat dan pemberontakan 'pemilik budak' baru ini, 'Kornilov putsch' baru ini, akan menimbulkan gejala baru revolusi, dan pengalaman dari aksi revolusi semacam ini akan meninggalkan kemungkinan kecil untuk sebuah rejim nasionalis-burjuis untuk kembali ke stabilitas."

Peristiwa-peristiwa Oktober 1965 akan membuktikan bahwa rejim Sukarno tidaklah kurang ramah terhadap tukang-tukang jagal Suharto dibandingkan dengan pemerintahan Kerensky terhadap kudeta Jendral Kornilov di tahun 1917. Sukarno menunjukkan intisari nasionalisme burjuis dengan mengakhiri karir politisnya sebagai presiden bonekanya junta militer Suharto. Kesimpulan dari catatan editor itu seharusnya ditulis di batu nisan Pabloisme: "Dalam kasus yang mana saja, arahan optimistis kita adalah benar. Revolusi Indonesia sedang maju! Kemenangannya sebagai sebuah revolusi sosialis sedang terjadi. (Tekanan dalam dokumen asli) Dari

tahun 1957 sampai 1965 para Pablois di seluruh dunia melakukan penutupan obyektivis ini atas bahaya-bahaya yang menghadapi revolusi Indonesia.

Pekerjaan dari organisasi bagian Pablois di Indonesia adalah sangat penting untuk seluruh perspektif sedunia Pablois. Itu dibicarakan secara intensif di yang dinamakan Kongres Dunia Kelima dari "Sekretariat Terpadung" di tahun 1957. "Kongres Dunia Kelima kita, dalam membicarakan kemajuan dan jalur revolusi kolonial sedunia, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan-perkembangan di Indonesia. Mengenali situasi Indonesia sebagai pra-revolusi, itu mengharapkan sebuah ledakan revolusioner sebentar lagi." Kata artikel Santen. Seluruh "Sekretariat Terpadung" Pablois mempunyai tangan berdarah. Mereka membantu pengkhianatan Stalinis terhadap pekerja-pekerja dan petani-petani Indonesia.

## BAB KELIMA

Para Pablois menutupi kekhianatan Stalinis.

Krisis kepemimpinan kelas pekerja tidak pernah terungkap setajam seperti di Indonesia antara tahun 1963 dan 1965. Nasib para buruh dan petani Indonesia tergantung kepada penanggungan dan pengalihan arah kontra-revolusioner PKI yang mengikat kelas pekerja ke rejim nasionalis-burjuis Sukarno ketika angkatan bersenjata, dengan dukungan AS, mempersiapkan sebuah kudeta berdarah. Stalinis-Stalinis PKI, dipimpin oleh sekretaris-jenderal Aidit, berulang-ulang menuntut para pekerja dan petani untuk mengembalikan pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan yang telah mereka sita. Mereka kemudian bergabung dengan jenderal-jenderal angkatan bersenjata duduk dalam kabinet pemerintah Sukarno dan mendukung pelarangan aksi-aksi mogok kerja.

Bertambah jelas kalau para jenderal sedang mempersiapkan sebuah kudeta berdarah, bertambah keras pemimpin-pemimpin PKI bekerja untuk menenangkan kelas burjuis dan angkatan bersenjata bahwa PKI menentang mobilisasi revolusioner rakyat. Aidit berulang-ulang menyatakan bahwa aparatus negara di Indonesia tidak perlu dihancurkan tetapi dapat dirubah dari dalam untuk memperkuat "elemen-elemen pro-rakyat," yang termasuk presiden Sukarno. Pemimpin PKI ini memberi ceramah-ceramah di sekolah-sekolah militer di mana dia menggembarkan "perasaan kebersamaan dan persatuan yang setiap hari bertambah kuat antara seluruh angkatan bersenjata republik Indonesia dan kelompok-kelompok lain rakyat Indonesia, termasuk para komunis." Kepemimpinan PKI hanya dapat mengajukan posisi-posisi ini karena para Pablois Indonesia bekerja sama kerasnya untuk mencegah para pekerja memisahkan diri dari para Stalinis. Mereka menentang keras pendirian sebuah kepemimpinan revolusioner yang baru.

Tanggung jawab untuk akibat kontra-revolusioner berdarah arahan ini dapat diusut secara langsung ke Kongres Reunifikasi Pablois di mana Partai Sosialis Pekerja (SWP) Amerika melakukan keputusan dengan Komite Internasional Internasional Keempat dan bergabung dengan "Sekretariat Terpadung" Pablois Ernest Mandel. Setelah memimpin perjuangan melawan likuidasionisme Pablois di tahun 1953, para pemimpin SWP di akhir 1950an makin lama makin menyerah ke tekanan perkembangan ekonomi cepat setelah Perang Dunia Kedua yang berlangsung dan tampak ketenangan kaum buruh. Mereka meninggalkan perjuangan untuk revolusi

proletar yang dipimpin oleh partai macam Bolshevik dan mencari "persatuan kembali" dengan para radikal petit-burjuis dan Stalinis yang tidak puas. Di tahun 1963 mereka bergandeng tangan dengan para Pablois dalam menyatakan bahwa bukan saja partai-partai Stalinis, seperti PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan nasionalis-burjuis di negara-negara berkembang, seperti Castro di Kuba dan Sukarno di Indonesia dapat menjadi sarana pernyataan sosialisme.

Resolusi pemersatuan kembali ini menyatakan bahwa tidak ada krisis kepemimpinan revolusioner di negara-negara tertindas: "Di negara-negara kolonial dan semi-kolonial...kelemahan kapitalisme, seluruh struktur sosio-ekonomis yang aneh yang dihasilkan oleh imperialisme, kesengsaraan permanen sebagian besar populasi dalam ketidakadaanya revolusi radikal agraris, stagnasi dan malah menurunnya standar kehidupan sementara industrialisasi berjalan dengan cepat secara relatif, menciptakan situasi-situasi di mana kejatuhan satu gejala revolusi tidak secara otomatis menciptakan stabilisasi ekonomis dan sosial yang relatif atau sementara. Sebuah rentetan perjuangan-perjuangan rakyat yang tampaknya tak ada habisnya terus berlangsung, seperti dialami Bolivia selama 10 tahun."

Dalam kata lain, bagaimanapun menghancurkannya kekalahan-kekalahan dan pengkhianatan-pengkhianatan yang dibebankan kepada rakyat, mereka akan bangkit kembali. Tidak ada perlu untuk partai Trotskyis. Sifat kriminal dari kepuasan diri oportunis ini akan segera ditunjukkan dalam darah rakyat Indonesia. Konperensi tahun 1963 ini didasarkan atas penolakan kepentingan bersejarah pembangunan seksi-seksi pergerakan Trotskyis di negeri-negeri terbelakang. Resolusi Pablois mengatakan: "Kelemahan musuh di negeri-negeri terbelakang telah menciptakan kemungkinan untuk merebut kekuasaan meskipun dengan instrumen tumpul." Di Indonesia, "instrumen tumpul" ini adalah PKI.

### **Pengkhianatan besar di Sri Lanka**

Kekhianatan Pablois di Indonesia adalah sangat berhubungan dengan pengkhianatan besar di Sri Lanka di tahun 1964 ketika Partai Lanka Sama Samaja (LSSP), organisasi Pablois, memasuki koalisi burjuis Ibu Bandaranaike, bersama dengan para Stalinis Partai Komunis Sri Lanka, untuk menggagal pergerakan massa kaum buruh melawan kekuasaan kapitalis.

LSSP telah menentang pembentukan Komite Internasional di tahun 1953 dan mengikuti itu memainkan peranan penting dalam mempersiapkan persatuan kembali SWP Amerika dengan para Pablois. Pertentangan mereka terhadap perjuangan menentang oportunisme dalam Internasional Keempat berakar di orientasi mereka yang makin bertambah nasionalis dan peninggalan program dan prinsip-prinsip Trotskyis untuk mengakomodasi para Stalinis dan partai kapitalis Bandaranaike SLFP di Ceylon (Sri Lanka).

Kongres Reunifikasi Pablois di tahun 1963 menutupi oportunisme nasional LSSP dengan mengajukan: "Seksi Ceylon kita sudah perlahan-lahan membetulkan orientasi salah yang diadopsi di tahun 1960 yang mendukung pemerintahan burjuis-liberal SLFP. Sejak rakyat mulai beraksi, mereka tidak ragu-ragu untuk menaruh diri mereka di kepala pergerakan ini melawan sekutu elektoral mereka yang kemarin." Hanya



setahun setelah itu aling-aling "Trotskyis" palsu yang diberikan oleh para Pablois digunakan oleh LSSP untuk memasuki pemerintahan kapitalis.

Pengkhianatan oleh sebuah partai yang dianjung-anjurkan oleh para Pablois sebagai "partai Trotskyis terbesar di dunia" ini mempunyai akibat yang membawa bencana di seluruh dunia, yang pertama di Indonesia. Itu memperkuat tangan partai-partai Stalinis dan Maois, seperti PKI, yang kemampuannya untuk menekan dan melucuti kaum buruh akan sudah hancur bila LSSP berpegang ke program revolusi permanen dan berjuang untuk penggulingan kekuasaan burjuis di Sri Lanka.

### **Pablois memperkuat PKI**

Setelah masuknya seksi Sri Lanka mereka ke dalam pemerintahan kapitalis itu, dengan para Stalinis, para Pablois terus mengikuti arahan pro-Stalinis dan pro-burjuis-nasional yang sangat mirip di Indonesia. Pamflet Pablois "Bencana di Indonesia" bukan saja menutupi peranan yang dimainkan oleh seksi Pablois Indonesia, Partai Acoma, seperti kita ungkapkan di bagian terakhir seri ini. Meskipun setelah kudeta berdarah di Indonesia, pamflet ini terus mengajukan kemungkinan kelas burjuis-nasional dan PKI dapat memainkan peranan progresif.

Itu termasuk sebuah artikel oleh T Soedarso, yang digambarkan oleh pemimpin SWP AS Joseph Hansen dalam kata depan pamflet ini sebagai "anggota muda PKI yang berhasil mengasingkan diri". Hansen memuji secara bersemangat artikel Soedarso sebagai "tanda dari tekad sebuah sektor penting dalam PKI untuk mempelajari apa yang terjadi dan menggunakan pelajaran-pelajaran sehingga dapat menjamin kemenangan bila rakyat bergejolak maju lagi, yang pasti akan terjadi."

Artikel Soedarso melihat program kontra-revolusioner kepemimpinan PKI sebagai sejumlah "kesalahan" termasuk "kekeliruan-kekeliruan...mencoba mendirikan sosialisme dengan jalan damai" dan untuk mengikuti "politik" teori revolusi dua tahap dan front tergabung dengan kelas burjuis-nasional.

Soedarso tidak mengutarakan perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan para Stalinis, setuju, contohnya, bahwa "Pergerakan revolusioner dapat dan sebaiknya mendukung sikap-sikap atau aksi-aksi progresif kelas burjuis nasional." Kalau bukti pernah diperlukan bahwa kelas burjuis semi-kolonial, dilambangkan oleh Sukarno, adalah pada dasarnya tidak mampu untuk melakukan program "progresif" tetapi akan mendukung pembantaian kelas pekerja, pertumpahan darah itu memberikannya. Selama 18 bulan Sukarno menjadi presiden boneka diktatur Jendral Suharto, dan setelah itu, mulai dari Maret 1967, dia dipertahankan sebagai "presiden tanpa kekuasaan".

Para Pablois juga meremehkan pentingnya pemasukan PKI ke dalam koalisi NASAKOM Sukarno dengan para tukang jagal militer. Soedarso mengimbuai PKI untuk membalik arahan ini, sepertinya itu hanyalah sebuah kesalahan kecil.

Peminta maafan Soedarso untuk kekhianatan kelas mendasar ini bukanlah kebetulan. Inti dari Pabloisme adalah pembalikan perjuangan Trotsky melawan Stalinisme. Evolusi Stalinisme menjadi sebuah birokrasi kontra-revolusioner ditetapkan tanpa keraguan di tahun 1933 ketika Komintern (Internasional Komunis) Stalinis menyetujui tanpa ada suara perlawanan satu pun kekhianatan Partai

Komunis Jerman yang menyerahkan kelas buruh Jerman kepada Hitler tanpa adanya peluru melayang. Mulai dari saat itu Trotsky bersikeras bahwa Internasional Ketiga telah secara pasti menyeberang ke kamp burjuis, dan bahwa Internasional Keempat harus dibangun sebagai partai dunia revolusi sosialis untuk memastikan kelangsungan Marxisme.

Artikel Soedarso adalah sebuah penutupan secara sadar, yang diatur oleh Mandel dan Hansen, atas peranan reaksioner Stalinisme. Artikel itu secara sadar tidak menggunakan kata "Stalinisme", tetapi secara curang memanggil PKI "Komunis". Dan kemudian untuk membuat posisinya sangat jelas, Soedarso menyimpulkan: "Kecaman di atas tidaklah dimaksudkan untuk merusak peranan PKI atau untuk membangkitkan ketidakpercayaan kepada Komunisme Indonesia."

Demikian, setahun setelah kudeta militer itu, pada saat mana satu juta pekerja dan petani sudah binasa, para Pablois sedang menutupi pelajaran-pelajaran tahun 1965 dan masih menganjurkan para pekerja dan petani Indonesia untuk tetap mempercayai PKI.

### **`Pelajaran-Pelajaran` Pablois Indonesia**

Artikel Soedarso bukanlah sebuah contoh terisolasi. Kenyataannya arah yang diajukan di artikel itu memberikan tema-tema penting sebuah pernyataan yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1966 oleh "Sekretariat Terpadu" Pablois. Berjudul "Pelajaran-Pelajaran Indonesia", itu menentang segala pemisahan dari PKI dan tidak mengeluarkan panggilan untuk pembangunan sebuah seksi Internasional Keempat. Sebaliknya, itu menyatakan bahwa "Komunis-Komunis Indonesia" dapat "mengunggulkan akibat dari kekalahan saat ini" dengan mengasimilasi pelajaran-pelajaran tertentu.

"Pelajaran" pertama diajukan secara berikut: "Walaupun itu benar dan penting untuk mendukung semua pergerakan-pergerakan rakyat anti-imperialis, dan bahkan mendukung secara kritis semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wakil-wakil kelas burjuis kolonial seperti Sukarno, untuk sebuah revolusi kolonial mendapat kemenangan, itu adalah sangat penting untuk mempertahankan kemandirian organisasi-organisasi proletar secara politis maupun secara keorganisasian dari kelas burjuis nasional."

Para Pablois bukan hanya mendorong ilusi-ilusi berbahaya tentang kepura-puraan "anti-imperialis" kelas burjuis nasional, kata-kata mereka tentang "kemandirian" politis organisasi-organisasi proletar adalah penuh dengan kepalsuan. Kemandirian politis kelas pekerja hanyalah dapat ditetapkan dengan membangun sebuah partai Trotskyis dalam perjuangan yang berani dan tak mengenal kasihan melawan para Stalinis yang sedang dicoba untuk disadarkan oleh para Pablois.

"Pelajaran" Pablois kedua mengajukan bahwa: "Meskipun itu benar dan penting dalam fase-fase pertama revolusi di negara-negara terbelakang untuk menekankan masalah kemenangan kemerdekaan nasional, mempersatukan negara dan menyelesaikan masalah agraris (yaitu, tugas-tugas bersejarah dari revolusi demokratis burjuis yang merupakan masalah yang paling penting di mata 80 percent sampai 90 percent populasi), itu adalah sangat penting untuk mengerti bahwa

penyelesaian tugas-tugas ini hanyalah mungkin bila kelas buruh, dalam persekutuan dengan para petani miskin, telah memenangkan kepemimpinan revolusi, mendirikan diktatur proletar dan petani miskin dan mendorong revolusi itu ke fase sosialisnya."

Dengan arah oportunist "dua fase", para Pablois mencoba untuk menghidupkan kembali teori "dua-tahap" Stalinis yang telah kehilangan kepercayaan, yang menuntut "fase sosialis" revolusi ditunda sampai selesainya revolusi demokratis dan nasional. Arahan para Pablois adalah kebalikan dari teori Revolusi Permanen Trotsky yang didasarkan atas sifat internasional revolusi sosialis dan peranan revolusioner proletariat internasional. Trotsky menekankan pelajaran inti dari Revolusi Rusia bahwa, dalam jaman ini, tugas-tugas demokratis dan nasional di negara-negara terbelakang dan tertindas hanya dapat dicapai melalui revolusi proletar dan penyebarannya ke seluruh dunia.

Seruan para Pablois untuk "diktatur proletar dan para petani miskin" mencoba untuk menghidupkan kembali formula "Bolshevik Lama" tentang "diktatur demokratis proletar dan petani" yang diganti oleh Lenin di tahun 1917. Lenin mengadopsi posisi Trotsky yang tegas bahwa proletariat adalah kelas revolusioner satu-satunya yang dapat memimpin para petani dan melaksanakan tugas-tugas demokratis dan sosialis negara-negara terbelakang sebagai bagian dari perjuangan kelas buruh seluruh dunia.

"Pelajaran" ketiga yang diajukan oleh para Pablois adalah: "Meskipun itu adalah penting untuk memenangkan basis rakyat seluas mungkin di desa-desa, sebuah partai revolusioner yang dapat melaksanakan politik ini haruslah berdasarkan atas kader proletar kuat yang dididik secara menyeluruh dalam teori dan praktek revolusioner Marxis."

Sifat ganda dari "pelajaran" ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa itu ditujukan kepada para Stalinis. Penyebutan-penyebutan "kader proletar kuat" dan "teori Marxis" adalah palsu. Kenyataannya, "Sekretariat Tergabung" menasehatkan anggota-anggota kepemimpinan PKI yang selamat untuk mengambil jalan perang gerilya di daerah pedesaan. Pernyataan mereka menunjukkan harapan bahwa "apa yang tertinggal dari kepemimpinan dengan kader-kader partai yang selamat -- terutama yang berpendidikan terbaik, mereka yang dikuatkan oleh pengalaman mengerikan yang mereka alami dalam enam bulan terakhir -- akan mengambil jalan perang gerilya, jika hanya untuk pertahanan diri.

Mereka menganjurkan para Stalinis untuk berbelok ke perang gerilya yang menggunakan para petani, meniru para Maois di Cina. Maoisme adalah semacam Stalinisme, berdasar atas permusuhan para petani terhadap kekuasaan kelas buruh. Berasal dari kekalahan revolusi Cina dan penghancuran keanggotaan buruh Partai Komunis Cina di tahun 1926-27, pembelokan Mao ke arah para petani menghasilkan aborsi di tahun 1949 revolusi Cina. Itu menghasilkan negara buruh yang sangat cacat di kelahirannya yang berdasarkan atas "blok empat kelas" Mao -- kelas burjuis nasional, kelas petit-burjuis urban, petani dan kelas buruh. Itu adalah doktrin ini yang memandu kebulatan tekad Aidit dari kepemimpinan PKI untuk mencegah sebuah revolusi sosialis proletar di Indonesia. Dalam kata-kata Aidit: "Kelas buruh, petani dan kelas petit-burjuis dan kelas burjuis nasional haruslah bergabung dalam satu front nasional".

Pamflet para Pablois adalah percobaan sinis untuk mengalihkan para buruh yang sadar akan kelasnya dari pelajaran yang paling penting dari pengkhianatan di Indonesia -- pentingnya untuk sebuah partai Trotskyis untuk mengalahkan para Stalinis dan pembantu-pembantu Pablois mereka yang berfungsi sebagai agen-agen petit-burjuis kontra-revolusioner dalam pergerakan rakyat. Hanya ada satu partai revolusioner, dulu dan sekarang, yang dapat membalas pengkhianatan di tahun 1965 dengan membimbing kelas buruh Indonesia ke kekuasaan -- sebuah seksi Indonesia Komite Internasional Internasional Keempat.

## Kesimpulan

Di tahun 1951 kepemimpinan PKI telah menggambarkan secara jelas jalan pengkhianatan yang akan diikutinya. "Dalam perjuangan untuk menyatakan pendapat politis mereka, para komunis tidak akan menggunakan kekerasan sementara kelas penguasa masih membiarkan jalan damai, keparlemenan terbuka. Bila ada penggunaan kekerasan, pertumpahan darah, perang saudara, itu bukan para komunis yang memulai, tetapi kelas penguasa sendiri."

Arahan kontra-revolusioner ini hanya dapat dibebankan kepada rakyat Indonesia karena para Pablois mengikat seksi-seksi yang paling sadar akan kelasnya ke panji-panji dan program PKI. Pengkhianatan-pengkhianatan para Pablois di Sri Lanka dan Indonesia menunjukkan sifat kontra-revolusioner Pabloisme. Seperti Komite Internasional Internasional Keempat menyatakan dalam Arahan-arahan resolusi 1988-nya, Krisis Kapitalis Sedunia dan Tugas-Tugas Internasional Keempat:

"Dalam bantuan yang mereka berikan kepada Stalinisme, sosial-demokrat dan nasionalisme burjuis, oportunisme para Pablois sentris memainkan peranan vital dalam memperbolehkan imperialisme menjalani tahun-tahun penting antara 1968 dan 1975 ketika orde dunia sedang tergoncang oleh gejolak ekonomi dan pergerakan internasional kaum buruh dan rakyat yang tertindas di negara-negara terbelakang. Ini membuktikan taksiran Trotsky tentang sentrisisme sebagai agen sekunder imperialisme. Para pengalah petit-burjuis yang mengajar tentang nasib proletar yang akan selalu berakhir dengan bencana dan sementara itu menemukan pandangan-pandangan baru tentang kelas burjuis, tidak pernah menganalisa secara konkrit bagaimana kapitalisme yang sudah jompo dapat hidup sampai dekade 1980an. Para Pablois adalah yang paling tidak peduli untuk mempelajari hasil-hasil politik-politik mereka. Sebanyak-banyaknya semua persaudaraan petit-burjuis sentris, para radikal dan cendekiawan yang tidak berkelas menolak a priori kemampuan revolusioner kelas pekerja dan menerima kekalahan-kekalahannya sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, mereka tidak pernah memikirkan bagaimana konsekuensi-konsekuensi sebuah politik Marxis yang benar akan bekerja di Sri Lanka di tahun 1964, di Perancis di tahun 1968, di Chili di tahun 1973, dan di Yunani dan Portugis di tahun 1974.

"Komite Internasional, sebaliknya, mengambil pengalaman-pengalaman strategis proletar dalam periode setelah Perang Dunia Kedua pelajaran-pelajaran penting yang akan menjadi dasar dari persiapan mereka untuk pergejolakan revolusioner yang akan datang: pembangunan Internasional Keempat sebagai Partai Dunia Revolusi Sosialis untuk memastikan kemenangan kelas buruh internasional

memerlukan sebuah perjuangan yang tanpa henti dan tanpa kompromi melawan oportunisme dan sentrisme.

Sebuah kepemimpinan revolusioner yang baru harus didirikan untuk memimpin rakyat Indonesia untuk menghancurkan diktatur Suharto, menggulingkan kelas burjuis dan menghentikan pemerasan imperialis dalam perjuangan untuk revolusi sosialis sedunia. Menentang para Stalinis dan Pablois yang sedang mempersiapkan jebakan berdarah satu lagi untuk rakyat, seksi Indonesia dari Komite Internasional Internasional Keempat (ICFI) harus dibangun untuk memimpin perjuangan ini.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0510/08/humaniora/2105067.htm>

Sabtu, 08 Oktober 2005

## Satu Museum untuk Tujuh Jenderal?

Jadi sejarah sebenarnya hanyalah permainan kata dalam menyusun sebuah cerita panjang tentang kebenaran. Penulisan sejarah adalah arena permainan antara fakta dan fiksi.

Harus disampaikan dalam bentuk cerita dan berhasil dimengerti karena akal manusia memiliki ruang fiksional tempat imajinasi bermain. Tak heran, cerita sejarah sebagai sebuah laporan tentang fakta-fakta kemerdekaan selalu hadir dengan romantis, patriotik, bahkan sedikit mitologis.

Penting suatu peristiwa sejarah, makin romantis dan patriotik wujud pengungkapannya. Sebaliknya, bahkan roman paling picisan sekalipun harus dibangun atas setting dan kejadian-kejadian yang logis dan faktual sehingga bisa dimengerti.

Sebagian fakta adalah fiksi dan sebagian fiksi adalah fakta, bagaimana manusia mengingat sejarah? Hanya sebagian kecil saja orang yang begitu berdedikasi pada tanggal seperti para guru sejarah yang idealis dan sejarawan kutu buku. Di luar itu, manusia sebenarnya makhluk egois atau lebih tepat selektif. Dia hanya ingin mengingat hal-hal yang ingin dikenangnya.

Terbatas

Warga negara yang loyal, kita tidak diperbolehkan untuk terlalu bebas memilih mana yang harus diingat dan mana yang harus dilupakan. Masa silam sudah dituliskan oleh pihak lain yang punya kuasa. Ikatan emosional atas suatu peristiwa sejarah adalah nostalgia yang disuntikkan penguasa dalam ruang imajinasi kolektif rakyat, dan jauh dari pengalaman pribadi terhadap peristiwa yang terjadi.

Mengajarkan kita untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ditentukan, lewat cara-cara yang sudah ditentukan juga. Sejarah transisi Indonesia 1963-1966 bisa sebagai sebuah laboratorium yang baik untuk melihat bagaimana situasi akhir perang dingin di Asia Tenggara dengan kemenangan telak blok kapitalisme mengubah secara radikal tidak hanya pemetaan geopolitis, pemasaran, demokrasi, informasi, dan arus modal di Indonesia, tapi juga bagaimana sejarah seharusnya dituliskan.

Sistematik ingatan kolektif Indonesia pascaperang dingin dipersiapkan agar siap menerima sistem ekonomi liberal yang lebih menguntungkan pasar modal internasional di akhir 1966. Proses ini harus cepat, mulus, dan efektif karena waktu tidak banyak. Pemerintah baru harus menentukan mana yang harus diingat dan mana yang harus dilupakan.

Pada marxisme dan sosialisme di Indonesia diarahkan pada kebencian kolektif terhadap fakta 30 September. PKI= Binatang dan atribut-atribut senada di media massa jadi senjata retorika efektif dalam menggairahkan pembunuhan mendekati sejuta manusia dengan suka ria hanya beberapa bulan setelah PKI dilarang.

tahun kemudian ?komunisme adalah bahaya laten, sebuah jargon yang lebih intelektual, mengunci imajinasi kita dengan fiksi-fiksi heroik yang sangat faktual dan fakta-fakta yang berbaur dengan fiksi. Tapi itulah wajah kebudayaan kekerasan kita, di mana pembunuhan massal hanyalah statistik dalam laci gelap, sementara pembunuhan tujuh jenderal menjadi drama horror, urban legend untuk generasi tua-muda.

kini kita memetik buah ranum kapitalisme. Tahun 1960-an kita tak punya apa-apa kecuali harga diri. Tahun ini, kita nyaris punya semuanya kecuali harga diri karena harus mengimpor semua kebutuhan, mulai dari peniti sampai handphone, sementara ekspornya TKI serta garmen dan sepatu hasil keringat buruh upahan rendah yang dikendalikan dan dimiliki perusahaan asing.

ekonomi marxisme dibunuh 30 tahun lalu, tanpa ruang untuk mengkaji segi positifnya dari segi pemikiran ekonomi-politik untuk kepentingan negara Dunia Ketiga yang gampang digonjang-ganjang lewat pasar bursa. Maka, kita, generasi muda urban sekarang merasa bahwa ketidakadilan ekonomi adalah risiko biasa dalam kapitalisme yang merupakan kehendak Tuhan.

, hati kecil punya kecerdasan sendiri. Dia bisa terlihat mati, tapia£á”sebagaimana virusa£á”hati kecil sukar dibunuh dan punya kemampuan bertahan sepanjang akal sehat ada. Ada dosa tak terjelaskan dalam ingatan kultural kita hari ini.

menjelaskan secara telanjang bahwa perlu ada sejuta orang awam (barangkali lebih) sengaja dibunuh tanpa pengadilan hanya karena punya hubungan dengan sebuah partai kiri yang dituduh makar dan gagal? Apakah marxisme dilarang karena dia tidak henti-hentinya menawarkan suatu kesadaran kritis akan ketidakadilan yang akan jadi penghambat globalisasi ekonomi? Apakah semuanya sudah direncanakan? Akal sehat memang selalu bertanya.

sejarah tutur

dari kita memahami fakta-fakta historis karena memiliki ikatan personal terhadap peristiwa-peristiwa yang sangat khusus. Testimonial dari sisa-sisa yang masih bernapas dan mengingat sebetulnya menjadi bahan yang penting dan menunggu untuk disuarakan sebagai data utama bagi sejarah.

dalam perspektif oral tentunya lebih kaya nuansa, sebab para penuturnya hadir secara aktif menceritakan pengalaman pribadi sebagai makhluk kultural yang



akan membidik sasaran. Dan bidikan itu sudah lama ia tengarai. Pembicaraan-pembicaraan itu menjadi bekal.

“Ini saatnya bagi tuan untuk bergerak. Jika tuan terlambat, maka negeri ini akan jatuh ke tangan komunis.”

“Jangan sampai komunisme berkuasa. Katakan, tindakan apa yang harus saya lakukan? Sebagai prajurit saya patuh pada atasan, dan hingga kini tak ada perintah dari komandan untuk bertindak.”

“Tuanlah yang harus bertindak. Bukan komandan tuan. Mereka selalu akan menunggu perintah panglima tertinggi. Dan ingat, dia sedang sakit parah. Tuan tidak lihat bahwa komunisme semakin gencar merengkuh semua kekuatan politik untuk berada di bawah pengaruhnya?”

“Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu tidak ada yang salah dengan itu, karena mereka menjalankan bagian daripada strategi dan taktik politik.”

“Tuan terlalu naif. Politik itu berwajah seribu, hari ini menjadi kawan besok sudah dijadikan lawan.”

“Saya prajurit, bukan politisi. Tugas saya adalah mengamankan negeri ini daripada ancaman, gangguan, dan hambatan yang terjadi.”

“Di situlah maksud saya. Tuan tahu, komunisme adalah ancaman yang nyata bagi negeri tuan. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai bagian dari gerakan komunis internasional yang dipimpin oleh Beijing. Jika itu terjadi, maka tuan tidak punya keleluasaan dalam membangun negeri tuan, karena semuanya nanti akan tergantung pada arahan dan persetujuan Beijing.”

“Saya mengerti.”

Dia terdiam sejenak. Memahami benar bagaimana Partai Komunis Indonesia adalah ancaman nyata baginya. Namun, dia juga paham, bahwa PKI berjalan di koridor yang telah ditentukan. Mereka ikut pemilu, mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan tidak menentang Angkatan Darat secara langsung.

Dia menatap lawan bicaranya yang masih duduk sambil menghisap sebatang rokoknya. Terbersit di benaknya, sebuah kalimat pancingan yang bernada lugu namun diarahkan untuk membuatnya tahu apa isi benak lawan bicaranya.

“Saya mengerti, namun, soal politik, itu bukan urusan saya.”

“Ah lagi-lagi tuan terlalu naif. Tuan tentunya tahu bahwa dalam komunisme, militer harus tunduk pada arahan dan perintah partai.”

“Jangan sampai itu terjadi. AD bukan alat kekuatan apapun, AD bukan pemadam kebakaran. Bahkan AD, seperti kata Panglima Besar Jend. Soedirman, adalah satu-satunya kekuatan yang tetap utuh dan solid. AD adalah tentara rakyat, ia berjuang bersama rakyat merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik. Karena itu, AD harus terlibat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.”



“Itulah yang saya maksud mengapa komunisme dan PKI merupakan ancaman nyata.”

“Tapi apa yang harus saya lakukan? PKI adalah sebuah partai politik yang sah, yang berjuang dengan cara-cara legal. Mereka tidak menabrak konstitusi kami.”

“Tuan, itu hanya salah satu aspek dari strategi politik PKI. Mereka mengenal perjuangan legal dan ilegal, mekanisme atas-bawah. Yang di atas tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Tuan tahu bahwa mereka juga menggarap prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata?”

“Saya lebih tahu daripada mereka. Saya tahu mereka menyusup ke tubuh angkatan bersenjata. Saya tahu betul agen-agen mereka. Berikan kepada saya, apa alasan legal saya untuk menindak PKI? Mereka tidak melakukan pemberontakan, mereka tidak menentang angkatan bersenjata secara terbuka. Mereka berbeda dengan Masyumi atau PSI yang terkait dengan PRRI dan Permesta.”

Si lawan bicara tersenyum.

“Tuan, politik itu berwajah seribu. Tuan bisa membuat seribu satu alasan untuk menghantam komunisme, untuk kemudian berkuasa di negeri ini.”

“Yang saya butuhkan alasan legalnya, saya ingin kelak ketika berkuasa hal itu dicapai dengan cara-cara legal. Soal bagaimana melakukan, Anda tak perlu mengajari saya.”

“Tuan, alasan bisa dicari dan dibentuk. Yang paling penting adalah tindakan. Dalam politik, mereka yang berhasil memanfaatkan momentum adalah yang memenangkan pertarungan. Politik bukanlah matematika. Politik adalah seni. Seni berkuasa. Kadang tuan harus tampil gagah, kadang lemah, kadang lembut, kadang abstrak, tapi juga harus berani bersikap tegas dan keras. Jangan seperti Nasution, yang gagah tapi tidak berani bersikap tegas. Atau Yani, yang hanya cukup puas mengabdikan pada pemimpin besar revolusi.”

“Lalu apa momentum itu?”

“Tuan, inilah saatnya momentum yang terbaik. Panglima besar sedang jatuh sakit, semua kekuatan politik saling bersiaga, menunggu siapa yang mulai bertindak. Tapi mereka hanya menunggu, mereka tak berani mulai bertindak. Itulah kesalahan utama mereka.”

“Saya mengerti, tapi tindakan apa yang harus diambil? Saya kira semua elite itu berpikiran seperti saya, ‘tindakan apa yang harus diambil yang menguntungkan kedudukannya?’”

Si lawan bicara mengerti, mata kail telah bergoyang.

“Tuan, untuk memenangkan pertempuran saat ini, tuan harus menyerang kekuatan yang paling kuat. Kekuatan yang paling kuat itu adalah Soekarno, panglima besar revolusi, pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.”

“Itu saya mengerti, tapi sekali lagi apa alasan legalnya?”

“Tuan bertindaklah, jangan dulu memikirkan alasan legalnya. Kalau tuan sudah berkuasa, tuan bisa membuat sendiri alasan legal itu. Hukum itu produk politik, orang sejak awal berkuasa dulu baru membuat aturan, karena dengan demikian barulah aturan itu bisa ditegakkan. Bukan sebaliknya.”

“Tapi, kalau itu saya lakukan, pasti akan ada pertumpahan darah yang luar biasa, akan ada perang saudara. Saya tidak mau sebagai prajurit, dituduh mengobarkan perang saudara.”

“Tuan, untuk kepentingan umum, terkadang kita harus mengorbankan kepentingan orang per orang atau golongan per golongan. Untuk kepentingan jangka panjang, tidaklah soal jika kepentingan jangka pendek dibatalkan.”

“Itulah yang saya pikirkan, kepentingan jangka panjang itu. Saya tak ingin disebut sebagai pemimpin yang berlumuran darah, saya tak ingin dunia internasional takut berhadapan dengan saya karena kekejaman yang terjadi.”

“Tuan, masa depan ditentukan oleh tindakan tuan hari ini. Masa depan ada dalam buku-buku sejarah, dan sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Soal dunia internasional, tuan dunia tidak terbuka yan tuan kira, juga tidak sesantun yang tuan sangka. Dunia luar penuh warna, dan warna itu tergantung pada kepentingan mereka. Apalagi saat ini, setiap negara sibuk dengan urusannya masing-masing.”

“Tapi pasti mereka akan tahu, dan saya tidak ingin terasing dari pergaulan internasional.”

“Tuan jangan khawatir soal itu. Kami adalah kawan dan sahabat tuan, jika tuan berkuasa kelak. Kami justru lebih takut dengan pemerintahan yang ada saat ini, karena mereka membiarkan komunisme bersimaharajalela.”

Sang prajurit menghela nafas panjang-panjang.

Malam kian larut, dan dingin semakin menusuk tulang.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://perso.club-internet.fr/kontak/>.

KOLOM UMAR SAID:

## SEKILAS TENTANG PERINGATAN TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN 65

Kegiatan untuk memperingati 40 Tahun Peristiwa Tragedi Kemanusiaan 65 yang pada pokoknya dimulai sekitar tanggal 29 September 2005 sampai sekarang masih terasa ada gemanya. Di antara acara-acara yang menarik perhatian cukup banyak orang ialah yang diselenggarakan dalam rangka Pekan Seni Budaya “Menguak Tabir Merajut Masa Depan” oleh kerjasama berbagai organisasi antara tanggal 28 September dan 5 Oktober 2005 di Jakarta dan Depok.

Meskipun kegiatan peringatan 40 tahun peristiwa 65 ini kemudian agak “terganggu” oleh adanya peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menggiring perhatian banyak orang, yaitu peristiwa peledakan bom oleh teroris di Bali dan geger besar-besaran

karena kenaikan harga BBM sejak tanggal 1 Oktober, boleh dikatakan kegiatan peringatan ini tetap merupakan peristiwa yang penting.

Dan walaupun koran-koran nasional tidak banyak menyiarkan berita tentang kegiatan-kegiatan ini, tetapi dalam berbagai milis di Internet cukup banyak tulisan atau berita dari berbagai kalangan merupakan partisipasi dalam peringatan ini. Sepanjang pengamatan dari jauh (dan karenanya bisa lengkap atau tidak cermat) kegiatan untuk memperingati peristiwa 40 tahun ini tidak mendapat rintangan yang besar atau serangan yang serius dari pihak pendukung atau simpatisan Orde Baru.

Dalam rangka peringatan ini juga telah dilaksanakan bedah Buku Antologi Tragedi Kemanusiaan 65 di Jakarta, dengan mendapat perhatian banyak sekali orang dari berbagai kalangan. Buku Antologi yang terdiri dari 350 halaman ini berisi cerpen, curahan hati, esai, dan puisi hasil karya 37 penulis. Dalam acara bedah buku yang dihadiri juga oleh Gus Dur ini, telah diserahkan kepadanya satu jilid buku antologi ini oleh Ilham Aidit, sebagai simbol yang mempunyai makna penting.

Berbagai kegiatan di luar Indonesia

Dalam rangka memperingati 40 tahun peristiwa 65 ini berbagai Indonesia di luarnegeri juga mengadakan kegiatan-kegiatan. Pada tanggal 15 Oktober 2005 ini Panitia Peringatan Tragedi Nasional 1965 di negeri Belanda akan mengadakan pertemuan besar di Diemen. Pertemuan besar ini akan dihadiri oleh peserta-peserta orang Indonesia dari negeri Belanda, Perancis, Swedia dan negeri-negeri lain. Sedangkan pada tanggal 16 Oktober kegiatan yang serupa untuk memperingati peristiwa 65 juga akan diadakan di Aachen (Jerman).

Perhatian terhadap peringatan 40 Tahun Peristiwa ini juga tercermin dalam sebagian pers di berbagai negeri. Antara lain: mingguan *l'Humanité Hebdo* (penerbitan Partai Komunis Perancis) telah menyajikan tulisan panjang yang memenuhi satu halaman penuh, mengenai peristiwa G30S dan pembunuhan besar-besaran terhadap golongan kiri di Indonesia. Demikian juga mingguan *ROUGE* kepunyaan Liga Komunis Revolusioner (aliran Internasionale ke-4) juga menyiarkan tulisan satu halaman penuh tentang peran CIA dan TNI-AD dalam peristiwa besar yang bersejarah ini. Di negeri Belanda, radio CPRO menyiarkan secara berturut-turut 3 macam siaran, sedangkan penerbitan NCPN (Partai Komunis Belanda Baru) juga membuat tulisan mengenai peristiwa 65.

Sejumlah penerbitan di Jerman ( *Neues Deutschland*, *Junge Welt*, *Taz*) juga tidak ketinggalan dalam para pembacanya tentang peristiwa 65 dan rejim militer Suharto yang telah membuat penderitaan begitu banyak orang di Indonesia.

Dalam arti tertentu, peringatan 40 tahun peristiwa 65 ini berhasil dalam menggugah kembali banyak orang kepada masa gelap Orde Baru yang dibangun oleh rezim militer Suharto. Karena, dalam rangka peringatan ini telah bermunculan sekali tulisan berupa berbagai macam esai, sajak, curahan hati, analisa dan, yang mengambil masalah peristiwa 65 sebagai tema Penting sekali dicatat bahwa kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan oleh kerjasama berbagai organisasi dengan partisipasi kalangan luas dalam masyarakat. Satu aspek yang juga menggembirakan ialah ikut sertanya secara aktif generasi muda bangsa dalam berbagai kegiatan ini.

<http://kontak.club.fr/Soal G30S, Bung Karno dan Suharto.htm>

Catatan A. Umar Said

Paris, 26 September 2003

## SOAL G30S, BUNG KARNO DAN SUHARTO

Sebentar lagi akan datang 30 September. Bagi banyak orang, di masa yang lalu, tanggal ini dan hari-hari berikutnya, merupakan hari yang mengandung kenang-kenangan yang penuh kepedihan dan kegetiran. Bahkan, bagi sebagian bangsa kita, penderitaan yang diakibatkan buntut peristiwa G30S masih dirasakan sampai sekarang, lebih dari 37 tahun kemudian. Kekuasaan rezim militer Orde Baru di bawah pimpinan Suharto dkk, telah membikin peristiwa 30 September 1965 sebagai dasar serentetan pengkhianatan terhadap Bung Karno dan Republik Indonesia, dan sebagai sumber berbagai pelanggaran HAM secara besar-besaran yang dilakukan selama puluhan tahun.

Selama ini, sudah banyak yang ditulis atau dibicarakan tentang G30S serta buntutnya yang panjang. Tetapi selama jangka waktu yang lama ini, sebagian terbesar tulisan mengenai peristiwa ini, serta berbagai akibatnya, hanya menyajikan versi sefihak yang banyak diputarbalikkan atau dipalsu oleh para pendukung rezim militer. Oleh karena itu, perlu terus didorong lahirnya berbagai macam tulisan - atau kegiatan lainnya - tentang G30S serta akibatnya, yang memungkinkan kita bersama untuk meninjaunya dari banyak sudut pandang. Sebab, sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa G30S sebenarnya mengandung persoalan-persoalan yang rumit dan punya latar-belakang politik dan sejarah yang panjang dan berliku-liku. Jadi, masalah G30S bukanlah masalah yang sederhana. Dan, karenanya, makin banyak kalangan mempersoalkan berbagai aspek G30S adalah makin baik bagi bangsa dan generasi yang akan datang.

## FAKTOR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Peristiwa G30S, seperti banyak persoalan besar lainnya, dipengaruhi berbagai faktor sejarah, dan faktor dalam negeri dan luar negeri. Di antara faktor-faktor itu terdapat faktor Bung Karno; yang merupakan lambang terpusat perjuangan nasional untuk kemerdekaan melawan kolonialisme dan imperialisme (ingat pidato Bung Karno „Indonesia menggugat“ dan kumpulan pidato-pidato beliau dalam „Di bawah Bendera Revolusi“. Ada juga faktor-faktor PKI, sebagian golongan Islam dan Angkatan Darat. Di samping itu, ada faktor perang dingin, sebagai perkembangan internasional penting sesudah Perang Dunia ke-II. Saling keterkaitan berbagai faktor dalam negeri dan faktor luar negeri ini tercermin di Indonesia dalam peristiwa-peristiwa penting, antara lain (sekadar menyebutkan sejumlah kecil contoh-contohnya) : revolusi 45, Konferensi Bandung 1955, pembontakan PRRI-Permesta, politik konfrontasi Malaysia, Trikora, perang Vietnam, masalah Taiwan, hubungan Indonesia-RRT

Di antara faktor-faktor dalam negeri adalah naiknya prestise PKI sesudah pemilu tahun 1955. Kenaikan prestise PKI ini membikin tidak senangnya sebagian dari TNI-AD, dan juga sebagian negeri-negeri Barat. Sejumlah perwira-perwira TNI-AD, dengan mendapat sokongan Amerika Serikat (CIA) melakukan pembontakan terhadap pemerintahan pusat di tahun 1958, dengan mendirikan Pemerintah

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang disokong oleh partai politik Masjumi dan PSI. (Ingat juga peristiwa penerbang AS Allan Pope yang ditembak jatuh di Ambon tahun 1958).

Bung Karno, yang waktu itu merupakan tokoh internasional dalam melawan imperialisme dan kolonialisme (ingat, antara lain: gerakan Non-blok, Ganefo, Konferensi Wartawan Asia-Afrika, Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing) mendapat dukungan yang besar dari PKI. Berbagai politik Bung Karno jelas-jelas tidak menguntungkan kepentingan sejumlah negeri-negeri Barat. Politik negeri-negeri Barat tertentu ini punya pengikut juga di Indonesia, termasuk di kalangan Angkatan Darat dan sebagian golongan Islam.

## MENGHANCURKAN PKI UNTUK MENGGULINGKAN BUNG KARNO

Dalam jangka waktu lama sekali (lebih dari 32 tahun), para pendiri rezim militer Orde Baru menyajikan kepada opini umum bahwa persoalan G30S adalah terutama berkaitan dengan PKI. Bahkan, nama resmi yang diberikan kepada peristiwa ini adalah GESTAPU/PKI. Tetapi, dalam berbagai kesempatan, pimpinan Angkatan Darat dan para pendukung Orde Baru lainnya menuduh bahwa dalam peristiwa ini Bung Karno „terlibat“, atau tidak mau bertindak tegas, atau bahkan bersimpati kepada PKI. Selalu dikemukakan oleh mereka bahwa PKI adalah dalang G30S atau penggerakannya. Bahwa sejumlah pimpinan PKI terlibat dalam rencana sejumlah perwira-perwira militer untuk mencetuskan G30S ini telah diakui sendiri oleh para pemimpin PKI. Tetapi, tidaklah bisa dikatakan bahwa PKI sebagai partai secara keseluruhan ikut terlibat dalam G30S.

Sampai sekarang, banyak sekali hal yang bersangkutan dengan G30S yang masih tetap menjadi misteri atau masih merupakan pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas. Misalnya : sampai di manakah kebenaran berita bahwa Dewan Jenderal mau mengadakan kudeta? Siapakah sebenarnya Syam Kamaruzaman itu? Apakah Suharto sudah mengetahui rencana G30S? Sampai di manakah CIA tersangkut dalam peristiwa ini? Apa sajakah peran Bung Karno dalam menghadapi G30S dan sesudahnya?

## ARTI TERGULINGNYA BUNG KARNO DAN HANCURNYA PKI

Sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur, sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai ada jawabannya. Meskipun masih banyak soal G30S yang belum jelas benar duduk perkaranya, tetapi satu hal sudah pasti, yaitu bahwa rezim militer Suharto dkk menjadikan masalah ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan PKI dan melalui kehancuran PKI ini untuk kemudian menggulingkan Bung Karno. Dan hal yang sudah pasti lainnya, ialah bahwa hancurnya kekuatan PKI dan jatuhnya Bung Karno adalah merupakan „kemenangan“ kubu imperialis, yang diketuai oleh AS.

Jadi, sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa dalam meninjau masalah G30S kita harus juga berusaha memperhitungkan faktor Bung Karno. Sebab, akhirnya, nasib Bung Karno terkait erat juga dengan peristiwa G30S ini. Para pendukung rezim militer Suharto memberi julukan „Gestapu Agung“ kepada Bung Karno, dan kemudian digulingkan dari kedudukan beliau sebagai presiden. Beliau telah

dikenakan tahanan rumah secara ketat, sesudah dijadikan sasaran demonstrasi yang terus-menerus digerakkan oleh pimpinan Angkatan Darat. Bung Karno, panglima tertinggi ABRI, meninggal dalam tahanan Angkatan Darat sesudah mengalami berbagai siksaan batin dan jasmani.

Rezim militer Suharto dkk yang didukung oleh Angkatan Darat dan Golkar sebagai tulang-punggung telah bertindak secara amat kejam dalam menumpas kekuatan PKI. Dengan tujuan utama menyingkirkan Bung Karno dari tampuk pimpinan negara dan bangsa, maka Suharto dkk menghancurkan lebih dahulu kekuatan PKI. Sebab, jelas bahwa sejak akhir tahun 50-an dan permulaan tahun 60-an PKI merupakan kekuatan pendukung politik Bung Karno yang paling gigih (ingat, antara lain : Manipol, Nasakom, Resopim, Trikora, Dwikora, Indonesia keluar dari PBB). Dan berbagai politik Bung Karno ini pada umumnya, atau pada pokoknya, adalah anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Karena itulah Bung Karno punya cukup banyak musuh, baik di luarnegeri maupun di dalam negeri.

## POLITIK BUNG KARNO ADALAH KIRI

Memang, sikap politik Bung Karno adalah pada pokoknya „kiri“. Politik „kiri“ yang dianutnya sejak tahun-tahun mahasiswa inilah yang membikin beliau seorang pejuang nasionalis yang besar. Kebesaran Bung Karno adalah berkat sikap politik beliau yang „kiri“, yang anti-imperialisme dan anti-kapitalisme, yang pro-rakyat. Sikap inilah yang dipertahankannya sampai terjadinya G30S. Dalam rangka ini perlu dicatat diselenggarakannya Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing KIAPMA, permulaan Oktober 1965, di Hotel Indonesia Jakarta, yang dibuka oleh Bung Karno. Konferensi internasional ini penyelenggaranya adalah Indonesia dan sasaran utamanya adalah Amerika Serikat.

Jadi, dalam meninjau masalah G30S, di samping menyorotinya dari segi pertentangan antara segolongan Angkatan Darat dan PKI waktu itu, kita perlu sekali memperhitungkan di dalamnya juga faktor Bung Karno dan faktor internasional (baca: perang dingin), yang merupakan latar-belakang yang juga cukup penting. Berbagai aspek G30S punyai kaitan yang erat dengan perang dingin. Karena itu, hancurnya kekuatan PKI dan digulingkannya Bung Karno oleh Suharto dkk adalah peristiwa penting yang menggembirakan bagi negara-negara Barat

Dari segi inilah kita dapat melihat mengapa dalam jangka lama rezim militer Suharto mendapat simpati, atau dukungan, atau bantuan dalam berbagai bentuk dan cara dari negara-negara Barat (terutama AS). Hancurnya kekuatan yang mendukung politik Bung Karno menyebabkan kemunduran besar dalam gelora perjuangan rakyat berbagai negeri melawan imperialisme dan kolonialisme. Itulah sebabnya, selama masa Orde Baru jiwa Konferensi Bandung menjadi loyo atau apinya jadi padam. Rezim militer Suharto dkk membikin akibat G30S sebagai sarana untuk menghapuskan arti penting dan bersejarah Konferensi Bandung. Ini wajar. Sebab semangat Konferensi Bandung adalah justru bertentangan sama sekali dengan tujuan politik rezim militer ini. Semangat konferensi Bandung banyak dijiwai oleh semangat „kiri“ Bung Karno.

## SUHARTO BUKANLAH PAHLAWAN BANGSA

Dalam mengenang kembali berbagai peristiwa yang berkaitan dengan G30S tahun 1965, sudah tentu saja kita harus menggugat pembunuhan besar-besaran - dan segala macam siksaan yang tidak berperikemanusiaan terhadap jutaan manusia tidak bersalah oleh militer dan para pendukung Suharto dkk. Menggugat masalah ini adalah kegiatan penting untuk mengingatkan bangsa kita supaya kebiadaban besar-besaran yang pernah terjadi di kalangan bangsa kita itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bukan itu saja. Menggugat berbagai kejahatan Suharto sekitar peristiwa G30S ini juga perlu untuk meyakinkan banyak orang bahwa Suharto dkk bukannya „pahlawan bangsa“ yang patut disanjung-sanjung seperti selama puluhan tahun itu.

Sekarang makin banyak bukti yang nyata bagi banyak orang bahwa Suharto bukanlah „bapak pembangunan“, bukan pula Pancasila sejati. Banyaknya cerita yang berbau busuk sekitar keluarganya (ingat: kasus Ibu Tien, Sigit, Tutut, Bambang, Tommy, Ari, Probosutedjo dll) meyakinkan banyak orang bahwa Suharto adalah seorang kepala keluarga yang tidak pantas dijadikan contoh bangsa. Selama lebih 32 tahun Suharto, yang mengkhianati Bung Karno ini, telah disanjung-sanjung oleh para pendukung Orde Baru.

Sudah terlalu lama G30S telah dijadikan dalih atau alasan oleh Suharto dkk untuk menyebar racun perpecahan, dengan indoktrinasi yang menyesatkan tentang Bung Karno dan pendukung utamanya (PKI). Indoktrinasi ini, yang dijalankan secara besar-besaran dan dalam jangka yang lama sekali, menimbulkan kerusakan mental yang besar sekali. Indoktrinasi lewat buku-buku di sekolah, lewat film dan televisi, lewat ceramah atau seminar dan bermacam-macam kursus, telah membikin „buta“ banyak orang. Sampai sekarang, dalam masyarakat kita, masih banyak orang yang terpengaruh oleh indoktrinasi Orde Baru tentang Bung Karno dan PKI ini. Mereka ini terdapat di berbagai partai politik, badan pemerintahan, DPR/DPD, orop, kalangan agama (termasuk kalangan Islam)

## GUNAKAN 30 SEPTEMBER UNTUK MENGGUGAT ORBA

Sekarang ini terbukalah kesempatan untuk menyajikan kepada bangsa Indonesia hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi atau dipalsu oleh Orde Baru mengenai G30S. Kita semua harus berusaha membongkar, sejauh mungkin, latar-belakang peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Antara lain, kita harus membikin 30 September jadi hari menggugat berbagai kejahatan rezim militer Suharto dkk. Menggugat berbagai kejahatan rezim militer Suharto dkk ini adalah kewajiban kita semua. Ini perlu kita lakukan, demi pelurusan sejarah, demi rekonsiliasi nasional, demi persatuan bangsa, dan demi pendidikan generasi yang akan datang. Generasi muda kita, dan generasi yang akan datang, tidak boleh diracuni oleh segala pembusukan yang telah terjadi selama Orde Baru

Dalam rangka ini pulalah tulisan kali ini menyambut adanya kegiatan-kegiatan di berbagai tempat di Indonesia untuk menjadikan tanggal 30 September sebagai hari untuk membongkar berbagai kejahatan Orde Baru terhadap perikemanusiaan. Di antara kegiatan-kegiatan itu terdapat pertemuan “Mengungkap Tabir ‘65” di Jakarta (tanggal 29-30 September) yang diselenggarakan oleh Lakpesdam NU, Yappika, Elsam, SNB, PEC, Pakorba,

LPRKROB, LPKP, JKB dll.

Tabir 65 ? memang harus dibuka. Dan, seluas-luasnya.

Paris, 26 September 2003

[http://kontak.club.fr/Pulihkan\\_nama\\_baik\\_Bung\\_Karno\\_dan\\_cabut\\_TAP\\_MPRS\\_033-1967.htm](http://kontak.club.fr/Pulihkan_nama_baik_Bung_Karno_dan_cabut_TAP_MPRS_033-1967.htm)

**PULIHKAN NAMA BUNG KARNO!**

**DAN CABUT TAP MPRS 33/1967!**

( Oleh :A. Umar Said )

Renungan dan catatan tentang BUNG KARNO (12)

Di antara berbagai kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-100 Bung Karno yang akan datang ini ada satu hal penting yang patut mendapat perhatian seluruh kekuatan pro-reformasi dan pro-demokrasi, yaitu: menjadikan kesempatan yang bersejarah ini untuk mulai dilancarkannya gerakan besar-besaran untuk menuntut dicabutnya Ketetapan MPRS nomor 33/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno. Sebab, dewasa ini, dalam perjuangan nasional untuk me-reformasi segala produk atau akibat buruk politik Orde Baru, masalah dicabutnya TAP MPRS 33/1967 tentang Presiden Sukarno adalah termasuk agenda yang sangat penting.

Tuntutan dicabutnya TAP MPRS 33/1967 ini sudah juga diajukan oleh Keluarga Besar Bung Karno, melalui Rachmawati Soekarnoputri. Menurut berita pers, ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), (Rachmawati) tanggal 6 Mei 2001 telah bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Merdeka selama 2 jam. Dalam pertemuan tersebut, Rachmawati menyampaikan surat permohonan pencabutan TAP MPRS 33/1967 itu dalam rangka memperingati seratus tahun Bung Karno, yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2001 (Kompas 8 Mei 2001)

Kalau dipandang dari berbagai segi, tuntutan Rachmawati kepada Presiden Abdurrahman Wahid supaya TAP MPRS 33/1967 dicabut adalah persoalan besar. Sebab, masalah ini berkaitan dengan pentingnya mengkoreksi salah satu dari begitu banyaknya kesalahan-kesalahan Orde Baru, yang dampak buruknya masih terasa sampai sekarang. Artinya, masalah Bung Karno adalah juga MASALAH KINI, atau, setidak-tidaknya, mempunyai hubungan erat sekali dengan masa sekarang.

Oleh karena itu, walaupun kasus TAP MPRS 33/1967 sudah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, adalah penting sekali bagi para pakar sejarah, pakar hukum, pakar ilmu sosial (dan para pakar di bidang-bidang lainnya), untuk bersama-sama dengan berbagai kalangan masyarakat (universitas, LSM, pesantren, ornop lainnya dll) mengangkat masalah ini, untuk dipelajari kembali atau untuk dipersoalkan kembali. Dengan mengangkat kembali masalah ini tinggi-tinggi di depan opini publik, maka gerakan atau tekanan dapat digalang bersama-sama, sehingga akhirnya TAP MPRS 33/1967 dapat dicabut.



## APAKAH TAP MPRS 33/1967 ITU ?

Sidang Istmewa MPRS Tahun 1967 telah diselenggarakan oleh para pendiri Orde Baru di Jakarta antara 7 sampai 12 Maret (1967). Perlu diingat bersama-sama terlebih dulu, bahwa walaupun „resminya“ Bung Karno waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi sebenarnya kekuasaannya sudah diperlemah oleh Suharto dkk sejak Oktober 1965, setelah terjadinya G30S (atau Gestok, menurut Bung Karno). Kekuasaan Bung Karno kemudian dipreteli secara lebih besar-besaran oleh Suharto dkk dengan dikeluarkannya - secara paksa atau dengan intimidasi - Surat Perintah Sebelas Maret dalam tahun 1966, yang kontroversial itu.

Dengan Super Semar inilah Suharto dkk telah membubarkan PKI (tanggal 12 Maret 1966) beserta seluruh ormas-ormasnya, sesudah berbulan-bulan - sejak Oktober 1965 ratusan ribu manusia tidak bersalah telah dibunuh secara besar-besaran dengan cara-cara yang tidak perlu lagi disebutkan dalam tulisan ini. Kemudian ia menangkapi juga menteri-menteri dan anggota-anggota DPR-GR yang mewakili PKI, PNI atau ormas kiri. Suharto dkk juga mengangkat 136 anggota MPRS (yang baru, yang terdiri dari orang-orang „mereka“) untuk mengganti mereka yang sudah „dibersihkan“ terlebih dulu. Padahal, Suharto semestinya tidak berhak melakukan hal yang demikian itu.

Maka, MPRS yang demikian itulah yang dalam bulan Maret 1967 telah memutuskan TAP nomor 33/1967 , yang dalam pasal nomor 3-nya berbunyi: “Melarang Presiden Sukarno melakukan politik sampai dengan pemilu dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945”. Dalam pasal 4 TAP MPRS itu disebutkan bahwa Jenderal Suharto diangkat sebagai Pejabat Presiden sehingga dipilihnya Presiden oleh MPRS hasil Pemilu.

Nah, dengan TAP 33/1967 yang dibikin oleh “MPRS” yang legitimasinya semacam itulah (!!!) segala kekuasaan Bung Karno sebagai kepala negara, pemimpin besar revolusi, dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata telah dilucuti. Mereka yang membikin TAP untuk melucuti kekuasaan Bung Karno itu adalah “wakil-wakil rakyat”, yang telah digiring oleh TNI-AD dalam suasana terror yang sedang melanda seluruh negeri waktu itu. Lewat kampanye besar-besaran anti-PKI telah diselipkan juga kampanye anti-Sukarno dalam berbagai bentuk. (Bagi mereka yang kini sudah agak lanjut usia, tentunya masih terngiang-ngiang di telinga mereka slogan-slogan “Sukarno Gestapu Agung”, “Sukarno dalang Gestapu” dll).

## PUNCAK KUDETA “MERANGKAK”

TAP MPRS 33/1967 yang “memecat” Bung Karno sebagai presiden RI ini merupakan puncak dari sederetan panjang pembangkangan (insubordinasi) Suharto dkk kepada Bung Karno sebagai kepala negara dan panglima tertinggi. Berbagai pembangkangan ini secara nyata sudah dimulai sejak 1 Oktober 1965, (sesudah pecahnya G30S). Sejumlah perintah Bung Karno tidak dilaksanakan oleh Suharto dkk. Sebaliknya, Suharto dkk melakukan banyak langkah-langkah yang bertentangan dengan kemauan atau politik Bung Karno. (Dewasa ini, amatlah penting adanya suatu studi yang menyeluruh tentang berbagai pembangkangan Suharto dkk

terhadap Bung Karno ini, yang perlu dilakukan oleh para pakar hukum dan militer, oleh masyarakat sejarawan dll).

TAP MPRS 33/1967 untuk menggulingkan Bung Karno adalah realisasi “kudeta merangkak” secara “konstitusional” yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh pimpinan TNI-AD waktu itu. Ketetapan MPRS ini adalah manifestasi terpusat pertentangan antara garis politik revolusioner anti-imperialis Bung Karno berhadapan dengan sikap pimpinan TNI-AD yang anti-politik Bung Karno dan sekaligus anti-PKI. Ketetapan MPRS 33/1967 ini adalah pengejawantahan titik pertemuan antara kepentingan kekuatan asing (imperialisme dan neo-kolonialisme) dan kekuatan kontra-revolusi dalam negeri. Apa yang tidak bisa dicapai oleh berbagai gerakan kontra-revolusi (terutama sekali PRRI-Permesta) telah tercapai oleh ketetapan MPRS ini, dalam situasi yang baru dan oleh pelaku-pelaku yang berbeda. Ringkas-padatnya, ketetapan ini adalah pengkhianatan terhadap revolusi 45, artinya pengkhianatan kepada bangsa.

Karena hebatnya indoktrinasi beracun Orde Baru/GOLKAR yang dibarengi oleh pemalsuan sejarah dalam tempo yang begitu lama (lebih dari 32 tahun!) maka banyak orang yang kabur atau bahkan keliru memandang persoalan ketetapan MPRS 33/1967. Berseberangan dengan apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Orde Baru/GOLKAR, penggulingan Bung Karno bukanlah tindakan untuk menyelamatkan republik kita, bahkan merusaknya. Apa yang kita saksikan dewasa, dengan timbulnya begitu banyak persoalan parah yang sedang melanda negara dan bangsa, adalah buktinya.

Oleh karena itu, tergulingnya Bung Karno secara definitif oleh ketetapan MPRS 33/1967 adalah MASALAH BESAR dalam sejarah bangsa Indonesia. Memang, pertama-tama, TAP 33/1967 adalah urusan keluarga Bung Karno sendiri (putra-puterinya atau saudara-saudara terdekatnya yang lain). Tetapi, di samping itu, masalah ini adalah juga urusan banyak orang lainnya. Masalah Bung Karno bukanlah hanya urusan para pengikut Marhaenisme atau para pendukung politiknya saja! Yang menderita (secara lahiriyah atau bathiniyah) atau yang dirugikan oleh TAP 33/1967 berjumlah puluhan atau ratusan juta orang. Bahkan, bukan itu saja!!! Kalau kita renungkan dalam-dalam, yang dirugikan oleh TAP 33/1967 adalah perjuangan bangsa sebagai keseluruhan.

## BUNG KARNO ADALAH KORBAN KONTRA-REVOLUSI

Anak-judul tulisan ini mungkin mengagetkan orang-orang tertentu, atau, setidaknya, membikin mereka bertanya-tanya apakah memang benar demikian adanya. Bahwa Bung Karno menjadi sasaran imperialisme, mungkin masih agak mudah dimengerti oleh banyak orang. Tetapi, bahwa ia juga menjadi sasaran kontra-revolusi dalam negeri yang bernama ORDE BARU/GOLKAR adalah suatu hal yang, agaknya, masih belum difahami secara jelas oleh sebagian orang. Padahal, kalau dilihat dari perjalanan sejarah hidup Bung Karno, maka jelas sekalilah bahwa ia telah sering sekali menjadi sasaran berbagai serangan kontra-revolusi dalam negeri. Dan, kalau kita tinjau perjalanan sejarah bangsa dan juga mengingat tujuan Revolusi 17 Agustus 45, maka jelaslah bahwa Bung Karno akhirnya telah menjadi korban satu kontra-revolusi dalam negeri yang paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Kontra-revolusi yang paling besar itu bernama : ORDE BARU (artinya: Golkar).

Dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri Orde Baru/GOLKAR terhadap Bung Karno sebagai kepala negara dan pemimpin bangsa dalam tahun 1965, 1966 dan 1967, maka jelaslah bahwa Orde Baru/GOLKAR adalah, pada hakekatnya, suatu KEKUATAN KONTRA-REVOLUSIONER. Jati-diri Orde Baru/ GOLKAR sebagai kontra-revolusi besar-besaran itu tidak hanya dimanifestasikan dalam aksi-aksi para pendirinya dalam melumpuhkan kekuatan pendukung Bung Karno dalam tahun 1965 dan 1966, melainkan juga dalam menggulingkan “secara konstitusional” Bung Karno dalam tahun 1967. Kemudian, jati-diri Orde Baru/GOLKAR sebagai kekuatan kontra-revolusioner itu dimanifestasikannya lebih jelas lagi dalam berbagai politiknya atau prakteknya, terus-menerus, selama lebih dari 32 tahun.

Adalah penting sekali bagi bangsa kita, dewasa ini maupun di kemudian hari, untuk menghayati bahwa Orde Baru adalah satu kekuatan kontra-revolusi yang paling ganas, yang paling besar, dan yang mempunyai ciri-ciri fasis. Mengerti secara jelas bahwa Orde Baru/GOLKAR adalah, pada intinya, suatu KONTRA-REVOLUSI ini sangat diperlukan untuk mengerti pula, mengapa Bung Karno telah digulingkan, dan mengapa untuk menggulingkannya itu perlu sekali dihancurkan terlebih dulu kekuatan pendukungnya, terutama PKI. Juga mengerti bahwa yang menjadi korban penggulingan Bung Karno bukannya hanya para pendukungnya saja, melainkan juga mereka yang tidak menyukai politiknya. Karena, sistem politik Orde Baru/GOLKAR adalah regime militer diktatorial atau otoriter yang menindas seluruh bangsa, dan hanya menguntungkan sebagian kecil sekali golongan masyarakat.

#### MENGAPA TAP 33/1967 HARUS DICABUT

Perjuangan untuk dicabutnya TAP MPRS 33/1967 mempunyai arti besar bagi bangsa kita yang sedang memperjuangkan reformasi. Perjuangan ini tidak mudah, mengingat masih banyaknya kekuatan sisa-sisa Orde Baru/GOLKAR di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga di antara tokoh-tokoh masyarakat. Karenanya, juga akan makan waktu lama, barangkali. Tetapi, pekerjaan ini perlu dilakukan juga terus-menerus, dan dalam berbagai bentuk dan cara. Sebab, memperjuangkan dicabutnya TAP MPRS 33/1967 merupakan pendidikan politik bagi banyak orang, dan juga satu cara untuk menghormati Bung Karno sebagai guru pemersatu bangsa

Di samping itu, dalam proses memperjuangkan dicabutnya TAP tersebut maka berbagai masalah penting lainnya akan selalu terungkap terus juga, yang menunjukkan watak yang sebenarnya Orde Baru/GOLKAR. Umpamanya, bahwa TAP 33/1967 adalah kelanjutan logis dari tindakan buruk lainnya yang dilakukannya sebelumnya, yaitu TAP 25/1966 mengenai dilarangnya PKI dan penyebaran Marxisme. TAP MPRS tentang larangan PKI ini jelas sekali bertentangan sekali dengan politik Bung Karno, dan jelas juga bahwa Bung Karno tidak menyetujuinya.

Perlulah difahami oleh sebanyak mungkin orang, bahwa digulingkannya Bung Karno dengan TAP 33/1967 adalah, antara lain karena sikapnya yang tidak mau membubarkan PKI. Di sinilah letak keteguhan Bung Karno dalam mempertahankan prinsip-prinsip perjuangan yang sudah diembannya sejak umur 26 tahun sampai akhir hayat hidupnya. Sejak muda ia meyakini pentingnya persatuan revolusioner nasional, pentingnya kerjasama antara golongan nasionalis, agama dan komunis, dalam menghadapi tugas-tugas perjuangan bangsa.

Karena prinsip-prinsipnya inilah, karena gagasan besarnya inilah, dan juga karena keteguhannya dalam mencengkam pendiriannya inilah maka ia bersedia bertahun-tahun masuk dalam penjara dan pembuangan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan, dan di sinilah kehebatan Bung Karno: karena teguh pada pendiriannya inilah maka sampai akhir hidupnya ia tidak mau mengkhianati PKI, sebagai salah satu di antara pendukung perjuangan politiknya.

Dalam kaitan ini, adalah menarik untuk dikutip satu bagian kecil pidato pembelaan Sudisman, salah satu dari pimpinan PKI didepan Mahmilub tanggal 21 Juni 1967, yang berbunyi :

Saya dan PKI tidak pernah memberikan gelar ini atau itu kepada Bung Karno, tidak pernah memberikan agung ini, atau agung itu, sebab gelar satu-satunya yang tepat adalah „Bung Karno“ sehingga nama Bung Karno berkembang dari Sukarno (ada kesukaran) ke Bung Karno (artinya bongkar kesukaran). Sebagai sesama orang revolusioner, justru dalam keadaan sulit seperti sekarang inilah saya terus membela dan mempertahankan Bung Karno, sebab sesuatu mengatakan bahwa „in de nood leert men zijn vrienden kennen“ (dalam kesulitan kita mengenal kawan) dan „yo sanak yo kadang, yen mati aku sing kelangan“ kata bung Karno untuk PKI.

Sebagai arek Surabaya, saya sambut uluran tangan Bung Karno dengan „ali-ali nggak ilang, nggak isa lali ambek kancane“ (artinya tidak bisa lupa sama kawannya). Kenapa saya bela dan pertahankan Bung Karno? Sebabnya ialah sepanjang sejarahnya Bung Karno konsekwen anti-imperialis sampai berani menyemboyan „go to hell with your aid“ terhadap imperialis Amerika Serikat. Bung Karno setuju mengikis sisa-sisa feodal dengan mengadakan landreform terbatas dan Bung Karno setia pada persatuan tenaga-tenaga revolusioner. Inilah dasar daripada instruksi saya pada anggota-anggota PKI, untuk masuk dan bentuk „Barisan Sukarno“ (kutipan habis).

Para pembaca yang budiman! Bagian terakhir tulisan ini diketik sambil menikmati latar-belakang suara yang keluar dari casette yang memperdengarkan pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB tahun 1960. Ketika mendengarkan dan merenungkan isi pidato Bung Karno itu, maka hati penulis dipenuhi oleh perasaan bangga, geram, senang dan berang. Alangkah bagusya bahasa Inggrisnya Bung Karno. Alangkah indahnya kalimat-kalimat dalam pidatonya. Alangkah mendalamnya arti isi berbagai bagian pidatonya itu. Alangkah besarnya wawasan politik dan pendekatan falsafahnya ketika berbicara tentang berbagai masalah dalam negeri Indonesia dan juga berbagai masalah internasional dewasa itu.

Dalam pidatonya itu ia dengan bagus sekali mengangkat masalah pentingnya menghubungkan perjuangan nasional setiap bangsa dan rakyat dengan perjuangan bangsa lain, pentingnya setiap bangsa berdiri di atas kaki sendiri tetapi juga kerjasama dengan negeri lain. Ia menjelaskan, dengan cara yang mempesonakan, perjuangan rakyat Aljazair, Congo dll melawan kolonialisme. Adalah dengan keberanian dan ketegasan yang menonjol sekali ketika ia memecam PBB (setengah memperolokkannya!) karena masih mengucilkan RRT dari keanggotan PBB. Di depan sidang PBB itu, ia mengajukan kritik-kritik pedas terhadap imperialisme. Ketika mendengar tepuk-tangan yang begitu meriah berkali-kali selama pidatonya itu, hati pun ikut melonjak-lonjak karena bangga.

(Catatan selingan : Penulis makin yakin, bahwa untuk mengerti tentang kebesaran Bung Karno, perlulah membaca karya-karya dan mendengar pidato-pidatonya. Kebesaran Bung Karno bukan karena bagusya tulisan dan pidato-pidatonya saja, melainkan berkat isinya yang dalam dan memberikan inspirasi. Bukan itu saja! Kebesarannya adalah juga berkat ketulusan perjuangannya, satunya antara kata dan perbuatan dalam mengabdikan kepada kepentingan bangsa. Oleh karena itu bacalah karya-karyanya, dan dengarkanlah pidato-pidatonya, para saudara!)

Sesudah mendengar pidatonya di depan PBB itu, maka nyatalah bagi penulis bahwa Bung Karno memanglah tokoh besar bangsa Indonesia, yang sampai sekarang belum ada tandangnya. Dan ketika merenungkannya, maka dalam hati penulis timbul juga rasa marah. Alangkah besarnya kerugian bangsa kita karena kehilangan orang yang sebesar itu, gara-gara kontra-revolusi yang mengkhianatinya! Dan yang lebih membikin geram adalah bahwa Bung Karno telah dijatuhkan dan kemudian hanya diganti oleh "Kepala negara" yang berkelakuan sebagai kriminal kaliber besar (ingat : kasus pengumpulan kekayaan secara tidak sah serta berlebihan) dan diktator yang bertindak secara fasis (ingat : kasus berbagai pelanggaran HAM selama puluhan tahun).

Bung Karno telah mengangkat derajat dan harga diri bangsa, melalui perjuangannya puluhan tahun sejak muda. Tetapi, seperti hasilnya yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini, Suharto dkk. lewat Orde Baru/GOLKAR-nya bertindak sebaliknya : membikin terpuruknya bangsa, baik di skala nasional maupun internasional!

Mengingat itu semua, maka adalah kewajiban yang benar (dan adil!) bagi semua orang yang mendambakan dipulihkannya nama Bung Karno untuk aktif berpartisipasi dalam gerakan untuk menuntut dicabutnya TAP 33/1967. Perjuangan ini adalah untuk kebaikan kita semua, baik untuk generasi sekarang, maupun generasi yang akan datang.

Paris, 9 Mei 2001

\*\*\*\*\*

Ajakan renungan . Umar Said

(Tulisan berikut di bawah ini juga disajikan dalam website

<http://perso.club-internet.fr/kontak/>

## PENGALAMAN KORBAN PERISTIWA 65 - ADALAH GURU BESAR BANGSA

Ketika kita memperingati "40 tahun peristiwa 65" apa sajakah yang perlu kita kenang kembali atau kita tarik sebagai pelajaran penting bagi bangsa kita dewasa ini dan juga untuk anak-cucu kita di kemudian hari ? Boleh dikatakan, semuanya! Semua soal yang berkaitan dengan peristiwa 65 adalah penting. Karena itu, peristiwa 65 adalah rumit, dan bersegi banyak. Dalam persoalan besar yang sangat bersejarah bagi bangsa dan Republik Indonesia ini ada aspek PKI, ada aspek Bung Karno, aspek TNI-AD, aspek Suharto, aspek golongan Islam, aspek CIA. Di dalamnya terdapat juga faktor sejarah, faktor politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dan

semuanya itu ada sangkut-pautnya - secara langsung atau tidak langsung - dengan banyak persoalan dalam negeri dan internasional pada waktu itu.

Mengingat begitu besar dampak peristiwa 65 untuk kehidupan bangsa kita, maka sebaiknya (atau sepatutnya) makin banyak orang bisa menulis tentang itu semua. Sehingga berbagai masalah peristiwa 65 bisa dilihat secara betul-betul jernih dan juga secara menyeluruh. Karena, seperti kita saksikan sendiri masing-masing selama ini, banyak sekali soal yang berkaitan dengan peristiwa 65 telah diputar-balikkan, direkayasa, dipalsukan, dibohongkan, disulap dan “divermaak” oleh Orde Baru. Dan dalam jangka waktu yang lama sekali pula, yaitu lebih dari 32 tahun !!! Jadi, tidak tanggung-tanggung.

Dalam tulisan yang kali ini titik berat diletakkan pada ajakan kepada semua untuk merenungkan bersama masalah penganiayaan dan penyiksaan dilakukan oleh para pembangun rejim militer Orde Baru. Karena, penganiayaan biadab dan penyiksaan sadis adalah salah satu di antara banyak “senjata ampuh” yang dipakai oleh Orde Baru dalam melumpuhkan kekuasaan Bung Karno dan dalam memukul PKI beserta pendukung-pendukungnya. dan penyiksaan (yang dilakukan dalam berbagai bentuk) adalah suatu cara rejim militer Orde Baru untuk kemudian melakukan terror permanen di seluruh negeri, guna memperkokoh cengkeraman kekuatan militernya. Dalam arti tertentu, bisalah kiranya disimpulkan bahwa penganiayaan dan terror adalah satu dan senyawa dengan Orde Baru.

## PUNCAK KEBIADABAN DALAM SEJARAH BANGSA

Barangkali, penganiayaan dan penyiksaan oleh kesatuan-kesatuan TNI-AD (dan kalangan kecil dari golongan Islam) terhadap anggota, simpatisan kader-kader PKI dan pendukung Bung Karno, merupakan puncak kebiadaban yang pernah dibikin oleh segolongan kecil bangsa kita terhadap sesama warganegara. Dan, mungkin juga, puncak kebiadaban yang mengerikan ini adalah satu-satunya yang muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan, Insya Allah!

Kalau mengingat betapa hebatnya penganiayaan atau sadisnya penyiksaan terhadap begitu banyak orang yang ditangkap dan diinterogasi oleh aparat militer maka kita bisa bertanya-tanya apakah bangsa kita ini masih pantas dinamakan bangsa yang beradab? Apakah kita bisa membanggakan diri sebagai bangsa yang mayoritasnya pemeluk agama?

Selama 32 tahun pemerintahan rejim militer Suharto dkk orang tidak bisa dan juga tidak berani buka suara tentang kebiadaban, kebuasan, dan kebengisan yang terjadi dalam tahun-tahun pertama ketika Suharto dkk menyerobot kekuasaan dari tangan Bung Karno. Sebab, berani buka suara waktu itu berarti pasti menghadapi penangkapan dan penganiayaan.

Baru setelah Suharto dengan Orde Barunya dipaksa turun dari kekuasaan dalam tahun 1998, sedikit demi sedikit muncullah beraneka ragam cerita dan kesaksian tentang betapa hebatnya penganiayaan dan penyiksaan terhadap para korban. Sebagian kecil sekali dari cerita dan kesaksian ini sudah mulai diketahui oleh publik melalui, antara lain, artikel atau tulisan dalam majalah, memoire dalam bentuk buku.

Mengingat banyaknya kasus penganiayaan dan hebatnya penyiksaan, dan mengingat juga besarnya orang yang telah menderita perlakuan yang tidak berperikemanusiaan ini, maka kiranya kita semua perlu mendorong sebanyak mungkin orang untuk terus menulis tentang itu semua lebih banyak lagi. Menulis (atau menceritakan) tentang kebiadaban penganiayaan dan penyiksaan yang telah dilakukan oleh sebagian golongan militer (dan sebagian kecil golongan Islam pada waktu itu) merupakan tugas penting generasi bangsa kita dewasa ini. Sebab, kalau tugas penting ini tidak dikerjakan sekarang, maka saksi-saksi hidupnya akan makin berkurang atau banyak pelaku-pelaku sejarahnya yang sudah keburu meninggal dunia.

## BESARNYA DAN LUASNYA PENGANIAYAAN

Sekadar untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama, pada akhir tahun 1965, dan dalam tahun-tahun 1966 dan 1967, hampir seluruh pemimpin dan kader PKI dari berbagai tingkat (propinsi, kabupaten, kota besar dan kota madya, kecamatan, bahkan kelurahan) di seluruh Indonesia ditangkap secara besar-besaran dan ditahan secara sewenang-wenang dalam jangka waktu yang lama. Sebagian besar di antara mereka dibunuh begitu saja dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan.

Banyak diceritakan sekarang bagaimana kejamnya siksaan terhadap mereka yang ditangkap itu selama diinterogasi. Besar di antara mereka itu terdiri dari para pemimpin atau kader bermacam-macam organisasi buruh, tani, nelayan, wanita, pemuda, tentara, pegawai negeri, dan golongan lainnya dalam masyarakat. Banyak di antara mereka yang disetrum listrik, disundut dengan puntung rokok, dipukuli dengan kawat berduri, digantung sampai berhari-hari, dipukuli beramai-ramai, ditusuk-tusuk dengan pisau atau bayonet, di-sel di ruangan gelap (tanpa sinar matahari sedikitpun) sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Sebagian di antara mereka disiksa di hadapan istri dan anak. Banyak yang sesudah disiksa tidak diberi pengobatan dan dibiarkan kesakitan sampai jangka lama. Banyak sekali orang tahanan yang tidak boleh berhubungan sama sekali dengan keluarganya. Tidak sedikit di antara tahanan wanita yang diperkosa atau dilecehkan kesusilaan mereka dengan berbagai cara. Semuanya ini sulit dibantah, karena saksi-saksinya masih ada, dan korban-korbannya pun banyak sekali yang masih bisa memberikan kesaksian.

Dampak siksaan atau penganiayaan ini besar sekali. Dari mulut ke mulut bocor juga berita tentang kekejaman yang diperlakukan terhadap para tahanan itu. Berita-berita inilah yang kemudian juga menimbulkan terror di kalangan keluarga (atau di kalangan teman-teman) yang ditahan. Ketakutan yang besar sekali terhadap militer menghinggapi kalangan luas dalam masyarakat di seluruh negeri waktu itu.

Dalam jangka lama semasa Orde Baru, tempat-tempat seperti Kodam, Korem dan Kodim di seluruh Indonesia merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh banyak orang biasa. (Ditakuti, tetapi tidak berarti juga dihormati). Sebab, sering sekali, orang-orang yang ditahan oleh Kodim adalah orang-orang yang dianggap mempunyai masalah. Masalah yang berkaitan dengan “keamanan”, yang arti polosnya ialah kekuasaan rezim militer.

Entah sudah berapa jumlah orang-orang yang pernah ditahan oleh Kodim (atau instansi militer bawahannya) di seluruh Indonesia. Seandainya tembok-tembok gedung Kodim di banyak tempat bisa bicara akan bisa menggigillah orang mendengar kisah-kisah tentang hebatnya dan juga banyaknya siksaan biadab yang telah dilakukan oleh para petugas militer waktu itu.

### KESAKSIAN PARA KORBAN ADALAH MILIK BERTAMBAH BANGSA

Kisah-kisah tentang penyiksaan atau penganiayaan oleh petugas-petugas militer ini sebenarnya sekarang ini dapat didengar dari banyak para korban peristiwa 65, para eks-tapol, dan juga keluarga mereka. Kesaksian mereka (beserta sanak-saudara mereka, dekat maupun jauh) adalah MEMOIRE KOLEKTIF dan merupakan milik bertambah bangsa, baik bagi generasi yang sekarang maupun bagi anak-cucu kita.

Dari kisah mereka itu bangsa kita sekarang dan anak-cucu kita akan mengetahui dengan jelas bahwa TNI-AD pernah melakukan kejahatan besar-besaran dalam bentuk siksaan biadab atau penganiayaan sadis terhadap sesama warganegara. Kisah para korban peristiwa 65 adalah sarana pendidikan moral yang sangat ampuh, atau alat pemupukan rasa perikemanusiaan yang sangat ideal. Kisah para korban peristiwa 65 tentang penyiksaan dan penganiayaan merupakan juga contoh kongkrit atau nyata tentang pelanggaran perikemanusiaan.

Dari segi inilah kita bisa melihat pentingnya mendorong atau menganjurkan kepada para korban peristiwa 65 (termasuk sanak-saudara, dan juga teman-teman terdekat mereka) untuk berusaha mengangkat kisah-kisah sebenarnya tentang pengalaman mereka mengenai penyiksaan dan penganiayaan oleh militer, terutama sekali dalam tahun-tahun pertama terjadinya G30S.

Dalam kaitan ini kiranya perlu sekali kita renungkan bersama -- secara dalam-dalam -- soal berikut: pengangkatan kisah-kisah ini tidak dimaksudkan untuk tujuan nista, yaitu: mengungkit-ungkit dendam, atau membuka luka-luka lama, sekadar melampiaskan kemarahan dan mengumbar hujatan, menyebar kebencian atau mengipasi permusuhan untuk tujuan luhur, yaitu : mengajak orang banyak untuk menjunjung tinggi-tinggi perikemanusiaan, mematuhi peradaban, memupuk rasa persaudaraan, dan menghormati perasaan keadilan, demi kebaikan bersama seluruh bangsa

Di samping itu, melalui kisah-kisah tentang penyiksaan dan penganiayaan ini kita bisa berusaha memberi sumbangan kepada reformasi di bidang jiwa dan moral di kalangan militer (terutama kalangan TNI-AD), supaya tidak mengulangi lagi kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran berat yang sudah banyak dan sering sekali dilakukan semasa Orde Baru.

Sebab, seperti sudah kita saksikan sendiri selama ini, jelaslah kiranya bahwa, penyiksaan, dan penindasan, dan pemerkosaan, dan pemerasan, dan persekusi, dan intimidasi, adalah praktek-praktek yang banyak dilakukan oleh kalangan militer dalam jangka waktu puluhan tahun. Ini dialami sendiri dengan bukti-bukti yang nyata oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan golongan di seluruh tanah air kita. Jadi, sekali lagi, fakta-fakta sejarah ini sulit sekali dibantah atau diungkiri.

Kalau dalam tahun-tahun pertama sesudah G30S tindakan yang biadab itu terutama sekali ditujukan kepada kader atau anggota dan simpatisan PKI dan pendukung



Bung Karno, maka kemudian juga golongan-golongan lainnya yang dianggap berbahaya bagi rejim militer mendapat gilirannya. Itu sebabnya maka terjadi peristiwa-peristiwa berdarah di Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Madura. Yang termasuk agak baru atau agak akhir adalah peristiwa di Timor Timur, kerusuhan rasial bulan Mei 1998, penculikan 14 anak muda PRD, penyerbuan gedung PDI di jalan Diponegoro, dan peristiwa Semanggi. Pembunuhan pejoang HAM, Munir, dalam tahun 2004, adalah bentuk yang lain lagi dari praktek biadab ini.

## GURU BESAR SOAL PENYIKSAAN DAN PERIKEMANUSIAAN

Jadi, dalam rangka memperingati 40 tahun peristiwa 65 mengungkap kembali kebiadaban penyiksaan dan membeberkan kebuasan penganiayaan aparat militer terhadap para korban adalah perlu atau dan juga tepat waktunya. Membeberkan kebiadaban penganiayaan dan terhadap korban peristiwa 65 tidaklah bermaksud untuk “memojokkan” salah satu golongan, bukan pula untuk “menghina” salah satu aparat Negara. Apalagi, bukan juga untuk sekadar “menjelek-jelekkan atau “menodai” kehormatannya.

Justru kebalikannya!!! Kita, sebagai bangsa, tidak ingin kalau kejahatan-kejahatan monumental yang sudah dilakukan oleh golongan militer (terutama TNI-AD) selama masa Orde Baru bisa terulang lagi, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Sebagai bangsa, kita butuhkan militer yang tidak berjiwa Orde Baru. Kita akan hormati militer yang anti-Orde Baru.

Kejahatan di masa yang lalu sudah makan terlalu banyak korban jiwa manusia. Dan penderitaan yang mengucurkan banyak airmata dan darah pun sudah berlangsung terlalu lama.

Tulisan ini diakhiri himbauan kepada para korban peristiwa 65 (termasuk juga para sanak-saudaranya dan teman-teman terdekatnya):

Pengalaman kalian adalah guru besar bangsa dalam soal-soal penderitaan dan perikemanusiaan! tanpa ragu-ragu pengalaman kalian sebagai sumbangan kepada pembangunan jiwa dan moral baru bangsa. Demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, yang juga dijiwai sungguh-sungguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika!

Paris, 14 Agustus 2005

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

From: "sally salido" <sallysalido@hotmail.de>

Date: Tue, 04 Oct 2005 16:21:21 +0000

Para pembaca yang terhormat,

Siapa saja yang ingin mencari "kebersihan Tragedi Nasional 30 September '65" harus berusaha menjelajahi seluruh sejarah perkembangan Republik Indonesia, dari hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. s/d terjadinya Tragedi Nasional tersebut dan sampai hari ini. Dibawah ini sedikit flashback:

Tragedi Nasional 30 September '65 adalah satu bagian matarantai dari aktivitas kaum Kolonial, terutama kaum Kolonial Belanda, dalam usaha untuk mempertahankan-

kan dan merehabilitasi kembali kekuasaan Kolonialisme diatas wilayah Republik Indonesia. Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak henti-hentinya serangan dan subversi kaum Kolonial Belanda, menyerang dan melakukan subversi untuk menghancurkan Republik Indonesia. Agresi Belanda I dan ke-II.

Pengkhianatan kekuatan politik yang pro kaum Kolonial Belanda didalam RI, seperti "joint venture" Pemerintahan Hatta-Sukiman dengan kaum Kolonial Belanda yang diwakili oleh van Mook yang melahirkan drive proposal, dan kemudian dengan apa yang dinamakan Peristiwa Madiun, dimana Pemerintahan Hatta-Sukiman dan bersama dengan Perwira TNI AD di Kementerian Pertahanan menterror/membunuh pada Pejuang, Pendiri dan Pembela RI, karena mereka adalah aktivis dan anggota Partai Komunis Indonesia. Republik Indonesia dengan aksi yang demikian dilemahkan, baiknya Presiden RI. Soekarno masih berada dalam kekuasaan Negara, sebagai Presiden RI., karena Presiden Soekarno mendapat kepercayaan Rakyat Indonesia yang tanpa batas.

Selanjutnya, Col.TNI AD Zulkifli Lubis membawa Meriam ke Istana Negara, menodong Presiden Soekarno untuk meletakkan jabatan sebagai Presiden R.I. Usaha coup d'etat Col. Zulkifli Lubis gagal. Justru itu, kaum Kolonial Belanda dengan bantuan antek-antek mereka dalam kekuasaan RI, selanjutnya mengorganisasi DII & TII Kartosuwiryo di Jawa-Barat dan DII & TII Daud Bereuh di Aceh yang berfungsi menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan Serikat Buruh dan Tani di Perkebunan-Perkebunan Teh, Karet,etc., karena kaum Kolonial Belanda masih beranggapan bahwa Perkebunan-Perkebunan tsb. adalah hakmilik mereka. Anehnya, Kementerian Pertahanan dibawah Jendral Nasution dan para Perwira TNI AD takpernah berhasil menangkap Kartosuwiryo atau Daud Bereuh.

Selanjutnya, diorganisasi Gerakan Separatisme hampir diseluruh wilayah RI, seperti apa yang dinamakan PRRI, PERMESTA, RMS, dan lain-lain seperti itu, untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Pimpinan Presiden Soekarno. Fungsi utama dari Perwira-Perwira TNI AD pada Gerakan Separatisme tsb. ialah menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota PKI, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Serikat Buruh, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota Barisan Tani Indonesia, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Pemuda Rakyat, CGMI, etc.

Kita kenal pembunuhan massal terhadap Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Partai dan Organisasi-Organisasi tersebut diatas di Situjuh-Payakumbuh Sumatra-Barat atas perintah Perwira TNI AD Col. Ahmad Husen, dan yang seperti itu, ratusan banyaknya disepanjang wilayah RI. Mereka tidak memberontak, mereka tidak melakukan Gerakan Separatisme melawan RI., tapi mereka di terror, dibunuh tanpa proses apapun. Hak Azasi Manusia? Convention Geneva yang mengatur Hak-Hak Asasi? Atau "Bill of Right" dari PBB yang menyatakan, bahwa "dignity of the people is inviolable?". Jendral A.H.Nasution sebagai Perwira TNI didikan kaum Kolonial di Breda dan para Jendral AD lainnya, tidak pernah mengenal/mendengar mengenai Hak Azasi Manusia.

Komando Militer didaerah KODAM menentukan hidup atau mati seseorang warga-negara RI, terutama kalau person tsb. anggota PKI, maka Hak-Kewarganegaraannya dirampas, diperkosa, ditahan tanpa proses apapun, atau ditembak mati dan hilang

taktentu rimbanya. Col.TNI AD Ahmad Husen, Col.TNI AD Simbolon dan yang lain-lainnya seperti itu, yang memberontak, mengadakan Gerakan Separatisme melawan RI. dianugrahi "Bintang Jasa" - kehidupan mewah dibawah Kementerian Pertahan di Jakarta.

Para Gubernur di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Komando Militer - KODAM-setempat. Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Perwira KODIM, pun Camat dan Lurah ditentukan Komando Distrik Militer setempat. Status ini dinamakan Jendral A.H.Nasution sebagai SOB.Jendral A.H.Nasution harus mempergunakan istilah bahasa Breda ( bahasa VOC). Penunjang kekuatan politik Presiden Soekarno, terutama PKI menjadi lemah, kendatipun demikian Presiden Soekarno, sebagai jawaban RI terhadap subversi asing, terutama subversi Belanda, men-Dekrit-kan penasionalisasian asset asing, terutama Modal Monopol Belanda di Indonesia dan dijadikan hakmilik RI, guna memperkuat Perekonomian Sektor Negara.

Dengan mempergunakan SOB (istilah VOC) Jendral A.H.Nasution menempatkan para Jendral TNI AD untuk mengambil Management disemua Perusahaan-Perusahaan, Perkebunan-Perkebunan dan system per-Bank-an, yang telah dijadikan PN-PN Negara RI.

Dimulai Business Militer dalam sejarah RI, dan Jendral A.H.Nasution mengeluarkan Doctrin apa yang dinamakan "Dwi Fungsi ABRI", untuk melegalisasi kekuasaan Militer tersebut. Militer bukan lagi Aparat Negara, melainkan Badan Eksekutif dalam Tatanegara RI, hanya masih "Dualisme" dengan Presiden Soekarno, dengan Manipol dan USDEK yang ditunjang oleh kekuatan politik NASAKOM, terutama oleh Partai Nasional Indonesia dan Komunis Indonesia.

Untuk merebut seluruh kekuasaan Negara RI, Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya harus menghancurkan NASAKOM, terutama menghancurkan PKI dan kemudian membunuh Presiden Soekarno. Bantuan untuk itu bukan hanya dari Amsterdam-Balanda, tetapi dan terutama dari CIA akan diperoleh oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, karena Pentagon yang sedang bankrupts/bankrott di Perang Vietnam, membutuhkan "orang Asia untuk membunuh orang Asia di Vietnam" untuk Petagon-USA (Doctrin Nixon).

Provokasi dan Provokasi - apakah dikalangan Partai-Partai Politik dalam NASAKOM, ataukah dikalangan ABRI, pun dikalangan Mahasiswa/Pemuda di organisasi oleh CIA bersama dengan para Jendral TNI AD dan puncaknya yang menentukan adalah 30 September'65, ketika konflik terbuka didalam intern TNI AD, diantara Perwira Tinggi TNI AD/para Jendral dengan Perwira Menengah TNI AD. Para Perwira Menengah seperti nama-nama yang sering disebut, seperti .Sabur, Col.Untung, Col.Latief, yang menolak permainan CIA dengan Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, untuk menjatuhkan Presiden Soekarno-artinya untuk menghancurkan RI-.

Para Perwira Menengah tsb. - Col.TNI AD Sabur, Col.TNI AD Untung, Col.TNI AD Latief tidak ada hubungan organik dengan PKI, karena mereka itu bukanlah anggota atau Pimpinan PKI. Kesempatan tsb.diatas diambil oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya untuk melaksanakan Program Red drive Proposal seperti di Madiun, seperti yang dijalankan oleh DII & TII, seperti yang dilakukan oleh para Perwira TNI AD yang melakukan Gerakan Separatisme PRRI, PERMESTA, etc.

Dalam tempo tigabulan pertama para Jendral TNI AD menjagal manusia Warganegara RI. dari Mentri s/d orang awam hampir 750.000 manusia; dan selanjutnya, Pemerintahan Jendral TNI AD -Golkar dengan nama ORDE-BARU hampir 1,7 juta Warganegara Republik Indonesia yang dijagal/dibunuh oleh TNI AD. Presiden Soekarno dibunuh a la Hamlet atau a la Singosari.

Dengan demikian Militer (TNI AD)-Jendral Suharto menguasai sepenuhnya Exekutive; KOPKAMTIB sebuah Aparat yang Non-Konstitusional, menguasai bukan hanya Exekutive untuk memperkuat kekuasaan Militer, tetapi juga menguasai Yudikative - menjatuhkan dan melaksanakan Hukuman atas Warganegara RI yang dituduh PKI atau Soekarnoisme dan diantaranya Tahanan Politik-Legislative -Para Jendral TNI AD meletakkan seratus orang para Perwira TNI AD MPR.

Mereka inilah sesungguhnya yang menguasai kekuasaan Negara RI - d 'etat Jendral AD berhasil. Dan GOLKAR diperlukan untuk applaude.

Amsterdam puas, karena Jendral TNI AD Suharto mengembalikan kepada "Pemiliknya" Perusahaan-Perusahaan dan Perkebunan-Perkebunan, etc. yang dinasionalisasi oleh Pemerintah NASAKOM.

Modal Asing bisa beroperasi di Indonesia tanpa pajak, dan Prof.Sadli bangga dengan Konsep Ekonomi-nya. IMF menganugrahi Jendral TNI AD Suharto jutaan US-Dollar.Pentagon gembira, karena Jendral Suharto-Golkar(Orde-Baru) tidak menentang Perang USA di Vietnam.

Tetapi Rakyat Indonesia kembali mengalami GLOBALISASI sebelum terminology ini populer di Media seperti sekarang. Dan Globalisasi Ekonomi ini dialami Rakyat Indonesia/Nusantara hampir 350 Tahun, yang dimulai oleh J.P.Coon, disempurnakan oleh Jendral van den Bosch (VOC), dijaga keras oleh Jendral Daendels, dan diteruskan oleh Jendral TNI AD Suharto-Golkar dengan nama ORDE-BARU. Pemerintahan sekarang? ORDE-BARU dalam bentuk yang diselubungi oleh tabir sutra yang tipis.

Para Tehnokrat sekarang ini yang berada di Institut-Institut Ilmu Pengetahuan, seperti LIPI atau CSIS, etc. sibuk mengobrol "Apakah Jendral Suharto terlibat dalam melakukan Genoside 30 September'65". Terang-terangan Exekutif, Yudikative dan Legislative dikuasai oleh para Jendral TNI AD dan masih ingin mengajukan pertanyaan seperti itu, Sebagai Sarjana Tinggi adalah sangat menyedihkan atau usaha untuk mengelabui mata 200 juta Rakyat Indonesia.Penarik Beca dari Tanjungperiok, di Manggarai, s/d etc. dengan pengalaman pengamatan mereka, mereka mengerti sangat, bahwa Militer, dibawah Komando para Jendral TNI AD melakukan coup d'etat dan untuk itu membunuh ribuan manusia, tetangga dan anggota keluarga mereka.

Dalam waktu yang sama, sekarang ini para Sarjana CSIS sibuk mengobrol/Seminar mengenai "Pertahanan Nasional" atau "Keamanan Nasional" atau terminology apalagy, yang seperti itu. Hanya para Tehnokrat tsb. dalam Paper mereka tak pernah menyebut, bahwa masalah Pertahanan Nasional menyangkut erat masalah Perekonomian Nasional/Sektor Negara yang kuat.

Doctrin Pertahanan Nasional yang bagaimana yang akan bisa dirumuskan oleh CSIS, kalau Perekonomian Sektor Negara berada ditangan global corporation of multinational company?

Kalau TNI AD hanya berfungsi untuk menjagal/membunuh para Patriot, Pendiri, Pembela Republik Indonesia, semenjak RI diproklamasikan? Kalau para Jendral TNI sudah tidak mempunyai harga diri sebagai Bangsa Merdeka, bahwa disaat Senat USA meng-Undang-kan EMBARGO penjualan alat-alat tehnik Militer dan Persenjataan ke Republik Indonesia, Mentri Pertahanan RI memerintahkan untuk melakukan latihan Bersama antara Angkatan Laut RI dengan Angkatan Laut USA beberapa bulan yang lalu di wilayah perairan RI?. Kalau Rakyat Indonesia lapar, sakit, penganggur, etc?

Delegasi Kementrian Pertahan RI hari ini membicarakan di Moskow dengan Pemerintahan R.F.Russia mengenai pembelian senjata (kemungkinan utang jangka panjang) seperti beberapa biji Pesawat Tempur SU 27, beberapa biji Helicopter, beberapa biji Peluru-Kendali, beberapa buah Kapal Selam, etc. Andaikan Delegasi tsb. berhasil mencapai persetujuan dengan Utang Jangka Panjang pembelian persenjataan tsb. dengan Pemerintah R.F.Russia, bagaimana Pesawat-Pesawat tsb. bisa terbang tanpa BBM?, karena Minyak telah diberikan oleh Yusuf Kala/Aburizal Bakrie pada "Majikan mereka" Exxon dan Texaco.

Justru itu, kalau para Sarjana di CSIS ingin merumuskan Doctrin Pertahan Nasional, pertama-tama harus menasionalisasi Asset Asing/Kapitalmonopol Asing di Indonesia, terutama yang mempromosi dan membantu Gerakan Separatisme melawan RI dan re-nasionalisasi BUMN-BUMN yang di-divertasi dan membantu perkembangan Industri Nasional untuk memperkuat Perekonomian Sektor Negara, seperti yang diajukan oleh Program Tuntutan ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT.

60 Tahun Sejarah Kemerdekaan RI, tapi Rakyat Indonesia belum mengenal apa itu Hak Azasi Manusia dan Yusril Ihza Mahendra yang memegang Mentri Kehakiman dan Hak-Hak Manusia dalam dua pemerintahan berusaha menutupi kejahatan genoside Jendral TNI AD -Golkar. Rakyat Indonesia belum pernah udara , karena Rakyat Indonesia mengenal SOB dan sebagainya. Rakyat Indonesia tidak mengenal apa itu Kesejahteraan Sosial, hanya mengenal miskin, lapar, sakit busunglapar, ditindas dan dihina oleh penguasa.

Justru itu, pemutarbalikkan sejarah Rakyat Indonesia, takkan membawa akhir yang baik, karena lambat atau cepat Rakyat Indonesia akan meluruskan sejarahnya sendiri. Perdura lo que un pueblo defiende = Segala perkembangan ditentu oleh Rakyat, seruan Angkatan Bersenjata Venezuela.

Dr.rer.pol. A.Tchaniago  
Joseph-Oertgen-Weg 37  
45327 Essen – Germany  
E-Mail: sallysalido@hotmail.de

## Jenderal Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan

Kompas, Senin, 13 Agustus 2001

PERSEPSI, itulah yang memberi makna atas suatu realitas. Fakta yang sama dapat berbeda maknanya secara diametris akibat sudut pandang yang tidak sama. Makna sulit dikompromikan, terlebih jika dibalut ideologi. Peristiwa G30S, misalnya, bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai pengkhianatan Pancasila. Tindak balas yang dilakukan terhadap PKI menjadi layak dan sepantasnya. Banjir darah yang menewaskan antara 500.000-1.000.000 rakyat Indonesia, sekitar 700.000 orang ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum, menunjukkan dahsyatnya makna suatu peristiwa yang dicerna oleh kesadaran sosial suatu bangsa. Di sini upaya kompromi hanyalah kesia-siaan.

Orde Baru yang dibangun di atas darah dan mayat-mayat itu, menjadikan peristiwa G30S sebagai hantu yang menakutkan rakyat, yang setiap saat dapat muncul. Peristiwa ini menginspirasi Orde Baru membentengi rakyat dengan ideologi pembangunan melalui P-4.

Sebaliknya bagi Pemerintah AS, G30S adalah aib jika dibuka pada publik. Arsip-arsip menyangkut peristiwa ini disimpan rapat di pusat dokumen CIA, kendati peristiwa itu sendiri sudah 36 tahun berlalu. UU kebebasan memperoleh informasi AS memang menyebut batas 25 tahun usia suatu rahasia negara dapat dibuka untuk publik. Tapi ini bergantung pada pertimbangan presiden.

Zaman memang sudah berubah, generasi berganti, bahkan rakyat AS sedikitnya delapan kali menyenggarakan pemilu presiden, namun arsip peristiwa G30S tetap dikategorikan rahasia negara. Dibandingkan dengan aktivitas spionase, kontra spionase, dan perasi rahasia lainnya yang dilakukan AS di eks Negara tirai besi, Uni Soviet, yang hampir seluruh arsipnya sudah dibuka, peristiwa G30S dipandang jauh lebih sensitif.

Laporan CIA tahun 1967 menyebut peristiwa pembantaian ini merupakan salah satu yang terburuk sejak Perang Dunia II. Ia disejajarkan dengan pembantaian jutaan warga Yahudi oleh Nazi Jerman. Lantas jika CIA sendiri menyatakan peristiwa itu sebagai terburuk di dunia, lantas mengapa pelakunya tidak diseret ke Mahkamah Internasional, seperti halnya perwira-perwira Nazi Jerman?

INILAH yang membuat hambar 128 halaman yang menuturkan "Coup and Counter Reaction: October 1965-March 1966," kemudian dilanjutkan "The United States and Suharto: April 1966-December 1968" (180 halaman), dalam buku *Foreign Relations of The United States, 1964-1968 Volume XXVI*."

Dibuka dengan memorandum CIA untuk Presiden Lyndon B Johnson mengenai perkembangan situasi RI. Di situ tercatat tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20.

"Saat ini, di Jakarta sedang terjadi suatu pergerakan kekuatan, yang mungkin implikasinya sangat jauh. Kelompok yang menamakan dirinya 30 September, mengklaim berhasil menggagalkan rencana kudeta jenderal-jenderal..." Pada paragraf terakhir, "Sangat mungkin Soekarno sudah lebih dulu mengetahui gerakan ini dan apa tujuannya. Penggerak utama seluruh peristiwa ini agar berjalan lancar,

baik dalam perencanaan waktu maupun detailnya, adalah Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan dia maupun Soekarno."

Laporan tersebut begitu cepat "diarahkan" pada Bung Karno, Subandrio, dan PKI. Telegram-telegram yang menyusul dari Jakarta, termasuk Dubes Marshall Green, juga mencerminkan sikap demikian. Informasi seperti ini pula yang disampaikan dalam telegram Direktorat Wilayah Timur Jauh kepada Asisten Menhan untuk Masalah-masalah Keamanan Internasional, 4 Oktober 1965.

Laporan-laporan itu mempunyai pola sama. Selalu diawali dengan situasi yang belum menentu, pertarungan kekuatan belum final. Kemudian di tengah gelap gulita itu, muncul cahaya. Di atas pentas terlihat sosok trio Soekarno, Subandrio, dan PKI.

Agak membingungkan memang jika kita menyimak arsip-arsip yang sebagian besar materinya bersifat tentatif dan spekulatif. Suatu hal yang seharusnya dijauhkan dalam dunia intelijen. Ringkasan laporan CIA tanggal 6 Oktober, misalnya, pada poin 16 dikatakan, PKI tidak mungkin mengelak dari keterlibatannya dalam G30S. Sebab tajuk Harian Rakyat, corong resmi PKI, menyebut dukungannya pada gerakan Letkol Untung tersebut.

Akan tetapi, pada poin 18 disebutkan, Ketua PKI Aidit tentulah tidak merestui gerakan demikian bahkan juga perubahan pemerintahan. Sebab, situasi dalam maupun luar negeri saat itu sangat menguntungkan PKI. Di sini kemudian disebut kemungkinan sejumlah kader yang mengambil inisiatif sendiri ikut dalam gerakan itu.

Peter Dale Scott dalam *The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967*, justru melihat ada keanehan dalam Harian Rakyat yang terbit waktu itu. Padahal penguasa militer di Jakarta melarang semua surat kabar terbit. Larangan itu disiarkan melalui radio dan Televisi setelah gerakan Letkol Untung dipatahkan tanggal 1 Oktober. Mantan dosen dan diplomat ini melihat indikasi keterlibatan CIA dan militer dalam mencetak Harian Rakyat itu.

Washington sendiri atas permintaan Dubes Green, mengoperasikan pemancar gelapnya, Radio Jakarta dan Indo Press. Di samping itu, Suara Amerika, VOA, ditingkatkan frekuensinya. Semua radio ini menyebarluaskan langsung propaganda hitam, yang langsung menuding PKI dan Subandrio dalam peristiwa G30S. Soekarno sendiri mengetahui rencana gerakan itu. Data-data palsu direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. Mengenai propaganda hitam itu sendiri sudah disetujui 303 Committee sebagai bagian dari operasi rahasia di Indonesia.

Melalui Dubes Marshall Green di Jakarta, Washington menyampaikan salam hangat dan dukungan kepada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto yang memimpin Angkatan Darat mematahkan gerakan Untung Cs. Mengetahui Angkatan Darat membutuhkan banyak hal, termasuk perangkat komunikasi, senjata, kendaraan, obat-obatan, dan lain sebagainya, Washington menyatakan kesediaannya.

Akan tetapi, tidak ada bantuan yang gratis di jagat ini. Bahkan, pinjaman pada lintah darat pun masih disebut bantuan. Demikian pula pejabat tinggi di Washington, dengan alasan ada proses yang harus dilalui, maka tidak sesegera itu bisa mengirim bantuan. Masa menunggu itu dimanfaatkan agen-agen CIA menyuntikkan racun

dalam kesadaran pimpinan angkatan darat, mengenai perlunya menumpas habis PKI dan simpatisannya.

Memang ditampilkan ada keragu-raguan apakah nantinya akan ada perubahan politik luar negeri pasca G30S. AS ingin mendengar jawaban pasti. Apalagi ada kecurigaan Jenderal Nasution akan tetap loyal pada Bung Karno, sesuai konstitusi. Namun, semua khawatiran itu berhasil ditembus Adam Malik, yang juga mendapat dana Rp 50 juta dari Marshall Green. Dana ini digunakan untuk kampanye menumpas PKI.

Adam Malik meyakinkan AS, Jenderal Soeharto mendapat dukungan semua pihak, khususnya Angkatan Darat. Di lain kesempatan, Adam Malik mengatakan, Jenderal Soeharto memahami apa yang kita (baca: AS) inginkan.

Hiruk-pikuk pembantaian PKI hampir setiap hari dilaporkan ke Washington. Laporan dari missionaris Katolik di Kediri menyebut 3.000 orang tewas dibantai pada November 1965. Di Bali, persaingan PNI-PKI serta dendam para bangsawan yang dirampas tanahnya, telah membuat Pulau Dewata banjir darah dengan korban 80.000 jiwa manusia yang diduga anggota atau simpatisan PKI.

Kedubes AS tidak mau ketinggalan pesta darah ini, dengan menyerahkan daftar nama ribuan kader PKI. Walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam buku tersebut, jauh sebelumnya wartawati Cathy Kadane sudah mengungkap peristiwa ini. Menurut Kathy, daftar nama tersebut diserahkan Edward Master, Kepala Seksi Politik Kedubes AS di Jakarta, kepada sekretaris Adam Malik, yang selanjutnya disampaikan ke markas Soeharto di Kostrad.

Dalam tulisan Cathy dari hasil wawancara dengan staf Kedubes AS masa itu, termasuk dengan Asisten Direktur CIA untuk Timur Jauh, William Colby, diakui bahwa daftar nama itu sangat membantu Angkatan Darat dalam menumpas PKI dan simpatisannya.

Cathy juga mengutip salah seorang staf Kedubes AS yang datang ke Kostrad dan melihat begitu banyak manusia yang menjadi tahanan, dan bertanya pada Soeharto tentang proses hukumnya. Jawabnya singkat, siapa nantinya yang akan memberi makan mereka? Ini artinya semua tawanan itu akan dibunuh.

Hal lain yang membuat buku ini agak aneh, penjelasan Marshall Green yang isinya kurang lebih membantah pihaknya pernah membantu peralatan komunikasi kepada Angkatan Darat ketika peristiwa itu terjadi. Sama seperti daftar nama kader PKI di atas yang disebut diserahkan oleh staf kedutaan atas inisiatif pribadi, maka hampir mirip dengan itu pula dalam kasus peralatan komunikasi.

Green mengatakan dalam radiogramnya ke Deplu, benar bahwa staf kedutaan menyerahkan 3 unit radio komunikasi Motorola berikut charger baterainya. Para jenderal membutuhkannya untuk berkomunikasi. Dengan demikian ini tidak beda dengan handy-talky

Padahal, masih menurut pengusutan Cathy, hanya beberapa hari setelah peristiwa G30S, seperangkat alat komunikasi modern yang tercanggih masa itu, telah diterbangkan dengan pesawat Hercules dari pangkalan militer AS di Filipina, dengan



tujuan Jakarta. Antena alat komunikasi frekuensi tinggi itu tampak dipajang di depan Kostrad, markas Jenderal Soeharto.

Selain itu, menurut wartawati yang liputannya menghebohkan itu, sebuah kapal yang penuh muatan kendaraan jenis Jeep dan truk serta senjata, berangkat dari Subic, pangkalan angkatan laut AS di Filipina, menuju Jakarta. Dari informasi yang dihipunkannya diketahui, kendaraan dan senjata itu akan digunakan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI dan simpatisannya.

\*\*\*\*\*

PKI berhasil dilumpuhkan. Tetapi, di sana masih ada Bung Karno dan Subandrio. Selama kedua tokoh itu ada, AS tidak mungkin tenang. Maka inilah yang dibisikkan Dubes Green pada Jenderal Soeharto. Kurang-lebih demikian, bola sudah di kaki Anda, persis di bibir gawang. Lantas apakah Anda akan menyia-nyiakan peluang emas ini.

Soeharto yang dalam buku kontroversial itu disebut bertindak sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban, sempat pula membuat gemas AS. Dalam kacamata AS, setelah pemakaman jenderal korban G-30-S pada tanggal 5 Oktober, seharusnya Angkatan Darat dapat segera bergerak. Tapi Soeharto tidak menghendaki konfrontasi langsung dengan Bung Karno.

Keinginan AS akhirnya terkabul menjelang pertengahan Maret 1966, setelah kabinet baru yang dibentuk masih memasukkan unsur-unsur kiri dan mendepak Jenderal Nasution dari jabatan menhankam. Mahasiswa turun ke jalan, mengepung istana. Sejumlah prajurit Angkatan Darat gabung dengan berpakaian sipil dan membawa senjata.

Diteror oleh keadaan demikian, Bung Karno akhirnya memberi kekuasaan bagi Jenderal Soeharto untuk bertindak mengamankan situasi dan keluarga presiden. Dengan senjata Supersemar inilah Soeharto pembubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya.

Pada bagian akhir sesi Indonesia di bawah judul "The United States and Soeharto, April 1966-March 1968" setebal 150 halaman, AS ingin melihat bukti komitmen pemerintahan Soeharto dengan mengakhiri politik konfrontasi terhadap Malaysia. Selain itu AS juga tidak ingin Soekarno masih bercokol sebagai presiden, walaupun tanpa kekuasaan. Tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan Cina, yang selama ini mendominasi politik luar negeri RI.

Semua keinginan negara adikuasa itu dipenuhi Jenderal Soeharto. Konfrontasi berakhir, Kedubes RRC dibakar massa, dan Bung Karno mengundurkan diri dalam SI MPRS. Tetapi, di sini sama sekali tidak disebutkan pengunduran diri itu akibat tekanan dari Angkatan Darat, yang mengancam akan menyeret Soekarno ke pengadilan rakyat.

Halaman-halaman selanjutnya dipenuhi dengan arsip-arsip notulen rapat para pejabat tinggi Deplu, Dephan, Dewan Keamanan Nasional, dan asisten khusus presiden, berikut surat-menyurat di antara mereka dan telegram dari kedubes di Jakarta. Semua notulen rapat itu mengenai kesibukan menyiapkan bantuan bagi RI, sehingga mencerminkan "kemurahan dan kebaikan hati" Washington.

Dalam memorandum Wapres Humphrey kepada Presiden Lyndon B Johnson, 25 September 1966, disebutkan ia baru saja bertemu Menlu Adam Malik di Sheraton Ritz Hotel, Minneapolis, AS. Dalam pembicaraan yang menyangkut bantuan apa saja dibutuhkan RI itu, Adam Malik tidak lupa menyampaikan pesan Jenderal Soeharto, mengenai kehadiran AS di Vietnam berakibat langsung atas terjadi perubahan di Indonesia.

Hal senada juga kembali diucapkan Jenderal Soeharto ketika Wapres Humphrey berkunjung ke Indonesia, 4 November 1967. Bahwa hal itu atas arahan Dubes Green, tentu tidaklah penting dipersoalkan. Presiden Johnson sangat membutuhkan pernyataan itu untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kecaman rakyat dan kemungkinan impeachment Kongres AS, berkaitan dengan keterlibatan dalam Perang Vietnam dan Laos.

Dalam memorandum dari Wakil Direktur CIA Richard Helms kepada Asisten Khusus Presiden Walt Rostow, tanggal 13 Mei 1966, disebutkan, Presiden Johnson memintanya untuk melakukan studi analisa yang menghubungkan langsung atau tidak langsung dampak kehadiran AS di Vietnam dan perubahan yang terjadi di Indonesia. "Kami tidak berhasil menemukan bukti-bukti ke arah itu....Sebab peristiwa kudeta yang terjadi di Indonesia tampaknya murni dari perkembangan situasi politik dalam negeri yang kompleks dan berlangsung lama."

Akan tetapi, pengakuan Jenderal Soeharto menjadi senjata ampuh bagi Presiden Johnson membenarkan kebijakan keliru dalam intervensi militer di Vietnam. Dengan menyebut berhasil merontokkan PKI, partai komunis kedua terbesar jumlah anggotanya di dunia, maka oposisi kehilangan semangat dan prakarsa untuk menentangnya.

Tidak mengherankan jika Presiden Johnson, begitu besar perhatiannya terhadap Indonesia. Bahkan ia ingin meningkatkan bantuan. Dalam sidang kabinet 17 Oktober 1967, Presiden Johnson mengatakan, "undang Dubes Green untuk menyampaikan pikirannya di sini. Dubes menyarankan perlu bantuan 500 juta dollar AS bagi 110 juta penduduk RI." Suatu angka yang waktu itu luar biasa besarnya, melampaui total ekspor Indonesia.

Johnson menegaskan apa pun yang terjadi, AS harus membantu pemerintahan Orde Baru di saat kritis seperti sekarang. Semua lembaga internasional dan negara-negara maju dikoordinasikan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Seandainya mukizat ekonomi lahir di sini, maka Indonesia akan menjadi contoh keunggulan demokrasi, sekaligus prestasi Presiden Johnson.

Sikap Johnson ini mendorong Deplu AS dan Dubes Green memusatkan perhatian menemukan instrumen terbaik untuk mempertahankan Orde Baru. Segala kelemahan dan keunggulannya dianalisa, kemudian dicari jalan keluar. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang pas untuk bekerja sama dengan Soeharto, kemungkinan munculnya kekuatan-kekuatan tandingan, dan kombinasi pemerintahan militer seperti apa yang cocok di Indonesia. Deplu AS juga memikirkan pembentukan partai politik, seperti halnya di Korsel, yang didukung Angkatan Darat, bagi persiapan pemilu untuk memenangkan Soeharto.

Laporan Deplu di atas menjadi amat sangat ketinggalan dibanding apa yang sudah dibaca masyarakat di Indonesia. Upaya percobaan untuk melencengkan sejarah jenis ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Stig Aga Aandstad, "Surrendering to Symbols: United States Policy Towards Indonesia 1961-1965," dalam disertasi doktornya di University of Oslo, 1999. Ia berkesimpulan AS tidak tahu-menahu soal persiapan G-30-S. Buku dengan kesimpulan yang sama juga pernah diterbitkan CIA dalam membela diri.

Sikap pura-pura tidak tahu ini jelas bukan jawaban atas analisa Guy Pauker, tokoh dan otak CIA di Indonesia. Pada pertemuan dengan Wapres Humphrey dan stafnya tanggal 17 Februari 1967, Dubes Green mengulangi analisa Pauker bahwa hampir dapat dipastikan Indonesia akan jatuh ke tangan komunis tahun 1965.

Dubes Green hanya sekadar mengutip sampai di situ. Padahal kesimpulan palsu demikian adalah bagian dari skenario besar, dan dimaksud memperuncing kecurigaan Angkatan Darat terhadap PKI. Terlebih lagi Bung Karno disebut-sebut mengidap ginjal kronis. Sebaliknya, PKI mendapat bocoran "dokument" rencana Angkatan Darat melakukan kudeta tanggal 5 Oktober.

Pauker sangat berperan di Seskoad. Dia sangat menentukan dalam mengirim 2.100 perwira menengah dan tinggi TNI-Polri belajar di AS selama periode 1960-1965. Pentolan utama G30S, termasuk Letkol Untung, pernah mengikuti pendidikan di AS.

Maka menjadi sangat mencurigakan jika laporan Kedubes AS maupun CIA di Jakarta menyimpulkan, G30S melibatkan PKI, diskenariokan Menlu Subandrio dan diketahui Bung Karno. Apalagi disebut nama Letkol Untung tidak dikenal oleh Kedubes AS.

Laporan intelijen itu tidak pula menjelaskan tiga Batalyon Raiders, pasukan utama G30S, datang ke Jakarta atas radiogram Pangkostrad Mayjen Soeharto. Sehari sebelum pecahnya tragedi tersebut Mayjen Soeharto menginspeksi pasukan ini.

Di sini sejarah tidak akan pernah lempang. Apalagi ia dapat menjadi aib bagi bangsa yang memuja demokrasi dan hak asasi manusia. Negara adidaya seperti AS seyogyanya minta maaf kepada keluarga Bung Karno dan jutaan keluarga PKI. Bukan dengan menggelapkan fakta masa silam.

Seperti kerap dilakukannya pada negara lain, AS selayaknya pula memberi kompensasi bagi keluarga korban yang terkait dengan G30S. Bukan dengan mendorong militer dan elite politik Indonesia mengintimidasi rakyat yang sudah menderita 32 tahun di bawah Orde Baru, dengan cara meniupkan bahaya laten PKI. Atau sebaliknya, AS menyeret pelakunya-entah itu di Indonesia atau di negeri Paman Sam-ke Mahkamah Internasional. \*

From: "sally salido" <sallysalido@hotmail.de>

To: ouwehoer@centrin.net.id

Cc: titikapi@email.com

Sent: Tuesday, October 18, 2005 8:56 PM

Subject: FW: Re: Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S

Mr. Yap Hong Gie,

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berarti untuk Rakyat Indonesia bukan hanya Kemerdekaan Politik, tetapi lebih dari itu, ialah setiap Individuum dari Warganegara Republik Indonesia acceptance sebagai manusia Merdeka, yang mempunyai Hak-Hak Azasi Manusia yang takbisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh kekuatan apapun, yang hidup diatas wilayah R.I. - Laut, Darat dan Udara - dari Sabang sampai dengan ke Merauke. Kesadaran tersebut ditanamkan oleh Diponegoro, oleh Imam Bonjol, oleh Sisingamangaraja, oleh Teuku Umar, oleh Hasanudin, oleh Patirajawane, dll.nya, sampai dengan Pemberontakan Silungkan 1926 dan Sumpah Pemuda 1928 dan perlawanan Rakyat di Nusantara yang tak henti-hentinya melawan perbudakan kekuasaan kaum Kolonial Belanda: dan puncak yang tertinggi ialah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Pejuang Besar Rakyat Indonesia SOEKARNO!

Para Pahlawan Rakyat Indonesia diatas, yang mengorganisasi Rakyat untuk melawan kekuasaan perampokan, penindasan, penghinaan kaum Kolonial Belanda bukan "badut-badut yang ingin popularitas atau yang bermimpi untuk memutar kembali jarum lalu"( cursive dari saya) menyusun kembali suatu Negara Merdeka seperti yang pernah dipunyai diatas - Sriwijaya dan Majapahit - Setiap Individuum yang berusaha menyatukan dirinya dengan Barisan Rakyat dalam melawan kekuasaan penindasan, melawan Genocide, melawan perampokan Hak-Hak Azasi Manusia, untuk urusan Demokrasi, untuk Kemajuan Sosial dan untuk Perdamaian, menurut logika anda adalah "badut-badut...", amboi Mr. Yap Hong Gie, jalan pikiran anda mengingatkan saya ke-tahun-tahun '50an, ketika kelompok Kuo Min Tang di Jakarta melantangkan suara mereka, agar pemerintah Republik Indonesia menerima dan puas dengan keputusan KMB. Yeah, burung sejenis, terbang bersama. Soekarno mendenonsasi/membatalkan keputusan KMB dan menasionalisasi seluruh apa yang dinamak "Hakmilik" kaum Kolonial Belanda diatas wilayah R.I. yang kemudian dijadikan PN-PN Negara dan yang digrowoti oleh para Jendral TNI AD dengan "Dwi Fungsi ABRI". Dan aktivitas Kuo Min Tang di Jakarta ditutup oleh pemerintahan NASAKOM.

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kaum Kolonial Belanda defacto dan dejure tidak punya Hakmilik apapun diatas wilayah R.I. dan Republik Indonesia adalah subjek Hukum Internasional yang diakui PBB, terutama oleh Lima Anggota Dewan Keamanan PBB yang mempunyai Hak Veto.

Kaum Kolonial Belanda berusaha merehabilitasi kekuasaan Kolonialisme Belanda atas wilayah R.I., apakah itu dilakukan dengan Subversi dan Penyerangan/Agresi Belanda I & II, ataukah itu dilakukan dengan Bantuan para perwira TNI AD seperti Zulkifli lubis, A.H.Nasutio, Ahmad Husen, dll. Seperti itu, ataukah dengan Pengkhianatan Pemerintahan Hatta-Sukiman yang bertanggungjawab atas persetujuan KMB, dimana R.I. harus membayar ke Nederland sebesar 6,5 miliar Gulden, termasuk biaya agresi Belanda I & ke-II. Coba lihat, berapa besarnya kekayaan dari Bumi Nusantara yang dikuras dan dibawa ke Amsterdam, ke Den Haag, ke Rotterdeam - Nederland dari Tahun 1602 - 1942? Untuk periode antara Tahun 1830 - 1837 saja yaitu periode cultur stelsel/tanaman paksa, Belanda memeras dengan keuntungan ca.15,4 miliar Gulden. Belum lagi dihitung, berapa juta manusia yang mati kelaparan

dan dibunuh oleh kaum Kolonial Belanda. Dan kemudian Belanda menerima dari Jendral TNI AD Suharto-Golkar (ORBA-Orde Belanda) seluruh Perkebunan-perkebunan, perusahaan-perusahaan,dll. yang dinasionalisasi oleh Pemerintahan NASAKOM dalam bentuk Gulden sejumlah 600 juta Gulden (1969), yang anda ingkasi. Keadaan tersebut hanya bisa terjadi diantaranya dan terutama karena pengkhianatan kekuatan yang anti Kemerdekaan R.I., yang anti-Demokrasi, yang anti-Kesejahteraan Sosial untuk Rakyat didalam Republik Indonesia, kekuatan yang berusaha menghancurkan Pemerintahan Presiden Soekarno dengan NASAKOM dengan cara menterror kekuatan utama NASAKOM - Partai Komunis Indonesia.

Genoside 30 September'65 yang diorganisasi/dilakukan oleh para Jendral TNI AD bukanlah suatu Episode yang terlepas dari seluruh rangkaian Sejarah R.I., tapi adalah satu matarantai dari usaha-usaha kaum Kolonial untuk merebut kembali posisi mereka yanghilang, untuk merehabilitasi Kolonialisme di Wilayah Republik Indonesia, dalam bermacam bentuk.

Also, secara politik dapat disimpulkan bahwa antara saya dan anda Mr. Yap Hong Gie mempunyai pandangan yang bertentangan secara diametral: - saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang membela keutuhan R.I., sedangkan penyokong system Kolonial; - saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menolak dan mengutuk Genoside (kekuatan apapun yang melakukannya), karena dengan Genoside takkan bisa disusun suatu masyarakat yang demokratis, sedangkan anda seorang yang keranjingan dan menyokong Genoside 30 September'65 yang diorganisasi dan dilakukan oleh para Jendral TNI AD, yang menjagal lebihdari satu juta Warganegara Republik Indonesia, dari Mentri s/d orang awam.

Dapat saya tekankan disini, bahwa saya indentifikasi diri saya sepenuhnya dengan Program Tuntutan ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT, sedangkan anda seorang yang merindukan diktator Militer di wilayah R.I.; etc. dll. Rakyat Indonesia lambat atau cepat akan meluruskan sejarahnya sendiri, seperti Rakyat RRChina yang meluruskan sejarahnya, dimana cara berpikir Kuo Min Tang tidak mendapat tempat dalam kehidupan Rakyat RRChina.Atau seperti di Venezuela, dimana sebagian besar Anggota Angkatan Bersenjata Venezuela bersama Rakyat menegakkan Demokrasi, berjuang bersama untuk Kemajuan Sosial dan untuk Perdamaian di Regional Amerika-Latin.

- dr.tchaniago-

-----  
"Hong Gie" <ouwehoer@centrin.net.id>

Herr Tchaniago,

Cukup mengesankan proloog mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tentang Kemerdekaan Azasi Bangsa Indonesia dari penindasan kolonial Belanda, namun sayang semua itu sama sekali tidak ada relevansi mauoun ada kaitannya dengan tema diskusi "Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Yang menyedihkan adalah, disamping memiliki dendam politik khronis terhadap TNI dan Orde Baru, akurasi mengenai data dan fakta sejarah yang Anda miliki amat lah

miskin, seperti halnya beberapa koreksi saya terhadap tulisan Anda terdahulu, yang tidak mampu Anda justifikasikan. lagi kalau mencampur-adukan urusan perjuangan melawan kolonialisme Belanda dengan peristiwa G30S/PKI, disitulah asal-muasal terciptanya kekacauan memori dan kerancuan nalar, yang membuat sistematika dan fakta sejarah RI, terdengar seperti sebuah lenong rumpi.

Tapi baiklah, mari kita mundur sedikit, dimasa periode sebelum PKI melonjak, khususnya soal "da-na kompensasi" Belanda; salah satu butir hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB); 23 Agust - 02 Nov 1949 diselenggarakan di Den Haag. Dibawah tekanan dunia internasional, Belanda menuntut kompensasi sebesar 6,5 miliar gulden untuk menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang akhirnya disepakati menjadi 4,5 miliar gulden. Jadi bukan sebesar 6,5 miliar gulden seperti yang di mark-up oleh Anda --- [Koreksi 1.].

Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam (Amsterdam), Ratu Juliana melimpahkan kedaulatan (soevereniteits overdracht) kepada Perdana Menteri RIS. Mohammad Hatta, dan paralel dilakukan di Batavia/Jakarta, dimana Hoge Vertegewoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Lovink menyerahkan kedaulatan kepada Wakil Perdana Menteri RIS. Hamengku Buwono IX. Entah karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan Lambert Giebel: "De indonesische injectie" dalam majalah Belanda "De Groene Amsterdamer" 5 Januari 2000- -- [Koreksi 2.].

Ketika dimulainya konfrontasi (1961?) mengenai masalah Irian Barat, Pemerintah Sukarno membatalkan hasil Persetujuan KMB mengenai Uni Indonesia-Belanda, menghentikan pembayaran "dana kompensasi" dan menasionalisasi perusahaan dan perkebunan . Pemerintah Orde Baru yang diwarisi segala macam kekacauan didalam negeri, termasuk pembatalan sepihak (tanpa perundingan diplomatik) hasil keputusan KMB, maka tahun 1969 terpaksa dikabulkan tuntutan ganti-rugi sebesar 600 juta gulden, atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di masa pemerintahan Sukarno, yang nilai nominalnya tidak sebanding dengan 4 milyar gulden yang sudah dibayarkan oleh Pemerintahan Sukarno.

Statement Anda yang dikamuflagekan dalam bentuk pertanyaan: "Penyerangan/ Agresi Belanda I & II, atukah itu dilakukan dengan Bantuan para Perwira TNI AD seperti Zulkifli lubis, A.H.Nasutio, Ahmad Husen, dll. seperti itu, atukah dengan Pengkhianatan Pemerintahan Hatta-Sukiman yang bertanggungjawab atas persetujuan KMB...", adalah bentuk suatu kemunafikan. Kemunafikan, karena "pertanyaan" dilontarkan menjurus pada suatu tuduhan. Seandainya Anda memiliki sedikit kehormatan, saya beri kesempatan untuk menunjukan referensi data atau bukti atas keterlibatan para Perwira TNI AD (Zulkifli lubis, A.H. Nasution, Ahmad Husen, dll.), yang membantu Belanda dalam Agresi Militer I & II.

Begitu gagahnya Anda menyebut "kekuatan utama NASAKOM". Numpang tanya Bung, dimana dan apa yang dilakukan kaum Nasionalis dan Agama ketika ('65-'66) terjadi pembantaian terhadap PKI dan onderbouwnya? engapa Anda takut mengatakan secara jujur, kelompok mana yang melakukan pembantaian terhadap PKI di Jawa Timur dan di Bali? --- [Koreksi 3.]

Didalam pleidoinya dimuka Mahmilub (19 Februari 1966), Nyono mengatakan: "Bahwasanya G30S bukanlah suatu pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, hal ini tidak hanya dinyatakan dalam pengumuman dan dekrit Dewan Revolusi, juga dibuktikan oleh perbuatan - perbuatan konkritnya". Sehubungan dengan pernyataan Anda: "saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menolak dan mengutuk Genoside", maka supaya "jangan ada dusta diantara kita" tolong dijawab: Apakah Anda mengutuk atau mendukung "gerakan pembersihan" terhadap para Pahlawan Revolusi?

Tentang berbagai tuduhan Anda terhadap saya, itu bukan fenomena baru. Ketika orang melakukan koreksi terhadap kebohongan dan manipulasi sejarah, pada umumnya simpatisan PKI yang intelektualnya kurang, mudah menjadi kalap sehingga melontarkan bermacam-macam fitnah murahan. Mirip dengan isu yang dilontarkan PKI tentang "Dewan Jenderal" ....

Walaupun saya belum pernah mendengar tentang "Aliansi Perjuangan Rakyat". Apabila adapun, gerakan itu perlu kita waspadai, karena sudah terlalu banyak pihak-pihak yang menjual nama "Rakyat", untuk kepentingan politik, jabatan (kekuasaan) dan uang.

Kesimpulan Anda bahwa, antara Anda dan saya terdapat pandangan politik yang bertentangan secara diametral, masih kurang tepat. Karena perbedaan pandangan politik kita bertentangan secara fundamental! --- [Koreksi 4.]

Wassalam, yhg.

-----  
Waruno Mahdi <mahdi@fhi-berlin.mpg.de>

Bung Hong Gie,

bukan maksud saya membela salah satu sebelah dalam "pertukaran pikiran" anda dengan "Herr Tchaniago", yang kebetulan saya baca dan harus saya akui memang ada nilai entertainmentnya yang tidak dapat disangkal.

Dari saya hanya satu koreksi kecil, yaitu dalam hal:

> Tchaniago,

.....<snip>

> karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan

Sesungguhnya, antara tahun 1950-1956 di Indonesia, kalau saya tidak salah hitung, ada enam (6) pemerintah silih berganti (yah, agar tidak salah, katakanlah sekurangnya 5, paling banyak 7), tetapi tidak satupun di antaranya itu pemerintah Sukarno. Dalam periode tersebut, yang berlaku bukan UUD 1945 yang menetapkan struktur pemerintahan presidensiil, melainkan yang berlaku itu mula-mula UUD RIS selama beberapa bulan, kemudian UUD 1950, dan sesuai rumusan kedua-duanya, yang menentukan dalam kekuasaan eksekutif itu perdana menteri yang silih

berganti. Baru setelah kembali ke UUD 45, Bung Karno pun jadi kepala pemerintah kembali.

Sekian saja dari saya. Silakan anda dengan "dr.tchaniago" lanjutkan satu sama lain.

Wassalam,

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

A.S. Munandar:

## **PERANAN NEKOLIM DALAM TRAGEDI NASIONAL 1965**

Nekolim akronim untuk Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Akronim ini agak umum kita kenal pada masa sebelum terjadi tragedi nasional 1965.

Pada tahun 1930 – kita tinjau agak jauh ke belakang - dalam pidato pembelaannya yang termashur 'Indonesia Menggugat' di depan pengadilan kolonial Hindia Belanda Bung Karno secara ilmiah dan gamblang mengexpos sistem imperialisme dan kolonialisme yang dipraktekkan di jajahan Hindia Belanda. Bung Karno mengungkapkan bahwa sistem penindasan dan exploatasi atas rakyat dan bangsa Indonesia, tak terelakkan akan membangkitkan perlawanan dan perjuangan untuk Indonesia Merdeka dan cita-cita itu pasti akan terwujud. Pada 17 Agustus yang lalu kita peringati ulangtahun ke-60 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi itu adalah satu puncak dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia selama puluhan tahun melawan imperialisme dan kolonialisme, pertama-tama dari Belanda, kemudian Jepang dan selanjutnya berbagai kekuasaan imperialis dunia.

Sejak tahun 1930 banyak sekali terjadi perubahan internasional dalam perimbangan kekuatan negara-negara imperialis dan sistem kolonialisme. Sistem kolonial yang lama runtuh, banyak negeri jajahan dan setengah-jajahan mencapai kemerdekaannya. Namun inti kupasan dan analisis Bung Karno mengenai imperialisme dan kolonialisme masih berlaku sampai sekarang.

Dengan proklamasi kemerdekaan R.I. rakyat Indonesia mematahkan belenggu imperialisme Belanda dan fasisme Jepang. Tetapi pada saat itupun imperialisme dan kolonialisme yang tak rela menerima kealahannya terus merongrong Republik Indonesia yang muda itu.. Pada 1948 komplotan imperialis dengan 'Red Drive Proposals' yang bertujuan menceraiberaikan serta menghancurkan kekuatan revolusioner rakyat Indonesia dilaksanakan dengan pencetusan Peristiwa Madiun. Sekalipun dipaksa menerima kompromi persetujuan Konferensi Meja Bundar rakyat Indonesia meneruskan perjuangan melawan imperialisme demi mewujudkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Intervensi imperialis, khususnya imperialisme AS, tak berhenti dan semakin nyata. George McKahin, pakar Indonesia dari Universitas Cornell AS, menguraikan dalam bukunya 'Subversi sebagai politik luarnegeri', bahwa bagi imperialis AS intervensi dan subversi menjadi bagian dari politik luarnegerinya.

Dalam pernyataan 'Dasa Sila' yang disepakati oleh Konferensi AA Bandung pada 1955 dengan tegas dinyatakan dan dicanangkan bahwa 'kolonialisme belum mati' dan munculnya 'neokolonialisme' – jajahan model baru.



Tidak mengherankan bahwa Bung Karno yang menyuarakan tekad perjuangan rakyat Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme itu berkali-kali menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Berkali-kali itu gagal, tapi sebagaimana kolonel Maulwi Saetan dalam memoarnya menyatakan, akhirnya usaha itu berhasil, yaitu oleh rezim Suharto.

Dengan menelusuri jalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, dapat dilacak tangan nekolim dalam tragedi nasional yang dimulai dengan peristiwa G30S September 1945. Hingga kini masih berlangsung perdebatan dan penelitian mengenai apa sesungguhnya yang terjadi. Namun dengan menjadikan PKI sebagai kambing hitam, kekuatan reaksioner AD dibawah jenderal Suharto segera melaksanakan pengejaran, penangkapan dan pembunuhan atas semua orang yang dituduh PKI atau menjadi pendukungnya.

Pada saat kita memperingati 40 tahun tragedi nasional 1965, patut kita kenang kembali bagaimana sikap Bung Karno mengenai peristiwa itu. Sikapnya konsekuensi mendasarkan diri pada pengenalan mendalam atas siasat imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme. Dalam pidato NAWAKSARA, pidato pertanggung-jawaban sikapnya kepada MPRS pada 10 Januari 1967, Bung Karno menegaskan bahwa atas dasar penyelidikannya yang seksama peristiwa G30S “ditimbulkan oleh ‘pertemuannya’ tiga sebab, yaitu: a) keblingeran pimpinan PKI, b) kelihaian subversi nekolim, c) memang adanya oknum-oknum yang ‘tidak benar’”. MPRS yang sudah dicopoti semua elemen yang mendukung Bung Karno dan yang kritis terhadap AD menolak pidato Bung Karno. Bung Karno lewat penyalahgunaan ‘supersemar’ diturunkan dan sampai meninggal berstatus ‘tahanan rumah’.

Mengapa pernyataan NAWAKSARA Bung Karno samasekali diabaikan? Mengapa sasaran hanya dibidikkan pada PKI dengan meninggalkan segala prosedur hukum? Mengapa tokoh-tokoh pimpinan PKI yang sudah di tangan AD tidak dibawa ke pengadilan tapi dibunuh secara gelap? Mengapa sebab b) kelihaian subversi nekolim dan c) memang adanya oknum-oknum yang ‘tidak benar’ samasekali tak jadi perhatian? Meneliti pidato NAWAKSARA memberi petunjuk kepada kita mengenai sebab-sebabnya.

Dalam NAWAKSARA Bung Karno menekankan keharusan ‘kewaspadaan istimewa terhadap bahaya kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri dan bahaya kekuatan subversif kontrarevolusioner dari luar negeri. Kejadian-kejadian yang kita saksikan membuktikan bahwa kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri (yaitu oknum-oknum yang ‘tidak benar’) sudah bersatu padu dengan kekuatan subversif kontra-revolusioner dari luar negeri (kelihaihan subversi nekolim). Pada hakekatnya kup kontra-revolusioner yang didalangi oleh jenderal Suharto sudah berjalan.

Bahan-bahan dan publikasi yang selama ini diterbitkan, khususnya di luarnegeri, semakin jelas menyingkap ‘kelihaihan subversif nekolim’ dalam Tragedi Nasional 1965. Satu bahan penting ialah DOKUMEN CIA – Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965 yang diterbitkan oleh Hasta Mitra. Bahan ini merupakan kumpulan data intelijen otentik yang dibuka oleh State Department AS tapi kemudian ditarik kembali oleh CIA. Dari bahan-bahan ini para sejarawan a.l. menyimpulkan bahwa Amerika memberikan nama-nama orang komunis kepada Angkatan Darat

Indonesia, yang membunuh paling tidak 105.000 orang komunis pada 1965-1966. CIA tidak bisa lagi menutup peranannya.

Buku yang sangat penting untuk memahami peranan imperialis AS (Pentagon dan CIA) dalam usaha mendominasi dunia ialah karya Noam Chomsky dan Edward S. Herman yang berjudul: 'The Washington Connection and Third World Fascism' (Keterkaitan Washington dengan Fasisme Di Dunia Ketiga), 1979. Dalam Bab 1, Introduksi, a.l. disimpulkan 'Dunia kolonial yang lama dihancurkan selama Perang Dunia II, menghasilkan kebangkitan nasionalis-radikal yang mengancam hegemoni tradisional Barat dan kepentingan-kepentingan ekonomi bisnis Barat. Untuk membendung ancaman ini Amerika Serikat menggabungkan diri dengan elemen-elemen elite dan militer di Dunia Ketiga yang fungsinya membendung pasang-surut perubahan.' Inilah yang dilakukan oleh rezim-rezim diktatorial seperti di Vietnam Selatan untuk menahan perjuangan pembebasan rakyat Vietnam, kemudian juga oleh Mobutu di Zaire, Pinochet di Chili dan Suharto di Indonesia. Dalam bab-bab berikutnya Noam Chomsky mengupas keterkaitan neokolonialisme dengan Washington dan berbagai jenis teror yang diterapkan di berbagai negeri dunia ketiga. Bab 4 berjudul 'Teror Konstruktif'. Mengapa 'konstruktif'? Karena pembantaian berdarah dan teror yang secara substansial menciptakan iklim investasi yang menguntungkan. Inilah yang dimaksud 'konstruktif', sebab mencapai tujuan yang jadi prioritas paling tinggi bagi pemimpin-pemimpin 'Dunia Bebas'. Adapun masalah hak-hak asasi manusia dapat dikesampingkan. Selanjutnya dengan subjudul: Indonesia: pembasmian massal, sorga kaum investor, diuraikan makna kejadian-kejadian di Indonesia 'Massaker-massaker besar di Indonesia pada tahun 1965-1966 punya artipenting bersegi tiga. Pertama, kejadian-kejadian itu merupakan suatu tahap baru dalam kekerasan kontrarevolusioner ditandai oleh "pembasmian massal guna mengkonsolidir kekuasaan otoriter". Kedua, kejadian-kejadian itu mempertunjukkan seterang-terangnya respon pemerintahan AS atas pertumpahan darah di mana hasil-hasil politik dari pembantaian itu dipandang sebagai "positif". Ketiga, karena reaksi para jurnalis yang bertanggungjawab dan para pemimpin politik antusias, dan protes dunia terhadap pembunuhan massal itu minimal, maka pertumpahan darah di Indonesia mempersiapkan jalan untuk jadi model yang dapat berwujud untuk pogrom-pogrom lain yang biarpun lebih kecil tetap berskala besar seperti pada tahun-tahun kemudian di Chili.'

Analisis Chomsky sepenuhnya dibuktikan kebenarannya pada Tragedi Nasional 1965 di Indonesia. Di bidang ekonomi rezim Orba membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi modal asing, meninggalkan prinsip berdikari Bung Karno. Indonesia betul-betul menjadi sorga bagi kaum investor. Ini hasil atas dasar pembantaian massal luarbiasa atas jutaan rakyat tak berdosa, sedangkan dunia barat yang mendominir media massa yang biasanya suka berteriak mengenai pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan, betul-betul bisu dalam seribu bahasa. Sebagaimana dicatat Chomsky "protes dunia itu ....minimal".

Begitu luas dan besar pembunuhan terjadi di Indonesia, sehingga Chomsky menamakannya 'holocaust terbesar yang kedua dalam abat keduapuluh.'

Melalui analisis dan bukti-bukti nyata Chomsky menyingkap keterlibatan nekolim, khususnya AS, dalam Tragedi Nasional 1965. Dengan segala cara yang licik para

pemihak imperialis ketika itu berusaha mencegah penerbitan edisi pertama buku ini, tapi usaha ini akhirnya sia-sia.

Peranan nekolim ini dengan jelas dibahas juga dalam artikel David Easter yang dimuat di *Journal of Cold War History*, Vol. 5, No. 1, 2005. Judulnya 'Keep the Indonesian Pot Boiling'; Western Covert Intervention in Indonesia, Oktober 1965-March 1966. (Biarkan kerusuhan di Indonesia terus berjalan, Intervensi Terselubung Barat di Indonesia, Oktober 1965-Maret 1966). Pembahasan itu lebih jauh menambah persepsi kita. Dalam studi ini David Easter menguraikan persekongkolan antara negara-negara AS, Inggris, Australia dan Malaysia untuk menyebarkan propaganda yang menghasut permusuhan terhadap PKI. Dampaknya ialah memberi hati kepada pembunuhan massal terhadap kaum komunis. Terjadilah kerjasama antara negara-negara Barat ini dengan kekuatan AD yang tak setuju dengan politik konfrontasi Sukarno terhadap Malaysia, sehingga mensabot politik itu. Tulis Davis Easter "...Kolonel Willis Ethel, atase militer AS di Jakarta, secara reguler bertemu dengan asisten Nasution". "Ethel juga memberi jaminan agak luas, bahwa Inggris tidak akan mengeskalir Konfrontasi selama tentara Indonesia sibuk membereskan kaum komunis." "Tentara Indonesia bisa menindas kaum komunis dengan tidak usah kuatir mengenai operasi-operasi Inggris dan Australia dalam Konfrontasi. Selain itu, Amerika secara rahasia memberi bantuan material kepada tentara."

David Easter mengakui bahwa propaganda Barat membantu menggambarkan kaum komunis sebagai pembunuh-pembunuh haus darah yang selayaknya harus dibasmi. Dampak kampanye itu adalah untuk 'dehumanize' ('membukan-manusiakan') kaum komunis supaya lebih mudah membunuhnya. Kita sama-sama tahu 'keberhasilan' nekolim dan rezim Orba dalam usaha ini sehingga sampai sekarangpun sangat berat untuk mencabut stigma 'komunis sebagai penjahat dan pembunuh' dan melenyapkan diskriminasi pada korban 1965.

Publikasi penting yang juga perlu disebut ialah karya Roland Challis, 'Shadow of a Revolution - Indonesia and the Generals', 2001. Roland Challis yang jadi koresponden BBC untuk Asia Tenggara dari tahun 1964-1969, meliput semua kejadian sejak peristiwa 30 September 1965, pengejaran dan pembantaian kaum komunis atau yang disangka komunis, sampai berdirinya rezim orba di bawah Suharto. Kesaksian atas berlangsungnya Tragedi Nasional itu begitu menyentuhnya sehingga ia mempersembahkan bukunya kepada jutaan orang Indonesia yang jadi korban. Teks yang dicantumkan pada halaman depan bukunya berbunyi: "Dedicated with respect to the memory of more than one million Indonesians who died and are still dying because of the greed, brutality dan ruthless indifference of the military, politicians, global corporations and 'statesmen' of all nations." (Dipersembahkan dengan rasa hormat demi mengenangkan lebih dari satu juta orang Indonesia yang telah mati dan masih akan mati disebabkan kerakusan, kebengisan dan ketak-acuhan kejam para militer, politisi, korporasi-korporasi global dan para 'negarawan'dari semua bangsa.)

Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang harus dinikmati oleh semua manusia. Tapi di Indonesia selama puluhan tahun, khususnya sejak berdirinya rezim Orba, hak-hak itu telah dilanggar dan diinjak-injak. Nekolim lewat negara-negara Barat merestui pelanggaran-pelanggaran itu. Peranan nekolim ini tidak hanya terbatas pada Indonesia, tapi di kebanyakan negeri dunia ketiga, seperti kesewenang-

wenangan yang terjadi di negeri-negeri Amerika Latin, Afrika dan Asia, Irak, dan bahkan di beberapa negeri Eropa. Dalam pidatonya pada tanggal 9 September yang lalu dalam Konferensi Hak-hak Asasi Manusia Suhakam, Malaysia, mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dengan tajam mengecam kemunafikan negara-negara Barat dalam hal ini Mereka mengangkat diri sebagai yang berhak meletakkan dasar hak-hak manusia dan menjadi pengawas atas pelaksanaannya di dunia. Globalisasi mereka bukanlah untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kapital.

Pada saat kita memperingati 40 tahun Tragedi Nasional 1965 harus kita camkan peranan jahat nekolim, yang sampai sekarang masih berlangsung. Imperialis AS kini satu-satunya negara adikuasa.. Ambisinya dewasa ini dengan seksama diuraikan dalam karya Chomsky yang terbit 2003 berjudul: HEGEMONY OR SURVIVAL – America's quest for global dominance (HEGEMONI ATAU BERTAHAN-HIDUP – pelacakan Amerika untuk mencapai dominasi global).

Rakyat dan bangsa kita masih menghadapi perjuangan jangka panjang agar hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dinikmati setiap orang. Usaha ini memerlukan persatuan semua kekuatan rakyat dan bangsa Indonesia. Nekolim adalah musuh internasional, maka perlu pula menggalang kerjasama dan solidaritas dengan rakyat berbagai negeri untuk mewujudkan bersama dunia adil dan demokratik.

15 Oktober 2005

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Rakyat Merdeka, Minggu, 13 Nopember 2005

<http://www.rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat&id=4751>

## Kapankah Soeharto Diseret Ke Pengadilan

Catatan Wartawan 'Rakyat Merdeka' A Supardi Adiwidjaya Dari Amsterdam

Beberapa kelompok aktivis HAM Indonesia dan sejumlah akademikus/ilmuan Belanda serta perorangan yang merasa prihatin atas penegakkan HAM di Indonesia berinisiatif mengadakan seminar dan pameran sehari guna memperingati 40 tahun pembunuhan dan pembantaian massal sehubungan peristiwa 30 September 1965 di Indonesia.

SEMINAR dan pameran sehari tersebut berjudul "1965: The Forgotten Holocaust of Indonesia", digelar Jumat, (28/10) lalu di Institut Internasional Sejarah Sosial (International Institute of Social History/IISH), Amsterdam.

Sebelum masuk acara seminar dan diskusi, diputar film dokumenter "Kuburan Massal", sebuah gambaran penye-lidikan tentang telah terjadinya pembunuhan massal pada tahun 1965-1966 dengan melakukan penggalian kuburan massal, yang ditemukan di Wonosobo (Jawa Tengah). Penyelidikan di wilayah tersebut dilakukan kelom-pok aktivis HAM dan keluarga korban pembunuhan yang dilakukan rezim Orba. Kemudian diputar film dokumenter "Penjara Perempuan di Plantungan (Jawa

Tengah)", yang melukiskan kondisi buruk, antara lain, penista-an atas para tawanan perempuan di penjara Plantungan itu.

Setelah itu, Ken Setiawan dan Sisca Pattipilohi membacakan surat kesaksian anak-anak korban dan korban yang selamat (dalam pembunuhan massal 1965), yang melukiskan kekejaman tak terhitung Orde Baru.

Mengenai pembunuhan massal yang kejam ini, diungkap dalam latar belakang digelarnya seminar sehari terse-but, bahwa "Dalam sejarah resmi rezim Soeharto, bagaimanapun, samasekali tak diungkap peristiwa pembunuhan-pembunuhan dan represi yang kejam terhadap jutaan penduduk Indonesia. Sama sekali tak disebut peran utama militer Indonesia dalam mengatur pembunuhan-pembunuhan tersebut. Sebenarnya di beberapa tempat seperti Bali, pembunuhan-pembunuhan tak akan terjadi, jika militer tidak mengirimkan pasukan-pasukan khusus ke pulau tersebut untuk mengadakan kampanye antikomunis. Fakta-fakta banyak sekali menunjukkan, militer tak saja mereka sendiri yang melakukan pembunuhan-pembunuhan, tetapi juga memobilisasi kelompok-kelompok pemuda anti-komunis untuk ambil bagian (dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut)".

Seminar sehari tersebut mengedepankan dua pembahasan pokok. Pertama, hubungan antara "massacre" (pembunuhan massal yang sangat kejam) dan keterlibatan Belanda ("Link between 1965 massacre in Indonesia and the Dutch involvement"). Kedua, "40 tahun sesudah 1965: Mencari keadilan dan bagaimana langkah selanjutnya" ("40 years after 1965: In search of justice and how to move on").

Dan Fuad Hassan Pun Terlibat

Soal keterlibatan para psikolog Belanda, tidak berkaitan soal massacre 1965 di Indonesia. Melainkan, keterlibatan Universitas Nijmegen dalam proses interogasi atas para tawanan pulau Buru. Masalah ini dipresentasikan Hilmar Farid (Jaringan Kerja Budaya) dan Marek Ave (Lembaga Sapulidi) berdasarkan arsip-arsip yang bertalian dengan kegiatan Universitas Nijmegen dalam soal interogasi atas para tawanan pulau Buru tersebut.

Dalam kaitan ini, diungkapkan pada tahun 1970-an badan represif rezim Orba Kopkamtib mengajak sejumlah ahli psikologi Belanda dari Universitas Nijmegen bersama rekan mereka dari Indonesia, untuk bekerjasama menguji «orientasi komunis» para tahanan politik pulau Buru. Kerjasama Kopkamtib tersebut bukan saja dengan para ilmuwan/psikolog Belanda, tetapi juga dengan para ilmuwan/psikolog Inggris dan Amerika Serikat.

Sehubungan dengan ini, Marek Ave memberikan penjelasan, yang pertama mengeluarkan pernyataan keterlibatan para psikolog Inggris, Belanda dan Amerika ialah admiral Soedomo dalam wawancara dengan New York Times, 12 April 1978. Berita itu dimuat di Volkskrant edisi 13 dan 14 April 1978, anehnya atas permintaan New York Times. Kemudian, 28 April 1978, ada lagi wawancara dengan Soedomo dan Brigjen Soemitro, yang mene-rangkan kerjasama antara psikolog Belanda dan Indonesia, antara lain Fuad Hassan dan Saporinah Sadeli disebut namanya. Ujicoba itu berpengaruh pada peluang bebas dan nasib mereka kemudian.

Dalam konteks ini, dalam wawancaranya dengan Radio Nederland Seksi Indonesia (Ranesi), 1 November 2005 yang lalu, sejarawan aktivis dari Jaringan Kerja Budaya Hilmar Farid memberikan penjelasan, tim peneliti kasus tersebut mulai mengadakan riset ini berkaitan dengan peringatan 40 tahun tragedi 1965.

Dan mengapa fokus ini yang dipilih, menurut Hilmar Farid, antara lain karena tim peneliti mencoba melihat hubungan tragedi itu dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini Belanda. Hilmar Farid berpendapat, masalah keterlibatan sejumlah psikolog Belanda dimaksud sangat serius. Terutama karena keterlibatan tersebut selama ini tidak diketahui. Yang paling penting, menurut Hilmar, karena upaya ini kemudian memberi semacam legitimasi ilmiah kepada pemerintah Indonesia, Orde Baru khususnya saat itu untuk menjalankan represi. Termasuk seleksi terhadap para tahanan politik (tapol). Karena test yang dilakukan terhadap tahanan itu sebetulnya untuk membuktikan seberapa jauh para tahanan ini masih komunis atau tidak.

Itu akan berkaitan dengan pelepasan dan perlakuan juga dalam tahanan. Beberapa tahanan politik bilang, memang kami pernah didatangi, ditest dan tidak tahu persis hasilnya apa. Tapi yang jelas kemudian kepulangan orang dan perlakuan mereka setelah ditahan sangat bergantung pada jawaban-jawaban yang mereka berikan.

"1978 Orde Baru sedang pada puncak-puncak kekuasaannya. Jadi di lingkungan universitas sekali pun ada banyak protes tidak banyak orang yang memperhatikan itu. Kedua karena mungkin, dibandingkan dengan represi yang sifatnya langsung persoalan ini kan nggak begitu terlihat. Bahwa ada dukungan ilmiah terhadap upaya represi gitu. Ini dugaan sementara saja", ujar Hilmar Farid dalam wawancaranya dengan Ranesi (1/11).

Menurut Hilmar, bahan-bahan yang sekarang didapat baru dari sisi Belanda. "Ada banyak sekali informasi di sini yang tidak diketahui di Indonesia. Tetapi ini yang nanti dibawa kembali dan di-cross check nanti dengan wawancara maupun bahan-bahan tulisan yang bisa kita dapatkan di sana. Kita bisa bikin kesimpulan yang lebih kuat dan berdasar mengenai apa sesungguhnya peristiwa ini dan berapa jauh dampaknya terhadap kelang-gengan represi Orde Baru jaman itu", ujar Hilmar Farid. Ketua Bekas Tapol Indonesia Di London.

Berbicara mengenai mencari keadilan, Carmel Budiardjo - "eks Tapol", Ketua organisasi TAPOL di London, Inggris - melontarkan pendapat, berupa usul melakukan upaya terus menerus agar Soeharto bisa diseret ke pengadilan. Sehubungan dengan ini, dalam kesempatan intervensi dalam diskusi tersebut, publisis Ibrahim Isa minta perhatian hadirin, terhadap satu soal penting: "Di Indonesia terdapat kendala mental terbesar untuk ditingkatkannya kesadaran di sekitar penegakkan hukum, masalah mengakhiri situasi 'impunity', atau 'tanpa hukum'.

Kendala mental itu adalah pikiran-salah (denkfout) yang sudah sejak berdirinya Orba terus menerus dipompakan ke dalam kesadaran masyarakat, - bahwa berbuat sewenang-wenang, yang melanggar hukum, melakukan pelanggaran HAM, bahkan sampai membantai orang-orang komunis, orang-orang PKI atau yang diduga PKI, terhadap golongan kiri lainnya yang umumnya mendukung politik Presiden Sukarno, - tindakan tersebut - bukanlah suatu kejahatan".

Jelas kiranya, lanjut Ibrahim, pikiran salah itu perlu dikikis, agar menciptakan syarat dan situasi kondusif untuk ditegakkannya kesadaran mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Selain Carmel, sastrawan kondang Sitor Situmorang yang juga "eks Tapol" mengajukan pendapat perlunya proses pengadilan terhadap Soeharto. Sambil berke-lakar Sitor mengatakan, kita harus "adil terhadap Soeharto".

Karena itu, kita tak sekadar bicara tentang kejahatan Soeharto, tetapi juga harus menuntutnya di pengadilan. Jelas apa gugatan kita terhadap Soeharto, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di muka pengadilan itulah Soeharto dipersilakan membela diri. Agar semuanya jelas, dan tidak terus jadi bulan-bulanan seperti sekarang ini.

Berbicara tentang pelanggaran HAM, Sitor Situmorang menceritakan, belum lama ini melalui anaknya dia mem-peroleh berkas resmi mengenai penangkapan terhadap dirinya. Meskipun di atas setiap berkas tertulis kata-kata "pro justisia", namun keseluruhan isi berkas resmi itu mengungkapkan betapa kesewenang-wenangan hukum telah diperlakukan Orba terhadap dirinya.

Sitor mengaku telah mengirimkan kopi berkas bertuliskan "pro justisia" tersebut ke Fakultas Hukum UI, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan LBH Jakarta. Bahkan dia mengusulkan kepada Fakultas Hukum UI, berkas tertulis "pro justisia" ini dijadikan bahan kuliah.

Dalam bincang-bincang khusus dengan Rakyat Merdeka, Fay (demikian panggilan akrab Hilmar Farid) menya-takan, soal menyeret Soeharto ke pengadilan itu merupakan fokus dan bukan satu-satunya masalah. Hal tersebut patut terus diperjuangkan dalam kerangka bukan kita ingin mengadakan pembalasan. "Saya sendiri tak punya latar belakang keluarga yang terkait peristiwa ini, jadi bukan sesuatu yang pribadi buat saya. Paling penting sebetulnya adalah membongkar kejahatan, mengungkapkan fakta-faktanya di satu forum yang legal", ujar Fay.

Selama ini, lanjut Fay, yang terjadi kemudian adalah dugaan, analisis, dan kesimpulan yang kadang sifatnya juga tuduhan. Dan tuduhan ini harus dibuktikan, fakta-fakta itu ditegakkan dan diakui memang benar adanya. Jadi sebetulnya kita masih hidup di alam dugaan yang sama seperti dulu tanpa adanya klarifikasi di forum yang legal, yakni pengadilan. Kalau mau dipikir, seperti Sitor sempat bicara, yang rugi kan sebenarnya kekuasaan itu sendiri, terus menjadi bulan-bulanan tuduhan tanpa pernah ada klarifikasi mengenai peran sesungguhnya dari mereka.

Menjawab pertanyaan kemungkinan menyeret Soeharto ke pengadilan sekarang, Fay berpendapat: "Kalau kemungkinan dari segi politik, saya tidak percaya itu akan terjadi di bawah pemerintahan yang sekarang. Itu jelas. Juga pemerintahan-pemerintahan sebelumnya (sesudah Soeharto jatuh). Pencapaian yang paling hebat adalah ketika sempat dibuka pengadilan Soeharto, tapi dia tidak dapat hadir karena alasan sakit, dan seterusnya, dan seterusnya".

Sekarang ini saya lihat, lanjut Fay, kemungkinan itu semakin menurun. Bukan hanya mood-nya, tetapi seluruh sistemnya tidak membantu. Elit-elit yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak menginginkan adanya pengadilan terhadap Soeharto, karena tidak lain adanya keterlibatan mereka sendiri di dalam urusan-urusan di masa lalu.

"Jadi sulit saya membayangkan, itu akan terjadi di bawah pemerintahan sekarang", tegas Fay.

"Bagi saya makin jelas, bahwa pembicaraan menyangkut peristiwa 1965 itu masih jauh dari selesai. Itu satu catatan penting. Masih akan ada banyak lagi pertemuan seperti ini. Catatan dari Carmel Budiardjo, penting sekali, ketika dia bilang, peristiwa 1965 harus dilihat dalam kerangka kekerasan Orde Baru secara menyeluruh. Sehingga kita mendapat gambar mengenai rezim Orba ini secara lengkap, bukan hanya fragmen-fragmen tertentu saja. Untuk itu, masih banyak penelitian yang harus dikerjakan", ungkap Hilmar Farid menutup bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka. R

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*





# **Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 Suing for the Justice**

**Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965**

**Mencari Keadilan**

**Compiled by**

**Cyntha Wirantaprawira**

**Published by**

**German - Indonesian Society  
Heidelberg - Republic Federal of Germany**

# **Lifting the Curtain on the Coup of October 1<sup>st</sup> 1965**

**Suing for the Justice**

**Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965**

**Mencari Keadilan**

**Compiled by:**

**Cyntha Wirantaprawira**

Published by  
German Indonesian Society  
Heidelberg Germany

Dedicated to  
All Victims of General Suharto's Regime

## Preface

This Book is a compilation of articles and emails concerning “Coup d’état of October 1<sup>st</sup> 1965” in Indonesia, which I read and collected from the Internet and mailing lists between September – October 2005 during the Commemoration of 40 years National Tragedy of the Republic of Indonesia (October 1<sup>st</sup> 1965 – October 1<sup>st</sup> 2005) with the aim, to uncover the 40 years mystery of the Indonesian massacres.

As a young person, born 1983 and living outside Indonesia, I would like to know the reasons, why my father, Willy R. Wirantaprawira, who was sent by Indonesian Government to study in East Europe (1963 – 1968), since he was 24 years old until today, more than 42 years, has to live in exile outside his home country.

All articles and emails in this book are presented without changes or comments. All rights of all articles are reserved by the mentioned authors. This book is to be distributed free of charge to libraries in Indonesia and abroad and to those, who have not the possibility to get digital information through the Internet.

Dedicated to all Indonesians, the victims of General Soeharto’s regime living inside and outside the country

Heidelberg, Germany on September – October 2005

Cyntha Wirantaprawira

cynth@wirantaprawira.net

<http://www.wirantaprawira.org/privat/cyntha/>

### **It is a human right for all Indonesian citizens to know the Truth about the Coup of October 1st 1965**

The Guilt of Vorfathers, who were accused to have connection with the Coup of October 1<sup>st</sup> 1965, is not to be carried over to their children and grandchildren

The Insurrection of Free Aceh Movement, who rebelled against  
the United Republic of Indonesia  
were granted an amnesty and were rehabilitated

Otherwise.....

All those Indonesian – including Bung Karno  
the "Founding Father" of the Republic of Indonesia –  
who are accused to overthrow the legal Indonesian Government 1965

When they are will be granted an amnesty and to be rehabilitated?

## Table of Contents

95	Preface	p.	698
96	Table of Contents	p.	699
97	UNHCR: Statement of Dr. Ribka Tjiptaning Crimes Against Humanity and Gross Violations of Human Rights in Indonesia committed by the Military Regime of General Suharto	p. p.	701 702
98.	Class Action Against Five Presidents RI by Victims of 1965	p	706
99	Peter Dale Scott: The US and the Overthrowing Soekarno 1965 – 1966	p	711
100	Ralph McGehee: The Indonesian Massacres and the CIA	p.	737
.101	Benedict R. Anderson: Petrus Dadi Ratu	p	773
102	Kathy Kadane: “Ex-Agents say : CIA compiled Death List for Indonesians“	p	780
103	CIA Stalling State Department Histories. Archive posts one of two disputed Volumes on Web	p	786
104	CIA Book 1964 – 1968 Vol. XXVI concerning Indonesia, Malaysia-Singapore and	p	788
105	The Indonesian Institute for the Study of 1965 – 1966 Massacres (YPKP ‘65/’66)	P:	789
106	Keep the Indonersian Pot Boiling David Easter: Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965 – March 1966	p	792
107	Chomsky on Indonesia	p	813
108	Anonymous: The Coup	p	827
109	Mark Curtis: US and British Conspiracy in Indonesia 1965	p	829
110	Covert Olperations in Indonesia 1965	p	835
111	Greg Poulgrain: Who plotted 1965 Coup?	p	854
112	Mike Head: US orchestrated Suharto’s 1965 – 1966 Slaughter in Indonesia	p	856
113	During Suharto’s Coup in 1965 - 1966 US Officials Provided Indonesian Military with Death Lists	p	868
114	Mike Head: A Key Participant in Indonesian Massacre	p	870
115	Noam Chomsky: Thirty Five Years of Complicity Indonesia: Master Card in Washington’s Hand	p	905

116	Indonesia: US Role in 1965 Massacres. Confessions from the US State Department	p	908
117	What happened in Indonesia? Letter of Benedict R. Anderson & Ruth McVey	p	913
118	Killer File: Mohamed Suharto	p	918
119.	Asvi Warman Adam: The Institutionalization of State Violence after 1965	p	929
120	Ibrahim Isa: Focus on the 30th September '65 Events	p	934
121	Mochtar Buchori: Tragedy Between Amnesia and Lustration	p.	935
122	Hera Diani: Forty Years on Events of 1965 remains a mystery	p	937
123	M. Taufiqurrahman: Democracy takes root in larges Muslim Country	p	938
124	Statement of the Asian Human Rights Commission (AHRC) of October 6 <sup>th</sup> ,2005	p.	941
125	The Mass Killings in Indonesia After 40 Years by John Roosa and Joseph Nevins	p	943
126	LAMPIRAN - ATTACHMENTS	p	950

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*



## UN HIGH COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Fifty-ninth sessions

Item 11 of the Provisional Agenda

CIVIL AND POLITICAL RIGHTS INCLUDING

THE QUESTIONS OF TORTURE AND DETENTION

Oral Statement

by Third World Movement Against the Exploitation of Women

Delivered by Ribka Tjiptaning MD

Distinguish chairperson,

My name is Ribka Tjiptaning. I speak on behalf of the Third World Movement Against the Exploitation of Women. I am a daughter of a human rights victim of the 1965 tragedy.

We all know, that military regime led by General Suharto, in the year 1965, seized power in Indonesia. This seized of power committed acts of severe violence towards certain parts of the civilian population. They were allegedly members of the Indonesian Communist Party or other organizations affiliated to this political party. To secure its power, the Suharto's regime, furthermore detained hundred thousands of people without any judicial process, without clear charges, without time limit. In the year 1967 Attorney General admitted that some 200.000 people were put in the concentration camps. Not only were they detained, they also experienced torture.

Distinguish chairperson,

I would like to give testimony of the situation of torture and detention as experience by my father from 1968 until 1980.

My father, Mr. R.M. Suropto Tjondrosaputro, owned a factory producing nails, but he was also a member of the Executive Board of a progressive youth organization.

I was only 7 years old when my father was detained for over 12 years. He was detained without proper judicial process. He imprisoned in several cities, in Jakarta, Semarang, Pekalongan, and Ambarawa. During his detainment, he experienced torture in the form of receiving electric shocks; hanged upside down until blood flowed from his ears, nose and mouth; burnt by hot iron on his back until he got a stroke. His physique was totally in a poor health condition when he came back to my family.

My father died in 1991 by heart attack as an effect of bad conditions during the detainment. What had happened with my father has influence me until now, because

I believe this was also experienced by hundreds thousands of political prisoners and detainee of the 1965 victims.

Distinguish chairperson,

What make it even worse, since the 1965, the practice of torture continues until now in others human rights violation cases such as in Aceh and Papua. This is primarily due to the lack of proper response from the state to take the responsibility over human rights violations since 1965.

Concerning the tragedies that have affected the lives of the 1965 victims and their families, I herewith present you the following requests:

1. I urge the commission to take notice of the crimes against humanity committed by the military regime of General Suharto during their 32 years of reign since 1965.
2. I ask the commission to urge the government of Indonesia to set up a national investigation team on the human rights violation, which occurred in 1965 and the impact.
3. I ask the commission to urge the government of Indonesia to bring justice to the victim 1965 using the human rights standards.
4. I ask the commission to urge the government of Indonesia to apply the recommendation of the Committee Against Torture in 2001.
5. I ask the commission to urge the government of Indonesia to invite the Special Rapporteur on Torture.

I will end here. Thank you for this opportunity.

\*\*\*\*\*

## STATEMENT

### UN HIGH COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Fifty-ninth sessions

Item 11 of the Provisional Agenda

### CRIMES AGAINST HUMANITY AND GROSS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA COMMITTED BY THE MILITARY REGIME OF GENERAL SUHARTO

by Ir. Setiadi Reksoprodjo

- + Advisor to PAKORBA (Communion of victims of the New Order Regime Indonesia).
- + Former Minister for Electricity and Energy of the Republic of Indonesia.
- + Associate Member of the ALRC (Asian Legal Resource Centre)
- + Associate Member of the WPC (World Peace Council)



After the military regime led by general Suharto had seized power in the Republic of Indonesia in the year 1965, it perpetrated acts of severe violence towards certain parts of the civilian population. The acts amounted to gross violations of human rights and crimes against humanity on an immense scale.

This regime orchestrated. Incited and in part carried out the killings of 500.000 to one million men and women, adults as well as younger people allegedly being members of the Indonesia Communist Party or their peasant, labour, women and youth community organizations and even innocent people accused of being their sympathizer because of some personal malice or because they cared about the orphaned children of the killed families. Those murdered were virtually all unarmed civilians. The late general Sarwo Edhi, personally involved in these “red drive” actions, even quoted the amount of slaughtered people as much as three million covering the isles of Java, Sumatra, Bali, Sulawesi, Borneo, the Molucas and the Lesser Sunda Isles, all over the area of Indonesia territory.

During more than 30 years of the military rule of general Suharto the subject of the genocide crime, summary executions and enforced disappearances had been unspeakable in Indonesia and many of these massacres have not yet been sufficiently uncovered up till now. Yet no serious historian within Indonesia or abroad, such as Prof. Gunnar Myrdal from Sweden, Benedict Anderson of the USA, Herbert Feith and Richard Tanter from Australia, doubts that so many people were killed.

To secure its power, the Suharto regime detained furthermore many hundred-thousands of people without any judicial process, without any clear charges, without time limit. These people were kept in concentration camps mostly under inhuman conditions; many prisoners died as a result of absence of medical care, torture during interrogations, summary executions and of starvation. In the year 1967 the Attorney General admitted that some 200.000 people were in detention. The climate of fear, insecurity and mutual distrust that was created by the measures of the regime kept every body else silenced.

When the victims of massacre, enforced disappearances, detention were at least three million people, those who indirectly suffered from the despotic policies practiced by the Suharto military regime were another ten to fifteen million children and family (old fathers and mothers) of the killed, disappeared or detained persons. They were usually bereaved of every thing, yet were stigmatized as “politically unclean” and there fore subject to several discriminative regulations decreed by the regime.

We are raising these crimes against humanity and the gross violations of human rights committed and instigated by the military regime led by general Suharto in Indonesia some forty years ago because:

1. The criminal acts against humanity and human rights concerning some three million people murdered, hundreds of thousands arbitrary detained and another ten million children, women and elderly people suffering discrimination of their civil rights, seem to be overlooked and have not been investigated as it should be. These crimes which have brought suffering to millions of civilian people, for the sake of justice, should not pass away without being properly prosecuted.

2. Children and innocent people still have to suffer from the stigmatization and discrimination originated by the Suharto military regime.
3. Although general Suharto has stepped down as the President of the Indonesia Republic, he and his cronies have not been called to account for the crimes they have perpetrated.

I am one of those who experienced the arbitrariness of the military regime of general Suharto. I was Minister for Electricity and Energy with the legitimate government of President Sukarno when general Suharto started his coup. I escaped an attempt of kidnapping and murder by the cohorts that supported general Suharto. But I could not evade being put in detention without any judicial process and without clear charges for twelve years by the regime of general Suharto who came to power by coup d'etat. Even when we have been put out of the camps, because of international diplomatic intervention, and were formally given back our full freedom, former detainees (tapol) until recently were not allowed to move freely and up till now are subject to regulations restraining their human rights. The most recent (new) regulation deprives us from the right to be chosen for membership of the Parliament.

We there fore urge the UN-HCHR to take notice of the crimes against humanity and gross violations of human rights in Indonesia which were committed by the military regime of general Suharto during their 32 years of reign since 1965.

We urge the UN-HCHR to decide on an investigation into this matter, since it has not been satisfactorily solved up till now. We urge the UN-HCHR for the sake of justice and humanity, to take appropriate steps on the basis of the results of the investigation to put the perpetrators responsible for their crimes.

\*\*\*\*\*

## House ratifies covenants ahead of recess

SOURCE: Jakarta Post - October 1, 2005

Tony Holland, Jakarta -- The elimination of all forms of restrictions on freedom of expression, threats to religious freedom, forced labour and discrimination in the workplace are new tasks for the government after the House of Representatives finally ratified on Friday two long-awaited United Nations covenants.

The ratification of the UN 1969 Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights wrapped up the House's first one-year sitting period. The lawmakers will now go into a three-week recess. Chairman of House Commission I on defence and foreign affairs Theo L. Sambuaga said ratifying the covenants would commit Indonesia to protecting the rights of its citizens to an international standard.

The covenants will also serve as an important main reference for national laws that have been or will be passed in the future, according to Theo, although some House members said that most of the covenants' articles were already recognized by the 1945 Constitution and other laws. The House also approved one major additional

clause to Article 1 of the Covenant on Civil and Political Rights regarding the right of self-determination.

"Self-determination does not apply to any parts of a united state, and there's no parts of the covenant that will go against the unitary state of Indonesia," Theo said. It took the lawmakers less than three weeks to ratify the two covenants, a process that also involved consultation with human rights activists and experts in international law. A bill's deliberation normally lasts more than a month.

Some observers believe that the ratification was simply aimed to facilitate the request from the Free Aceh Movement (GAM) following the Aug. 18 signing of a peace accord to end almost 30 years of separatist fighting in the province.

Minister of Foreign Affairs Hassan Wirayuda said the ratification would mean the international community could hold Indonesia accountable for the implementation of the two covenants.

"We're now responsible to the international community for any violations of the covenants. We're also obliged to write a biennial report on our implementation of the covenants," he said. Human rights activists, however, called the ratification half-hearted.

Ildhal Kasim, director of the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), said the ratification had excluded two optional protocols, which were as important as other clauses in the covenant on civil and political rights.

The two excluded protocols were on the mechanism of victims of human rights violations to individually claim for rights restoration and the abolishment of capital punishment. "The House was so worried about the self-determination clause, that they didn't focus on these two protocols, which are more relevant to our situation now," said Ildhal.

The two international covenants were the latest of only 12 bills the lawmakers managed to endorse since they took office in October last year. The House had set a target of passing 55 bills, in line with the National Legislation Program for 2005.

TITLE: What ratification of rights covenants implies

SOURCE: Jakarta Post - October 1, 2005

Implications of ratification of UN Conventions on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights to states (selected). The state must:

1. Ensure that all individuals can enjoy the rights recognized in the Covenant, regardless of their race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status
2. Protect the right to life; in countries which have not abolished the death penalty, the death sentence may be imposed only for the most serious crimes.
3. Prohibit slavery, slave trade in all their forms, and forced or compulsory labour.

4. Ensure that everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.
5. Guarantee people's rights to liberty of movement and freedom to choose residence, freedom to leave and enter their country.
6. Ensure equality before the courts and tribunals.
7. Protect people's right to freedom of expression and ideas in writing or in print, in the form of art, or through any other media of their choice; the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions.
8. Recognize the right of men and women of marriageable age to marry and to found a family.
9. Recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts.
10. Recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, fair and equal remuneration and opportunity of promotion to appropriate higher level, particularly for women.

\*\*\*\*\*

Source : <http://tapol.gn.apc.org/news/files/st050420.htm>

## Class Action Against Five Presidents By Victims of 1965

20 April 2005

(Tapol summary translation of main aspects of the legal action)

This Class Action (/SK/LBH/III/2005) has been filed by the Jakarta Legal Aid Institute on behalf of victims who were alleged to be involved in the G30S (30th September Movement) of 1965 consisting of twenty million people, three million of whom were officers or members of the PKI (Indonesian Communist Party) who were murdered and seventeen million of whom consist of PKI sympathisers, admirers of Sukarno, and their descendants, and others who were not officers, members, sympathisers, children or grandchildren or otherwise associated with the above.

The appellants consist of seven groups as follows:

**Group I Persons who were forced to resign or were dismissed from employment without any formalities and thus received no wages or allowances.**

**Group II** Persons who were deprived of their pension rights as civil servants or members of the armed forces or the police.

**Group III** Victims of special investigation who were said to have an unclean environment, being accused of being PKI, with the result that they were dismissed from their jobs and were unable to find work.

**Group IV** Persons whose allowances as veterans were withdrawn.

**Group V** Persons whose land, buildings or other possessions were seized, destroyed, burnt or commandeered .

**Group VI** Persons who were expelled from school and were unable to continue their education because they were accused of being involved in the G30S or of having an unclean environment.

**Group VII** Persons whose creative works were hindered and who were obstructed from publishing their works and staging performances.

By virtue of the similarity of the facts and the legal basis of these 20 million persons who were discriminated against, the case is presented as a Class Action, which has the advantage of being straightforward, speedy and less costly.

The Class Action states that since 1965 and up to the present day, the victims of accusations who bear the PKI stigma have not enjoyed fulfilment, protection and respect for their rights, including their rights to employment, to owning personal possessions, to education and their cultural rights.

The failure to provide the appellants with their rights since 1965 which has been maintained by all the defendants up to the present day is in direct contravention of the legal responsibilities of the defendants.

The five defendants are:

Susilo Bambang Yudhoyono, President.

Megawati Sukarnoputri, ex-President.

Abdurrahman Wahid, ex-President.

B.J. Habibie, ex-President.

Suharto, ex-President.

After explaining the legal justification for pursuing this action as a Class Action, the historical facts are presented, commencing with 28 - 30 September 1965 when troops of two Diponegoro battalions were instructed by the commander of Kostrad (Suharto) to move. On the following day, 1 October, several senior and middle-ranking officers were murdered by a group calling itself the G30S. Two senior officers escaped being murdered, Lt General Abdul Haris Nasution and Suharto.

While the motive for the murders was still unclear, President Sukarno issued an order to Suharto to instruct all troops to remain in their places while awaiting instructions from the President.

Suharto did not carry out the order of the President and compelled the President to grant him powers to restore law and order. Although this order was opposed by many, the powers were nevertheless granted to Suharto.

Special powers having been vested in Suharto, the rights of the appellants were thereupon eliminated.

Suharto became commander of Kopkamtib (Command for the Restoration of Law and Order) on 3 October by means of the powers vested in him by the President.

Once he became commander of Kopkamtib, the appellants lost their rights as citizens, as a result of accusations blaming the PKI for the G30S and orders were issued to all governmental departments to dismiss members of the PKI as well as their children and grandchildren.

The appellants represented by Group I had no legal status after being branded as being involved in the G30S, and having no document regarding their status, they were not able to get work

The appellants represented by Group II suffered damages by losing their jobs in government departments or state enterprises for alleged involvement in the G30S and lost their jobs as civil servants or members of the armed forces and the police. Appellants represented by Groups I and II suffered the consequences of the actions of Suharto not just in one province but in other provinces as well.

From the time that Suharto became commander of Kopkamtib, the appellants represented by Group V lost their possessions, their homes and the contents therein, which were deliberately destroyed and taken over by persons in army uniform. The seizure of land and buildings occurred not only in Jakarta but throughout Java.

The appellants were then imprisoned without any legal process.

The appellants represented by Group VI were unable to complete their education because they were imprisoned without due process.

The works and artistic creations of appellants represented by Group VI were banned by Suharto and were they imprisoned throughout Indonesia.

From 2 - 10 October, all publications were banned by Suharto with the exception of two newspapers published by the armed forces.

On 11 March 1966, Suharto received an order from the President of Indonesia to take such measures as necessary to preserve security and order and to safeguard the President. On the basis of this order, Suharto disbanded the PKI; the order was not signed by Sukarno but by Suharto on 12 March.

Using the apparatus now under his command, Suharto took increasingly discriminatory measures against persons represented by Group I who suffered immense damages as a result. Even those who were given written proof that they had not been involved in the G30S were unable to get work.

On 12 March 1966, President Sukarno corrected the 11 March order because he saw that Suharto was exceeding his powers, but this order was ignored by the latter. The appellants represented by Group I were imprisoned on the orders of Suharto without justification, explanation or evidence presented in a court of law. They were accused of involvement in the G30S and accused of endangered state security.

On 21 March 1967, Suharto was appointed Acting President without any election being held, alleging that President Sukarno has lost the confidence of the people. On

27 March 1968, he was confirmed as President, which meant that the failure of the G30S to take power had been overtaken by a seizure of power without a general election being held.

The Class Action then deals with further actions during the 1970s, the 1980s and the 1990s, up until 21 May 1998 when Suharto was forced to resign as demanded by the students whereupon the Vice President (BJ Habibie) took over as president. After Habibie took over, he allowed the violation of the rights of the appellants to remain in force, ignoring their fundamental rights., which had not been protected during the rule of Suharto.

The first amendment to the Constitution was enacted in 1999 and on 23 September 1999, Habibie enacted Law No 39 on Basic Human Rights but the provisions of this law have never been applied to the appellants.

On 20 October, Habibie was replaced by Abdurrahman Wahid as President of Indonesia but as was the case with Habibie, Wahid did nothing to restore the rights of the appellants as provided for in the 1945 Constitution and in Law No 39, 1999 on Basic Human Rights.

A second amendment to the Constitution was enacted in 2000.

On 10 March 2000, Wahid issued a presidential decree revoking president instruction No 16, 1990 on special investigations for employees of the Republic of Indonesia. Even so, the basic rights of the appellants were not restored.

On 14 March 2000, Wahid, in his capacity as a member of the NU, publicly apologized to the nation for the murder of citizens who had been accused of involvement in the G30S.

In 2001, a further amendment of the Constitution was enacted and on 23 July 2001, Wahid was replaced by Megawati as President.

In 2002, the appellants submitted a request to Megawati for the restoration of their rights that had been eliminated by Suharto, but she, like the two presidents before her, took no action, with the result that the appellants continued to live without employment or their legitimate rights.

On 12 June 2003, the Supreme Court wrote to the President reminding her of the request for rehabilitation she had received from the appellants. On 25 July, 2003, the Indonesian Parliament (DPR) wrote to Megawati requesting her to act in response to the letter from the Supreme Court and on 25 August 2003, the National Human Rights Commission wrote to Megawati regarding rehabilitation for victims of the G30S/PKI, in view of the request for rehabilitation made earlier by the Supreme Court, but none of these requests received any response from Megawati.

On 24 February 2004, the Constitutional Court announced a decision to endorse the results of a Judicial Review regarding Article 60 (g) (which would now allow 1965 victims to stand for election for national and regional assemblies) and requested the government to revise and revoke various discriminatory regulations affecting the social, economic and cultural rights of persons bearing the G30S stigma.

On 14 September 2004, the appellants wrote to Megawati, Habibie and Wahid reminding them of their earlier request, but no answer has been received.

On 20 October, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was sworn in as President of Indonesia.

On 21 October 2004, the appellants sent reminders to the five presidents . They did so again on 23 November. The only person to reply was Wahid.

On 10 January 2005, the appellants wrote to Wahid reminding him of his responsibilities regarding the denial of their rights.

On 8 February 2005, the National Human Rights Commission wrote to SBY regarding the restoration of the rights of the appellants.

However, despite the representations made by the Supreme Court, the Indonesian Parliament and the National Human Rights Commission, the five presidents have done nothing to fulfill the requests made by the appellants regarding the restoration of their rights.

They therefore conclude that the presidents have deliberately allowed the sufferings of the appellants to remain in force, year after year and up until the moment this Class Action was filed and the appellants continue to suffer the denial of their rights as citizens and continue to bear the G30S/PKI stigma.

After explaining at great length how the five presidents have acted in contravention of the law, the appellants state that the five presidents have failed to show any goodwill in applying the provisions of the Human Rights Law to the appellants.

They then state that each of the groups of appellants are entitled to material compensation and specify the amounts (calculated per day, for a period of 25 years) which each of the members of the groups of appellants should receive.

They request the court to order President SBY to set up a team to calculate the damages suffered by the appellants in accordance with the specifications as stated above and to calculate the precise number of persons represented by the appellants.

They furthermore state that considering that others in addition to the appellants are also likely to feel the consequences of the G30S/PKI stigma, they request SBY to immediately issue an instruction for the repeal of all discriminatory regulations and put an end to the G30S/PKI stigma at all levels of government, central and regional, which result in grave discrimination against Indonesian citizens and are in contravention of basic human rights.

[This document was submitted to the President of Indonesia on 17 December 2004 with a request for the repeal of all discriminatory regulations and special marks on identity cards indicating that the hold is not a former member of the banned PKI or any of its mass organizations or was not involved either directly or indirectly in the G30S/PKI or other banned organizations, for the restoration of their legitimate rights as citizens.



It was also submitted to the chairman of the UN Human Rights Commission meeting which was held in Geneva from March - April 2005 by the Central Council of Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (Institute to Struggle for Rehabilitation of Victims of the New Order Regime) and signed by Chairman Sumaun Utomo, Head of the Advocacy Team Mulyiono SH, and Secretary General Mudjayin.]

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

\* Source: SiaR WEBSITE: <http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html>

## The United States and the Overthrow of Soekarno, 1965-1967

**Peter Dale Scott**

In this short paper on a huge and vexed subject, I discuss the U.S. involvement in the bloody overthrow of Indonesia's President Soekarno, 1965-67. The whole story of that ill-understood period would transcend even the fullest possible written analysis. Much of what happened can never be documented; and of the documentation that survives, much is both controversial and unverifiable. The slaughter of Soekarno's left-wing allies was a product of widespread paranoia as well as of conspiratorial policy, and represents a tragedy beyond the intentions of any single group or coalition. Nor is it suggested that in 1965 the only provocations and violence came from the right-wing Indonesian military, their contacts in the United States, or (also important, but barely touched on here) their mutual contacts in British, German and Japanese intelligence.

And yet, after all this has been said, the complex and ambiguous story of the Indonesian bloodbath is also in essence simpler and easier to believe than the public version inspired by President Soeharto and U.S. government sources. Their problematic claim is that in the so-called Gestapu (Gerakan September Tigahpuluh) coup attempt of September 30, 1965 (when six senior army generals were murdered), the left attacked the right, leading to a restoration of power, and punitive purge of the left, by the center.<sup>1</sup> This article argues instead that, by inducing, or at a minimum helping to induce, the Gestapu "coup," the right in the Indonesian Army eliminated its rivals at the army's center, thus paving the way to a long-planned elimination of the civilian left, and eventually to the establishment of a military dictatorship.<sup>2</sup> Gestapu, in other words, was only the first phase of a three-phase right-wing coup -- one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials.<sup>3</sup>

Before turning to U.S. involvement in what the CIA itself has called "one of the worst mass murders of the twentieth century,"<sup>4</sup> let us recall what actually led up to it. According to the Australian scholar Harold Crouch, by 1965 the Indonesian Army General Staff was split into two camps. At the center were the general staff officers appointed with, and loyal to, the army commander General Yani, who in turn was reluctant to challenge President Soekarno's policy of national unity in alliance with the Indonesian Communist party, or PKI. The second group, including the right-wing generals Nasution and Soeharto, comprised those opposed to Yani and his

Soekarnoist policies.<sup>5</sup> All of these generals were anti-PKI, but by 1965 the divisive issue was Soekarno.

The simple (yet untold) story of Soekarno's overthrow is that in the fall of 1965 Yani and his inner circle of generals were murdered, paving the way for a seizure of power by right-wing anti-Yani forces allied to Soeharto. The key to this was the so-called Gestapu coup attempt which, in the name of supporting Soekarno, in fact targeted very precisely the leading members of the army's most loyal faction, the Yani group.<sup>6</sup> An army unity meeting in January 1965, between "Yani's inner circle" and those (including Soeharto) who "had grievances of one sort or another against Yani," lined up the victims of September 30 against those who came to power after their murder.<sup>7</sup>

Not one anti-Soekarno general was targeted by Gestapu, with the obvious exception of General Nasution.<sup>8</sup> But by 1961 the CIA operatives had become disillusioned with Nasution as a reliable asset, because of his "consistent record of yielding to Soekarno on several major counts."<sup>9</sup> Relations between Soeharto and Nasution were also cool, since Nasution, after investigating Soeharto on corruption charges in 1959, had transferred him from his command.<sup>10</sup>

The duplicitous distortions of reality, first by Lt. Colonel Untung's statements for Gestapu, and then by Soeharto in "putting down" Gestapu, are mutually supporting lies.<sup>11</sup> Untung, on October 1, announced ambiguously that Soekarno was under Gestapu's "protection" (he was not); also, that a CIA-backed Council of Generals had planned a coup for before October 5, and had for this purpose brought "troops from East, Central, and West Java" to Jakarta.<sup>12</sup> Troops from these areas had indeed been brought to Jakarta for an Armed Forces Day parade on October 5th. Untung did not mention, however, that "he himself had been involved in the planning for the Armed Forces Day parade and in selecting the units to participate in it,"<sup>13</sup> nor that these units (which included his own former battalion, the 454th) supplied most of the allies for his new battalion's Gestapu activities in Jakarta.

Soeharto's first two broadcasts reaffirmed the army's constant loyalty to "Bung Karno the Great Leader," and also blamed the deaths of six generals on PKI youth and women, plus "elements of the Air Force" -- on no other evidence than the site of the well where the corpses were found.<sup>14</sup> At this time he knew very well that the killings had in fact been carried out by the very army elements Untung referred to, elements under Soeharto's own command.<sup>15</sup>

Thus, whatever the motivation of individuals such as Untung in the Gestapu putsch, Gestapu as such was duplicitous. Both its rhetoric and above all its actions were not simply inept; they were carefully designed to prepare for Soeharto's equally duplicitous response. For example, Gestapu's decision to guard all sides of the downtown Merdeka Square in Jakarta, except that on which Soeharto's KOSTRAD [Army Strategic Reserve Command] headquarters were situated, is consistent with Gestapu's decision to target the only army generals who might have challenged Soeharto's assumption of power. Again, Gestapu's announced transfer of power to a totally fictitious "Revolutionary Council," from which Soekarno had been excluded, allowed Soeharto in turn to masquerade as Soekarno's defender while in fact preventing him from resuming control. More importantly, Gestapu's gratuitous murder of the generals near the air force base where PKI youth had been trained allowed

Soeharto, in a Goebbels-like manoeuvre, to transfer the blame for the killings from the troops under his own command (whom he knew had carried out the kidnappings) to air force and PKI personnel who were ignorant of them.<sup>16</sup>

From the pro-Soeharto sources -- notably the CIA study of Gestapu published in 1968 -- we learn how few troops were involved in the alleged Gestapu rebellion, and, more importantly, that in Jakarta as in Central Java the same battalions that supplied the "rebellious" companies were also used to "put the rebellion down." Two thirds of one paratroop brigade (which Soeharto had inspected the previous day) plus one company and one platoon constituted the whole of Gestapu forces in Jakarta; all but one of these units were commanded by present or former Diponegoro Division officers close to Soeharto; and the last was under an officer who obeyed Soeharto's close political ally, Basuki Rachmat.<sup>17</sup>

Two of these companies, from the 454th and 530th battalions, were elite raiders, and from 1962 these units had been among the main Indonesian recipients of U.S. assistance.<sup>18</sup> This fact, which in itself proves nothing, increases our curiosity about the many Gestapu leaders who had been U.S.-trained. The Gestapu leader in Central Java, Saherman, had returned from training at Fort Leavenworth and Okinawa, shortly before meeting with Untung and Major Sukirno of the 454th Battalion in mid-August 1965.<sup>19</sup> As Ruth McVey has observed, Saherman's acceptance for training at Fort Leavenworth "would mean that he had passed review by CIA observers."<sup>20</sup>

Thus there is continuity between the achievements of both Gestapu and the response to it by Soeharto, who in the name of defending Soekarno and attacking Gestapu continued its task of eliminating the pro-Yani members of the Army General Staff, along with such other residual elements of support for first Yani and then Soekarno as remained.<sup>21</sup>

The biggest part of this task was of course the elimination of the PKI and its supporters, in a bloodbath which, as some Soeharto allies now concede, may have taken more than a half-million lives. These three events -- Gestapu, Soeharto's response, and the bloodbath -- have nearly always been presented in this country as separately motivated: Gestapu being described as a plot by leftists, and the bloodbath as for the most part an irrational act of popular frenzy.

U.S. officials, journalists and scholars, some with rather prominent CIA connections, are perhaps principally responsible for the myth that the bloodbath was a spontaneous, popular revulsion to what U.S. Ambassador Jones later called PKI "carnage."<sup>22</sup> Although the PKI certainly contributed its share to the political hysteria of 1965, Crouch has shown that subsequent claims of a PKI terror campaign were grossly exaggerated.<sup>23</sup> In fact systematic killing occurred under army instigation in staggered stages, the worst occurring as Colonel Sarwo Edhie's RPKAD [Army Paracommando Regiment] moved from Jakarta to Central and East Java, and finally to Bali.<sup>24</sup> Civilians involved in the massacre were either recruited and trained by the army on the spot, or were drawn from groups (such as the army- and CIA-sponsored SOKSI trade unions [Central Organization of Indonesian Socialist Employees], and allied student organizations) which had collaborated for years with the army on political matters. It is clear from Sundhaussen's account that in most of the first areas

of organized massacre (North Sumatra, Aceh, Cirebon, the whole of Central and East Java), there were local army commanders with especially strong and proven anti-PKI sentiments. Many of these had for years cooperated with civilians, through so-called "civic action" programs sponsored by the United States, in operations directed against the PKI and sometimes Soekarno. Thus one can legitimately suspect conspiracy in the fact that anti-PKI "civilian responses" began on October 1, when the army began handing out arms to Muslim students and unionists, before there was any publicly available evidence linking Gestapu to the PKI.<sup>25</sup>

Even Sundhaussen, who downplays the army's role in arming and inciting the civilian murder bands, concludes that, whatever the strength of popular anti-PKI hatred and fear, "without the Army's anti-PKI propaganda the massacre might not have happened."<sup>26</sup> The present article goes further and argues that Gestapu, Soeharto's response, and the bloodbath were part of a single coherent scenario for a military takeover, a scenario which was again followed closely in Chile in the years 1970-73 (and to some extent in Cambodia in 1970).

Soeharto, of course, would be a principal conspirator in this scenario: his duplicitous role of posing as a defender of the constitutional status quo, while in fact moving deliberately to overthrow it, is analogous to that of General Pinochet in Chile. But a more direct role in organizing the bloodbath was played by civilians and officers close to the cadres of the CIA's failed rebellion of 1958, now working in so-called "civic action" programs funded and trained by the United States. Necessary ingredients of the scenario had to be, and clearly were, supplied by other nations in support of Soeharto. Many such countries appear to have played such a supporting role: Japan, Britain, Germany,<sup>27</sup> possibly Australia. But I wish to focus on the encouragement and support for military "putschism" and mass murder which came from the U.S., from the CIA, the military, RAND, the Ford Foundation, and individuals.<sup>28</sup>

### The United States and the Indonesian Army's "Mission"

It seems clear that from as early as 1953 the U.S. was interested in helping to foment the regional crisis in Indonesia, usually recognized as the "immediate cause" that induced Soekarno, on March 14, 1957, to proclaim martial law, and bring "the officer corps legitimately into politics."<sup>29</sup>

By 1953 (if not earlier) the U.S. National Security Council had already adopted one of a series of policy documents calling for "appropriate action, in collaboration with other friendly countries, to prevent permanent communist control" of Indonesia.<sup>30</sup> Already NSC 171/1 of that year envisaged military training as a means of increasing U.S. influence, even though the CIA's primary efforts were directed towards right-wing political parties ("moderates ... on the right," as NSC 171 called them): notably the Masjumi Muslim and the PSI "Socialist" parties. The millions of dollars which the CIA poured into the Masjumi and the PSI in the mid-1950s were a factor influencing the events of 1965, when a former PSI member -- Sjam -- was the alleged mastermind of Gestapu,<sup>31</sup> and PSI-leaning officers -- notably Suwanto and Sarwo Edhie -- were prominent in planning and carrying out the anti-PKI response to Gestapu.<sup>32</sup>

In 1957-58, the CIA infiltrated arms and personnel in support of the regional rebellions against Soekarno. These operations were nominally covert, even though

an American plane and pilot were captured, and the CIA efforts were accompanied by an offshore task force of the U.S. Seventh Fleet.<sup>33</sup> In 1975 a Senate Select Committee studying the CIA discovered what it called "some evidence of CIA involvement in plans to assassinate President Soekarno"; but, after an initial investigation of the November 1957 assassination attempt in the Cikini district of Jakarta, the committee did not pursue the matter.<sup>34</sup>

On August 1, 1958, after the failure of the CIA-sponsored PRRI-Permesta regional rebellions against Soekarno, the U.S. began an upgraded military assistance program to Indonesia in the order of twenty million dollars a year.<sup>35</sup> A U.S. Joint Chiefs of Staff memo of 1958 makes it clear this aid was given to the Indonesian Army ("the only non-Communist force ... with the capability of obstructing the ... PKI") as "encouragement" to Nasution to "carry out his 'plan' for the control of Communism."<sup>36</sup>

The JCS had no need to spell out Nasution's "plan," to which other documents at this time made reference.<sup>37</sup> It could only imply the tactics for which Nasution had distinguished himself (in American eyes) during the crushing of the PKI in the Madiun Affair of 1948: mass murders and mass arrests, at a minimum of the party's cadres, possibly after an army provocation.<sup>38</sup> Nasution confirmed this in November 1965, after the Gestapu slaughter, when he called for the total extinction of the PKI, "down to its very roots so there will be no third Madiun."<sup>39</sup>

By 1958, however, the PKI had emerged as the largest mass movement in the country. It is in this period that a small group of U.S. academic researchers in U.S. Air Force- and CIA-subsidized "think-tanks" began pressuring their contacts in the Indonesian military publicly, often through U.S. scholarly journals and presses, to seize power and liquidate the PKI opposition.<sup>40</sup> The most prominent example is Guy Pauker, who in 1958 both taught at the University of California at Berkeley and served as a consultant at the RAND Corporation. In the latter capacity he maintained frequent contact with what he himself called "a very small group" of PSI intellectuals and their friends in the army.<sup>41</sup>

In a RAND Corporation book published by the Princeton University Press, Pauker urged his contacts in the Indonesian military to assume "full responsibility" for their nation's leadership, "fulfill a mission," and hence "to strike, sweep their house clean."<sup>42</sup> Although Pauker may not have intended anything like the scale of bloodbath which eventually ensued, there is no escaping the fact that "mission" and "sweep clean" were buzz-words for counterinsurgency and massacre, and as such were used frequently before and during the coup. The first murder order, by military officers to Muslim students in early October, was the word *sikat*, meaning "sweep," "clean out," "wipe out," or "massacre."<sup>43</sup>

Pauker's closest friend in the Indonesian army was a U.S.-trained General Suwanto, who played an important part in the conversion of the army from a revolutionary to a counterinsurgency function. In the years after 1958, Suwanto built the Indonesian Army Staff and Command School in Bandung (SESKOAD) into a training-ground for the takeover of political power. SESKOAD in this period became a focal-point of attention from the Pentagon, the CIA, RAND, and (indirectly) the Ford Foundation.<sup>44</sup>

Under the guidance of Nasution and Suwanto, SESKOAD developed a new strategic doctrine, that of Territorial Warfare (in a document translated into English by Pauker), which gave priority to counterinsurgency as the army's role. Especially after 1962, when the Kennedy administration aided the Indonesian Army in developing Civic Mission or "civic action" programs, this meant the organization of its own political infrastructure, or "Territorial Organization," reaching in some cases down to the village level.<sup>45</sup> As the result of an official U.S. State Department recommendation in 1962, which Pauker helped write, a special U.S. MILTAG (Military Training Advisory Group) was set up in Jakarta, to assist in the implementation of SESKOAD's Civic Mission programs.<sup>46</sup>

SESKOAD also trained the army officers in economics and administration, and thus to operate virtually as a para-state, independent of Soekarno's government. So the army began to collaborate, and even sign contracts, with U.S. and other foreign corporations in areas which were now under its control. This training program was entrusted to officers and civilians close to the PSI.<sup>47</sup> U.S. officials have confirmed that the civilians, who themselves were in a training program funded by the Ford Foundation, became involved in what the (then) U.S. military attache called "contingency planning" to prevent a PKI takeover.<sup>48</sup>

But the most significant focus of U.S. training and aid was the Territorial Organization's increasing liaison with "the civilian administration, religious and cultural organizations, youth groups, veterans, trade unions, peasant organizations, political parties and groups at regional and local levels."<sup>49</sup> These political liaisons with civilian groups provided the structure for the ruthless suppression of the PKI in 1965, including the bloodbath.<sup>50</sup>

Soon these army and civilian cadres were together plotting disruptive activities, such as the Bandung anti-Chinese riots of May 1963, which embarrassed not just the PKI, but Soekarno himself. Chomsky and Herman report that "Army-inspired anti-Chinese programs that took place in West Java in 1959 were financed by U.S. contributions to the local army commander"; apparently CIA funds were used by the commander (Colonel Kosasih) to pay local thugs in what Mazingo calls "the army's (and probably the Americans') campaign to rupture relations with China."<sup>51</sup> The 1963 riot, which took place in the very shadow of SESKOAD, is linked by Sundhaussen to an army "civic action" organization; and shows conspiratorial contact between elements (an underground PSI cell, PSI- and Masjumi-affiliated student groups, and General Ishak Djuarsa of the Siliwangi Division's "civic action" organization) that would all be prominent in the very first phase of Soeharto's so-called "response" to the Gestapu.<sup>52</sup> The May 1963 student riots were repeated in October 1965 and (especially in Bandung) January 1966, at which time the liaison between students and the army was largely in the hands of PSI-leaning officers like Sarwo Edhie and Kemal Idris.<sup>53</sup> The CIA Plans Directorate was sympathetic to the increasing deflection of a nominally anti-PKI operation into one embarrassing Soekarno. This turn would have come as no surprise: Suwanto, Kemal Idris and the PSI had been prominent in a near-coup (the so-called "Lubis affair") in 1956.<sup>54</sup>

But increasingly Suwanto cultivated a new student, Colonel Soeharto, who arrived at SESKOAD in October 1959. According to Sundhaussen, a relatively pro-Soeharto

scholar: "In the early 1960s Soeharto was involved in the formation of the Doctrine of Territorial Warfare and the Army's policy on Civic Mission (that is, penetration of army officers into all fields of government activities and responsibilities).<sup>55</sup> Central to the public image of Gestapu and Soeharto's response is the much-publicized fact that Soeharto, unlike his sometime teacher Suwato, and his long-time chief of staff Achmad Wiranatakusuma, had never studied in the United States. But his involvement in Civic Mission (or what Americans called "civic action") programs located him along with PSI-leaning officers at the focal point of U.S. training activities in Indonesia, in a program which was nakedly political.<sup>56</sup>

The refinement of Territorial Warfare and Civic Mission Doctrine into a new strategic doctrine for army political intervention became by 1965 the ideological process consolidating the army for political takeover. After Gestapu, when Suwato was an important political advisor to his former SESKOAD pupil Soeharto, his strategic doctrine was the justification for Soeharto's announcement on August 15, 1966, in fulfillment of Pauker's public and private urgings, that the army had to assume a leading role in all fields.<sup>57</sup>

Hence the army unity meeting of January 1965, arranged after Soeharto had duplicitously urged Nasution to take "a more accommodating line"<sup>58</sup> towards Soekarno, was in fact a necessary step in the process whereby Soeharto effectively took over from his rivals Yani and Nasution. It led to the April 1965 seminar at SESKOAD for a compromise army strategic doctrine, the Tri Ubaya Cakti, which "reaffirmed the army's claim to an independent political role."<sup>59</sup> On August 15, 1966, Soeharto, speaking to the nation, justified his increasing prominence in terms of the "Revolutionary Mission" of the Tri Ubaya Cakti doctrine. Two weeks later at SESKOAD the doctrine was revised, at Soeharto's instigation but in a setting "carefully orchestrated by Brigadier Suwato," to embody still more clearly Pauker's emphasis on the army's "Civic Mission" or counterrevolutionary role.<sup>60</sup> This "Civic Mission," so important to Soeharto, was also the principal goal and fruit of U.S. military aid to Indonesia.

By August 1964, moreover, Soeharto had initiated political contacts with Malaysia, and hence eventually with Japan, Britain, and the United States.<sup>61</sup> Although the initial purpose of these contacts may have been to head off war with Malaysia, Sundhaussen suggests that Soeharto's motive was his concern, buttressed in mid-1964 by a KOSTRAD intelligence report, about PKI political advances.<sup>62</sup> Mrazek links the peace feelers to the withdrawal of "some of the best army units" back to Java in the summer of 1965.<sup>63</sup> These movements, together with earlier deployment of a politically insecure Diponegoro battalion in the other direction, can also be seen as preparations for the seizure of power.<sup>64</sup>

In Nishihara's informed Japanese account, former PRRI / Permesta personnel with intelligence connections in Japan were prominent in these negotiations, along with Japanese officials.<sup>65</sup> Nishihara also heard that an intimate ally of these personnel, Jan Walandouw, who may have acted as a CIA contact for the 1958 rebellion, later again "visited Washington and advocated Soeharto as a leader."<sup>66</sup> I am reliably informed that Walandouw's visit to Washington on behalf of Soeharto was made some months before Gestapu.<sup>67</sup>



## The U.S. Moves Against Soekarno

Many people in Washington, especially in the CIA Plans Directorate, had long desired the "removal" of Soekarno as well as of the PKI.<sup>68</sup> By 1961 key policy hard-liners, notably Guy Pauker, had also turned against Nasution.<sup>69</sup> Nevertheless, despite last-minute memoranda from the outgoing Eisenhower administration which would have opposed "whatever regime" in Indonesia was "increasingly friendly toward the Sino-Soviet bloc," the Kennedy administration stepped up aid to both Soekarno and the army.<sup>70</sup>

However, Lyndon Johnson's accession to the presidency was followed almost immediately by a shift to a more anti-Soekarno policy. This is clear from Johnson's decision in December 1963 to withhold economic aid which (according to Ambassador Jones) Kennedy would have supplied "almost as a matter of routine."<sup>71</sup> This refusal suggests that the U.S. aggravation of Indonesia's economic woes in 1963-65 was a matter of policy rather than inadvertence. Indeed, if the CIA's overthrow of Allende is a relevant analogy, then one would expect someday to learn that the CIA, through currency speculations and other hostile acts, contributed actively to the radical destabilization of the Indonesian economy in the weeks just before the coup, when "the price of rice quadrupled between June 30 and October 1, and the black market price of the dollar skyrocketed, particularly in September."<sup>72</sup>

As was the case in Chile, the gradual cutoff of all economic aid to Indonesia in the years 1962-65 was accompanied by a shift in military aid to friendly elements in the Indonesian Army: U.S. military aid amounted to \$39.5 million in the four years 1962-65 (with a peak of \$16.3 million in 1962) as opposed to \$28.3 million for the thirteen years 1949-61.<sup>73</sup> After March 1964, when Soekarno told the U.S., "go to hell with your aid," it became increasingly difficult to extract any aid from the U.S. congress: those persons not aware of what was developing found it hard to understand why the U.S. should help arm a country which was nationalizing U.S. economic interests, and using immense aid subsidies from the Soviet Union to confront the British in Malaysia.

Thus a public image was created that under Johnson "all United States aid to Indonesia was stopped," a claim so buttressed by misleading documentation that competent scholars have repeated it.<sup>74</sup> In fact, Congress had agreed to treat U.S. funding of the Indonesian military (unlike aid to any other country) as a covert matter, restricting congressional review of the president's determinations on Indonesian aid to two Senate committees, and the House Speaker, who were concurrently involved in oversight of the CIA.<sup>75</sup>

Ambassador Jones' more candid account admits that "suspension" meant "the U.S. government undertook no new commitments of assistance, although it continued with ongoing programs.... By maintaining our modest assistance to [the Indonesian Army and the police brigade], we fortified them for a virtually inevitable showdown with the burgeoning PKI."<sup>76</sup>

Only from recently released documents do we learn that new military aid was en route as late as July 1965, in the form of a secret contract to deliver two hundred Aero-Commanders to the Indonesian Army: these were light aircraft suitable for use



in "civic action" or counterinsurgency operations, presumably by the Army Flying Corps whose senior officers were virtually all trained in the U.S.<sup>77</sup> By this time, the publicly admitted U.S. aid was virtually limited to the completion of an army communications system and to "civic action" training. It was by using the army's new communications system, rather than the civilian system in the hands of Soekarno loyalists, that Soeharto on October 1, 1965 was able to implement his swift purge of Soekarno-Yani loyalists and leftists, while "civic action" officers formed the hard core of lower-level Gestapu officers in Central Java.<sup>78</sup>

Before turning to the more covert aspects of U.S. military aid to Indonesia in 1963-65, let us review the overall changes in U.S.-Indonesian relations. Economic aid was now in abeyance, and military aid tightly channeled so as to strengthen the army domestically. U.S. government funding had obviously shifted from the Indonesian state to one of its least loyal components. As a result of agreements beginning with martial law in 1957, but accelerated by the U.S.-negotiated oil agreement of 1963, we see exactly the same shift in the flow of payments from U.S. oil companies. Instead of token royalties to the Soekarno government, the two big U.S. oil companies in Indonesia, Stanvac and Caltex, now made much larger payments to the army's oil company, Pertamina, headed by an eventual political ally of Soeharto, General Ibnu Sutowo; and to a second company, Pertamina, headed by the anti-PKI and pro-U.S. politician, Chaerul Saleh.<sup>79</sup> After Soeharto's overthrow of Soekarno, *Fortune* wrote that "Sutowo's still small company played a key part in bankrolling those crucial operations, and the army has never forgotten it."<sup>80</sup>

#### U.S. Support for the Soeharto Faction Before Gestapu

American officials commenting on the role of U.S. aid in this period have taken credit for assisting the anti-Communist seizure of power, without ever hinting at any degree of conspiratorial responsibility in the planning of the bloodbath. The impression created is that U.S. officials remained aloof from the actual planning of events, and we can see from recently declassified cable traffic how carefully the U.S. government fostered this image of detachment from what was happening in Indonesia.<sup>81</sup>

In fact, however, the U.S. government was lying about its involvement. In Fiscal Year 1965, a period when *The New York Times* claimed "all United States aid to Indonesia was stopped," the number of MAP (Military Assistance Program) personnel in Jakarta actually increased, beyond what had been projected, to an unprecedented high.<sup>82</sup> According to figures released in 1966,<sup>83</sup> from FY 1963 to FY 1965 the value of MAP deliveries fell from about fourteen million dollars to just over two million dollars. Despite this decline, the number of MAP military personnel remained almost unchanged, approximately thirty, while in FY 1965 civilian personnel (fifteen) were present for the first time. Whether or not one doubts that aid deliveries fell off as sharply as the figures would suggest, the MILTAG personnel figures indicate that their "civic action" program was being escalated, not decreased.<sup>84</sup> We have seen that some months before Gestapu, a Soeharto emissary with past CIA connections (Colonel Jan Walandouw) made contact with the U.S. government. From as early as May 1965, U.S. military suppliers with CIA connections (principally Lockheed) were negotiating equipment sales with payoffs to middlemen, in such a way as to generate payoffs to backers of the hitherto little-known leader of a new third faction in the

army, Major-General Soeharto -- rather than to those backing Nasution or Yani, the titular leaders of the armed forces. Only in the last year has it been confirmed that secret funds administered by the U.S. Air Force (possibly on behalf of the CIA) were laundered as "commissions" on sales of Lockheed equipment and services, in order to make political payoffs to the military personnel of foreign countries.<sup>85</sup>

A 1976 Senate investigation into these payoffs revealed, almost inadvertently, that in May 1965, over the legal objections of Lockheed's counsel, Lockheed commissions in Indonesia had been redirected to a new contract and company set up by the firm's long-time local agent or middleman.<sup>86</sup> Its internal memos at the time show no reasons for the change, but in a later memo the economic counselor of the U.S. Embassy in Jakarta is reported as saying that there were "some political considerations behind it."<sup>87</sup> If this is true, it would suggest that in May 1965, five months before the coup, Lockheed had redirected its payoffs to a new political eminence, at the risk (as its assistant chief counsel pointed out) of being sued for default on its former contractual obligations.

The Indonesian middleman, August Munir Dasaad, was "known to have assisted Soekarno financially since the 1930's."<sup>88</sup> In 1965, however, Dasaad was building connections with the Soeharto forces, via a family relative, General Alamsjah, who had served briefly under Soeharto in 1960, after Soeharto completed his term at SESKOAD. Via the new contract, Lockheed, Dasaad and Alamsjah were apparently hitching their wagons to Soeharto's rising star:

When the coup was made during which Soeharto replaced Soekarno, Alamsjah, who controlled certain considerable funds, at once made these available to Soeharto, which obviously earned him the gratitude of the new President. In due course he was appointed to a position of trust and confidence and today Alamsjah is, one might say, the second important man after the President.<sup>89</sup>

Thus in 1966 the U.S. Embassy advised Lockheed it should "continue to use" the Dasaad-Alamsjah-Soeharto connection.<sup>90</sup>

In July 1965, at the alleged nadir of U.S.-Indonesian aid relations, Rockwell-Standard had a contractual agreement to deliver two hundred light aircraft (Aero-Commanders) to the Indonesian Army (not the Air Force) in the next two months.<sup>91</sup> Once again the commission agent on the deal, Bob Hasan, was a political associate (and eventual business partner) of Soeharto.<sup>92</sup> More specifically, Soeharto and Bob Hasan established two shipping companies to be operated by the Central Java army division, Diponegoro. This division, as has long been noticed, supplied the bulk of the personnel on both sides of the Gestapu coup drama -- both those staging the coup attempt, and those putting it down. And one of the three leaders in the Central Java Gestapu movement was Lt. Col. Usman Sastrodibroto, chief of the Diponegoro Division's "section dealing with extramilitary functions."<sup>93</sup>

Thus of the two known U.S. military sales contracts from the eve of the Gestapu Putsch, both involved political payoffs to persons who emerged after Gestapu as close Soeharto allies. The use of this traditional channel for CIA patronage suggests that the U.S. was not at arm's length from the ugly political developments of 1965, despite the public indications, from both government spokesmen and the U.S.

business press, that Indonesia was now virtually lost to communism and nothing could be done about it.

The actions of some U.S. corporations, moreover, made it clear that by early 1965 they expected a significant boost to the U.S. standing in Indonesia. For example, a recently declassified cable reveals that Freeport Sulphur had by April 1965 reached a preliminary "arrangement" with Indonesian officials for what would become a \$500 million investment in West Papua copper. This gives the lie to the public claim that the company did not initiate negotiations with Indonesians (the inevitable Ibnu Sutowo) until February 1966.<sup>94</sup> And in September 1965, shortly after *World Oil* reported that "Indonesia's gas and oil industry appeared to be slipping deeper into the political morass,"<sup>95</sup> the president of a small oil company (Asamera) in a joint venture with Ibnu Sutowo's Pertamina purchased \$50,000 worth of shares in his own ostensibly-threatened company. Ironically this double purchase (on September 9 and September 21) was reported in the *Wall Street Journal* of September 30, 1965, the day of Gestapu.

#### The CIA's "[One Word Deleted] Operation" in 1965

Less than a year after Gestapu and the bloodbath, James Reston wrote appreciatively about them as "A Gleam of Light in Asia": Washington is being careful not to claim any credit for this change in the sixth most populous and one of the richest nations in the world, but this does not mean that Washington had nothing to do with it. There was a great deal more contact between the anti-Communist forces in that country and at least one very high official in Washington before and during the Indonesian massacre than is generally realized.<sup>96</sup>

As for the CIA in 1965, we have the testimony of former CIA officer Ralph McGehee, curiously corroborated by the selective censorship of his former CIA employers:

Where the necessary circumstances or proofs are lacking to support U.S. intervention, the C.I.A. creates the appropriate situations or else invents them and disseminates its distortions worldwide via its media operations. A prominent example would be Chile.... Disturbed at the Chilean military's unwillingness to take action against Allende, the C.I.A. forged a document purporting to reveal a leftist plot to murder Chilean military leaders. The discovery of this "plot" was headlined in the media and Allende was deposed and murdered.

There is a similarity between events that precipitated the overthrow of Allende and what happened in Indonesia in 1965. Estimates of the number of deaths that occurred as a result of the latter C.I.A. [one word deleted] operation run from one-half million to more than one million people.<sup>97</sup>

McGehee claims to have once seen, while reviewing CIA documents in Washington, a highly classified report on the agency's role in provoking the destruction of the PKI after Gestapu. It seems appropriate to ask for congressional review and publication of any such report. If, as is alleged, it recommended such murderous techniques as a model for future operations, it would appear to document a major turning-point in the agency's operation history: towards the systematic exploitation of the death squad operations which, absent during the Brazilian coup of 1964, made the Vietnam

Phoenix counterinsurgency program notorious after 1967, and after 1968 spread from Guatemala to the rest of Latin America.<sup>98</sup>

McGehee's claims of a CIA psychological warfare operation against Allende are corroborated by Tad Szulc: CIA agents in Santiago assisted Chilean military intelligence in drafting bogus Z-plan documents alleging that Allende and his supporters were planning to behead Chilean military commanders. These were issued by the junta to justify the coup.<sup>99</sup>

Indeed the CIA deception operations against Allende appear to have gone even farther, terrifying both the left and the right with the fear of incipient slaughter by their enemies. Thus militant trade-unionists as well as conservative generals in Chile received small cards printed with the ominous words *Djakarta se acerca* (Jakarta is approaching).<sup>100</sup>

This is a model destabilization plan -- to persuade all concerned that they no longer can hope to be protected by the status quo, and hence weaken the center, while inducing both right and left towards more violent provocation of each other. Such a plan appears to have been followed in Laos in 1959-61, where a CIA officer explained to a reporter that the aim "was to polarize Laos."<sup>101</sup> It appears to have been followed in Indonesia in 1965. Observers like Sundhaussen confirm that to understand the coup story of October 1965 we must look first of all at the "rumour market" which in 1965 ... turned out the wildest stories."<sup>102</sup> On September 14, two weeks before the coup, the army was warned that there was a plot to assassinate army leaders four days later; a second such report was discussed at army headquarters on September 30.<sup>103</sup> But a year earlier an alleged PKI document, which the PKI denounced as a forgery, had purported to describe a plan to overthrow "Nasutionists" through infiltration of the army. This "document," which was reported in a Malaysian newspaper after being publicized by the pro-U.S. politician Chaerul Saleh<sup>104</sup> in mid-December 1964, must have lent credence to Soeharto's call for an army unity meeting the next month.<sup>105</sup>

The army's anxiety was increased by rumors, throughout 1965, that mainland China was smuggling arms to the PKI for an imminent revolt. Two weeks before Gestapu, a story to this effect also appeared in a Malaysian newspaper, citing Bangkok sources which relied in turn on Hong Kong sources.<sup>106</sup> Such international untraceability is the stylistic hallmark of stories emanating in this period from what CIA insiders called their "mighty Wurlitzer," the world-wide network of press "assets" through which the CIA, or sister agencies such as Britain's MI-6, could plant unattributable disinformation.<sup>107</sup> PKI demands for a popular militia or "fifth force," and the training of PKI youth at Lubang Buaja, seemed much more sinister to the Indonesian army in the light of the Chinese arms stories.

But for months before the coup, the paranoia of the PKI had also been played on, by recurring reports that a CIA-backed "Council of Generals" was plotting to suppress the PKI. It was this mythical council, of course, that Untung announced as the target of his allegedly anti-CIA Gestapu coup. But such rumors did not just originate from anti-American sources; on the contrary, the first authoritative published reference to such a council was in a column of the Washington journalists Evans and Novak:

As far back as March, General Ibrahim Adjie, commander of the Siliwangi Division, had been quoted by two American journalists as saying of the Communists: "we knocked them out before [at Madiun]. We check them and check them again." The same journalists claimed to have information that "...the Army has quietly established an advisory commission of five general officers to report to General Yani ... and General Nasution ... on PKI activities."<sup>108</sup>

Mortimer sees the coincidence that five generals besides Yani were killed by Gestapu as possibly significant.

But we should also be struck by the revival in the United States of the image of Yani and Nasution as anti-PKI planners, long after the CIA and U.S. press stories had in fact written them off as unwilling to act against Soekarno.<sup>109</sup> If the elimination by Gestapu of Soeharto's political competitors in the army was to be blamed on the left, then the scenario required just such a revival of the generals' forgotten anti-Communist image in opposition to Soekarno. An anomalous unsigned August 1965 profile of Nasution in *The New York Times*, based on an 1963 interview but published only after a verbal attack by Nasution on British bases in Singapore, does just this: it claims (quite incongruously, given the context) that Nasution is "considered the strongest opponent of Communism in Indonesia"; and adds that Soekarno, backed by the PKI, "has been pursuing a campaign to neutralize the ... army as an anti-Communist force."<sup>110</sup>

In the same month of August 1965, fear of an imminent showdown between "the PKI and the Nasution group" was fomented in Indonesia by an underground pamphlet; this was distributed by the CIA's long-time asset, the PSI, whose cadres were by now deeply involved:

The PKI is combat ready. The Nasution group hope the PKI will be the first to draw the trigger, but this the PKI will not do. The PKI will not allow itself to be provoked as in the Madiun Incident. In the end, however, there will be only two forces left: the PKI and the Nasution group. The middle will have no alternative but to choose and get protection from the stronger force.<sup>111</sup>

One could hardly hope to find a better epitome of the propaganda necessary for the CIA's program of engineering paranoia. McGehee's article, after censorship by the CIA, focuses more narrowly on the CIA's role in anti-PKI propaganda alone:

The Agency seized upon this opportunity [Soeharto's response to Gestapu] and set out to destroy the P.K.I.... **[eight sentences deleted]**.... Media fabrications played a key role in stirring up popular resentment against the P.K.I. Photographs of the bodies of the dead generals -- badly decomposed -- were featured in all the newspapers and on television. Stories accompanying the pictures falsely claimed that the generals had been castrated and their eyes gouged out by Communist women. This cynically manufactured campaign was designed to foment public anger against the Communists and set the stage for a massacre.<sup>112</sup>

McGehee might have added that the propaganda stories of torture by hysterical women with razor blades, which serious scholars dismiss as groundless, were

revived in a more sophisticated version by a U.S. journalist, John Hughes, who is now the chief spokesman for the State Department.<sup>113</sup>

Soeharto's forces, particularly Col. Sarwo Edhie of the RPKAD commandos, were overtly involved in the cynical exploitation of the victims' bodies.<sup>114</sup> But some aspects of the massive propaganda campaign appear to have been orchestrated by non-Indonesians. A case in point is the disputed editorial in support of Gestapu which appeared in the October 2 issue of the PKI newspaper *Harian Rakjat*. Professors Benedict Anderson and Ruth McVey, who have questioned the authenticity of this issue, have also ruled out the possibility that the newspaper was "an Army falsification," on the grounds that the army's "competence ... at falsifying party documents has always been abysmally low."<sup>115</sup>

The questions raised by Anderson and McVey have not yet been adequately answered. Why did the PKI show no support for the Gestapu coup while it was in progress, then rashly editorialize in support of Gestapu after it had been crushed? Why did the PKI, whose editorial gave support to Gestapu, fail to mobilize its followers to act on Gestapu's behalf? Why did Soeharto, by then in control of Jakarta, close down all newspapers except this one, and one other left-leaning newspaper which also served his propaganda ends?<sup>116</sup> Why, in other words, did Soeharto on October 2 allow the publication of only two Jakarta newspapers, two which were on the point of being closed down forever?

As was stated at the outset, it would be foolish to suggest that in 1965 the only violence came from the U.S. government, the Indonesian military, and their mutual contacts in British and Japanese intelligence. A longer paper could also discuss the provocative actions of the PKI, and of Soekarno himself, in this tragedy of social breakdown. Assuredly, from one point of view, no one was securely in control of events in this troubled period.<sup>117</sup> And yet for two reasons such a fashionably objective summation of events seems inappropriate. In the first place, as the CIA's own study concedes, we are talking about "one of the ghastliest and most concentrated bloodlettings of current times," one whose scale of violence seems out of all proportion to such well-publicized left-wing acts as the murder of an army lieutenant at the Bandar Betsy plantation in May 1965,<sup>118</sup> And, in the second place, the scenario described by McGehee for 1965 can be seen as not merely responding to the provocations, paranoia, and sheer noise of events in that year, but as actively encouraging and channeling them.

It should be noted that former CIA Director William Colby has repeatedly denied that there was CIA or other U.S. involvement in the massacre of 1965. (In the absence of a special CIA Task Force, Colby, as head of the CIA's Far Eastern Division from 1962-66, would normally have been responsible for the CIA's operations in Indonesia.) Colby's denial is however linked to the discredited story of a PKI plot to seize political power, a story that he revived in 1978:

Indonesia exploded, with a bid for power by the largest Communist Party in the world outside the curtain, which killed the leadership of the army with Soekarno's tacit approval and then was decimated in reprisal. CIA provided a steady flow of reports on the process in Indonesia, although it did not have any role in the course of events themselves.<sup>119</sup>

It is important to resolve the issue of U.S. involvement in this systematic murder operation, and particularly to learn more about the CIA account of this which McGehee claims to have seen. McGehee tells us: "The Agency was extremely proud of its successful **[one word deleted]** and recommended it as a model for future operations **[one-half sentence deleted]**."<sup>120</sup> Ambassador Green reports of an interview with Nixon in 1967:

The Indonesian experience had been one of particular interest to [Nixon] because things had gone well in Indonesia. I think he was very interested in that whole experience as pointing to the way we [!] should handle our relationships on a wider basis in Southeast Asia generally, and maybe in the world.<sup>121</sup>

Such unchallenged assessments help explain the role of Indonesians in the Nixon-sponsored overthrow of Sihanouk in Cambodia in 1970, the use of the Jakarta scenario for the overthrow of Allende in Chile in 1973, and the U.S. sponsorship today of the death squad regimes in Central America.<sup>122</sup>

*University of California, Berkeley, U.S.A., December 1984*

1. The difficulties of this analysis, based chiefly on the so-called "evidence" presented at the Mahmilub trials, will be obvious to anyone who has tried to reconcile the conflicting accounts of Gestapu in, e.g., the official Soeharto account by Nugroho Notosusanto and Ismail Saleh, and the somewhat less fanciful CIA study of 1968, both referred to later. I shall draw only on those parts of the Mahmilub evidence which limit or discredit their anti-PKI thesis. For interpretation of the Mahmilub data, cf. especially Coen Holtzappel, "The 30 September Movement," *Journal of Contemporary Asia*, IX, 2 (1979), pp. 216-40. The case for general skepticism is argued by Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1974), pp. 421-3; and more forcefully, by Julie Southwood and Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda, and Terror* (London: Zed Press, 1983), pp. 126-34.
2. At his long-delayed trial in 1978, Gestapu plotter Latief confirmed earlier revelations that he had visited his old commander Soeharto on the eve of the Gestapu kidnappings. He claimed that he raised with Soeharto the existence of an alleged right-wing "Council of Generals" plotting to seize power, and informed him "of a movement which was intended to thwart the plan of the generals' council for a coup d'etat" (Anon., "The Latief Case: Soeharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, IX, 2 [1979], pp. 248-50). For a more comprehensive view of Soeharto's involvement in Gestapu, cf. especially W.F. Wertheim, "Whose Plot? New Light on the 1965 Events," *Journal of Contemporary Asia*, IX, 2 (1979), pp. 197-215; Holtzappel, "The 30 September," in contrast, points more particularly to intelligence officers close to the banned Murba party of Chaerul Saleh and Adam Malik: cf. fn. 104.
3. The three phases are: (1) "Gestapu," the induced left-wing "coup"; (2) "KAP-Gestapu," or the anti-Gestapu "response," massacring the PKI; (3) the



progressive erosion of Soekarno's remaining power. This paper will chiefly discuss Gestapu / KAP-Gestapu, the first two phases. To call the first phase by itself a "coup" is in my view an abuse of terminology: there is no real evidence that in this phase political power changed hands or that this was the intention.

4. U.S. Central Intelligence Agency, *Research Study: Indonesia -- The Coup that Backfired*, 1968 (cited hereafter as CIA Study), p. 71n.
5. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1978), pp. 79-81.
6. In addition, one of the two Gestapu victims in Central Java (Colonel Katamso) was the only non-PKI official of rank to attend the PKI's nineteenth anniversary celebration in Jogjakarta in May 1964: Mortimer, *Indonesian Communism*, p. 432. Ironically, the belated "discovery" of his corpse was used to trigger off the purge of his PKI contacts.
7. Four of the six pro-Yani representatives in January were killed along with Yani on October 1. Of the five anti-Yani representatives in January, we shall see that at least three were prominent in "putting down" Gestapu and completing the elimination of the Yani-Soekarno loyalists (the three were Soeharto, Basuki Rachmat, and Sudirman of SESKOAD, the Indonesian Army Staff and Command School): Crouch, *The Army*, p. 81n.
8. While Nasution's daughter and aide were murdered, he was able to escape without serious injury, and support the ensuing purge.
9. *Indonesia*, 22 (October 1976), p. 165 (CIA Memorandum of 22 March 1961 from Richard M. Bissell, Attachment B). By 1965 this disillusionment was heightened by Nasution's deep opposition to the U.S. involvement in Vietnam.
10. Crouch, *The Army*, p. 40; Brian May, *The Indonesian Tragedy* (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), pp. 221-2.
11. I shall assume for this condensed argument that Untung was the author, or at least approved, of the statements issued in his name. Scholars who see Untung as a dupe of Gestapu's controllers note that Untung was nowhere near the radio station broadcasting in his name, and that he appears to have had little or no influence over the task force which occupied it (under Captain Suradi of the intelligence service of Colonel Latief's Brigade): Holtzappel, pp. 218, 231-2, 236-7. I have no reason to contradict those careful analysts of Gestapu -- such as Wertheim, "Whose Plot?" p. 212, and Holtzappel, "The 30 September," p. 231 -- who conclude that Untung personally was sincere, and manipulated by other *dalangs* such as Sjam.
12. Broadcast of 7:15 a.m. October 1; *Indonesia* 1 (April 1966), p. 134; Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics, 1945-1967* (Kuala Lumpur and Oxford: Oxford University Press, 1982), p. 196.
13. *Ibid.*, p. 201.



14. Broadcasts of October 1 and 4, 1965; *Indonesia* 1 (April 1966), pp. 158-9.
15. CIA Study, p. 2; O.G. Roeder, *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), p. 12, quoting Soeharto himself: "On my way to KOSTRAD HQ [Soeharto's HQ] I passed soldiers in green berets who were placed under KOSTRAD command but who did not salute me."
16. Anderson and McVey concluded that Soekarno, Air Force Chief Omar Dhani, PKI Chairman Aidit (the three principal political targets of Soeharto's anti-Gestapu "response") were rounded up by the Gestapu plotters in the middle of the night, and taken to Halim air force base, about one mile from the well at Lubang Buaja where the generals' corpses were discovered. In 1966 they surmised that this was "to seal the conspirators' control of the bases," and to persuade Soekarno "to go along with" the conspirators' plans (Benedict Anderson and Ruth McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* [Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971], pp. 19-21). An alternative hypothesis of course is that Gestapu, by bringing these men together against their will, created the semblance of a PKI-air force-Soekarno conspiracy which would later be exploited by Soeharto. Soekarno's presence at Halim "was later to provide Soekarno's critics with some of their handiest ammunition" (John Hughes, *The End of Soekarno* [London: Angus and Robertson, 1978], p. 54).
17. CIA Study, p. 2; cf. p. 65: "At the height of the coup ... the troops of the rebels [in Central Java] were estimated to have the strength of only one battalion; during the next two days, these forces gradually melted away."
18. Rudolf Mrazek, *The United States and the Indonesian Military, 1945-1966* (Prague: Czechoslovak Academy of Sciences, 1978), vol. II, p. 172. These battalions, comprising the bulk of the 3rd Paratroop Brigade, also supplied the bulk of the troops used to put down Gestapu in Jakarta. The subordination of these two factions in this supposed civil war to a single close command structure under Soeharto is cited to explain how Soeharto was able to restore order in the city without gunfire. Meanwhile out at the Halim air force base an alleged gun battle between the 454th (Green Beret) and RPKAD (Red Beret) paratroops went off "without the loss of a single man" (CIA Study, p. 60). In Central Java, also, power "changed hands silently and peacefully," with "an astonishing lack of violence" (CIA Study, p. 66).
19. *Ibid.*, p. 60n; Arthur J. Dommen, "The Attempted Coup in Indonesia," *China Quarterly*, January-March 1966, p. 147. The first "get-acquainted" meeting of the Gestapu plotters is placed in the Indonesian chronology of events from "sometimes before August 17, 1965"; cf. Nugroho Notosusanto and Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the "September 30 Movement" in Indonesia* (Jakarta: [Pembimbing Masa, 1968], p. 13); in the CIA Study, this meeting is dated September 6 (p. 112). Neither account allows more than a few weeks to plot a coup in the world's fifth most populous country.
20. Mortimer, *Indonesian Communism*, p. 429.

21. Of the six General Staff officers appointed along with Yani, three (Suprpto, D.I. Pandjaitan, and S. Parman) were murdered. Of the three survivors, two (Mursjid and Pranoto) were removed by Soeharto in the next eight months. The last member of Yani's staff, Djamin Gintings, was used by Soeharto during the establishment of the New Order, and ignored thereafter.
22. Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream* (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971), p. 391; cf. Arnold Brackman, *The Communist Collapse in Indonesia* (New York: Norton, 1969), pp. 118-9.
23. Crouch, *The Army*, p. 150n.
24. *Ibid.*, pp. 140-53; for the disputed case of Bali, even Robert Shaplen, a journalist close to U.S. official sources, concedes that "The Army began it" (*Time Out of Hand* [New York: Harper and Row, 1969], p. 125). The slaughter in East Java "also really got started when the RPKAD arrived, not just Central Java and Bali" (letter from Benedict Anderson).
25. Sundhaussen, *The Road*, pp. 171, 178-9, 210, 228; Donald Hindley, "Alirans and the Fall of the Older Order," *Indonesia*, 25 (April 1970), pp. 40-41.
26. Sundhaussen, *The Road*, p. 219.
27. "In 1965 it [the BND, or intelligence service of the Federal Republic of Germany] assisted Indonesia's military secret service to suppress a left-wing *Putsch* in Djakarta, delivering sub-machine guns, radio equipment and money to the value of 300,000 marks" (Heinz Hoehne and Hermann Zolling, *The General Was a Spy* [New York: Bantam, 1972], p. xxxiii).
28. We should not be misled by the CIA's support of the 1958 rebellion into assuming that all U.S. Government plotting against Soekarno and the PKI must have been CIA-based (cf. fn. 122).
29. Daniel Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Ithaca, New York: Cornell University press, 1966), p. 12. For John Foster Dulles' hostility to Indonesian unity in 1953, cf. Leonard Mosley, *Dulles* (New York: The Dial Press / James Wade, 1978), p. 437.
30. *Declassified Documents Quarterly Catalogue* (Woodbridge, Connecticut: Research Publications, 1982), 001191.
31. As the head of the PKI's secret Special Bureau, responsible only to Aidit, Sjam by his own testimony provided leadership to the "progressive officers" of Gestapu. The issue of PKI involvement in Gestapu thus rests on the question of whether Sjam was manipulating the Gestapu leadership on behalf of the PKI, or the PKI leadership on behalf of the army. There seems to be no disagreement that Sjam was (according to the CIA Study, p. 107) a longtime "double agent" and professed "informer for the Djakarta Military Command." Wertheim (p. 203) notes that in the 1950s Sjam "was a cadre of the PSI," and "had also been in touch with Lt. Col. Soeharto, today's President, who often came to stay in his house in Jogja." This might help explain why in the 1970s, after having been sentenced to death, Sjam and his co-conspirator Supeno

- were reportedly "allowed out [of prison] from time to time and wrote reports for the army on the political situation" (May, *The Indonesian*, p. 114). Additionally, the "Sjam" who actually testified and was convicted, after being "captured" on March 9, 1967, was the third individual to be identified by the army as the "Sjam" of whom Untung had spoken: *Declassified Documents Retrospective Collection* (Washington, D.C.: Carrollton Press, 1976), 613C; Hughes, p. 25.
32. Wertheim, "Whose Plot?" p. 203; Mortimer, *Indonesian Communism*, p. 431 (Sjam); Sundhaussen, *The Road*, p. 228 (Suwanto and Sarwo Edhie).
  33. Joseph B. Smith, *Portrait of a Cold Warrior* (New York: Putnam, 1976), p. 205; cf. Thomas Powers, *The Man Who Kept the Secrets* (New York: Knopf, 1979), p. 89.
  34. U.S., Congress, Senate, Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. "Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders," 94th Cong., 1st Sess., 1975 (Senate Report No. 94-465), p. 4n; personal communications.
  35. *Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1982, 002386; 1981, 367A.
  36. *Ibid.*, 1982, 002386 (JCS Memo for SecDef, 22 September 1958).
  37. *Indonesia*, 22 (October 1976), p. 164 (CIA Memorandum of 22 March 1961, Attachment A, p. 6).
  38. Scholars are divided over interpretations of Madiun as they are over Gestapu. Few Americans have endorsed the conclusion of Wertheim that "the so-called communist revolt of Madiun ... was probably more or less provoked by anti-communist elements"; yet Kahin has suggested that the events leading to Madiun "may have been symptomatic of a general and widespread government drive aimed at cutting down the military strength of the PKI" (W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* [The Hague: W. van Hoeve, 1956], p. 82; George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* [Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970], p. 288). Cf. Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, pp. 26-30.
  39. Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, p. 68; cf. Nasution's statement to students on November 12, 1965, reprinted in *Indonesia*, 1 (April 1966), p. 183: "We are obliged and dutybound to wipe them [the PKI] from the soil of Indonesia."
  40. Examples in Peter Dale Scott, "Exporting Military-Economic Development," in Malcolm Caldwell, ed., *Ten Years' Military Terror in Indonesia* (Nottingham, England: Spokesman Books, 1975), pp. 227-32.
  41. David Ransom, "Ford Country: Building an Elite for Indonesia," in Steve Weissman, ed., *The Trojan Horse* (San Francisco, California: Ramparts Press, 1974), p. 97; cf. p. 101. Pauker brought Suwanto to RAND in 1962.
  42. John H. Johnson, ed., *The Role of the Military in Underdeveloped Countries* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962), pp. 222-4. The

foreword to the book is by Klaus Knorr, who worked for the CIA while teaching at Princeton.

43. Shaplen, *Time*, p. 118; Hughes, *The End*, p. 119; Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, pp. 75-6; Scott, "Exporting," p. 231. William Kintner, a CIA (OPC) senior staff officer from 1950-52, and later Nixon's ambassador to Thailand, also wrote in favor of "liquidating" the PKI while working at a CIA-subsidized think-tank, the Foreign Policy Research Institute, on the University of Pennsylvania campus (William Kintner and Joseph Kornfeder, *The New Frontier of War* [London: Frederick Muller, 1963], pp. 233, 237-8): "If the PKI is able to maintain its legal existence and Soviet influence continues to grow, it is possible that Indonesia may be the first Southeast Asia country to be taken over by a popularly based, legally elected communist government.... In the meantime, with Western help, free Asian political leaders -- together with the military -- must not only hold on and manage, but reform and advance while liquidating the enemy's political and guerrilla armies."
44. Ransom, "Ford Country," pp. 95-103; Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, pp. 34-6; Scott, "Exporting," pp. 227-35.
45. Sundhaussen, *The Road*, pp. 141, 175.
46. Published U.S. accounts of the Civic Mission / "civic action" programs describe them as devoted to "civic projects -- rehabilitating canals, draining swampland to create new rice paddies, building bridges and roads, and so on (Roger Hilsman, *To Move a Nation* [Garden City, New York: Doubleday, 1967], p. 377). But a memo to President Johnson from Secretary of State Rusk, on July 17, 1964, makes it clear that at that time the chief importance of MILTAG was for its contact with anti-Communist elements in the Indonesian Army and its Territorial Organization: "Our aid to Indonesia ... we are satisfied ... is *not helping Indonesia militarily*. It is however, *permitting us to maintain some contact with key elements in Indonesia which are interested in and capable of resisting Communist takeover*. We think this is of vital importance to the entire Free World" (*Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1982, 001786 [DOS Memo for President of July 17, 1964; italics in original]).
47. Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, p. 35; Scott, "Exporting," p. 233.
48. Ransom, "Ford Country," pp. 101-2, quoting Willis G. Ethel; cited in Scott, "Exporting," p. 235.
49. Sundhaussen, *The Road*, p. 141. There was also the army's "own securely controlled paramilitary organization of students -- modelled on the U.S.R.O.T.C. and commanded by an army colonel [Djuhartono] fresh from the U.S. army intelligence course in Hawaii": Mrazek, *The United States*, vol. II, p. 139, citing interview of Nasution with George Kahin, July 8, 1963.
50. Pauker, though modest in assessing his own political influence, does claim that a RAND paper he wrote on counterinsurgency and social justice, ignored by the U.S. military for whom it was intended, was influential in the development of his friend Suwarto's Civic Mission doctrine.

51. Noam Chomsky and E.S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism* (Boston, Massachusetts: South End Press, 1979), p. 206; David Mozingo, *Chinese Policy Toward Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1976), p. 178.
52. Sundhaussen, *The Road*, pp. 178-9. The PSI of course was neither monolithic nor a simple instrument of U.S. policy. But the real point is that, in this 1963 incident as in others, we see conspiratorial activity relevant to the military takeover, involving PSI and other individuals who were at the focus of U.S. training programs, and who would play an important role in 1965.
53. Sundhaussen, *The Road*, pp. 228-33: in January 1966 the "PSI activists" in Bandung "knew exactly what they were aiming at, which was nothing less than the overthrow of Soekarno. Moreover, they had the protection of much of the Siliwangi officer corps" Once again, I use Sundhaussen's term "PSI-leaning" to denote a milieu, not to explain it. Sarwo Edhie was a long-time CIA contact, while Kemal Idris' role in 1965 may owe much to his former PETA commander the Japanese intelligence officer Yanagawa. Cf. Masashi Nishihara, *The Japanese and Soekarno's Indonesia* (Honolulu: University Press of Hawaii, 1976), pp. 138, 212.
54. Sundhaussen, *The Road*, pp. 99-101. Lubis was also a leader in the November 1957 assassination attempt against Soekarno, and the 1958 rebellion.
55. *Ibid.*, 188; cf. p. 159n.
56. Soeharto's "student" status does not of course mean that he was a mere pawn in the hands of those with whom he established contact at SESKOAD. For example, Soeharto's independence from the PSI and those close to them became quite evident in January 1974, when he and Ali Murtopo cracked down on those responsible for army-tolerated student riots reminiscent of the one in May 1963. Cf. Crouch, *The Army*, pp. 309-17.
57. Sundhaussen, *The Road*, pp. 228, 241-43. In the same period SESKOAD was used for the political re-education of generals like Surjosumpeno, who, although anti-Communist, were guilty of loyalty to Soekarno (p. 238).
58. Crouch, *The Army*, p. 80; at this time Soeharto was already unhappy with Soekarno's "rising pro-communist policy" (Roeder, *The Smiling*, p. 9).
59. Crouch, *The Army*, p. 81; cf. Mrazek, *The United States*, vol. II, pp. 149-51.
60. Sundhaussen, *The Road*, pp. 241-3.
61. Through his intelligence group OPSUS (headed by Ali Murtopo) Soeharto made contact with Malaysian leaders; in two accounts former PSI and PRRI / Permesta personnel in Malaysia played a role in setting up this sensitive political liaison: Crouch, *The Army*, p. 74; Nishihara, *The Japanese*, p. 149.
62. Sundhaussen, *The Road*, pp. 188.

63. Mrazek, *The United States*, vol. II, p. 152.
64. Cf. Edward Luttwak, *Coup D'Etat: A Practical Handbook* (London: Allen Lane / Penguin Press, 1968), p. 61: "though Communist-infiltrated army units were very powerful they were in the wrong place; while they sat in the Borneo jungles the anti-Communist paratroops and marines took over Jakarta, and the country." What is most interesting in this informed account by Luttwak (who has worked for years with the CIA) is that "the anti-Communist paratroops" included not only the RPKAD but those who staged the Gestapu uprising in Jakarta, before putting it down.
65. Nishihara, *The Japanese*, pp. 142, 149.
66. *Ibid.*, p. 202, cf. p. 207. The PRRI / Permesta veterans engaged in the OPSUS peace feelers, Daan Mogot and Willy Pesik, had with Jan Walandouw been part of a 1958 PRRI secret mission to Japan, a mission detailed in the inside account by former CIA officer Joseph B. Smith (*Portrait of a Cold Warrior* [New York: G.P. Putnam's Sons, 1976], p. 245), following which Walandouw flew on "to Taipeh, then Manila and New York."
67. Personal communication. If the account of Neville Maxwell (senior research officer at the Institute of Commonwealth Studies, Oxford University) can be believed, then the planning of the Gestapu / anti-Gestapu scenario may well have begun in 1964 (*Journal of Contemporary Asia*, IX, 2 [1979], pp. 251-2; reprinted in Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, p. 13): "A few years ago I was researching in Pakistan into the diplomatic background of the 1965 Indo-Pakistan conflict, and in foreign ministry papers to which I had been given access came across a letter to the then foreign minister, Mr. Bhutto, from one of his ambassadors in Europe ... reporting a conversation with a Dutch intelligence officer with NATO. According to my note of that letter, the officer had remarked to the Pakistani diplomat that 'Indonesia was going to fall into the Western lap like a rotten apple.' Western intelligence agencies, he said, would organize a 'premature communist coup ... [which would be] foredoomed to fail, providing a legitimate and welcome opportunity to the army to crush the communists and make Soekarno a prisoner of the army's goodwill.' The ambassador's report was dated December 1964."
68. *Indonesia*, 22 (October 1976), p. 164 (CIA Memo of March 27, 1961, Appendix A, p. 8); cf. Powers, *The Man*, p. 89.
69. *Indonesia*, 22 (October 1976), p. 165 (CIA Memo of March 27, 1961).
70. The lame-duck Eisenhower NSC memo would have committed the U.S. to oppose not just the PKI in Indonesia, but "a policy increasingly friendly toward the Sino-Soviet bloc on the part of whatever regime is in power." "The size and importance of Indonesia," it concluded, "dictate [!] a vigorous U.S. effort to prevent these contingencies": *Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1982, 000592 (NSC 6023 of 19 December, 1960). For other U.S. intrigues at this time to induce a more vigorous U.S. involvement in Southeast Asia, cf.

*Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1983, 001285-86; Peter Dale Scott, *The War Conspiracy* (New York: Bobbs Merrill, 1972), pp. 12-14, 17-20.

71. Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, p. 299.
72. Mortimer, *Indonesian Communism*, pp. 385-6.
73. U.S. Department of Defense, *Military Assistance Facts*, May 1, 1966. Before 1963 the existence as well as the amount of the MAP in Indonesia was withheld from the public; retroactively, figures were published. After 1962 the total deliveries of military aid declined dramatically, but were aimed more and more particularly at anti-PKI and anti-Soekarno plotters in the army; cf. fns. 46, 76 and 83.
74. *The New York Times*, August 5, 1965, p. 3; cf. Nishihara, *The Japanese*, p. 149; Mrazek, vol. II, p. 121.
75. A Senate amendment in 1964 to cut off all aid to Indonesia unconditionally was quietly killed in conference committee, on the misleading ground that the Foreign Assistance Act "requires the President to report fully and concurrently to both Houses of the Congress on any assistance furnished to Indonesia" (U.S. Cong., Senate, Report No. 88-1925, *Foreign Assistance Act of 1964*, p. 11). In fact the act's requirement that the president report "to Congress" applied to eighteen other countries, but in the case of Indonesia he was to report to two Senate Committees and the *speaker* of the House: Foreign Assistance Act, Section 620(j).
76. Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, p. 324.
77. U.S., Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, *Multinational Corporations and United States Foreign Policy, Hearings* (cited hereafter as Church Committee Hearings), 94th Cong., 2nd Sess., 1978, p. 941; Mrazek, *The United States*, vol. II, p. 22. Mrazek quotes Lt. Col. Juono of the corps as saying that "we are completely dependent on the assistance of the United States."
78. Notosusanto and Saleh, *The Coup*, pp. 43, 46.
79. ishihara, *The Japanese* (pp. 171, 194, 202), shows the role in the 1965-66 anti-Soekarno conspiracy of the small faction (including Ibnu Sutowo, Adam Malik, and the influential Japanese oilman Nishijima) who interposed themselves as negotiators between the 1958 PRRI Rebellion and the central government. Alamsjah, mentioned below, was another member of this group; he joined Soeharto's staff in 1960. For Murba and CIA, cf. fn. 104.
80. *Fortune*, July 1973, p. 154, cf. *Wall Street Journal*, April 18, 1967; both in Scott, "Exporting," pp. 239, 258.
81. *Declassified Documents Retrospective Collection*, 609A (Embassy Cable 1002 of October 14, 1965); 613A (Embassy Cable 1353 of November 7, 1965).
82. *The New York Times*, August 5, 1965, p. 3.



83. U.S. Department of Defense, *Military Assistance Facts*, May 1, 1966. The thirty-two military personnel in FY 1965 represent an increase over the projected figure in March 1964 of twenty-nine. Most of them were apparently Green Beret U.S. Special Forces, whose forward base on Okinawa was visited in August 1965 by Gestapu plotter Saherman. Cf. fn. 122.
84. George Benson, an associate of Guy Pauker who headed the Military Training Advisory Group (MILTAG) in Jakarta, was later hired by Ibnu Sutowo to act as a lobbyist for the army's oil company (renamed Pertamina) in Washington: *The New York Times*, December 6, 1981, p. 1.
85. *San Francisco Chronicle*, October 24, 1983, p. 22, describes one such USAF-Lockheed operation in Southeast Asia, "code-named 'Operation Buttercup' that operated out of Norton Air Force Base in California from 1965 to 1972." For the CIA's close involvement in Lockheed payoffs, cf. Anthony Sampson, *The Arms Bazaar* (New York: Viking, 1977), pp. 137, 227-8, 238.
86. Church Committee Hearings, pp. 943-51.
87. *Ibid.*, p. 960.
88. Nishihara, *The Japanese*, p. 153.
89. Lockheed Aircraft International, memo of Fred C. Meuser to Erle M. Constable, 19 July 1968, in Church Committee Hearings, p. 962.
90. *Ibid.*, p. 954; cf. p. 957. In 1968, when Alamsjah suffered a decline in power, Lockheed did away with the middleman and paid its agents' fees directly to a group of military officers (pp. 342, 977).
91. Church Committee Hearings, p. 941; cf. p. 955.
92. Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, p. 59.
93. Crouch, *The Army*, p. 114.
94. *Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1982, 002507 (Cable of April 15, 1965, from U.S. Delegation to U.N.); cf. Forbes Wilson, *The Conquest of Copper Mountain* (New York: Atheneum, 1981), pp. 153-5.
95. *World Oil*, August 15, 1965, p. 209.
96. *The New York Times*, June 19, 1966, IV, 4.
97. Ralph McGehee, "The C.I.A. and the White Paper on El Salvador," *The Nation*, April 11, 1981, p. 423. The deleted word would appear from its context to be "deception." Cf. Roger Morris and Richard Mauzy, "Following the Scenario," in Robert L. Borosage and John Marks, eds., *The CIA File* (New York: Grossman / Viking, 1976), p. 39: "Thus the fear of Communist subversion, which erupted to a frenzy of killing in 1965-1966, had been encouraged in the 'penetration' propaganda of the Agency in Indonesia.... 'All I know,' said one former intelligence officer of the Indonesia events, 'is that the Agency rolled in some of its top people and that things broke big and very



favorable, as far as we were concerned.'" All references to deletions appear in the original text as printed in *The Nation*. These bracketed portions, shown in this article in bold-face type, reflect censorship by the CIA.

98. Victor Marchetti and John Marks, *The CIA and the Cult of Intelligence* (New York: Knopf, 1974), p. 245. For a list of twenty-five U.S. operatives transferred from Vietnam to Guatemala in the 1964-73 period, cf. Susanne Jonas and David Tobis, *Guatemala* (Berkeley, California, and New York: North American Congress on Latin America, 1974), p. 201.
99. Tad Szulc, *The Illusion of Peace* (New York: Viking, 1978), p. 724. The top CIA operative in charge of the 1970 anti-Allende operation, Sam Halpern, had previously served as chief executive officer on the CIA's anti-Soekarno operation of 1957-58: Seymour Hersh, *The Price of Power* (New York: Summit Books, 1983), p. 277; Powers, *The Man*, p. 91.
100. Donald Freed and Fred Simon Landis, *Death in Washington* (Westport, Connecticut: Lawrence Hill, 1980), pp. 104-5.
101. *Time*, March 17, 1961.
102. Sundhaussen, *The Road*, p. 195.
103. Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, p. 374; Justus M. van der Kroef, "Origins of the 1965 Coup in Indonesia: Probabilities and Alternatives," *Journal of Southeast Asian Studies*, III, 2 (September 1972), p. 282. Three generals were alleged targeted in the first report (Soeharto, Mursjid, and Sukendro); all survived Gestapu.
104. Chaerul Saleh's Murba Party, including the pro-U.S. Adam Malik, was also promoting the anti-Communist "Body to Support Soekarnoism" (BPS), which was banned by Soekarno on December 17, 1964. (Subandrio "is reported to have supplied Soekarno with information purporting to show U.S. Central Intelligence Agency influence behind the BPS" [Mortimer, p. 377]; it clearly did have support from the CIA- and army-backed labor organization SOKSI.) Shortly afterwards, Murba itself was banned, and promptly "became active as a disseminator of rumours and unrest" (Holtzappel, p. 238).
105. Sundhaussen, *The Road*, p. 183; Mortimer, *Indonesian Communism*, pp. 376-77; *Singapore Straits Times*, December 24, 1964; quoted in Van der Kroef, "Origins," p. 283.
106. *Sabah Times*, September 14, 1965; quoted in Van der Kroef, "Origins," p. 296. Mzingo, *Chinese Policy* (p. 242) dismisses charges such as these with a contemptuous footnote.
107. Powers, *The Man*, p. 80; cf. Senate Report No. 94-755, *Foreign and Military Intelligence*, p. 192. CIA-sponsored channels also disseminated the Chinese arms story at this time inside the United States -- e.g., Brian Crozier, "Indonesia's Civil War," *New Leader*, November 1965, p. 4.

108. Mortimer, *Indonesian Communism*, p. 386. The Evans and Novak column coincided with the surfacing of the so-called "Gilchrist letter," in which the British ambassador purportedly wrote about a U.S.-U.K. anti-Soekarno plot to be executed "together with local army friends." All accounts agree that the letter was a forgery. However it distracted attention from a more incriminating letter from Ambassador Gilchrist, which Soekarno had discussed with Lyndon Johnson's envoy Michael Forrestal in mid-February 1965, and whose authenticity Forrestal (who knew of the letter) did not deny (*Declassified Documents Retrospective Collection*, 594H [Embassy Cable 1583 of February 13, 1965]).
109. Cf. Denis Warner, *Reporter*, March 28, 1963, pp. 62-63: "Yet with General A.H. Nasution, the defense minister, and General Jani, the army chief of staff, now out-Soekarnoing Soekarno in the dispute with Malaya over Malaysia ... Mr. Brackman and all other serious students of Indonesia must be troubled by the growing irresponsibility of the army leadership."
110. *The New York Times*, August 12, 1965, p. 2.
111. Brackman, *The Communist*, p. 40.
112. McGehee, "The C.I.A.," p. 423.
113. Hughes, *The End*, pp. 43-50; cf. Crouch, *The Army*, p. 140n: "No evidence supports these stories."
114. Hughes, *The End*, p. 150, also tells how Sarwo Edhie exploited the corpse of Colonel Katamso as a pretext for provoking a massacre of the PKI in Central Java; cf. Crouch, p. 154n; also fn. 6.
115. Anderson and McVey, *A Preliminary*, p. 133.
116. Benedict Anderson and Ruth McVey, "What Happened in Indonesia?" *New York Review of Books*, June 1, 1978, p. 41; personal communication from Anderson. A second newspaper, *Suluh Indonesia*, told its PNI readers that the PNI did not support Gestapu, and thus served to neutralize potential opposition to Soeharto's seizure of power.
117. Thus defenders of the U.S. role in this period might point out that where "civic action" had been most deeply implanted, in West Java, the number of civilians murdered was relatively (!) small; and that the most indiscriminate slaughter occurred where civic action programs had been only recently introduced. This does not, in my view, diminish the U.S. share of responsibility for the slaughter.
118. *CIA Study*, p. 70; Sundhaussen, *The Road*, p. 185.
119. William Colby, *Honorable Men: My Life in the CIA* (New York: Simon and Schuster, 1978), p. 227. Crouch, *The Army* (p. 108), finds no suggestion in the Mahmilub evidence "that the PKI aimed at taking over the government," only that it hoped to protect itself from the Council of Generals.

120. McGehee, "The C.I.A.," p. 424.
121. Szulc, *The Illusion*, p. 16.
122. Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, pp. 38-9 (Cambodia). According to a former U.S. Navy intelligence specialist, the initial U.S. military plan to overthrow Sihanouk "included a request for authorization to insert a U.S.-trained assassination team disguised as Vietcong insurgents into Phnom Penh to kill Prince Sihanouk as a pretext for revolution" (Hersh, *The Price*, p. 179). As Hersh points out, Green Beret assassination teams that operated inside South Vietnam routinely dressed as Vietcong cadre while on missions. Thus the alleged U.S. plan of 1968, which was reportedly approved "shortly after Nixon's inauguration ... 'at the highest level of government,'" called for an assassination of a moderate at the center by apparent leftists, as a pretext for a right-wing seizure of power. This raises an interesting question, albeit outlandish: did the earlier anti-Soekarno operation call for foreign elements to be infiltrated into the Gestapu forces murdering the generals? Holtzappel ("The 30 September," p. 222) has suspected "the use of outsiders who are given suitable disguises to do a dirty job." He points to trial witnesses from Untung's battalion and the murder team who "declared under oath not to have known ... their battalion commander." Though these witnesses themselves would not have been foreigners, foreigners could have infiltrated more easily into their ranks than into a regular battalion.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## The Indonesian Massacres and the CIA

by Ralph McGehee

**Covert Action Quarterly, Fall 1990**

In my original article ( *The Nation*, April 11, 1981) I tried to explain, through the constraints of the secrecy agreement and the deletions by the CIA's review board, one aspect of the Agency's successful effort to manipulate events in Indonesia in late 1965 and early 1966. The article was based on a classified CIA study of which I was custodian while working in the International Communism Branch of the CIA's Counterintelligence Staff. The *Nation* joined with me in an unsuccessful lawsuit by the ACLU to gain release of the deleted portions of the article. The Agency claims it cannot delete unclassified lies or speculations. By heavily censoring my article, it effectively admitted to an Agency role in the peration.

In a recent story in the *San Francisco Examiner*, researcher Kathy Kadane quotes CIA and State department officials who admit compiling lists of names of the Communist Party of Indonesia (PKI), making those lists available to the Indonesian military, and checking names off as people were "eliminated." The killings were part of a massive bloodletting after an abortive coup attempt taking, according to various

estimates, between 250,000 and 1,000,000 lives and ultimately led to the overthrow of President Sukarno's government.

Since then a debate has simmered over what happened. A recent study based on information from former Johnson administration officials, asserted that for months the U.S. "did their damndest" through public pressure and more discreet methods, to prod the Indonesian army to move against Sukarno without success.

Debate continues over the origins of the coup attempt called Gestapu. Was it the result of CIA machinations, a takeover maneuver by General Suharto, a revolt by leftist officers under the control of the PKI, a power play by the People's Republic of China, a pre-emptive strike by Sukarno loyalists to prevent a move by officers friendly to the CIA, some combination of these factors, or others as yet unknown? I confess to no inside knowledge of the Gestapu.

### Historical Background

It is well known that the CIA had long sought to unseat Sukarno: by funding an opposition political party in the mid-1950s, sponsoring a massive military overthrow attempt in the mid-1958, planning his assassination in 1961, and by rigging intelligence to inflame official U.S. concerns in order to win approval for planned covert actions.

Before attempting to describe one aspect of the CIA's role, it is essential to provide background on the scope and nature of its worldwide operations. Between 1961 and 1975 the Agency conducted 900 major or sensitive operations, and thousands of lesser covert actions. The majority of its operations were propaganda, election or paramilitary. Countries of major concern, such as Indonesia in the early 1960s, were usually subjected to the CIA's most concerted attention.

Critics of the CIA have aptly described the mainstays of such attention: "discrediting political groups... by forged documents that may be attributed to them. . . , "faking "communist weapon shipments," capturing communist documents and then inserting forgeries prepared by the Agency's Technical Services Division. The CIA's "Mighty Wurlitzer" then emblazoned and disseminated the details of such "discoveries."

The Mighty Wurlitzer was a worldwide propaganda mechanism consisting of hundreds or even thousands of media representatives and officials including, over a period of years, approximately 400 members of the American media. The CIA has used the Wurlitzer and its successors to plant stories and to suppress expository or critical reporting in order to manipulate domestic and international perceptions. From the early 1980s, many media operations formerly the responsibility of the CIA have been funded somewhat overtly by the National Endowment for Democracy (NED).

From the earliest days, the Agency's International Organizations Division (IOD) implemented and coordinated its extensive covert operations. The division's activities created or assisted international organizations for youth, students, teachers, workers, veterans, journalists, and jurists. The CIA used, and continues to use, the various labor, student, and other suborned organizations not only for intelligence and propaganda purposes, but also to participate in elections and paramilitary operations and to assist in overthrowing governments. At the same time, the CIA manipulates

their organizational publications for covert propaganda goals.

The labor unions the CIA creates and subsidizes, in their more virulent stages, provide strong-arm goon squads who burn buildings, threaten and beat up opponents, pose as groups of the opposition to discredit them, terrorize and control labor meetings, and participate in coups.

#### Use of "Subversive Control Watch Lists"

As a matter of course, the Agency develops close relationships with security services in friendly nations and exploits these in many ways-by recruiting unilateral sources to spy on the home government, by implementing pro-U.S. policies, and by gathering and exchanging intelligence. As one aspect of those liaisons, the CIA universally compiles local "Subversive Control Watch Lists" of leftists for attention by the local government. Frequently that attention is the charter of government death squads.

After the CIA's overthrow of Arbenz's government in Guatemala in 1954, the U.S. gave the new government lists of opponents to be eliminated. In Chile from 1971 through 1973, the CIA fomented a military coup through forgery and propaganda operations and compiled arrest lists of thousands, many of whom were later arrested and assassinated. In Bolivia in 1975, the CIA provided lists of progressive priests and nuns to the government which planned to harass, arrest and expel them. To curry the favor of Khomeini, in 1983 the CIA gave his government a list of KGB agents and collaborators operating in Iran. Khomeini then executed 200 suspects and closed down the communist Tudeh party. In Thailand, I provided the names of hundreds of leftists to Thai security services. The Phoenix program in Vietnam was a massive U.S.-backed program to compile arrest and assassination lists of the Viet Cong for action by CIA-created Provisional Reconnaissance Unit death squads. In fact, former Director of the CIA William Colby compared the Indonesian operation directly to the Vietnam Phoenix Program. Colby further admitted directing the CIA to concentrate on compiling lists of members of the PKI and other left groups.

In 1963, responding to Colby's direction, U.S.-trained Indonesian trade unionists began gathering the names of workers who were members or sympathizers of unions affiliated with the national labor federation, SOBSI. These trade unionist spies laid the groundwork for many of the massacres of 1965-1966. The CIA also used elements in the 105,000 strong Indonesian national police force to penetrate and gather information on the PKI.

Providing "Watch Lists" based on technical and human penetration of targeted groups is a continuing program of CIA covert operators. Today, U.S.-advised security services in El Salvador, using the techniques of the Phoenix program, operate throughout El Salvador and have taken a heavy toll on peasants, activists and labor leaders in that country. In the late 1980s, the CIA began assisting the Philippine government in the conduct of "low-intensity" operations by, among other things, computerizing security service records of leftists and assisting in the development of a national identity card program. Wherever the CIA cooperates with other national security services it is safe to assume that it also compiles and passes "Subversive Control Watch Lists."

## Putting the Pieces Together

All of this is essential to understanding what happened in Indonesia in 1965 and 1966. In September and October of 1965, the murder of six top military officers during the Gestapu coup attempt provided a pretext for destroying the PKI and removing Sukarno. Surviving officers-principally General Suharto, who was not a target-rallied the army and defeated the coup, ultimately unseating Sukarno.

Two weeks before the coup, the army had been warned that the PKI was plotting to assassinate army leaders. The PKI, nominally backed by Sukarno, was a legal and formidable organization and was the third largest Communist Party in the world. It claimed three million members, and through affiliated organizations-such as labor and youth groups-it had the support of 17 million others. The Army's anxiety had been fed by rumors throughout 1965 that mainland China was smuggling arms to the PKI for an imminent revolt. Such a story appeared in a Malaysian newspaper, citing Bangkok sources which relied in turn on Hong Kong sources. Such untraceability is a telltale mark of the Mighty Wurlitzer.

Less subtle propaganda claimed that the PKI was a tool of the Red Chinese and planned to infiltrate and divide the armed forces. To bolster these allegations, "communist weapons" were discovered inside Chinese crates labeled as construction material. Far more inflammatory news reporting prior to October 1965 claimed the PKI had a secret list of civilian and military leaders marked for beheading.

After the coup attempt the Indonesian Army in the main left the PKI alone, as there was no credible evidence to substantiate the horror stories in the press. [Eight sentences censored.] As noted, a favorite tactic is to arrange for the capture of communist documents and then insert forgeries prepared by the Agency's Technical Services Division.

Suddenly documents were serendipitously discovered providing "proof" of PKI guilt. On October 23, 1965, the Suara Islam reported:

...millions of copies of the text of a proclamation of the counterrevolutionary Gestapu...have been recovered.... The text...was obviously printed in the CPR [People's Republic of China]. Steel helmets and a large quantity of military equipment have also been found.... There is incontrovertible evidence of the CPR's involvement.... The arms sent by the CPR were shipped under cover of "diplomatic immunity." ...other important documents offer irrefutable evidence of the involvement of the CPR Embassy and the CPR ambassador....

On October 30, 1965 Major General Suharto, in a speech before a military audience, angrily denounced the PKI saying that captured documents proved the PKI was behind Gestapu. Suharto demanded that the "Communists be completely uprooted."

On November 2, the Indonesian Armed Forces Bulletin asserted that the PKI had a plan for revolution, and published supposed PKI directives for the period following the October coup attempt. The document stated that the PKI "is only supporting the revolutionary council" that the coup tried to establish. It added that if the council were crushed the PKI would "directly confront" the generals whom the coup leaders

accused of planning to overthrow President Sukarno. The document also said, "when the revolution is directly led by the PKI, we can achieve victory because the command will be under the PKI-our hidden strength is in the armed forces."

Military leaders [seven words censored] began a bloody extermination campaign. Civilians involved were either recruited and trained by the army on the spot, or were drawn from groups such as the army- and CIA-sponsored SOKSI trade unions [Central Organization of Indonesian Socialist Employees], and allied student organizations. Media fabrications had played a key role in preparing public opinion and mobilizing these groups for the massacre.

The documents, manufactured stories of communist plans and atrocities, and claims of communist arms shipments created an atmosphere of hysteria, resulting in the slaughter and the establishment of a dictatorship that still exists today.

The Agency wrote a secret study of what it did in Indonesia. [One sentence censored.] The CIA was extremely proud of its [one word censored] and recommended it as a model for future operations [one half sentence censored].

#### Yesterday's Fake News, Today's Fake History

The CIA desperately wants to conceal evidence of its role in the massacre, which it admits was one of the century's worst. The U.S. media seem equally determined to protect the American image from consequences of covert operations.

Reaction to Kadane's new revelations was swift. An Op-Ed by columnist Stephen S. Rosenfeld in the July 20, 1990 Washington Post, and an article by correspondent Michael Wines in the July 12, 1990 New York Times, each deny any CIA role in the massacre. Rosenfeld, reversing his conclusions of a week before, ignores the new evidence, cites one of many academic studies, and concludes with certainty: "For me, the question of the American role in Indonesia is closed."

Prior to his article, Wines interviewed me. His approach was to reject any information that might implicate the Agency. I told him virtually everything in this article and more. He dismissed the information and instead quoted John Hughes, an "observer removed from the controversy," citing him as formerly of the Christian Science Monitor but failing to mention that he was also State Department spokesman from 1982 to 1985. In an interview with Kadane, Hughes claimed that during the coup which brought Suharto to power, he functioned as the "eyes and ears of the embassy." Wines was uninterested.

Subversive control watch lists are an effective and deadly political tool long used by U.S. intelligence, so deadly that the Agency cannot allow them to become public knowledge. Keeping them secret depends on at least two things: Agency censorship of government employees, and self-censorship by the mainstream media.

---

Ralph McGehee worked for the CIA from 1952 until 1977 and now writes about intelligence matters, notably the book *Deadly Deceits -- My 25 years in the CIA* (New York: Sheridan Square Press, 1983). He has compiled a computer data base on CIA activities. Persons interested may write to him at: 422 Arkansas Ave., Herndon, VA

22070.

## *Chapter One*

### **The historical background**

In October 1965 the international working class suffered one of its greatest defeats and betrayals in the post-World War II period.

Up to one million workers and peasants were slaughtered in a CIA-organised army coup led by General Suharto which swept aside the shaky bourgeois regime of President Sukarno, crushed the rising movement of the Indonesian masses, and established a brutal military dictatorship.

Retired US diplomats and CIA officers, including the former American ambassador to Indonesia and Australia, Marshall Green, have admitted working with Suharto's butchers to massacre hundreds of thousands of workers and peasants suspected of supporting the Indonesian Communist Party (PKI). They personally provided the names of thousands of PKI members from the CIA's files for the armed forces death lists.

According to Howard Federspeil, who was an Indonesian expert working at the State Department at the time of the anti-communist program: "No one cared, so long as they were communists that they were being butchered."

The coup was the culmination of a prolonged operation by the CIA, with the help of agents of the Australian Secret Intelligence Service, to build up and train the Indonesian armed forces in preparation for a military dictatorship to suppress the revolutionary strivings of the Indonesian masses.

At the time of the coup, the PKI was the largest Stalinist party in the world, outside China and the Soviet Union. It had 3.5 million members; its youth movement another 3 million. It controlled the trade union movement SOBSI which claimed 3.5 million members and the 9 million-strong peasants' movement BTI. Together with the women's movement, the writers' and artists' organisation and the scholars' movement, the PKI had more than 20 million members and active supporters.

During the independence struggle against the Dutch in the 1940s and throughout the 1950s and 1960s hundreds of thousands of class conscious workers joined the PKI, believing that it still represented the revolutionary socialist traditions of the Bolshevik Revolution of 1917.

Yet by the end of 1965, between 500,000 and a million PKI members and supporters had been slaughtered, and tens of thousands were detained in concentration camps, without any resistance being offered.

The killings were so widespread that the rivers were clogged with the corpses of workers and peasants. While the CIA-backed military death squads rounded up all known PKI members and sympathisers and carried out their grisly work, *Time* magazine reported:



The killings have been on such a scale that the disposal of corpses has created a serious sanitation problem in northern Sumatra where the humid air bears the reek of decaying flesh. Travellers from these areas tell us small rivers and streams have been literally clogged with bodies. River transportation has become seriously impeded."

How was this historic defeat able to be inflicted? The answer requires an examination of the history of the struggle of the Indonesian masses, the treachery of the national bourgeoisie led by Sukarno, the counter-revolutionary role played by the PKI, and the crucial part played by the Pabloite opportunists of the "United Secretariat" of Ernest Mandel and Joseph Hansen in aiding the treachery of the Stalinists.

### **The 'Jewel of Asia'**

The bloody coup in Indonesia was the outcome of the drive by US imperialism to gain unchallenged control of the immense natural wealth and strategic resources of the archipelago, often referred to as the "Jewel of Asia".

The importance that United States imperialism attached to Indonesia was emphasised by US President Eisenhower in 1953, when he told a state governors' conference that it was imperative for the US to finance the French colonial war in Vietnam as the "cheapest way" to keep control of Indonesia.

Eisenhower detailed: "Now let us assume that we lose Indochina. If Indochina goes, several things happen right away. The Malay peninsula, the last little bit of land hanging on down there, would be scarcely defensible. The tin and tungsten we so greatly value from that area would cease coming, and all India would be outflanked.

"Burma would be in no position for defence. All of that position around there is very ominous to the United States, because finally if we lost all that, how would the free world hold the rich empire of Indonesia?

"So you see, somewhere along the line, this must be blocked and it must be blocked now, and that is what we are trying to do.

"So when the US votes \$400 million to help the war (in Indochina), we are not voting a giveaway program. We are voting for the cheapest way that we can prevent the occurrence of something that would be of a most terrible significance to the United States of America, our security, our power and ability to get certain things we need from the riches of the Indonesian territory and from South East Asia.

Indonesia is estimated to be the fifth richest country in the world in terms of natural resources. Besides being the fifth largest oil producer, it has enormous reserves of tin, bauxite, coal, gold, silver, diamonds, manganese, phosphates, nickel, copper, rubber, coffee, palm oil, tobacco, sugar, coconuts, spices, timber and cinchona (for quinine).

By 1939 the then Dutch East Indies supplied more than half the total US consumption of 15 key raw materials. Control over this vital region was central to the conflict in the Pacific between the US and Japan during World War II. In the post-war period the US ruling class was determined not to have the country's riches torn from their grasp by the Indonesian masses.

Following the defeat of the French in Vietnam in 1954 the US feared that the struggle of the Vietnamese masses would ignite revolutionary upheavals throughout the South East Asian region, threatening its grip over Indonesia.

In 1965, just prior to the Indonesian coup, Richard Nixon, soon to become US president, called for the saturation bombing of Vietnam to protect the "immense mineral potential" of Indonesia. Two years later he declared Indonesia to be the "greatest prize" of South East Asia.

After the coup, the value of Suharto's dictatorship to the interests of US imperialism was underlined in a 1975 US State Department report to Congress which referred to Indonesia as the "most strategically authoritative geographic location on earth":

"It has the largest population of any country in South East Asia.

"It is the principal supplier of raw materials from the region.

"Japan's continued economic prosperity depends heavily on oil and other raw materials supplied by Indonesia.

"Existing American investments in Indonesia are substantial, and our trading relationship is growing rapidly.

"Indonesia will probably become an increasingly important supplier of US energy needs.

"Indonesia is a member of OPEC, but assumed a moderate stance in its deliberations, and did not participate in the oil embargo.

"The Indonesian archipelago sits astride strategic waterways and the government of Indonesia is playing a vital role in the law-of-the-sea negotiations which are vital to our security and commercial interests."

### **Centuries of colonial plunder**

The Dutch colonial powers mercilessly plundered Indonesia for 350 years, looting the natural resources, establishing vast agricultural estates, and ruthlessly exploiting its people.

In 1940 there was only one doctor per 60,000 people (compared to India, where the ratio was 1:6,000) and just 2,400 Indonesian graduates from high school. At the end of World war II, 93 percent of the population was illiterate.

At the beginning of the 19th century, the rising British bourgeoisie increasingly challenged the Dutch for domination over the region. In 1800 the Dutch East India company collapsed and the British occupied the region from 1811 to 1816. The Treaty of London of 1824 carved up the region between the two colonial powers: the British took control of the Malayan peninsula and the Dutch kept charge of the 13,000 islands in the Indonesian archipelago.

By the turn of the 20th century, the emerging imperialist power, the United States, began challenging the old European colonial power, particularly after the American occupation of the Philippines in 1898.

The US was locked into a trade war with the Dutch over oil and rubber. The Standard Oil Company began to contest the monopoly on the Indonesian oil fields by the Royal Dutch company. In 1907, Royal Dutch and Shell merged to combat the American competitor. Taking advantage of World War I, Standard Oil commenced drilling in central Java in 1914, and in the same year US corporations also moved into the rubber plantations. Goodyear Tyre and Rubber opened estates and US Rubber brought the largest rubber estates in the world under single ownership.

US strategy in the region during this period was summed up by Senator William Beveridge:

"The Philippines are ours forever ... and beyond the Philippines are **China's illimitable markets**. We will not retreat from either. We will not repudiate our duty in the archipelago. We will not abandon our duty in the Orient. We will not renounce our part in **the mission of our race, trustee under God, of the civilisation of the world** ... We will move forward to our work ... with gratitude ... and thanksgiving to Almighty God that he has marked us as his **chosen people**, henceforth to lead in the regeneration of the world ... **Our largest trade henceforth must be with Asia**. The Pacific is our ocean ... **and the Pacific is the ocean of the commerce of the future. The power that rules the Pacific, therefore, is the power that rules the world**. And with the Philippines, **that power is and will forever be the American Republic**." (Emphasis in the original)

The rise of Japanese imperialism and its expansion into Korea, Manchuria and China led to increasing conflict with US imperialism over control over the region, culminating in World War II. The drive by the Japanese bourgeoisie to contest US, British, French and Dutch hegemony brought into sharp focus the value of Indonesia as the South East Asian gateway to the Indian Ocean and as a source of natural resources.

In 1942 the Dutch colonialists surrendered control of Indonesia to the Japanese rather than allow the Indonesian people to fight for their independence. All the imperialist powers had good reason to fear the oppressed Indonesian masses.

As early as 1914 the best representatives of the Indonesian toilers had turned to Marxism when the Indies Social Democratic Association was founded on the initiative of the Dutch communist Hendrik Sneevliet. In 1921 it had transformed itself into the Indonesian Communist Party in response to the Bolshevik Revolution in Russia.

The PKI had won great authority among the masses by taking the lead of the struggle against Dutch colonialism, including the first major uprisings, in Java and Sumatra in 1926 and 1927.

While the Chinese masses were rising up in the second Chinese Revolution of 1926-27, the Indonesian workers and peasants also came forward in a rebellion, led by the PKI. However, the Dutch colonial authorities succeeded in quelling the revolts. They arrested 13,000 suspects, imprisoned 4,500 and interned 1,308 in a concentration camp in West Papua. The PKI was outlawed.

## **National liberation struggle betrayed**

At the end of World War II the oppressed masses in Indonesia, India, Sri Lanka, China, throughout South East Asia and internationally came forward in revolutionary struggles to throw off the yoke of imperialism.

At the same time, the working class in Europe and the capitalist countries engaged in convulsive struggles. These were only contained through the treachery of the Soviet bureaucracy headed by Stalin and the Stalinist parties worldwide. The betrayal of the French, Italian and Greek workers in particular and the imposition of bureaucratically controlled regimes in Eastern Europe allowed imperialism to stabilise itself.

By the 1930s, the emergence of a privileged caste in the Soviet Union, which usurped political power from the Soviet proletariat, had destroyed the Communist Parties. From revolutionary internationalist parties they became transformed into counter-revolutionary organisations, suppressing the independent struggles of the working class.

In the colonial countries the Stalinised parties, including the PKI, systematically subordinated the masses to the national bourgeoisie led by figures such as Gandhi in India and Sukarno in Indonesia who sought to reach settlements with the colonial powers in order to maintain capitalist rule.

The post-war settlements did not achieve genuine national liberation from imperialism but imposed on the masses a new set of agents of imperialist rule. This was clearly the case in Indonesia where the national bourgeoisie, with Sukarno in the lead, entered into a series of reactionary deals with the Dutch.

Sukarno, the son of a Javanese school teacher of aristocratic family, was a young architecture graduate, part of a very thin layer of educated petty-bourgeois. He had been the founding chairman of the Indonesian Nationalist Party (PNI) in 1927 and had suffered imprisonment and exile at the hands of the Dutch for campaigning for national independence.

During World War II Sukarno and the national bourgeoisie worked with the occupying Japanese forces in the hope of achieving a degree of national self-government. In the dying days of the war Sukarno, with the reluctant support of the Japanese, declared the independent Republic of Indonesia on August 17, 1945.

The perspective of the national bourgeois leaders was not to lead a proletarian uprising against imperialism but to establish an administration and strengthen their hand for negotiations with the Dutch, who had no forces in the region.

But the response of the Dutch ruling class was to launch a brutal war to suppress the new regime. They ordered that Indonesia be kept under Japanese command until British troops could arrive. The British and the Dutch then used Japanese troops to attack the ferocious resistance of the Indonesian workers, youth and peasants. Thus all the imperialist powers united against the Indonesian masses.

As armed opposition erupted throughout Indonesia against the Dutch forces, Sukarno, backed by the PKI leadership, pursued a policy of compromise with the Dutch and signed the Linggadjati Agreement in March 1947. The Dutch nominally

recognised Indonesian control over Java, Madura and Sumatra and agreed to evacuate their troops. But in fact the Dutch used this as a breathing space to build up their forces and prepare for a new attack of unsurpassed brutality in July and August 1947.

Throughout this period, hundreds of thousands of workers and peasants joined or supported the PKI because of their disillusionment with the bourgeois leaders and because they viewed the PKI as a revolutionary party. They were also greatly inspired by the advances of Mao Zedong's Chinese Communist Party in its war against Chiang Kai Shek. In the war against the Dutch, workers and peasants repeatedly seized property and mass unions were formed.

To head off this development, Sukarno's Republican government, led by the then Prime Minister Amir Sjarifuddin (a secret member of the PKI), signed the January 1948 Renville Agreement (so called because it was negotiated aboard the USS Renville in the harbour). This pact gave the Dutch control of half the sugar mills in Java, 75 percent of Indonesia's rubber, 65 percent of coffee, 95 percent of tea and control of Sumatran oil. Moreover, this US-imposed settlement provided for the withdrawal of guerrilla forces from Dutch-occupied territory and created the conditions for the liquidation of the PKI-led "people's armed units" in favour of the bourgeois "Indonesian National Armed Forces" controlled by Sukarno and his generals.

In 1948 a series of strikes erupted against the Republican government, now headed by right-wing Vice-President Hatta as Prime Minister, demanding a parliamentary government. These strikes were suppressed by Sukarno who appealed for "national unity".

At the same time, the exiled PKI leader Musso returned from the Soviet Union and a series of prominent leaders of the Indonesian Socialist and Labor parties announced that they had been secret PKI members for many years. The announcement revealed a far wider base of support for the PKI than previously realised by the imperialist powers.

In July 1948 the bourgeois leaders, including Sukarno and Hatta, held a secret meeting with US representatives at Sarangan where the US demanded, in return for assistance to the government, the launching of a purge of PKI members in the army and the public service. Hatta, who also held the post of Defence Minister, was given \$10 million to carry out a "red purge".

Two months later, in an attempt to crush the PKI, the Maduin Affair was launched in Java. A number of army officers, members of the PKI, were murdered and others disappeared, after they opposed plans to demobilise the guerrilla units of the army that had been at the forefront of the fight against the Dutch.

The killings provoked an uprising at Maduin which was suppressed bloodily by the Sukarno regime. Prime Minister Hatta proclaimed martial law. Thousands of PKI members were killed, 36,000 were imprisoned and PKI leader Musso and 11 other prominent leaders were executed.

The US Consul General Livergood cabled his superiors in the US that he had informed Hatta that "the crisis gives the Republican government the opportunity (to) show its determination (to) suppress communism".

Encouraged by the anti-communist pogrom, the Dutch launched a new military attack in December 1948, arresting Sukarno. But widespread resistance forced the Dutch to capitulate within six months.

Even then, the 1949 Round Table conference at the Hague imposed a new betrayal on the Indonesian masses, involving still more concessions by the Indonesian bourgeoisie.

The Sukarno regime agreed to take over the debts of the former colony, and gave guarantees to protect Dutch investments. The Dutch were to keep control of West Papua and the Indonesian Republic was to continue to cooperate with the Dutch imperialists within the framework of a Netherlands-Indonesian Union. The Sukarno government kept all the colonial laws intact. A new army was formed by incorporating the former Dutch troops of Indonesian nationality into the "National Armed Forces". In other words, the old colonial state apparatus and laws were retained beneath the facade of parliamentary government in the new Republic.

The PKI leadership supported the betrayal of the national liberation struggle and determined to confine the working class and peasantry to "peaceful democratic" forms of struggle. This was a continuation of the PKI's position throughout World War II when the PKI leadership (as well as the Communist Party of the Netherlands) had followed Stalin's line of cooperating with the Dutch imperialist government against Japan, and called for an "independent Indonesia within the Commonwealth of the Dutch Empire". This call remained PKI policy even during the post-war fighting against the Dutch.

But for the Indonesian masses, the fraud of "national independence" under the continued domination of Dutch, American and world imperialism became ever more apparent. The natural resources, principal industries, agricultural estates and financial power remained in the hands of the foreign corporations.

For example, 70 percent of the inter-islands sea traffic was still controlled by the Dutch firm KPM and one of the big Dutch banks, the *Nederlandche Handel Maatschappij*, controlled 70 percent of all Indonesian financial transactions.

According to the Indonesian government calculations, in the mid-1950s, Dutch investments in the country were worth \$US1.5 billion. The Sukarno government declared that even if it wanted to nationalise the Dutch possessions it did not have the money to indemnify the former colonial rulers. And to nationalise without compensation would be labelled "communism".

The growing disillusionment of the masses was reflected in the 1955 elections when the number of seats held by the PKI increased from 17 to 39.

Within two years the mass movement was to erupt in the seizure of Dutch, American and British factories, plantations, banks, shops and ships.

## **Chapter Two:**

### **Stalinists betray the mass movement**

In December 1957 the whole fabric of imperialist domination over the Indonesian economy was shaken by a massive eruption of the working class and peasantry. Factories, plantations, banks and ships were seized and occupied.

Sukarno's bourgeois nationalist regime was only able to survive because the Stalinist Indonesian Communist Party (PKI) leadership sabotaged the mass movement, insisting that the masses hand over the property they had seized to the US-backed army which was sent in by Sukarno to take control.

A dispatch in the New York Times of December 8, 1957 provided some idea of the scope and intensity of the upsurge: "The movement of the workers in Jakarta, to the extent we have been able to determine, took place without the government's sanction, and in opposition to the declarations of Prime Minister Djuanda, of the Army Chief-of-Staff, General Abdul Haris Nasution, and of other high governmental functionaries, according to whom such measures were inadmissible and rendered their participants liable to severe penalties..."

"The three Dutch banks here, the Netherlands Trading Society, the Escompto and the Netherlands Commercial Bank, were seized by the delegates. They read a proclamation before their enthusiastic comrades and then before the Dutch administrators, stating that the seizure was made in the name of the Association of Indonesian Workers and that the banks would become the property of the Indonesian Republic."

The Dutch newspaper Volksrant reported with alarm on December 11, 1957: "In Jakarta the Communists continue to hoist red flags on the Dutch enterprises ... Today the main office of Philips in Jakarta and that of the Societe D'Assurances Nillmij have been 'expropriated' by the Indonesian personnel under the leadership of 'Communist' trade union functionaries."

The movement was not confined to Java. According to the New York Herald-Tribune of December 16: "Workers of SOBSI, central trade union organisation dominated by the Communists, seized Dutch bakeries and stores in Java and banks in Borneo." The New York Times of the same day reported that in Palembang, capital of South Sumatra, "security forces arrested a number of workers belonging to the central trade union organisation controlled by the Communists for having taken 'arbitrary action' against three Dutch proprietors. Thirty seven red flags hoisted by the workers before the houses occupied by the Dutch employees were confiscated".

Other bourgeois papers spoke of "a situation of anarchy in Bali" and a fleeing Dutch plantation owner was quoted as saying that in Atjeh and Deli, on the east coast of Sumatra, the mass actions were directed not only against the Dutch companies but also against the American and British. Similar reports came from North Sumatra, the Celebes and other islands.

There were reports too that the uprisings inspired resistance in Australian-occupied Papua New Guinea. At Karema 20 people were wounded when native people fought soldiers after a native nurse reported that she had been insulted.

The rebellion throughout Indonesia erupted in response to a call by Sukarno for a general strike against all Dutch enterprises. He had previously raised the question of nationalisation of Dutch industry at a mass rally. Sukarno's aim was to use the threat of nationalisation to pressure the Netherlands to withdraw from West Papua, which it retained under the 1949 Round Table Conference agreement, so that Indonesia could then take control.

Seeking to balance between the rapacious dictates of Dutch, US and British imperialism, the seething discontent of the oppressed masses and the growing strength of the US-backed military on which his regime relied, Sukarno sought to use the pressure of the masses to force the hand of Dutch imperialism.

Workers themselves began to occupy the Dutch companies. Sukarno was totally unprepared for such a response. He immediately authorised the military to move in to take control of the enterprises which had been seized by the masses.

The Political Bureau of the PKI rushed to Sukarno's assistance, issuing a resolution that urgently appealed to the people "to quickly resolve the differences of opinion on the methods of struggle against Dutch colonialism by negotiations, so that in this way unity in the people and between the people, the government and the army may be strengthened".

At the same time the PKI appealed to the workers, "not only to set going the occupied enterprises, but to make them function in a still more disciplined and better way and to increase production.

"The government must appoint a capable and patriotic direction for these enterprises and the workers must support this direction with all their strength."

In addition, the PKI insisted that the takeovers must be confined to the Dutch companies, seeking to reassure US and British imperialism that their interests would not be harmed: "All the actions of the workers, of the peasants and the organisations of youth are directed against the Dutch capitalists. The other capitalist countries did not take a hostile attitude in the conflict between Holland and Indonesia in West Irian. That is why no action will be engaged against the enterprise of the capitalists of other countries."

Recognising the efforts of the PKI to choke the movement of the masses, Tillman Durdin wrote in the New York Times of December 16: "Members of the National Consultative Council of Communist orientation are known to have actually pronounced forcibly against the seizures by workers and have called such movements undisciplined 'anarcho-syndicalism'. The Communists defend a program of seizure directed by the government such as it is now applied."

Sukarno himself was ready to flee the country for a "holiday" in India, but the handing over of the Dutch enterprises to the military, on the instructions of the PKI, rescued his bourgeois regime. The Stalinist leadership of the PKI not only saved the day for



the Sukarno government. They created the conditions for the military generals and their US backers to prepare for their bloody counter-revolution eight years later.

The perspective fought for by the PKI leadership was the Stalinist "two stage" theory that the struggle for socialism in Indonesia had to first pass through the stage of so-called "democratic" capitalism. The revolutionary strivings of the masses for socialist measures had to be suppressed and subordinated to a "united front" with the national bourgeoisie.

In line with this reactionary perspective, the Stalinist bureaucracies in the Soviet Union and China hailed Sukarno and his regime throughout this entire period. Krushchev, for example, visited Jakarta and said he would give Sukarno every assistance in "all eventualities". In fact most of the weapons that were to be used to massacre the Indonesian masses in 1965 were supplied by the Kremlin.

### **Military preparations begin**

In 1956 the US-backed army had begun preparations for military dictatorship to crush the movement of the masses. In August the commander of the West Java military region ordered the arrest of Foreign Minister Roeslan Abdulgani on a charge of corruption. In November the army Deputy Chief of Staff, Colonel Zulkifli Lubis, attempted unsuccessfully to seize control of Jakarta and overthrow the Sukarno government. The next month there were regional military takeovers in Central and North Sumatra.

In October 1956 Sukarno moved to strengthen his hand against the masses and to appease the military by calling for political parties to disband themselves. This call was later extended to an attempt to form a National Council of all parties, including the PKI, to rule the country. When military commanders in East Indonesia, Kalimantan, Atjeh, and South Sumatra rejected the plan and took control of their provinces, Sukarno declared a state of emergency. Finally a new "non-party" cabinet was formed which included two PKI sympathisers.

In response to the mass upsurge of December 1957 the operations of United States imperialism were immediately stepped up. The US Central Intelligence Agency (CIA) had been active since the 1940s, spending millions to subsidise pro-US elements within the national bourgeoisie, particularly the Socialist Party (PSI) of Sumiro, a colleague of Hatta, and its larger Moslem ally, the Masjumi party of Sjafruddin Prawiranegara, with whom Hatta had also retained close links.

Throughout 1957 and 1958 a series of CIA-inspired secessionist and right-wing revolts were orchestrated in the oil-rich islands of Sumatra and Sulawesi, where the PSI and Masjumi dominated politically.

The first was the Permesta military revolt which began in March 1957 and continued into 1958, ending in a CIA-backed attempted coup in February 1958.

The United States government provided substantial financial support, military advisers, arms and a small airforce of B-26 bombers, piloted from bases in Taiwan and the Philippines. US Secretary of State Dulles even publicly expressed his support for the right-wing rebels.

An aircraft carrier of the US Seventh Fleet was sent to Singapore and for some time it appeared that the US might directly intervene in Sumatra under the guise of defending Caltex oil personnel and property.

The Indonesian military command finally decided that the rebellion, having failed to win any popular support at all, had to be ended. The Sukarno leadership survived.

But the role of the army had been enormously strengthened. Over the next six years the US poured huge resources into it, laying the basis for General Suharto to begin his climb to power after leading the military campaign to seize control of West Papua in 1962.

Between 1959 and 1965 the US supplied \$64 million in military grant-aid to the Indonesian military generals. According to a report in *Suara Pemuda Indonesia*: "Before the end of 1960, the US had equipped 43 battalions of the army. Every year the US trained officers of the right-wing military clique. Between 1956 and 1959 more than 200 high-ranking officers were trained in the US, while low-ranking officers are trained by the hundreds every year. Once the head of the Agency for International Development in America said that US aid, of course, was not intended to support Sukarno and that the US had trained a great number of officers and ordinary people who would form a unit to make Indonesia a 'free country'."

At the same time, Sukarno instituted his system of "Guided Democracy". In July 1959 the parliament was dissolved and Sukarno imposed a presidential constitution by decree again with the full support of the PKI. He further boosted the hand of the military, appointing army generals to leading positions.

The PKI warmly embraced Sukarno's "Guided Democracy" and his supposed consensus or Konsepsi alliance between nationalism, Islam and communism called "NASAKOM".

In pursuit of their "national united front" with Sukarno and the national bourgeoisie, the PKI leaders promoted the most deadly illusions in the armed forces.

Only five years before the bloody defeat inflicted upon the Indonesian workers and peasants at the hands of the military, the PKI line was put most crudely in a statement by the leadership of SOBSI, the PKI-led trade union federation, on May Day 1960:

"The SOBSI maintains the viewpoint that the armed forces of the Republic are still the true son of the popular revolution ... and therefore from the officers down to the NCOs and soldiers ... they cannot be drawn into actions which are treacherous to the Republic. Besides, president Sukarno, who identifies himself with the people, possesses a strong influence over members of the armed forces and he refuses to be a military dictator."

### **A new upsurge**

In 1962, Indonesia's military annexation of West Papua was fully backed by the PKI leadership, along with the suppression of the resistance of the West Papuan people to the occupation. In Indonesia itself, the underlying economic and class tensions, produced by the continued exploitation of the Indonesian masses by the imperialist

corporations and their national bourgeois lackeys, re-emerged. The period of "Guided Democracy," that is, of the collaboration of the PKI leadership with the national bourgeoisie in suppressing the independent struggles of the worker and peasant masses, failed to resolve any of the pressing economic and political questions. Export income declined, foreign reserves fell, inflation continued to spiral, and bureaucratic and military corruption became endemic.

From 1963 onwards the PKI leadership increasingly sought to avoid the growing clashes between the party's mass activists and the police and military. PKI leaders stressed the "common interests" of the police and "the people". PKI leader D.N. Aidit inspired the slogan "For Civil Order Help the Police". In April, 1964, in an interview with S.M. Ali of the *Far Eastern Economic Review* Aidit set out for the international bourgeoisie the Stalinists' perspective of a peaceful and gradual "two stage" transformation to socialism in Indonesia.

"When we complete the first stage of our revolution which is now in progress, we can enter into friendly consultation with other progressive elements in our society, and without an armed struggle lead the country towards socialist revolution." He presented a scenario in which the masses would be confined to placing pressure on the national bourgeoisie: "The chastening effect of the present stage of the revolution will maintain a kind of revolutionary pressure on Indonesia's national capitalists. "There will be no armed struggle unless there is foreign armed intervention on the capitalists' behalf. And when we successfully complete our present national democratic revolution the chances of any foreign power interfering with Indonesia's international affairs will become extremely remote."

In August, 1964, Aidit urged all PKI members to rid themselves of "sectarian attitudes" toward the army, calling on all left-wing artists and writers to make the "soldier masses" the subject of art and literary works. In late 1964 and early 1965 hundreds of thousands of peasants took action to seize the land of the big landowners. Fierce clashes developed with landlords and police. To forestall the revolutionary confrontation which was rapidly developing, the PKI called on its supporters to prevent violent conflict with the landlords and to improve cooperation with other elements, including the armed forces.

At a meeting of the PKI central committee Aidit urged the suppression of peasants' actions and denounced party cadre who, "carried away by their desire to spread the peasant actions, immediately became impatient, indulged in individual heroism, were insufficiently concerned with developing the consciousness of the peasants and wanting a definite event, were not careful enough in differentiating and choosing their targets." PKI leaders justified halting the land takeovers and handing back the land to the landowners by referring to the "impending probable" formation of a "NASAKOM cabinet".

In early 1965 workers in the oil and rubber industries owned by US corporations began to seize control of them. The PKI leadership responded by formally joining the government. At the same time, leading generals were brought into the cabinet. The PKI ministers not only sat beside the military butchers in Sukarno's cabinet, but they continued to promote the deadly illusion that the armed forces were part of the "peoples' democratic revolution". Aidit delivered a lecture to army staff school

trainees in which he referred to the "feeling of mutuality and unity that daily grows strong between all the armed forces of the Indonesian Republic and the various groups of Indonesian people, including the communists".

In this way, the Stalinists completely disarmed the most class conscious sections of the working class. The elementary Marxist understanding of the state as the "body of armed men" employed by the ruling class to maintain its rule was criminally denied. Aidit rushed to assure the bourgeoisie and the military that the PKI opposed the revolutionary mobilisation of the masses. "The important thing in Indonesia now is not how to smash the state power as is the case in many other states, but how to strengthen and consolidate the pro-people's aspect ... and to eliminate the anti-people's aspect".

The Sukarno regime moved against the working class by banning all strikes in industry. The PKI leadership raised no objections because industry was considered to belong to the NASAKOM government. Just before the coup, the PKI, well aware of preparations for military rule, called for the establishment of a "fifth force" within the armed forces, consisting of armed workers and peasants. Far from fighting for the independent mobilisation of the masses against the military threat, the PKI leadership sought to constrain the deepening mass movement within the bounds of the capitalist state.

They grovelled to the generals, seeking to assure them that the PKI's proposal would lead to the strengthening of the state. Aidit announced in a report to the PKI central committee that the "NASAKOMisation" of the armed forces could be achieved and that the fifth force could be established with the cooperation of the armed forces. Right up to the very end, the PKI leadership suppressed the revolutionary aspirations of the working class. As late as May 1965, the PKI Politburo sowed the illusion that the military and state apparatus was being modified to isolate the "anti-people's aspect" of state power:

"The strength of the pro-people's aspect (of state power) is already becoming steadily greater and holds the initiative and the offensive, while the anti-people's aspect, although moderately strong, is relentlessly pressed into a tight corner. The PKI is struggling so that the pro-people's aspect will become more powerful and finally dominate, and the anti-people's aspect will be driven out of the state power." The Indonesian and international working class paid a bitter and bloody price for this Stalinist perfidy when Suharto and the generals struck on September 30, 1965.

### **Chapter Three**

1965 -- Stalinism's bloody legacy

The Indonesian military coup of October 1-2, 1965 was the outcome of a carefully-orchestrated and long-planned operation by the CIA and the US-trained and backed commanders of the Indonesian armed forces. Throughout 1965 class tensions mounted. The year began with peasants seizing the estates of large landowners and oil and rubber workers occupying US-owned enterprises. President Sukarno had brought the army commanders, led by General Nasution, and the Indonesian Communist Party (PKI) leadership into his cabinet to suppress the movement. The

PKI leadership halted the takeovers but the mass movement was becoming increasingly difficult to control. There was growing discontent over the sentencing of 23 peasants to 15 to 20 years in prison for allegedly beating an army officer to death in the course of resisting military action to suppress land seizures in Sumatra.

On the evening of September 30, 1965, a CIA provocation was organised. A group of middle-ranking military officers, at least one of whom had close personal relations with General Suharto, arrested and executed the army chief of staff, Lieutenant-General Ahmad Yani, and five other leading generals, and announced the establishment of a Revolutionary Council. The round up of the generals did not include two key figures. The first was Suharto, then the commander of the Strategic Reserve Forces (Kostrad), comprised of the military's crack troops. The mutineers led by Lieutenant-Colonel Untung made no attempt to arrest Suharto nor cut off his headquarters in Jakarta despite being in a position to do so. The Defence Minister, General Nasution, also escaped. He was supposedly on the plotters' death list but miraculously survived.

Untung's so-called coup bid was a charade. Within 24 hours Suharto routed the rebels, virtually without a shot being fired, and took control of the capital, backed by Nasution. By the end of the week, Suharto's reconstituted army command eliminated all pockets of resistance, and launched the greatest anti-communist pogrom in history, orchestrated by the US embassy and the CIA. The White House, Pentagon and CIA, already fighting an undeclared war in Vietnam, were determined to drown the Indonesian revolution in blood. US diplomats and CIA officers, led by the US ambassador to Indonesia, Marshall Green, worked hand in glove with Suharto's death squads to exterminate every known member and supporter of the Indonesian Communist Party (PKI).

### **CIA-organised holocaust**

In preparation for the coup, US officials had spent at least two years compiling death lists which were handed over to the military with a clear instruction: exterminate them all. Suharto's men were ordered to report back after each set of killings so the names could be checked off on the CIA's lists. Some of the American officers involved described what took place. "It really was a big help to the army," said a former political officer in the US embassy in Jakarta, Robert Martens. "They probably killed a lot of people and I probably have a lot of blood on my hands, but that's not all bad.

"There's a time when you have to strike hard at a decisive moment."

Martens headed an embassy group of State Department and CIA officers who, from 1962, compiled a detailed who's who of the leadership of the PKI. They included, he said, names of provincial, city and other local PKI committee members, and leaders of PKI-backed trade union, women's and youth groups. The operation was masterminded by former CIA director William Colby, who was then director of the CIA's Far East Division, and thus responsible for directing US covert strategy in Asia. Colby said the work to identify the PKI leadership was a forerunner to the CIA's Phoenix Program in Vietnam, which attempted to exterminate supporters of the National Liberation Front in the late 1960s.

Colby admitted that the work of checking off the death lists was regarded as so important that it was supervised at the CIA's intelligence directorate in Washington. "We came to the conclusion that with the sort of draconian way it was carried out, it really set them (the PKI) back for years." Deputy CIA station chief Joseph Lazarsky described with undisguised relish how Suharto's Jakarta headquarters provided the US embassy with running reports on the roundup and killing of PKI leaders. "We were getting a good account in Jakarta of who was being picked up. The army had a 'shooting list' of about 4,000 or 5,000 people. "They didn't have enough goon squads to zap them all, and some individuals were valuable for interrogation. The infrastructure was zapped almost immediately. We knew what they were doing. We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them."

All this was conducted with the approval of Green who was later appointed US ambassador to Australia, where he played a leading role in the preparations for the dismissal of the Whitlam government in 1975. At least one million people were slaughtered in the six month holocaust that followed the coup. This was the estimate of a team of University of Indonesia graduates commissioned by the army itself to inquire into the extent of the killings.

Instigated and aided by the army, gangs of youth from right-wing Muslim organisations carried out mass killings, particularly in central and east Java. There were reports that at certain points the Brantas River near Surabaya was "choked with corpses". Another report from the east Javan hill town of Batu said there were so many killed within the narrow confines of a police courtyard that the bodies were simply covered over with layers of cement. On the island of Bali, formerly considered to be a PKI stronghold, at least 35,000 were killed by the beginning of 1966. There the Tamins, the storm-troopers of Sukarno's PNI (Indonesian National Party) performed the slaughter. A special correspondent of the Frankfurter Allgemeine Zeitung told of bodies lying along the roads, or heaped in pits, and of half-burned villages in which peasants dared not leave the charred shells of their huts. In other areas suspects were forced to kill their alleged comrades with their own hands to prove their loyalty. In the major cities anti-Chinese pogroms were conducted. Workers and public servants who went on strike in protest at the counter-revolutionary wave of terror were sacked.

At least 250,000 workers and peasants were thrown into concentration camps. An estimated 110,000 were still held as political prisoners at the end of 1969. Executions continue to this day, including several dozen since the early 1980s. Another four prisoners, Johannes Surono Hadiwiyono, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman and Norbertus Rohayan, were executed nearly 25 years after the coup, a clear sign that the Suharto regime still fears the resurgence of the Indonesian proletariat and poor peasantry.

### **Stalinist betrayal deepens**

While hundreds of thousands of suspected PKI members and supporters were being hunted down and slaughtered, the PKI leadership and their Stalinist counterparts in the Kremlin, Beijing and the Communist Party of Australia (CPA) urged PKI cadre and workers and peasants to offer no resistance, giving a green light for the generals

to proceed with their mass executions. The Stalinists deepened their reactionary line of demanding that the masses subordinate themselves to the national bourgeoisie and Sukarno, who was maintained by Suharto as a puppet president, and to the armed forces themselves.

On October 1, 1965 both Sukarno and PKI secretary general Aidit responded to the formation of the so-called rebel Revolutionary Council by moving to the Halim Air Base in Jakarta to seek protection. On October 6 Sukarno called for "national unity," that is, "unity" between the military and its victims, and an end to violence. The Political Bureau of the Central Committee of the PKI immediately urged all members and mass organisations to support the "leader of the Indonesian revolution" and offer no resistance to the military. Its statement was reprinted in the CPA's paper Tribune:

"Having studied the appeal by the supreme commander-in-chief of the armed forces of the Indonesian Republic, by the leader of the Indonesian revolution, president Sukarno, the political bureau of the central committee of the Communist Party of Indonesia declares full support for the appeal and appeals to all party committees and party members and sympathisers, as well as revolutionary mass organisations led by the PKI members to facilitate the carrying out of this appeal."

Meanwhile, Sukarno, the "leader of the Indonesian revolution," was collaborating with the military repression in the hope of saving his own neck. He called for a thorough purge of those allegedly involved in the "September 30 affair," (the alleged coup bid led by Colonel Untung), and permitted PKI leaders to be arrested and murdered. On October 15 he appointed Suharto as army chief.

Five months later, on March 11, 1966, Sukarno handed Suharto unchallenged decree-making power. He "ordered" Suharto to "take all steps" to re-establish order and to safeguard Sukarno's "personal safety and authority". Suharto's first exercise of his new powers was to formally outlaw the PKI. In recognition of the value of his services, Sukarno was retained as the titular president of the military dictatorship until March 1967.

The PKI leadership continued to demand that the masses bow to the authority of the Sukarno-Suharto regime. Aidit, who had fled, was captured and executed by the army on November 24, 1965 but his line was maintained by the PKI's Second Secretary Njoto. In an interview given to a Japanese newspaper correspondent he emphasised:

"The PKI recognises only one head of state, one supreme commander, one great leader of the revolution President Sukarno... It is President Sukarno united with the forces of the people who will decide the destiny and future of Indonesia."

All party members, Njoto continued, should "fully support the directives of President Sukarno and pledge themselves to implement these without reserve... Our party is making every effort in its power to prevent a civil war." In other words, while the military butchers and their CIA mentors organised the systematic liquidation of not only the PKI leadership but the most class conscious sections of the Indonesian masses, the PKI ordered its cadre to ensure that no-one fought back.



The utter bankruptcy and treachery of the Stalinist "two-stage" theory of insisting that the masses tie their fate to Sukarno and the national bourgeoisie could not have been spelt out more graphically. The betrayal of the PKI was endorsed and reinforced by the Stalinist bureaucracies in Moscow and Beijing. The Kremlin blamed "putschist" and "adventuristic" elements in the PKI for the defeat and called repeatedly for the "unity" of the Indonesian "revolution" around Sukarno's NASAKOM (Nationalism, Islam and Communism).

On October 12, 1965 Soviet leaders Brezhnev, Mikoyan and Kosygin sent a special message to Sukarno: "We and our colleagues learned with great joy that your health has improved ... We have with interest heard about your radio appeal to the Indonesian people to remain calm and prevent disorders ... This appeal will meet with profound understanding." At a Tricontinental Conference in Havana in February, 1966, the Soviet delegation tried in every way to block a public condemnation of the counter-revolutionary terror raging against the Indonesian masses. Its stance won praise from the Suharto regime. The Indonesian parliament passed a resolution on February 11 expressing "full appreciation" for the "efforts of the delegations of Nepal, Mongolia, the Soviet Union and others at the Solidarity Conference of the Peoples of Africa, Asia and Latin America, who successfully neutralised the efforts of the counter-revolutionists of the so-called September 30 movement, and their protectors and leaders, to intervene in the internal affairs of Indonesia".

Thus, the betrayal of the Stalinists was so brazen that the parliamentary lapdogs of the military junta were able to refer to the CIA's September 30 set-up as an attempted counter-revolution! The Beijing Stalinists similarly wiped their hands of the fate of the Indonesian masses. They even went ahead in Jakarta with a World Conference Against Foreign Bases and stood by without protest as their Indonesian comrades were arrested in the conference hall itself.

### **The legacy of the 'bloc of four classes'**

The Stalinist betrayal in 1965 was the culmination of more than 20 years of treachery in which the PKI, working on the basis of the Stalinist "two-stage" theory and, in particular, the Maoist ideology of a "bloc of four classes," tied the working class and peasant masses to the bourgeois nationalist regime of Sukarno. Aidit spelt out the ideological framework of the bloody defeat of the Indonesian revolution shortly after returning from 18 months in China in July 1950 and wresting control of the PKI leadership: "The working class, the peasants, the petty-bourgeoisie and the national bourgeoisie must unite in one national front."

Aidit slavishly followed the line of the Maoist regime in China which suppressed the independent struggle of the working class and attempted to establish a "New Democracy", a bourgeois state, in alliance with sections of the national bourgeoisie and petty-bourgeoisie after the collapse of Chiang Kai Shek's dictatorship. Parroting Mao, he called for a "people's democracy" and a "united front of all anti-imperialist and anti-feudal forces in the country. That is to say, the working class, the peasantry, the petty-bourgeoisie and the national bourgeoisie." In keeping with the counter-revolutionary "two-stage" theory of Stalinism, "The task of this alliance is to bring about not socialist but democratic reforms".



Aidit demanded that the workers and peasant masses support not only the national bourgeoisie but also "all other patriotic and anti-colonial forces including the left (rather progressive) landlord group". It was this line, which Aidit hammered out incessantly, which was used to suppress workers' and peasants' struggles, tie the working class to the Sukarno regime, and create the conditions for the US-backed military to strike. Time and again, PKI members and supporters were instructed to strangle the class struggle and the revolutionary strivings of the oppressed masses in order to preserve the "national united front": "The basic principle we must adhere to in the conduct of the national struggle is to subordinate the class struggle to the national struggle."

The "two stage" theory of Stalinism insists that in the colonial and semi-colonial countries such as Indonesia, the oppressed masses must not engage in struggles that threaten the national bourgeoisie nor raise the program of socialist revolution. The class struggle has to be stifled to prop up the national bourgeoisie and establish a national capitalist democracy.

The bloody counter-revolutionary consequences of this Stalinist line were first demonstrated in China in 1926-27 when the butcher Chiang Kai Shek inflicted a crushing defeat on the Chinese working class after the Communist Party had been instructed by the Kremlin leadership to join his bourgeois nationalist Koumintang. The massacres carried out by Chiang confirmed Leon Trotsky's warnings that the weak and belated bourgeoisies of the oppressed nations are organically incapable of conducting any consistent struggle against imperialism and feudalism. That is because, to do so requires the mobilisation of the masses in revolutionary struggle and such a struggle immediately comes into conflict with the class position of the national bourgeoisie as exploiters of their "own" working class and peasantry. As Trotsky explained in his writings on the betrayal of the Chinese Revolution:

"To really arouse the workers and peasants against imperialism is possible only by connecting their basic and most profound life interest with the cause of the country's liberation. A workers' strike small or large an agrarian rebellion, an uprising of the oppressed sections in city and country against the usurer, against the bureaucracy, against the local military satraps, all that arouses the multitudes, that welds them together, that educates, steels, is a real step forward on the road to the revolutionary and social liberation of the Chinese people... But everything that brings the oppressed and exploited masses of the toilers to their feet inevitably pushes the national bourgeoisie into an open bloc with the imperialists. The class struggle between the bourgeoisie and the masses of workers and peasants is not weakened, but, on the contrary, is sharpened by imperialist oppression, to the point of bloody civil war at every serious conflict." (Trotsky, *Problems of the Chinese Revolution*, New Park 1969, p.5) The criminal role played by the PKI in tying the Indonesian masses to Sukarno's national bourgeois regime made Trotsky's analysis tragically prophetic.

The unresolved tasks of genuine national liberation, land redistribution, democracy and economic development in Indonesia and all historically-oppressed countries can be achieved only by the working class leading the peasant masses in the socialist revolution. That is, national self-determination can only arise as a by-product of the

socialist revolution led by the proletariat. The victory of this struggle is bound up with the development of the world socialist revolution to overthrow imperialism on a world scale. This is the kernel of the Marxist theory of Permanent Revolution developed by Leon Trotsky and vindicated by the victory of the October 1917 Russian Revolution.

## **Chapter Four**

### **Pabloite accomplices of counter-revolution**

In the months following the bloody CIA-organised military coup of October 1-2, 1965, every known member and supporter of the Indonesian Communist Party (PKI) and all working class parties, and hundreds of thousands of other Indonesian workers and peasants, were massacred or thrown into concentration camps for torture and interrogation. The systematic extermination and ruthless suppression of working class opposition intensified after March 11, 1966 when Sukarno, the bourgeois nationalist leader retained by the military as President, granted unfettered decree-making power to the coup leader and army chief, General Suharto.

The betrayal of the tumultuous revolutionary movement of the Indonesian masses by the Stalinist leadership of the PKI was a profound defeat with enormous implications for the international working class. The PKI blocked the repeated attempts of the workers and peasants to seize the factories and plantations. It tied the masses to the bourgeois nationalist regime of Sukarno and ultimately joined the US-backed military leaders, the future butchers of the masses, in the Sukarno cabinet. After the coup the Stalinists ordered their cadre to enforce Sukarno's appeal for "unity" with the military and to prevent any resistance to the holocaust that was being unleashed. The blow struck to the Indonesian revolution reverberated throughout Asia and around the world. In particular it encouraged and enabled the massive escalation of the US invasion of Vietnam, it crushed the hopes and revolutionary striving of the masses in Malaysia, Thailand, and the Philippines, and it strengthened the hand of the unstable bourgeois regimes in the Indian sub-continent.

### **Mandel and Hansen whitewash Stalinist treachery**

But the response of the Pabloite revisionists of the "United Secretariat," led by Ernest Mandel and Joseph Hansen, was to minimise the magnitude of the great Indonesian betrayal, to whitewash the counter-revolutionary role of the Stalinists, and, above all, to cover up their own responsibility for the bloodbath. While the Indonesian masses were being slaughtered, Professor Mandel attempted to paint the most reassuring picture of the future prospects of the Indonesian revolution, in order to dull the consciousness of the international working class. "Naturally the struggle has not ended in Indonesia," he wrote from the comfort of his Belgian university chair in an article published in the Pabloite journal *World Outlook* on March 11, 1966.

"A part of the Communist cadres have been able to go underground," he went on. "The discontent of the hungry masses is increasing from day to day; the empty stomachs of the workers and peasants are not filled through massacres. The revolt will widen against the corrupt regime. Sukarno understands this and will resume his eternal balancing act; he has just eliminated the most ferocious of the generals from his cabinet. The people will again have their turn." This whitewash of the immense

betrayal of the Indonesian masses demonstrates the counter-revolutionary consequences of Pabloite opportunism, which emerged in the Trotskyist movement from the late 1940s and early 1950s.

Led by Michel Pablo, elements such as Mandel adapted to the post-World War II stabilisation of capitalism and the seeming strengthening of the Stalinist bureaucracies which suppressed the revolutionary upsurge of the international working class in the immediate post-war period. They abandoned Trotsky's struggle for the construction of the Fourth International as the world party of socialist revolution and claimed that the Moscow and Beijing-line Stalinist bureaucracies and parties would be pressured by the masses into playing a progressive role. On this basis, they set out to liquidate the Fourth International into whatever Stalinist or social democratic formation then dominated the labour movement in each country, declaring that the road to socialism consisted of centuries of horribly deformed workers' states of the type established in Eastern Europe and China.

In 1953 this liquidationism was combatted by the formation of the International Committee of the Fourth International in response to an Open Letter issued by American Socialist Workers Party leader James P. Cannon calling for the defence of "orthodox Trotskyism". However, by the early 1960s the SWP leaders themselves had increasingly adapted to the prolonged post-war boom. They hailed the apparent successes of national bourgeoisie and petty bourgeois elements, such as Castro in Cuba, as a substitute for the seizure of power by the working class led by revolutionary Marxist parties, proclaiming that socialism could be achieved through such "blunted instruments". This was the perspective on which they reunified with the Pabloites in 1963 to form the United Secretariat.

Central to the Pabloite renunciation of proletarian revolution was the reactionary objectivist method which presented the struggle for socialism as a quasi-automatic "historical process" achieved through the spontaneous movement of the masses led by whatever political tendencies were at hand, regardless of their class composition and program. Thus the Indonesian "people" would prevail regardless of the terrible crisis of leadership produced by the perfidy of the mass Stalinist party. Sukarno, by now the willing tool of General Suharto, was supposedly muzzling the most ferocious generals. And, even after its unspeakable betrayal, Mandel referred to the PKI as a "Communist" party.

Mandel's snow job was ratified by the "United Secretariat" in a statement issued on March 20, 1966. Its conclusion was that the emergence of General Suharto as the "strong man" of the counter-revolution was of little consequence, because "It is extremely unlikely that the counter-revolutionists now in power in Jakarta will be able to stabilise the situation for any length of time." Today, with Suharto's military junta still riding ruthlessly on the back of Indonesia's oppressed millions, it is crucial to study how the Pabloite opportunists provided the essential political cover for the PKI and the Sukarno regime itself.

The "United Secretariat" statement sowed the most deadly illusion that even General Suharto's American-trained killers would be compelled to act in the interests of the Indonesian masses against imperialism as part of Sukarno's phoney "confrontation" with the newly-formed state of Malaysia: "The army leaders themselves will not

readily give up their nationalist, anti-imperialist verbiage which reflects real conflicts of interest with British imperialism and the ruling comprador bourgeoisie and semi-feudal landowners of Malaysia."

While the Indonesian masses were left leaderless in the face of Suharto's horrific slaughter, the Pabloites loftily declared their confidence that somehow the masses would be victorious. "The masses, though leaderless and deeply shaken, have not lost all fighting potential, particularly in the countryside. It will prove impossible to get the thousands of squatters to evacuate the imperialist-owned or 'nationalised' plantations managed by corrupt army officers, or to compel the thousands of plantation and oil workers to revert to the 'normal' working conditions of colonial times."

Above all, the Pabloites continued to insist that the masses place their trust in the Stalinist leaders of the PKI, arguing that they could be convinced to play a revolutionary role, even after they had strangled every mass movement against the Sukarno regime. "If they succeed in regrouping and in regaining a mass following in some regions of the countryside by calling on the peasants to immediately take over the land held by the landlords, the plantations and army administration, they could gain on a progressive scale due to the inability of the Indonesian reaction to solve the country's basic economic plight and due to the divisions in the ranks of the army which that inability will undoubtedly provoke."

In 1957, and again in 1964-65, the PKI had directed workers and peasants to surrender the factories, banks, oil installations, plantations and other enterprises they had occupied, saving the day for Sukarno and the Indonesian bourgeoisie. Now, the Pabloites claimed, they could play a progressive role. Mandel's article and the "United Secretariat" statement were published, together with an article by a Pabloite member of the PKI, by the US Socialist Workers Party in a pamphlet called "The Catastrophe in Indonesia" dated December 1966. It was complete with an introduction by Joseph Hansen, an SWP leader who had played a poisonous role in the 1963 reunification with the Pabloites. Hansen, subsequently exposed as a Stalinist agent who became an FBI plant in the SWP, was a central instigator in the SWP's 1963 break from the ICFI. Hansen sought to reassure the pamphlet's readers that "one of the new features of world politics today" was "the quickness with which the masses recover from defeats that formerly would have left them prostrate for decades".

The stunning indifference of the Pabloites to the fate of the Indonesian masses was not simply the product of the callousness and contempt for the working class which characterises their fetid petty-bourgeois milieu but was also a bid to cover-up the critical factor in the Indonesian betrayal the role played by the Pabloites themselves and their Indonesian representatives. It is a measure of the cynicism of the Pabloites and their subservience to the Stalinists and the national bourgeoisie that none of the articles and statements published in the 1966 pamphlet so much as mentioned the existence of a section of the "United Secretariat" in Indonesia, let alone explained the part it played in the events leading up to the coup. There was just one brief appeal for the legalisation of and release of all members of the PKI, the Partai Murbah (a social democratic formation) and the Partai Acoma, even though the Acoma party had

relations with the Pabloites at least as early as 1953 and was admitted as a section of the "United Secretariat" in 1960, just as the American SWP was intensifying its unprincipled reunification manoeuvres with the Pabloites.

This fleeting reference to their own members was a guilty attempt by the Pabloites to hide the part that they and their Indonesian proteges played in providing the PKI Stalinists with much-needed credibility throughout the 1950s and 1960s.

### **How Pabloism emerged in Indonesia**

The Partai Acoma originated as a breakaway from the PKI in 1948. By falsely claiming to be Trotskyist, it served to divert and trap working class and peasant opposition to the support of the PKI for the national bourgeois regime of Sukarno. Led by an MP, Ibnu Parna, its programmatic documents presented the PKI as a "Marxist-Leninist party like us." As we shall show, this was a fraud in relation to both the PKI and the Partai Acoma. The need for such a fake "Trotskyist" safety valve was demonstrated by the explosive events of 1948. The collaboration of the PKI leadership in the post-war administrations headed by Sukarno and their acceptance of the Indonesian bourgeoisie's rotten agreements with the Dutch colonialists aroused intense working class opposition.

From July 5, 1947 to January 23, 1948 President Sukarno's Republican administration was headed by Amir Sjarifuddin who was both Prime Minister and Defence Minister. Sjarifuddin was a secret member of the PKI, as was the Deputy Prime Minister and a Minister of State. In addition, two Ministers of State were open members of the PKI. This administration signed the Renville Agreement with the Netherlands which maintained Dutch control of the lion's share of the sugar, rubber, coffee, tea and oil industries, required the withdrawal of guerrilla forces from Dutch-occupied territory and provided for the liquidation of the PKI-led "people's armed units" into the bourgeois "Indonesian National Armed Forces" controlled by Sukarno and his generals. Such was the popular opposition to the acceptance of the US-imposed pact with the Dutch that the government was brought down and replaced by one headed by right-wing Vice-President Hatta as Prime Minister.

Strikes then erupted, demanding a parliamentary government. The PKI leadership supported the suppression of this movement by Sukarno who appealed for "national unity". When this betrayal was opposed by a section of the PKI, the PKI leadership responded savagely, executing the leaders of the opposition faction. Partai Acoma emerged from this dissenting group. While it opposed the PKI leadership, the Acoma party maintained that the Indonesian revolution had to be carried out by the PKI as a "Marxist-Leninist party". Subsequently the Acoma leaders established contact with the "United Secretariat" which encouraged their pro-Stalinist positions and illusions in Maoism.

It is apparent that the Partai Acoma diverted wide layers of workers and peasants looking for an alternative to the class collaborationist program of the PKI. From 1953 to 1955, for example, the Acoma's strength in the 200,000-strong Indonesian Peasants Association (SAKTI) delayed for two years plans by the PKI leadership to merge SAKTI with two PKI-controlled peasants' organisations, the RTI and the BTI.

## Pabloites prepare betrayal

An article published in February 1958 in the Pabloite journal *Quatrieme International* provides a graphic indictment of the role played by Pabloism in opposing the fight for revolutionary Marxist leadership in the working class. The article, "The Indonesian Revolution on the March," by Sal Santen, a close associate of Pablo, was written at the height of the revolutionary convulsions of December 1957, when workers and peasants seized control of Dutch and other imperialist-owned plantations and enterprises.

The article provided a criminal cover for the counter-revolutionary role of the PKI, which ordered the masses to hand over their conquests to the military in order to shore up the Sukarno administration. According to Santen: "It must be added that the Communist militants, the basic and average cadres of the PKI and of the SOBSI, the big Indonesian workers' union organisation, have nothing of the bureaucratic character of Aidit (Communist Party leader) and Co. They are in front; they are the ones who took over the initiative in occupying the factories, the plantations, the banks and the ships. There is no doubt that the most conscious of them are inflamed by the revolutionary audacity of Tan Malakka, by Leon Trotsky's ideas of the permanent revolution."

Acting on this perspective, the Indonesian Pabloites politically disarmed the tens of thousands of workers and peasants who came forward into struggle only to find their way blocked by the PKI. Just at the point when the decisive task was to educate the most class conscious elements in the necessity for an uncompromising struggle against the Stalinist "two-stage" and "bloc of four classes" line of the PKI, and the need for a thorough arming with the program of Permanent Revolution, the Pabloites worked for the opposite.

Opportunist to the core, they equated Trotsky with Tan Malakka, an early PKI leader who opposed the plans for a revolt in 1926 and split from the PKI to form his own organisation. They falsified the Marxist theory of Permanent Revolution, transforming it from a conscious strategy to guide the struggles for the dictatorship of the proletariat into a spontaneously generated perspective.

The central tenant of Trotsky's theory of Permanent Revolution is the perfidy of the national bourgeoisie and their incapacity to lead a real struggle against imperialism. Only the working class can free the masses from national and class oppression, by carrying the socialist revolution and uniting with their class brothers throughout the world in a common struggle to overthrow imperialism internationally.

Such a struggle can only be undertaken consciously under the banner of the Fourth International in an uncompromising struggle against the Stalinist and petty-bourgeois forces, such as the Pabloites, who attempt to disarm the working class and tie it to its own bourgeoisie. In the hands of the Pabloites, the program of Permanent Revolution became a justification for their own adaption to the national bourgeoisie and the Stalinists. The working class did not need its own revolutionary party to come to power because the PKI was the instrument through which the Permanent Revolution was being realised, albeit unconsciously.

Thus, Santen, speaking on behalf of Pablo and Mandel, declared:

"In any case it is clear that **the whole of Indonesia is moving**. The march of the masses has become irreversible although the process remains contradictory and has already reached the stage of **dual power in a good part of Indonesia, and above all in Java**. The occupation of enterprises, of plantations, of the fleet, and the banks by the masses has only one meaning: **It is a question of the classical beginning of the proletarian revolution. The Indonesian revolution is in the act of breaking the limits of the national revolution under a bourgeois nationalist leadership. It develops according to the laws of the permanent revolution.**" (Emphasis in the original)

The Pabloites held out the prospect of a peaceful transition to "worker and peasant power":

"A speedy and almost 'peaceful' victory of the revolution up to worker and peasant power (above all in Java) was possible, if the PKI, at the first moment pushed by the spirit of the masses, had not done everything to castrate the action of the masses by subordinating it to the control of the government."

What the Pabloites meant by "worker and peasant power" was completely opposed to the struggle for the dictatorship of the proletariat. The Pabloites lined up as cheer leaders for the counter-revolutionary Stalinist "two-stage" perspective of demanding that the proletariat give up the struggle for socialist revolution.

To sanctify their opposition to the independent mobilisation of the working class and to the forging of a revolutionary proletarian, that is, Trotskyist, party, the Pabloites insisted that the PKI, despite its betrayal of the December 1957 occupations, would be pressured to the left by the masses:

"At the same time, at each aggravation of the situation, the masses have the tendency to push the SOBSI and PKI further. A great deal will now depend on the boldness, on the revolutionary Marxist understanding of the militants, of the average Communist cadres. We feel completely solidarised with them, inspired and enthused by their initiatives, by their boldness which we passionately hope will not stop before the 'taboos' of the Aidits. We salute the Indonesian Trotskyist cadres who are integrated in the PKI with the correct revolutionary perspective that the radicalisation of the masses will be realised above all through the PKI and SOBSI."

This was the greatest crime of Pabloism the liquidation of Trotskyist cadre, and those who were attracted to Trotskyism, into the camp of Stalinism.

Santen added a footnote to emphasise that this treacherous line was advanced in direct opposition to the struggle waged by the International Committee of the Fourth International since its founding in 1953 to defend Trotskyism against Pabloite liquidationism. Santen specifically denounced the ICFI's fight for the construction of sections of the Fourth International to defeat counter-revolutionary Stalinism:

"In contradiction to some sectarian 'orthodox' people, the International does not let itself be fascinated by the reactionary Stalinist policy, but orients itself, above all, on the dynamism of the situation itself, a dynamism that pushes the masses, and



through the masses the PKI itself into contradiction with the present order in Indonesia."

This passage should be burned into the consciousness of every worker as the summation of Pabloism's pro-Stalinist dirty work.

In direct struggle against the ICFI, the Pabloites consciously pushed fatal illusions in the PKI Stalinists, precisely at the point where the burning question of the hour was to expose the criminal role of the Stalinists and resolutely fight for a decisive break by the masses from the PKI to construct a revolutionary Trotskyist leadership.

The protracted and implacable struggle waged against the Pabloite opportunists by the ICFI, which appeared for many years to be a fight taken up by small isolated forces in the Fourth International, was a life and death question for millions of Indonesian workers and peasants.

### **Counter-revolutionary handmaidens**

Within weeks of Santen's lines being penned, the rotten fruits of the PKI's betrayal of the December 1957 movement began to emerge. A counter-revolutionary government was formed in Central Sumatra in February 1958 by coup leader Colonel Achmed Hussein and headed by Dr Sjafruddin Prawiranegara. This CIA-backed operation, only possible because of the PKI's disarming of the December 1957 rebellion, was a test run for the bloody coup that was to take place seven years later.

Fully conscious that this was a dress rehearsal for counter-revolution, the response of the Pabloites was to intensify their wretched boosting of the PKI. *Quatrieme International's* editor added a footnote which climaxed with the following purple passage:

"Since the 'rebels' main aim is to do away with Sukarno's 'guided democracy' in which is included the PKI, then any compromise will be at the expense of the PKI. In this case, the immediate perspective is that the PKI, under mass pressure, will be obliged, willy nilly, to execute a major policy about-face as was performed by the Chinese Communist Party in a similar situation in 1949, and to go past the bourgeois-nationalist stage of the revolution to the socialist stage of workers' power. Thus, in fact, but again without acknowledgement, operating on the basis of, and validating the Trotskyist theory of permanent revolution."

Thus the PKI, the hangman of the Indonesian revolution, was depicted as the unwitting instrument of the Permanent Revolution!

Added to this was the lie that the Chinese Stalinists, the mentors of Aidit and the other PKI leaders, had carried through the "socialist stage of workers' power" in 1949. In fact, the peasant armies of the Maoists brutally suppressed the proletarian uprising in 1949, murdered the Trotskyist opposition, and established an extremely deformed workers' state based on the Stalinist perspective of a partnership with the national bourgeoisie, the urban petty bourgeoisie and the peasantry. This was indeed the model upon which the PKI leadership based itself.

Not content with glorifying the Stalinists, the editor's special footnote then promoted the prospects of the national bourgeoisie undertaking a progressive transformation



as well. It suggested an alternative scenario premised on the Sukarno government leading a struggle against the CIA-organised "rebels":

"In the other event, that the Sukarno government takes a stronger line of opposition and resistance to the 'rebels,' a further polarisation of all the bourgeois and semi-feudal counter-revolutionary forces will be seen; confronting a shadow bourgeois-nationalist government and the masses. This confrontation of the masses against the new 'slaveholders' rebellion,' against the new 'Kornilov putsch,' will mean a new upsurge of the revolution, while the experience of this kind of revolutionary action by the masses will leave little chance of a relapse to the stability of a bourgeois nationalist regime."

The events of October 1965 were to prove the Sukarno regime to be no less accommodating to General Suharto's killers than the Kerensky government was to General Kornilov's coup bid in 1917. Sukarno displayed the essence of bourgeois nationalism by ending his political career as a puppet President for Suharto's military junta.

The conclusion of the editor's footnote should be inscribed on the tombstone of Pabloism: "In either case our optimistic perspective is justified. **The Indonesian Revolution is on the march! Its victory as a socialist revolution is now in generation.** (Emphasis in original)

From 1957 to 1965 the Pabloites internationally perpetrated this objectivist cover-up of the grave dangers confronting the Indonesian revolution.

The work of the Pabloite section in Indonesia was central to the whole Pabloite world perspective. It was discussed intensively at the so-called Fifth World Congress of the "United Secretariat" in 1957.

"Our Fifth World Congress, in discussing the progress and the road of the world colonial revolution, gave serious attention to the developments in Indonesia. Recognising the Indonesian situation as pre-revolutionary, it expected a revolutionary explosion very soon," declared the article by Santen. The entire Pabloite "United Secretariat" has blood on its hands. They aided and abetted the Stalinist betrayal of the Indonesian workers and peasants.

### **Chapter Five**

Pabloites cover up Stalinist treachery

The crisis of working class leadership was never posed so sharply as in Indonesia between 1963 and 1965. The fate of the Indonesian workers and peasants depended entirely on overcoming and defeating the counter-revolutionary line of the Indonesian Communist Party (PKI) which bound the working class hand and foot to the tottering bourgeois nationalist regime of Sukarno while the US-backed military prepared for a bloody coup. The PKI Stalinists, led by general secretary Aidit, repeatedly demanded that workers and peasants hand back factories and plantations which they had seized. They then joined the army generals in taking cabinet posts in the Suharto government and backed the outlawing of workers' strikes.

The more it became obvious that the generals were preparing for a bloody coup, the more the PKI leaders worked feverishly to assure the bourgeoisie and the military that the PKI opposed the revolutionary mobilisation of the masses.

Aidit repeatedly declared that the state power in Indonesia did not have to be smashed but could be reformed from within to "strengthen and consolidate the pro-people's aspect," which included President Sukarno. The PKI leader gave lectures at army colleges in which he heralded a "feeling of mutuality and unity that daily grows strong between all the armed forces of the Indonesian Republic and the various groups of Indonesian people, including the communists".

The PKI leadership could only advance these positions because the Indonesian Pabloites were working equally feverishly to prevent workers from breaking with the Stalinists. They vehemently opposed the construction of a new revolutionary leadership.

The responsibility for the bloody counter-revolutionary consequences of this line can be traced directly to the 1963 Pabloite Reunification Congress at which the American Socialist Workers Party consummated an unprincipled break from the International Committee of the Fourth International and joined the Pabloite "United Secretariat" of Ernest Mandel.

After leading the struggle against Pabloite liquidationism in 1953, the SWP leaders had in the late 1950s increasingly adapted to the pressure of the protracted post-war boom and the apparent quiescence of the working class. They abandoned the struggle for proletarian revolution led by a Bolshevik-type party and sought "regroupment" with petty bourgeois radicals and disaffected Stalinists. In 1963 they joined hands with the Pabloites in claiming that not only the Stalinist parties, such as the PKI, but also the bourgeois nationalist and petty-bourgeois nationalist forces in the backward countries, such as Castro in Cuba and Sukarno in Indonesia, could become vehicles for the establishment of socialism.

The reunification resolution declared that there was no crisis of revolutionary leadership in the oppressed countries: "In the colonial and semi-colonial countries ... the very weakness of capitalism, the whole peculiar socio-economic structure produced by imperialism, the permanent misery of the big majority of the population in the absence of a radical agrarian revolution, the stagnation and even reduction of living standards while industrialisation nevertheless proceeds relatively rapidly, creates situations in which the failure of one revolutionary wave does not lead automatically to relative or even temporary social or economic stabilisation. A seemingly inexhaustible succession of mass struggles continues, such as Bolivia has experienced for 10 years."

In other words, no matter how crushing were the defeats and betrayals inflicted on the masses, they would rise again. There was no need for a Trotskyist party. The criminal character of this opportunist complacency was soon to be spelt out in the blood of the Indonesian masses.

The 1963 conference was based on the rejection of the historical necessity of building sections of the Trotskyist movement in the backward countries. The Pabloite

resolution declared: "The weakness of the enemy in the backward countries has opened the possibility of coming to power even with blunted instruments." In Indonesia, the "blunted instrument" was to be the PKI.

### **The great betrayal in Sri Lanka**

The Pabloite treachery in Indonesia was intimately bound up with the great betrayal in Sri Lanka in 1964 when the Lanka Sama Samaja Party (LSSP), the Pabloite organisation, joined the bourgeois coalition government of Mrs Bandaranaike, together with the Stalinist Communist Party of Sri Lanka, in order to behead the mass working class movement against capitalist rule.

The LSSP had opposed the formation of the International Committee in 1953 and subsequently played a central role in preparing the American SWP's reunification with the Pabloites. Its opposition to the struggle against opportunism in the Fourth International was rooted in its increasingly nationalist orientation and abandonment of Trotskyist program and principles in order to accommodate with the Stalinists and Bandaranaike's capitalist party, the SLFP, in Ceylon.

The Pabloite Reunification Congress of 1963 covered up the LSSP's national opportunism by claiming that "Our Ceylonese section has progressively corrected the wrong orientation adopted in 1960 of supporting the liberal-bourgeois government of the SLFP. Since the masses began to go into action, it has not hesitated to place itself at their head against its electoral allies of yesterday." Just one year later the fake "Trotskyist" credentials supplied by the Pabloites were used by the LSSP to join the capitalist government.

This betrayal by a party hailed by the Pabloites as the "largest Trotskyist party in the world" had disastrous implications internationally, first of all in Indonesia. It strengthened the hand of the Stalinist and Maoist parties, such as the PKI, whose capacity to suppress and disarm the working class would have been shattered had the LSSP upheld the program of permanent revolution and fought for the overthrow of bourgeois rule in Sri Lanka.

### **Pabloites boost PKI**

After the entry of their Sri Lankan section into the capitalist government in Sri Lanka alongside the Stalinists, the Pabloites continued to pursue a very similar pro-Stalinist and pro-national bourgeois line in Indonesia. The Pabloites' pamphlet, *The Catastrophe in Indonesia*, not only covered up the part played by the Indonesian Pabloite section, the Partai Acoma, as we exposed in the previous chapter. Even after the bloody coup in Indonesia, the pamphlet continued to promote the prospect of the national bourgeoisie and the PKI playing a progressive role.

It included an article by T. Soedarso, described by US Socialist Workers Party leader Joseph Hansen in the pamphlet's introduction as a "young member of the Indonesian Communist party who succeeded in making his way into exile". Hansen enthusiastically commended Soedarso's article as "an indication of the determination of an important sector of the Indonesian Communist Party to learn from what happened and to utilise the lessons in such a way as to ensure victory when the masses again surge forward, as they surely will".

Soedarso's article treated the counter-revolutionary program of the PKI leadership as a series of "mistakes", including the "errors" of "seeking to achieve socialism by peaceful means," and of pursuing a "policy" of a two-stage revolution and a united front with the national bourgeoisie.

Soedarso expressed no fundamental differences with the Stalinists, agreeing, for example, that "The revolutionary movement could and should support the progressive attitudes or actions of the national bourgeoisie". If ever proof was needed that the semi-colonial bourgeoisie, personified by Sukarno, was inherently incapable of a "progressive" program and would line up behind the slaughter of the working class, the Indonesian bloodbath provided it. For 18 months Sukarno served General Suharto's dictatorship as a puppet president, and even after that, from March 1967, he was retained as a token "president without powers".

The Pabloites likewise belittled the significance of the PKI's entry into the Sukarno NASAKOM coalition government with the military butchers. Soedarso implored the PKI to reverse this "line," as if it were a mere lapse.

Soedarso's virtual apology for this fundamental class treachery was no accident. The cardinal premise of Pabloism was the reversal of Trotsky's struggle against Stalinism. The evolution of Stalinism into a counter-revolutionary bureaucracy was established irrevocably in 1933 when the Stalinist Comintern, approved, without a single dissenting voice, the betrayal of the German Communist Party in handing over the German working class to Hitler without a shot being fired. From that point on Trotsky insisted that the Third International, following the Second, had passed definitely into the camp of the bourgeoisie, and that the Fourth International had to built as the world party of socialist revolution to ensure the continuity of Marxism.

Soedarso's article was a conscious cover-up, organised by Mandel and Hansen, for the reactionary role of Stalinism. The article deliberately did not use the word Stalinism, but fraudulently referred to the PKI as "Communist". And then to make his position crystal clear, Soedarso concluded: "The above criticism is not intended to undermine the role of the PKI nor to arouse distrust in Indonesian Communism."

Thus, a year after the military coup, by which time a million workers and peasants had perished, the Pabloites were whitewashing the lessons of 1965 and still urging the Indonesian workers and peasants to maintain their faith in the PKI.

### **The Pabloite 'lessons' of Indonesia**

Soedarso's article was not an isolated instance. In fact the line advanced in the article provided the essential themes for the statement issued on March 20, 1966 by the Pabloite "United Secretariat". Entitled "*The Lesson of Indonesia*," it opposed any break from the PKI and issued no call for the building of a section of the Fourth International. On the contrary, it declared that the "Indonesian Communists" could "overcome the results of the present defeat" by assimilating certain lessons.

The first "lesson" was stated as follows: "While it is correct and necessary to support all anti-imperialist mass movements, and even to critically support all concrete anti-imperialist measures taken by representatives of the colonial bourgeoisie like Sukarno, for colonial revolution to be victorious it is absolutely essential to maintain

the proletarian organisations strictly independent politically and organisationally from the 'national' bourgeoisie." Not only did the Pabloites continue to sow the most dangerous illusions in the "anti-imperialist" pretensions of the national bourgeoisie, their talk of "independent" proletarian organisations was an utter fraud. The political independence of the working class could only be forged by building a Trotskyist party in pitiless and audacious struggle against the Stalinists whom the Pabloites were trying to resuscitate.

The second Pabloite "lesson" claimed that "While it is correct and necessary during the first phases of the revolution in backward countries to place the main stress on the problems of winning national independence, unifying the country and solving the agrarian question (i.e., the historical tasks of the bourgeois democratic revolution which constitute the most burning tasks in the eyes of 80 to 90 percent of the population), it is indispensable to understand that the solution of these tasks is only possible when the working class, in alliance with the poor peasantry, has conquered leadership of the revolution, establishes the dictatorship of the proletariat and the poor peasantry and pushes the revolution through to its socialist phase."

With this opportunist line of "two phases," the Pabloites were trying to breathe new life into the discredited "two stage" theory of the Stalinists, which demanded that the "socialist phase" of the revolution be delayed until the completion of the democratic and national revolution. The Pabloite position was the opposite of Trotsky's theory of Permanent Revolution which was based on the international character of the socialist revolution and the revolutionary role of the international proletariat. Trotsky emphasised the essential lesson of the Russian revolution that, in this epoch, the democratic and national tasks in the backward and oppressed countries could be achieved only through the proletarian revolution and its extension on the world scale.

The Pabloite call for the "dictatorship of the proletariat and poor peasantry" sought to revive the "Old Bolshevik" formula of the "democratic dictatorship of the proletariat and peasantry" discarded by Lenin in 1917. Lenin adopted Trotsky's unequivocal position that the proletariat is the only consistently revolutionary class which can lead the peasants and carry through the democratic and socialist tasks of the oppressed nations as part of the struggle of the working class on a world scale.

The third "lesson" advanced by the Pabloites was: "While it is necessary to win the broadest possible mass base in the countryside, a revolutionary party capable of applying that policy must be based upon a hardened proletarian cadre thoroughly trained in Marxist theory and revolutionary practice." The duplicitous character of this "lesson" can be seen from the fact that it was oriented toward the Stalinists. The references to a "hardened proletarian cadre" and "Marxist theory" were a sham. In fact, the "United Secretariat" advised the survivors of the PKI leadership to take the road of rural guerrilla warfare.

Its statement expressed the hope that "what remains of that leadership along with the surviving party cadres especially the best educated, those steeled by the terrible experiences they went through in the past six months will have taken the road of guerrilla war, if only out of self-defence.

They urged the Stalinists to turn to a peasant-based guerrilla war, aping the Maoists in China. Maoism is a variant of Stalinism based on peasant hostility to the hegemony of the working class. Arising out the defeat of the 1926-27 Chinese revolution and the destruction of the Chinese Communist Party's working class membership, Mao's turn to the peasantry led to the abortion of the 1949 Chinese revolution. It produced a highly deformed workers' state based on Mao's "bloc of four classes" the national bourgeoisie, the urban petty-bourgeoisie, the peasantry and the working class.

It was this very doctrine which guided the determination of the Aidit leadership of the PKI to prevent a proletarian socialist revolution in Indonesia. In Aidit's words: "The working class, the peasants, the petty bourgeoisie and the national bourgeoisie must unite in one national front."

The Pabloites' pamphlet was a cynical bid to divert class conscious workers from the most essential lesson of the Indonesian betrayal the necessity for a Trotskyist party to defeat the Stalinists and their Pabloite accomplices who function as counter-revolutionary petty-bourgeois agencies within the mass movement. There was and is only one revolutionary party which can avenge the betrayal of 1965 by leading the Indonesian workers to power an Indonesian section of the International Committee of the Fourth International.

## Conclusion

In 1951 the PKI leadership had set out clearly the path of betrayal it was to pursue. "In the struggle to realise their political convictions, the communists will not use force while the ruling class still leaves the peaceful, the parliamentary way open. If there is the use of force, the spilling of blood, a civil war, it will not be the communists who start it but the ruling class itself."

This counter-revolutionary perspective was only able to be inflicted on the Indonesian masses because the Pabloites tied the most class conscious sections of the working class to the banner and program of the PKI. The Pabloite betrayals in Sri Lanka and Indonesia demonstrated the counter-revolutionary character of Pabloism. As the International Committee of the Fourth International stated in its 1988 perspectives resolution, *The World Capitalist Crisis and the Tasks of the Fourth International*,:

"In the assistance it rendered to Stalinism, social democracy and bourgeois nationalism, the opportunism of the Pabloite centrists played a vital role in enabling imperialism to survive the crucial years between 1968 and 1975 when its world order was shaken by economic turmoil and an international upsurge of the working class and the oppressed masses in the backward countries. It verified Trotsky's assessment of centrism as a secondary agency of imperialism. The petty-bourgeois defeatists who pontificate on the doomed character of the proletariat while discovering new vistas for the bourgeoisie never bother to concretely analyse how decrepit capitalism survived into the 1980s. The Pabloites care least of all to examine the results of their own policies. Inasmuch as the entire petty-bourgeois fraternity of centrists, radicals and declassed intellectuals dismiss a priori the revolutionary capacities of the working class and accept its defeat as inevitable, they never even consider what the consequences of a correct Marxist policy would have been in Sri

Lanka in 1964, in France in 1968, in Chile in 1973, and in Greece and Portugal in 1974.

"The International Committee, on the other hand, derives from the strategical experiences of the proletariat during the postwar period the crucial lesson upon which it bases its preparation for the coming revolutionary upheavals: *that the building of the Fourth International as the World Party of Socialist Revolution to ensure the victory of the international working class requires an uncompromising and unrelenting struggle against opportunism and centrism.*"

A new revolutionary leadership must be built to lead the Indonesian masses to smash the Suharto dictatorship, overthrow the bourgeoisie and throw off the yoke of imperialist exploitation in the fight for the world socialist revolution. Against the Stalinists and Pabloites who are preparing another bloody trap for the masses, an Indonesian section of the ICFI must be forged to lead this struggle.

(c) 1998 by World Socialist Web Site (TM)

All rights reserved

This article is from *Pacific Affairs*, 58, Summer 1985, pages 239-264. Peter Dale Scott is a professor of English at the University of California in Berkeley, and a member of the advisory board at Public Information Research.

See also: "CIA Compiled Indonesian Death Lists in 1965" at <http://www.pir.org/kadane.html>

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## **BENEDICT ANDERSON**

### **PETRUS DADI RATU**

Deliberately exploits the name of Semar, magically powerful figure in Ja In the early 1930s, Bung Karno [Sukarno] was hauled before a Dutch colonial court on a variety of charges of 'subversion'. He was perfectly aware that the whole legal process was prearranged by the authorities, and he was in court merely to receive a heavy sentence. Accordingly, rather than wasting his time on defending himself against the charges, he decided to go on the attack by laying bare all aspects of the racist colonial system. Known by its title 'Indonesia Accuses!' his defence plea has since become a key historical document for the future of the Indonesian people he loved so well.

Roughly forty-five years later, Colonel Abdul Latief was brought before a special military court—after thirteen years in solitary confinement, also on a variety of charges of subversion. Since he, too, was perfectly aware that the whole process was prearranged by the authorities, he followed in Bung Karno's footsteps by turning his defence plea into a biting attack on the New Order, and especially on the cruelty, cunning and despotism of its creator. It is a great pity that this historic document has

had to wait twenty-two years to become available to the Indonesian people whom he, also, loves so well. [1] But who is, and was, Abdul Latief, who in his youth was called Gus Dul? While still a young boy of fifteen, he was conscripted by the Dutch for basic military training in the face of an impending mass assault by the forces of Imperial Japan. However, the colonial authorities quickly surrendered, and Gus Dul was briefly imprisoned by the occupying Japanese.

Subsequently, he joined the Seinendan and the Peta in East Java. [2] After the Revolution broke out in 1945, he served continuously on the front lines, at first along the perimeter of Surabaya, and subsequently in Central Java. Towards the end he played a key role in the famous General Assault of March 1, 1949 on Jogjakarta [the revolutionary capital just captured by the Dutch]: directly under the command of Lieutenant-Colonel Suharto. After the transfer of sovereignty in December 1949, Latief led combat units against various rebel forces: the groups of Andi Azis and Kahar Muzakar in South Sulawesi; the separatist Republic of the South Moluccas; the radical Islamic Battalion 426 in Central Java, the Darul Islam in West Java, and finally the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia [CIA-financed and armed rebellion of 1957–58] in West Sumatra. He was a member of the second graduating class of the Staff and Command College (Suharto was a member of the first class). Finally, during the Confrontation with Malaysia, he was assigned the important post of Commander of Brigade 1 in Jakarta, directly under the capital's Territorial Commander, General Umar Wirahadikusumah. In this capacity he played an important, but not central, role in the September 30th Movement of 1965. From this sketch it is clear that Gus Dul was and is a true-blue combat soldier, with a psychological formation typical of the nationalist freedom-fighters of the Independence Revolution, and an absolute loyalty to its Great Leader. [3]

His culture? The many references in his defence speech both to the Koran and to the New Testament indicate a characteristic Javanese syncretism. Standard Marxist phraseology is almost wholly absent. And his accusations? The first is that Suharto, then the Commander of the Army's Strategic Reserve [Kostrad], was fully briefed beforehand, by Latief himself, on the Council of Generals plotting Sukarno's overthrow, and on the September 30th Movement's plans for preventive action. General Umar too was informed through the hierarchies of the Jakarta Garrison and the Jakarta Military Police. This means that Suharto deliberately allowed the September 30th Movement to start its operations, and did not report on it to his superiors, General Nasution and General Yani. [4] By the same token, Suharto was perfectly positioned to take action against the September 30th Movement, once his rivals at the top of the military command structure had been eliminated. Machiavelli would have applauded.

We know that Suharto gave two contradictory public accounts of his meeting with Latief late in the night of September 30th at the Army Hospital. Neither one is plausible. To the American journalist Arnold Brackman, Suharto said that Latief had come to the hospital to 'check' on him (Suharto's baby son Tommy was being treated for minor burns from scalding soup). But 'checking' on him for what? Suharto did not say. To *Der Spiegel* Suharto later confided that Latief had come to kill him, but lost his nerve because there were too many people around (as if Gus Dul only then realized that hospitals are very busy places!). The degree of Suharto's commitment



to truth can be gauged from the following facts. By October 4, 1965, a team of forensic doctors had given him directly their detailed autopsies on the bodies of the murdered generals. The autopsies showed that all the victims had been gunned down by military weapons. But two days later, a campaign was initiated in the mass media, by then fully under Kostrad control, to the effect that the generals' eyes had been gouged out, and their genitals cut off, by members of Gerwani [the Communist Party's women's affiliate]. These icy lies were planned to create an anti-communist hysteria in all strata of Indonesian society.

Other facts strengthen Latief's accusation. Almost all the key military participants in the September 30th Movement were, either currently or previously, close subordinates of Suharto: Lieutenant-Colonel Untung, Colonel Latief, and Brigadier-General Supardjo in Jakarta, and Colonel Suherman, Major Usman, and their associates at the Diponegoro Division's HQ in Semarang. When Untung got married in 1963, Suharto made a special trip to a small Central Javanese village to attend the ceremony. When Suharto's son Sigit was circumcised, Latief was invited to attend, and when Latief's son's turn came, the Suharto family were honoured guests. It is quite plain that these officers, who were not born yesterday, fully believed that Suharto was with them in their endeavour to rescue Sukarno from the conspiracy of the Council of Generals. Such trust is incomprehensible unless Suharto, directly or indirectly, gave his assent to their plans. It is therefore not at all surprising that Latief's answer to my question, 'How did you feel on the evening of October 1st?'—Suharto had full control of the capital by late afternoon—was, 'I felt I had been betrayed.'

Furthermore, Latief's account explains clearly one of the many mysteries surrounding the September 30th Movement. Why were the two generals who commanded directly all the troops in Jakarta, except for the Presidential Guard—namely Kostrad Commander Suharto and Jakarta Military Territory Commander Umar—not 'taken care of' by the September 30th Movement, if its members really intended a coup to overthrow the government, as the Military Prosecutor charged? The reason is that the two men were regarded as friends. A further point is this. We now know that, months before October 1, Ali Murtopo, then Kostrad's intelligence chief, was pursuing a foreign policy kept secret from both Sukarno and Yani. Exploiting the contacts of former rebels, [5] clandestine connexions were made with the leaderships of two then enemy countries, Malaysia and Singapore, as well as with the United States. At that time Benny Murdani [6] was furthering these connexions from Bangkok, where he was disguised as an employee in the local Garuda [Indonesian National Airline] office. Hence it looks as if Latief is right when he states that Suharto was two-faced, or, perhaps better put, two-fisted. In one fist he held Latief–Untung–Supardjo, and in the other Murtopo–Yoga Sugama [7]–Murdani.

The second accusation reverses the charges of the Military Prosecutor that the September 30th Movement intended to overthrow the government and that the Council of Generals was a pack of lies. Latief's conclusion is that it was precisely Suharto who planned and executed the overthrow of Sukarno; and that a Council of Generals did exist—composed not of Nasution, Yani, et al., but rather of Suharto and his trusted associates, who went on to create a dictatorship based on the Army which lasted for decades thereafter. Here once again, the facts are on Latief's side.

General Pranoto Reksoasudro, appointed by President/Commander-in-Chief Sukarno as acting Army Commander after Yani's murder, found his appointment rejected by Suharto, and his person soon put under detention. Aidit, Lukman and Nyoto, the three top leaders of the Indonesian Communist Party, then holding ministerial rank in Sukarno's government, were murdered out of hand. And although President Sukarno did his utmost to prevent it, Suharto and his associates planned and carried out vast massacres in the months of October, November and December 1965. As Latief himself underlines, in March 1966 a 'silent coup' took place: military units surrounded the building where a plenary cabinet meeting was taking place, and hours later the President was forced, more or less at gunpoint, to sign the super-murky Supersemar. [8] Suharto immediately cashiered Sukarno's cabinet and arrested fifteen ministers. Latief's simple verdict is that it was not the September 30th Movement which was guilty of grave and planned insubordination against the President, ending in his overthrow, but rather the man whom young wags have been calling Mr. TEK. [9]

Latief's third accusation is broader than the others and just as grave. He accuses the New Order authorities of extraordinary, and wholly extra-legal, cruelty. That the Accuser is today still alive, with his wits intact, and his heart full of fire, shows him to be a man of almost miraculous fortitude. During his arrest on October 11, 1965, many key nerves in his right thigh were severed by a bayonet, while his left knee was completely shattered by bullets (in fact, he put up no resistance). In the Military Hospital his entire body was put into a gypsum cast, so that he could only move his head. Yet in this condition, he was still interrogated before being thrust into a tiny, dank and filthy isolation cell where he remained for the following thirteen years. His wounds became gangrenous and emitted the foul smell of carrion. When on one occasion the cast was removed for inspection, hundreds of maggots came crawling out. At the sight, one of the jailers had to run outside to vomit. For two and a half years Latief lay there in his cast before being operated on. He was forcibly given an injection of penicillin, though he told his guards he was violently allergic to it, with the result that he fainted and almost died. Over the years he suffered from haemorrhoids, a hernia, kidney stones, and calcification of the spine. The treatment received by other prisoners, especially the many military men among them, was not very different, and their food was scarce and often rotting. It is no surprise, therefore, that many died in the Salemba Prison, many became paralytics after torture, and still others went mad. In the face of such sadism, perhaps even the Kempeitai [10] would have blanched. And this was merely Salemba—one among the countless prisons in Jakarta and throughout the archipelago, where hundreds of thousands of human beings were held for years without trial. Who was responsible for the construction of this tropical Gulag?

History textbooks for Indonesia's schoolchildren speak of a colonial monster named Captain 'Turk' Westerling. They usually give the number of his victims in South Sulawesi in 1946 as forty thousand. It is certain that many more were wounded, many houses were burned down, much property looted and, here and there, women raped. The defence speech of Gus Dul asks the reader to reflect on an ice-cold 'native' monster, whose sadism far outstripped that of the infamous Captain. In the massacres of 1965–66, a minimum of six hundred thousand were murdered. If the

reported deathbed confession of Sarwo Edhie to Mas Permadi is true, the number may have reached over two million. [11] Between 1977 and 1979, at least two hundred thousand human beings in East Timor died before their time, either killed directly or condemned to planned death through systematic starvation and its accompanying diseases. Amnesty International reckons that seven thousand people were extra-judicially assassinated in the Petrus Affair of 1983. [12] To these victims, we must add those in Aceh, Irian, Lampung, Tanjung Priok and elsewhere. At the most conservative estimate: eight hundred thousand lives, or twenty times the 'score' of Westerling. And all these victims, at the time they died, were regarded officially as fellow-nationals of the monster.

Latief speaks of other portions of the national tragedy which are also food for thought. For example, the hundreds of thousands of people who spent years in prison, without clear charges against them, and without any due process of law, besides suffering, on a routine basis, excruciating torture. To say nothing of uncountable losses of property to theft and looting, casual, everyday rapes, and social ostracism for years, not only for former prisoners themselves, but for their wives and widows, children, and kinfolk in the widest sense. Latief's *J'accuse* was written twenty-two years ago, and many things have happened in his country in the meantime. But it is only now perhaps that it can acquire its greatest importance, if it serves to prick the conscience of the Indonesian people, especially the young. To make a big fuss about the corruption of Suharto and his family, as though his criminality were of the same gravity as Eddy Tansil's, [13] is like making a big fuss about Idi Amin's mistresses, Slobodan Milošević's speculations, or Adolf Hitler's kitschy taste in art. That Jakarta's middle class, and a substantial part of its intelligentsia, still busy themselves with the cash stolen by 'Father Harto' (perhaps in their dreams they think of it as 'our cash') shows very clearly that they are still unprepared to face the totality of Indonesia's modern history. This attitude, which is that of the ostrich that plunges its head into the desert sands, is very dangerous. A wise man once said: Those who forget/ignore the past are condemned to repeat it. Terrifying, no?

Important as it is, Latief's defence, composed under exceptional conditions, cannot lift the veil which still shrouds many aspects of the September 30th Movement and its aftermath. Among so many questions, one could raise at least these. Why was Latief himself not executed, when Untung, Supardjo, Air Force Major Suyono, and others had their death sentences carried out? Why were Yani and the other generals killed at all, when the original plan was to bring them, as a group, face-to-face with Sukarno? Why did First Lieutenant Dul Arief of the Presidential Guard, who actually led the attacks on the generals' homes, subsequently vanish without a trace? How and why did all of Central Java fall into the hands of supporters of the September 30th Movement for a day and a half, while nothing similar occurred in any other province? Why did Colonel Suherman, Major Usman and their associates in Semarang also disappear without a trace? Who really was Syam alias Kamaruzzaman [14] —former official of the Recomba of the Federal State of Pasundan, [15] former member of the anti-communist Indonesian Socialist Party, former intelligence operative for the Greater Jakarta Military Command at the time of the huge smuggling racket run by General Nasution and General Ibnu Sutowo out of Tanjung Priok, as

well as former close friend of D. N. Aidit? Was he an army spy in the ranks of the Communists? Or a Communist spy inside the military? Or a spy for a third party? Or all three simultaneously? Was he really executed, or does he live comfortably abroad with a new name and a fat wallet?

Latief also cannot give us answers to questions about key aspects of the activities of the September 30th Movement, above all its political stupidities. Lieutenant-Colonel Untung's radio announcement that starting from October 1st, the highest military rank would be the one he himself held, automatically made enemies of all the generals and colonels in Indonesia, many of whom held command of important combat units. Crazy, surely? Why was the announced list of the members of the so-called Revolutionary Council so confused and implausible? [16] Why did the Movement not announce that it was acting on the orders of President Sukarno (even if this was untrue), but instead dismissed Sukarno's own cabinet? Why did it not appeal to the masses to crowd into the streets to help safeguard the nation's head? It passes belief that such experienced and intelligent leaders as Aidit, Nyoto and Sudisman [17] would have made such a string of political blunders. Hence the suspicion naturally arises that this string was deliberately arranged to ensure the Movement's failure. Announcements of the kind mentioned above merely confused the public, paralysed the masses, and provided easy pretexts for smashing the September 30th Movement itself. In this event, who really set up these bizarre announcements and arranged for their broadcast over national radio?

Most of the main actors in, and key witnesses to, the crisis of 1965, have either died or been killed. Those who are still alive have kept their lips tightly sealed, for various motives: for example, Umar Wirahadikusumah, Omar Dhani, Sudharmono, Rewang, M. Panggabean, Benny Murdani, Mrs. Hartini, Mursyid, Yoga Sugama, Andi Yusuf and Kemal Idris. [18] Now that thirty-five years have passed since 1965, would it not be a good thing for the future of the Indonesian nation if these people were required to provide the most detailed accounts of what they did and witnessed, before they go to meet their Maker?

According to an old popular saying, the mills of God grind slowly but very fine. The meaning of this adage is that in the end the rice of truth will be separated from the chaff of confusion and lies. In every part of the world, one day or another, long-held classified documents, memoirs in manuscript locked away in cabinets, and diaries gathering dust in the attics of grandchildren will be brought to His mill, and their contents will become known to later generations. With this book of his, 'shut away' during twenty-one years of extraordinary suffering, Abdul Latief, with his astonishing strength, has provided an impressive exemplification of the old saying. Who knows, some day his accusations may provide valuable material for the script of that play in the repertoire of the National History Shadow-Theatre which is entitled . . . well, what else could it be?—Petrus Becomes King.

*In traditional Javanese shadow-theatre, Petruk Dadi Ratu is a rollicking farce in which Petruk, a well-loved clown, briefly becomes King, with predictably hilarious and grotesque consequences. For Petrus, read Killer—see note 12 above. Suharto notoriously saw himself as a new kind of Javanese monarch, thinly disguised as a President of the Republic of Indonesia.*

- [1] Kolonel Abdul Latief, *Soeharto Terlibat G30S—Pledoi Kol. A. Latief [ Suharto was Involved in the September 30 Movement—Defence Speech of Colonel A. Latief ]* Institut Studi Arus Informasi: Jakarta 2000, 285 pp.
- [2] Respectively: paramilitary youth organization and auxiliary military apparatus set up by the Japanese.
- [3] Ironic reference to the title Sukarno gave himself in the early 1960s.
- [4] Nasution was Defence Minister and Chief of Staff of the Armed Forces, Yani Army Chief of Staff. Yani was killed on October 1, and Nasution just escaped with his life.
- [5] From the 1957–58 civil war, when these people were closely tied to the CIA as well as the Special Branch in Singapore and Malaya.
- [6] he legendary Indonesian military intelligence czar of the 1970s and 1980s.
- [7] A Japanese-trained high-ranking intelligence officer.
- [8] Acronym for Surat Perintah Sebelas Maret, Decree of March 11, which turned over most executive functions *ad interim* to Suharto; the acronym vanese shadow puppet theatre.
- [9] ‘Thug Escaped from Kemusu’: the Suharto regime regularly named all its supposed subversive enemies as GPK, Gerakan Pengacau Keamanan, or Order-Disturbing Elements. The wags made this Gali Pelarian Kemusu—Suharto was born in the village of Kemusu.
- [10] Japanese military police, famous for war-time brutality.
- [11] Then Colonel Sarwo Edhie, commander of the elite Red Beret paratroops, was the operational executor of the massacres; Mas Permadi is a well-known psychic.
- [12] The organized slaughter of petty hoodlums, often previously agents of the regime. A grim joke of the time called the death-squads of soldiers-in-mufti ‘Petrus’, as in St. Peter, an acronym derived from Penembak Misterius or Mysterious Killers.
- [13] Famous high-flying Sino-Indonesian crook who escaped abroad with millions of embezzled dollars.
- [14] Allegedly the head of the Communist Party’s secret Special Bureau for military affairs, and planner of the September 30th Movement.
- [15] In 1948–49, the Dutch set up a series of puppet regimes in various provinces they controlled to offset the power and prestige of the independent Republic. Recomba was the name of this type of regime in Java, and Pasundan is the old name for the Sundanese-speaking territory of West Java.

- [16] The Movement proclaimed this Council as the temporary ruling authority in Indonesia, but its membership included right-wing generals, second-tier left-wingers, and various notoriously opportunist politicians, while omitting almost all figures with national reputations and large organizations behind them.
- [17] Secretary-General of the Communist Party.
- [18] Omar Dhani: Air Force chief in 1965, sentenced to death, had his sentence reduced to life imprisonment, and was recently released. Sudharmono: for decades close aide to Suharto. Rewang: former candidate member of the Communist Party's Politbureau. Panggabean: top general in Suharto's clique and his successor as commander of Kostrad. Hartini: Sukarno's second wife in 1965. Mursyid: Sukarnoist general heading military operations for the Army Staff in 1965, subsequently arrested. Yusuf and Idris: both these generals played central roles in the overthrow of Sukarno.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Kathy Kadane \*)

***"...in four months,  
five times as many  
people died in  
Indonesia as in  
Vietnam in  
twelve years."***

*-- Bertrand Russell, 1966*

The following article appeared in the Spartanburg, South Carolina *Herald-Journal* on May 19, 1990, then in the *San Francisco Examiner* on May 20, 1990, the *Washington Post* on May 21, 1990, and the *Boston Globe* on May 23, 1990. The version below is from the *Examiner*.

### **Ex-agents say CIA compiled death lists for Indonesians**

#### **After 25 years, Americans speak of their role in exterminating Communist Party**

by Kathy Kadane, States News Service, 1990

WASHINGTON -- The U.S. government played a significant role in one of the worst massacres of the century by supplying the names of thousands of Communist Party leaders to the Indonesian army, which hunted down the leftists and killed them, former U.S. diplomats say.

For the first time, U.S. officials acknowledge that in 1965 they systematically compiled comprehensive lists of Communist operatives, from top echelons down to village cadres. As many as 5,000 names were furnished to the Indonesian army, and the Americans later checked off the names of those who had been killed or captured, according to the U.S. officials.

The killings were part of a massive bloodletting that took an estimated 250,000 lives.

The purge of the Partai Komunis Indonesia (PKI) was part of a U.S. drive to ensure that Communists did not come to power in the largest country in Southeast Asia, where the United States was already fighting an undeclared war in Vietnam. Indonesia is the fifth most-populous country in the world.

Silent for a quarter-century, former senior U.S. diplomats and CIA officers described in lengthy interviews how they aided Indonesian President Suharto, then army leader, in his attack on the PKI.

"It really was a big help to the army," said Robert J. Martens, a former member of the U.S. Embassy's political section who is now a consultant to the State Department. "They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that's not all bad. There's a time when you have to strike hard at a decisive moment."

White House and State Department spokesmen declined comment on the disclosures.

Although former deputy CIA station chief Joseph Lazarsky and former diplomat Edward Masters, who was Martens' boss, said CIA agents contributed in drawing up the death lists, CIA spokesman Mark Mansfield said, "There is no substance to the allegation that the CIA was involved in the preparation and/or distribution of a list that was used to track down and kill PKI members. It is simply not true."

Indonesian Embassy spokesman Makarim Wibisono said he had no personal knowledge of events described by former U.S. officials. "In terms of fighting the Communists, as far as I'm concerned, the Indonesian people fought by themselves to eradicate the Communists," he said.

Martens, an experienced analyst of communist affairs, headed an embassy group of State Department and CIA officers that spent two years compiling the lists. He later delivered them to an army intermediary.

People named on the lists were captured in overwhelming numbers, Martens said, adding, "It's a big part of the reason the PKI has never come back."

The PKI was the third-largest Communist Party in the world, with an estimated 3 million members. Through affiliated organizations such as labor and youth groups it claimed the loyalties of another 17 million.

In 1966 the Washington Post published an estimate that 500,000 were killed in the purge and the brief civil war it triggered. In a 1968 report, the CIA estimated there had been 250,000 deaths, and called the carnage "one of the worst mass murders of the 20th century."

## U.S. Embassy approval

Approval for the release of the names came from the top U.S. Embassy officials, including former Ambassador Marshall Green, deputy chief of mission Jack Lydman and political section chief Edward Masters, the three acknowledged in interviews.

Declassified embassy cables and State Department reports from early October 1965, before the names were turned over, show that U.S. officials knew Suharto had begun roundups of PKI cadres, and that the embassy had unconfirmed reports that firing squads were being formed to kill PKI prisoners.

Former CIA Director William Colby, in an interview, compared the embassy's campaign to identify the PKI leadership to the CIA's Phoenix Program in Vietnam. In 1965, Colby was the director of the CIA's Far East division and was responsible for directing U.S. covert strategy in Asia.

"That's what I set up in the Phoenix Program in Vietnam -- that I've been kicked around for a lot," he said. "That's exactly what it was. It was an attempt to identify the structure" of the Communist Party.

Phoenix was a joint U.S.-South Vietnamese program set up by the CIA in December 1967 that aimed at neutralizing members of the National Liberation Front, the Vietcong political cadres. It was widely criticized for alleged human rights abuses.

"You shoot them"

"The idea of identifying the local apparatus was designed to -- well, you go out and get them to surrender, or you capture or you shoot them," Colby said of the Phoenix Program. "I mean, it was a war, and they were fighting. So it was really aimed at providing intelligence for operations rather than a big picture of the thing."

In 1962, when he took over as chief of the CIA's Far East division, Colby said he discovered the United States did not have comprehensive lists of PKI activists. Not having the lists "could have been criticized as a gap in the intelligence system," he said, adding they were useful for "operation planning" and provided a picture of how the party was organized. Without such lists, he said, "you're fighting blind."

Asked if the CIA had been responsible for sending Martens, a foreign service officer, to Jakarta in 1963 to compile the lists, Colby said, "Maybe, I don't know. Maybe we did it. I've forgotten."

The lists were a detailed who's-who of the leadership of the party of 3 million members, Martens said. They included names of provincial, city and other local PKI committee members, and leaders of the "mass organizations," such as the PKI national labor federation, women's and youth groups.

## Better information

"I know we had a lot more information" about the PKI "than the Indonesians themselves," Green said. Martens "told me on a number of occasions that ... the government did not have very good information on the Communist setup, and he gave me the impression that this information was superior to anything they had."



Masters, the embassy's political section chief, said he believed the army had lists of its own, but they were not as comprehensive as the American lists. He said he could not remember whether the decision to release the names had been cleared with Washington.

The lists were turned over piecemeal, Martens said, beginning at the top of the communist organization. Martens supplied thousands of names to an Indonesian emissary over a number of months, he said. The emissary was an aide to Adam Malik, an Indonesian minister who was an ally of Suharto in the attack on the Communists.

Interviewed in Jakarta, the aide, Tirta Kentjana ("Kim") Adhyatman, confirmed he had met with Martens and received lists of thousands of names, which he in turn gave to Malik. Malik passed them on to Suharto's headquarters, he said.

#### "Shooting list"

Embassy officials carefully recorded the subsequent destruction of the PKI organization. Using Martens' lists as a guide, they checked off names of captured and assassinated PKI leaders, tracking the steady dismantling of the party apparatus, former U.S. officials said.

Information about who had been captured and killed came from Suharto's headquarters, according to Joseph Lazarsky, deputy CIA station chief in Jakarta in 1965. Suharto's Jakarta headquarters was the central collection point for military reports from around the country detailing the capture and killing of PKI leaders, Lazarsky said.

"We were getting a good account in Jakarta of who was being picked up," Lazarsky said. "The army had a 'shooting list' of about 4,000 or 5,000 people."

Detention centers were set up to hold those who were not killed immediately.

"They didn't have enough goon squads to zap them all, and some individuals were valuable for interrogation," Lazarsky said. "The infrastructure was zapped almost immediately. We knew what they were doing. We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them."

Masters, the chief of the political section, said, "We had these lists" constructed by Martens, "and we were using them to check off what was happening to the party, what the effect" of the killings "was on it."

Lazarsky said the checkoff work was also carried out at the CIA's intelligence directorate in Washington.

#### Leadership destroyed

By the end of January 1966, Lazarsky said, the checked-off names were so numerous the CIA analysts in Washington concluded the PKI leadership had been destroyed.

"No one cared, as long as they were Communists, that they were being butchered," said Howard Federspiel, who in 1965 was the Indonesia expert at the State Department's Bureau of Intelligence and Research. "No one was getting very worked up about it."

Asked about the checkoffs, Colby said, "We came to the conclusion that with the sort of Draconian way it was carried out, it really set them" -- the communists -- "back for years."

Asked if he meant the checkoffs were proof that the PKI leadership had been caught or killed, he said, "Yeah, yeah, that's right, ... the leading elements, yeah."

---

More from Kathy Kadane...

### **A Letter to the Editor, *New York Review of Books*, April 10, 1997**

To the Editors:

I very much admired Ms. Laber's piece on Indonesian politics and the origins of the Soeharto regime. In connection with her assertion that little is known about a CIA (or US) role in the 1965 coup and the army massacre that followed, I would like to make your readers aware of a compelling body of evidence about this that is publicly available, but the public access to it is little known.

It consists of a series of on-the-record, taped interviews with the men who headed the US embassy in Jakarta or were at high levels in Washington agencies in 1965. I published a news story based on the interviews in *The Washington Post* ("U.S. Officials' Lists Aided Indonesian Bloodbath in '60s," May 21, 1990), and have since transferred the tapes, my notes, and a small collection of documents, including a few declassified cables on which the story was based, to the National Security Archive in Washington, D.C. The Archive is a nongovernmental research institute and library, located at the George Washington University.

The former officials interviewed included Ambassador Marshall Green, Deputy Chief of Mission Jack Lydman, Political Counsellor (later Ambassador) Edward E. Masters, Robert Martens (an analyst of the Indonesian left working under Masters' supervision), and (then) director of the Central Intelligence Agency's Far East division, William Colby.

The tapes, along with notes of conversations, show that the United States furnished critical intelligence -- the names of thousands of leftist activists, both Communist and non-Communist -- to the Indonesian Army that were then used in the bloody manhunt.

There were other details that illustrate the depth of US involvement and culpability in the killings which I learned from former top-level embassy officials, but have not previously published. For example, the US provided key logistical equipment, hastily shipped in at the last minute as Soeharto weighed the risky decision to attack. Jeeps were supplied by the Pentagon to speed troops over Indonesia's notoriously bad roads, along with "dozens and dozens" of field radios that the Army lacked. As Ms.

Laber noted, the US (namely, the Pentagon) also supplied "arms." Cables show these were small arms, used for killing at close range.

The supply of radios is perhaps the most telling detail. They served not only as field communications but also became an element of a broad, US intelligence-gathering operation constructed as the manhunt went forward. According to a former embassy official, the Central Intelligence Agency hastily provided the radios -- state-of-the-art Collins KWM-2s, high-frequency single-sideband transceivers, the highest-powered mobile unit available at that time to the civilian and commercial market. The radios, stored at Clark Field in the Philippines, were secretly flown by the US Air Force into Indonesia. They were then distributed directly to Soeharto's headquarters -- called by its acronym KOSTRAD -- by Pentagon representatives. The radios plugged a major hole in Army communications: at that critical moment, there were no means for troops on Java and the out-islands to talk directly with Jakarta.

While the embassy told reporters the US had no information about the operation, the opposite was true. There were at least two direct sources of information. During the weeks in which the American lists were being turned over to the Army, embassy officials met secretly with men from Soeharto's intelligence unit at regular intervals concerning who had been arrested or killed. In addition, the US more generally had information from its systematic monitoring of Army radios. According to a former US official, the US listened in to the broadcasts on the US-supplied radios for weeks as the manhunt went forward, overhearing, among other things, commands from Soeharto's intelligence unit to kill particular persons at given locations.

The method by which the intercepts were accomplished was also described. The mobile radios transmitted to a large, portable antenna in front of KOSTRAD (also hastily supplied by the US -- I was told it was flown in in a C-130 aircraft). The CIA made sure the frequencies the Army would use were known in advance to the National Security Agency. NSA intercepted the broadcasts at a site in Southeast Asia, where its analysts subsequently translated them. The intercepts were then sent on to Washington, where analysts merged them with reports from the embassy. The combined reporting, intercepts plus "human" intelligence, was the primary basis for Washington's assessment of the effectiveness of the manhunt as it destroyed the organizations of the left, including, inter alia, the Indonesian Communist Party, the PKI.

A word about the relative importance of the American lists. It appears the CIA had some access prior to 1965 to intelligence files on the PKI housed at the G-2 section of the Indonesian Army, then headed by Major-General S. Parman. CIA officials had been dealing with Parman about intelligence concerning the PKI, among other matters, in the years prior to the coup, according to a former US official who was involved (Parman was killed in the coup). The former official, whose account was corroborated by others whom I interviewed, said that the Indonesian lists, or files, were considered inadequate by US analysts because they identified PKI officials at the "national" level, but failed to identify thousands who ran the party at the regional and municipal levels, or who were secret operatives, or had some other standing, such as financier.

When asked about the possible reason for this apparent inadequacy, former US Ambassador Marshall Green, in a December 1989 interview, characterized his understanding this way:

I know that we had a lot more information than the Indonesians themselves.... For one thing, it would have been rather dangerous [for the Indonesian military to construct such a list] because the Communist Party was so pervasive and [the intelligence gatherers] would be fingered...because of the people up the line [the higher-ups, some of whom sympathized with the PKI]. In the [Indonesian] Air Force, it would have been lethal to do that. And probably that would be true for the police, the Marines, the Navy -- in the Army, it depended. My guess is that once this thing broke, the Army was desperate for information as to who was who [in the PKI].

By the end of January 1966, US intelligence assessments comparing the American lists with the reports of those arrested or killed showed the Army had destroyed the PKI. The general attitude was one of great relief: "Nobody cared" about the butchery and mass arrests because the victims were Communists, one Washington official told me.

-- Kathy Kadane

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

X-URL: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/>

For immediate release, 27 July 2001

For more information:

Archive director Tom Blanton, 994-7000

CIA STALLING STATE DEPARTMENT HISTORIES  
ARCHIVE POSTS ONE OF TWO DISPUTED VOLUMES ON WEB

STATE HISTORIANS CONCLUDE U.S. PASSED NAMES OF COMMUNISTS  
TO INDONESIAN ARMY, WHICH KILLED AT LEAST 105,000 IN 1965-66

**WASHINGTON, D.C.**, 27 July – George Washington University's National Security Archive today posted on the Web ([www.nsarchive.org](http://www.nsarchive.org)) one of two State Department documentary histories whose release the U.S. Central Intelligence Agency is stalling, even though the documents included in the volumes were officially declassified in 1998 and 1999, according to public State Department records. The two disputed State Department volumes cover Indonesia-Malaysia-Philippines in the years 1964-68 and Greece-Turkey-Cyprus in the same period.

The CIA, as well as action officers at the State Department, have prevented the official release of either volume, already printed and bound by the Government Printing Office. The National Security Archive obtained the Indonesia volume posted today when the GPO, apparently by mistake, shipped copies to various GPO bookstores; but the Greece volume is still locked up in GPO warehouses.

The Indonesia volume includes significant new documentation on the Indonesian Army's campaign against the Indonesia Communist Party (PKI) in 1965-66, which brought to power the dictator Suharto. (Ironically, Suharto's successor, ex-President Wahid, is on his way to Baltimore this week for medical treatment, and has been replaced by his vice-president, who is the daughter of the man Suharto overthrew.) For example, U.S. Embassy reporting on November 13, 1965 passed on information from the police that "from 50 to 100 PKI members were being killed every night in East and Central Java...."; and the Embassy admitted in an April 15, 1966 airgram to Washington that "We frankly do not know whether the real figure [of PKI killed] is closer to 100,000 or 1,000,000 but believe it wiser to err on the side of the lower estimates, especially when questioned by the press." On page 339, the volume seems to endorse the figure of 105,000 killed that was proposed in 1970 by foreign service officer Richard Cabot Howland in a classified CIA publication.

On another highly controversial issue – that of U.S. involvement in the killings – the volume includes an "Editorial Note" on page 387 describing Ambassador Marshall Green's August 10, 1966 airgram to Washington reporting that an Embassy-prepared list of top Communist leaders with Embassy attribution removed "is apparently being used by Indonesian security authorities who seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time...." On December 2, 1965, Green endorsed a 50 million rupiah covert payment to the Kap-Gestapu movement leading the repression; but the December 3 CIA response to State is withheld in full (pp. 379-380).

The CIA's intervention in the State Department publication is only the latest in a series of such controversies, dating back to 1990 when the CIA censored a State volume on Iran in the early 1950s to leave out any reference to the CIA-backed coup that overthrew Mossadegh in 1953. The chair of the State Department historical advisory committee resigned in protest, producing an outcry among academics and journalists (see "History Bleached at State," New York Times editorial, May 16, 1990, p. A26: "At the very moment that Moscow is coming clean on Stalin's massacre of Polish officers, Washington is putting out history in the old Soviet mode."). Congress then passed a law in 1991 requiring the State Department volumes to include covert operations as well as overt diplomacy, so as to provide an accurate historical picture of U.S. foreign policy, 30 years after the events.

\*\*\*

### Exhibits:

1. Editorial note from the Indonesia volume on the number of Indonesian PKI members who were killed in 1965-66, pp. 338-340.
2. Editorial note from the Indonesia volume on the U.S. Embassy's role in providing lists to the Indonesian Army of PKI members, pp. 386-387.
- 2a. Ambassador Green's December 2, 1965 endorsement of a 50 million rupiah covert payment to the "army-inspired but civilian-staffed action group [Kap-Gestapu]... still carrying burden of current repressive efforts targeted against PKI...." The document immediately following, presumably CIA's response to this

proposal from December 3, 1965 (written by William Colby of CIA's Far East division to the State Department's William Bundy), was withheld in full from the volume. (pp.379-380)

3. Description of the declassification review of the Indonesia volume, written by the State Department historian, p. VII. This includes the official description of the "High Level Panel" which makes final decisions on acknowledgement of covert operations.
4. State Department Historical Advisory Committee's summary as of September 1, 1999 of the "Status of Johnson and Nixon Era FRUS High Level Panel Covert Action Cases" (2 pages). This document shows that the Panel decided on April 20, 1998 to acknowledge covert action in Indonesia, that the CIA completed review of the documents on August 28, 1998, and that the volume then went into page proofs, "however, publication has been delayed." The summary also shows that CIA completed its review of the Cyprus-Greece-Turkey volume on May 14, 1999, that the volume was in revised page proofs as of September 1 and was expected to be published by December 1999.
5. Excerpts from the House of Representatives' final version of Public Law 102-138, signed by President George H.W. Bush on October 28, 1991, which requires that the *Foreign Relations of the United States* series be a thorough, accurate, and reliable record of major U.S. foreign policy decisions and significant U.S. diplomatic activity.
6. Title page and table of contents of the Indonesia volume.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Details see: [http://www.wirantaprawira.de/bk/cia\\_book.html](http://www.wirantaprawira.de/bk/cia_book.html)

## **Foreign Relations of the United States, 1964-68**

### **Volume XXVI**

**Indonesia;  
Malaysia-Singapore;  
Philippines**

**Table of Contents** (Details see: [http://www.wirantaprawira.de/bk/cia\\_book.html](http://www.wirantaprawira.de/bk/cia_book.html))

(Note: This table is posted in sections corresponding to the divisions of the original)

<b>Preface</b>	II
<b>Johnson Administration Volumes</b>	IX
<b>Sources</b>	XIII
<b>Abbreviations</b>	XXI
<b>Persons</b>	XXVII
<b>Note on U.S. Covert Action Programs</b>	XXXIII

## Indonesia

Sukarno's confrontation With Malaysia: January-November 1964	1
Sukarno's confrontation With the United States: December 1964 - September 1965	189
Coup and Counter Reaction: October 1965-March 1966	300
The United States and Suharto: April 1966-December 1968	427
Malaysia-Singapore	577
Philippines	649
Index	843

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966  
INDONESIAN INSTITUTE FOR THE STUDY OF 1965/1966 MASSACRE  
Address: Jalan Kalibesar Timur No. 3 Jakarta Barat 11110 – Indonesia  
PO BOX 4923 JKTF 11049 Telp. +62 21- 6930324, Cell Phone: 0812 9240360  
Bank: BNI CAPEM CIMONE, TANGERANG. ACC: 001027.495.001

### **The Indonesian Institute for the Study of 1965/1966 Massacre (YPKP '65/ 66)**

The « Movement of 30 September » (Gerakan 30 September) was launched in 1965 by a group of Indonesian army officers led by the Commander of the Presidential Guard (Lieutenant Colonel Untung). A Revolutionary Council was proclaimed to protect and bolster the policies of President Sukarno.

Subsequently, six high ranking officers of the army were kidnapped and killed. The Indonesian army command, headed by Major General Suharto reacted strongly. They accused some leading members of the PKI (Indonesian Communist Party) and suspected president Sukarno of having had a hand in this affair. A country wide campaign to crush the PKI and other pro Sukarno organisations was put into effect.

Over a period of 16 months in 1965-1966 a huge number of Indonesians were massacred by the army (and its supporters) or imprisoned for long periods, most often without trial. Amongst the victims were leaders and activists of the PKI (at all levels) and members of various mass organisation including workers, peasants, teachers, students, government officials, women, intellectuals, artists and journalists. The outcome of all this was that president Sukarno lost power and was replaced by Suharto, whose authoritarian presidency lasted until 1998.

## The death-toll of the massacre

It has been impossible to establish realistically the death-toll resulting from the 1965-1966 massacres, as Suharto's military regime has firmly discouraged any such efforts. A kind of state terror was exercised to silence public opinion and independent research. The following figures speak for themselves :

1. A fact-finding Commission originally formed by President Sukarno before his eviction from power has estimated a figure of 78 000 deaths
2. General Sudomo (former Commander of National Security and Order in the Suharto regime) -2 000 000 deaths
3. Encyclopaedia Britannica - between 80 000 to 1 000 000 deaths
4. General Sarwo Edhie, who headed military actions during this period - 3 000 000 deaths
5. President Habibie mentioned (to the Indonesian press, 8 October 1999) the figure of 500 000 to 1 000 000 deaths

Following Suharto's deposure and now that Habibie is no longer president, it may be possible at last to carry out serious research regarding the extent of the massacres, as well as the imprisonment's, and flagrant abuses of power perpetrated during the 32 years of the Suharto's regime : a regime which has brought Indonesia to its knees economically, morally and socially.

## The founding of the Institute

Research work on the massacres was first instigated in 1994 by Mrs Sulami (former Secretary General of Gerwani, the leading women's organisation) but limited its scope to Central and East Java. This work was both very difficult and dangerous at the time. All those involved have agreed that there is a need and heed for a specialised organisation to continue the task in a serious, in depth and objective manner. The results will enable future generations of Indonesians to have a clear view regarding these years of their history.

The “Indonesian Institute for the Study of 1965/1966 Massacre” is the direct result : it was constituted by notarial act on 7th April 1999. Amongst its founding members are Pramodya Ananta Toer (writer), Hasan Raid, Koesalah Soebagio Toer, Mrs Soelami, Mrs Soemini Martono, Dr. Ribka Ciptaning and Soeharno. Its office is in Tangerang, near Jakarta.

The Institute's activities so far have been :

1. to treat and process data collected since 1994, including testimonies and other sources of evidence.
1. to establish a network of YPKP branches inside Java and to prepare its extension to other parts of Indonesia in order to collect further information.
1. to cooperate with other Indonesian organisations with similar aims.
1. to organise support from abroad (including the Indonesian Diaspora)



The Institute works with a small budget, essentially individual contributions from founding members and sympathisers. Much of the works done is voluntary. Despite the budget limitation, the Institute has organised conferences and workshops for activists and volunteers from Central and East Java in order to establish a common methodology. Even today the YPKP is obliged to carry on its activities with prudence in order to maintain security for all. A much larger budget will be required to enlarge the scope of activity.

The aims and programmes of the Institute

1. To continue collecting data concerning the number of victims, their identities and the circumstances at the time of arrest and/or disappearance in 1965-1966. The data to be stored in data-base or conventional files as well as in the forms of reports, etc.
2. To prepare all documentation needed to bring legal action against individuals or groups who were directly or indirectly involved in the massacres or other atrocities.
3. To call for the rehabilitation of rights and honours of the victims and their families, and the complete restoration of civil rights to ex-political prisoners and former members of the PKI and their relatives.
1. To demand correction of falsified versions of national history, especially those concerning the events of 1965-1966, and the policies of "Orde Baru" (New Order) during Suharto's regime

Methods of research

Interviews with witnesses of the condition at times of arrest, of movements into or out of prisons and concentration camps, or of the killings.

The recording of interviews, the collecting of photographs of victims, the mapping of massacre sites, the collecting of direct evidence (bones, skulls etc). The reconstruction of pictures of kidnap locations, concentration camps and killing grounds.

The extent of the work is immense, so efforts will have to be made step by step and area by area in accordance with political conditions, budget and human resources. The areas covered will include Central Java, Yogyakarta, East Java, West Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sumatra, NORTH Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya and other regions where sufficient evidence is detected.

Research should be carried out during the period of one year from September 1999 till August 2000.

A common task at home and abroad

The events in question took place some 36 years ago. Many of those involved directly or indirectly are still living, and some have reason to exert considerable influence to keep matters quiet. So the work to be done by the Institute will not be

easy. But it is of great importance to restore normal citizen's rights to the millions of relatives of victims and to rehabilitate the surviving victims themselves.

The Institute will need financial help from organisations and societies in Indonesia and abroad. It may perhaps hope for from many circles now that the presidency and the government have changed. It will need donations. It will need voluntary work. It will need co-operation from humanitarian organisations, historians, jurists, universities, parliamentarians, and others, at home and abroad.

The task is immense, and of great importance to Indonesia and the world, as it implies no less than a restoration of justice to the millions who have suffered or died because of the events of 1965-1966, but also a true revision of history as it was written and taught by those responsible for the crimes.

The Institute wishes to cooperate with all who share this aim. The task merits international solidarity.

For direct contacts at Jakarta

(preferably in English or Indonesian language) :

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966

(Indonesian Institute for the Study of 1965/1966 Massacre)

Address : Jalan Kalibesar Timur no.3 Jakarta Barat 11110 – Indonesia

Phone 62-21-5312 17 70 or 62-21-551 2314 and Cell Phone 0812 9240 360

Bank : BNI Capem Cimone, Tangerang, account number 001.027.495.001

E-mail : ypkp\_pusat at 37.com

Nederland

Email: YPKP\_NED at xs4all.nl

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

'Keep the Indonesian Pot Boiling':

## **Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965 - March 1966**

David Easter

London School of Economics and Political Science,

UK. Email: D.Easter@lse.ac.uk.

This study examines the role played by the West in the destruction of the Indonesian communist party, the PKI, and the removal of the radical Indonesian president, Sukarno, in 1965-66. After the murder of six generals in October 1965 the Indonesian army massacred thousands of communists and seized power from Sukarno. The United States secretly helped the army in this period by providing intelligence, arms,

medicines and radios and by giving assurances that Britain would not attack Indonesia while the army was suppressing the PKI. The US, Britain, Australia and Malaysia also used propaganda to encourage hostility in Indonesia towards the PKI. The article assesses the impact of Western covert intervention and concludes that Western propaganda may have encouraged the mass killings of the communists.

The changes that took place in Indonesia from October 1965 to March 1966 were a watershed in the history of South-East Asia and a major reverse for communism in the Cold War. Prior to October 1965 Indonesia was a radical Third World state. Its charismatic president, Sukarno, was a vocal anti-imperialist, dedicated to resisting what he called the *Nekolim* (neo-colonialists-imperialists) of the West. Sukarno openly aligned himself with the communist bloc in this struggle, proclaiming support for the North Vietnamese in the Vietnam War, establishing close ties with the People's Republic of China and angrily pulling Indonesia out of the United Nations in January 1965. Sukarno also tried to destabilize his pro-Western neighbour Malaysia through a campaign called 'Confrontation'. He denounced Malaysia as a British neo-colonialist creation and sponsored a guerrilla insurgency in the country. To leaders in Washington, London and Canberra, Sukarno appeared to be mounting a comprehensive challenge to Western interests in South-East Asia.

In internal affairs Sukarno was also moving Indonesia to the left. For many years there had been an uneasily balanced triangle of power in the country between Sukarno, the staunchly anti-communist army and the large Indonesian communist party, the PKI (*Partai Komunis Indonesia*). During 1964-65 Sukarno increasingly favoured the PKI. Government propaganda campaigns created a siege mentality by warning of *Nekolim* 'encirclement' of Indonesia and alleging American Central Intelligence Agency (CIA) plots to assassinate Sukarno. The president banned rival political parties to the PKI or allowed them to be taken over by the leftists. He also permitted the communists to gain control over most of the press and the Antara news agency.

It appeared that Sukarno, who was 64 years old and known to be in ill health, was creating the conditions for the PKI to take control in Indonesia after his death. Such an outcome would have been a major defeat for the West as Indonesia was a glittering geo-strategic prize. With a population of 103 million it was one of the largest countries in the world, it had abundant raw materials and the sprawling Indonesian island chain covered vital sea lanes.

The loss of Indonesia would also outflank American efforts to contain communism in South Vietnam.

Events in the winter of 1965-66 completely transformed the situation. An abortive coup took place in Jakarta on 1 October, which, although unsuccessful, caused the death of six leading army generals. The Indonesian army blamed the coup attempt on the PKI and it retaliated with a ferocious campaign of repression against the party. An estimated 300,000-500,000 people were killed in an anti-communist Terror and the PKI was extinguished as a political force. The army leader, Suharto, then compelled Sukarno in March 1966 to hand over executive powers to him in what was effectively a military coup. Under Suharto's leadership Indonesia moved sharply to the right, both domestically and internationally, making peace with Malaysia and

breaking ties with China. Sukarno was marginalized and died while under house arrest in 1970.

This 'reverse course' in Indonesia was an important victory for the Western powers in the Cold War. It removed the spectre of a communist Indonesia and ended Sukarno's troublesome anti-Malaysia campaign. Since the West was such an obvious beneficiary of the reverse course, there has been speculation as to whether the Western powers were actually responsible for it.<sup>1</sup> Peter Dale Scott has argued that the events of 1965-66 were in fact 'a three phase right-wing coup - one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials'.<sup>2</sup> Scott sees Suharto as the puppet master behind the reverse course, 'inducing, or at a minimum helping to induce' the October 1965 coup attempt and then using it as pretext to eliminate the PKI and remove Sukarno. In this conspiracy Scott believes Suharto had strong covert support from the United States, especially in areas like propaganda and secret aid to the Indonesian army. By contrast, the historian H.W. Brands has argued that Washington was not to blame for the changes in Indonesia.<sup>3</sup> Examining the documentary sources Brands could find no evidence of American links to the October 1965 coup attempt and he claims that the United States only gave cautious and limited support to the army in the subsequent power struggle. In short, he thinks that 'Sukarno's overthrow had little to do with American machinations. It resulted instead from developments of essentially Indonesian origin'.<sup>4</sup>

Other writers have focused on Britain's role.<sup>5</sup> The journalists Paul Lashmar and James Oliver claim in their book *Britain's Secret Propaganda War* that 'the British government secretly helped overthrow President Sukarno of Indonesia, assisting the rise of General Suharto . to power'.<sup>6</sup> Lashmar and Oliver draw on interviews with former Foreign Office officials to show that London mounted a covert propaganda campaign against Sukarno after the October 1965 coup attempt. However, Lashmar and Oliver provide little documentary proof and they also make bold claims about earlier Western plotting against Sukarno which are not supported by the evidence.<sup>7</sup>

This article will seek to answer the question of whether the West was responsible for the reverse course in Indonesia. Using British, Australian and American sources it will examine the covert role played by the West in the destruction of the Indonesian communist party and the ousting of Sukarno.

By the summer of 1965 there was a consensus amongst Britain, the United States, Australia and Malaysia, that Sukarno was an implacable enemy, threatening the stability of the region and leading his country to communism. Both the British and the Americans believed that the longer Sukarno remained in power the greater chance there was of a communist takeover in Indonesia after his death.<sup>8</sup>

The Western powers responded to this threat in a similar way: by using propaganda and covert action. For the three Commonwealth powers the immediate problem was Confrontation. Britain and Australia had committed substantial forces to defend Malaysia but for political reasons they were reluctant to openly retaliate for the Indonesian guerrilla raids. If, for example, the British and Australians bombed targets in Indonesia it would confirm to the Indonesian public Sukarno's warnings about the threat posed by the Nekolim. An open war between Britain, Australia and Indonesia

could strengthen the position of the PKI and damage the prestige of the army, hastening moves towards a communist takeover. The Commonwealth allies therefore had to rely on covert pressures to make Indonesia halt Confrontation; British and Australian soldiers secretly crossed the jungle border to attack guerrilla units inside Indonesia and Britain and Malaysia gave aid to rebel groups in the outer Indonesian islands of Sumatra and Sulawesi.<sup>9</sup>

In addition, the British and Malaysians used covert propaganda to erode support for Confrontation and encourage disunity in Indonesia.<sup>10</sup> In February 1965 the Information Research Department of the Foreign Office, which specialized in unattributable propaganda, set up the South East Asia Monitoring Unit in Singapore to carry out propaganda directed at Indonesian audiences.<sup>11</sup> London instructed that the propaganda from Singapore should undermine the will of the Indonesian armed forces to attack Malaysia, by representing that their real enemies were the PKI and communist China.

Propaganda should also 'Discredit any potential successor to Sukarno . whose accession to power might benefit the PKI'.<sup>12</sup> In July the Foreign Office decided to step up its propaganda operations by appointing a Political Warfare Coordinator in Singapore. Norman Reddaway, the Regional Information Officer in Beirut, was selected for the position, although Reddaway would not take up the post until November.<sup>13</sup> Malaysian propaganda against Sukarno and the PKI was disseminated overtly, through Radio Malaysia's external broadcasts to Indonesia, and covertly, through a 'black' radio station, 'Radio Free Indonesia', which masqueraded as the work of Indonesian émigrés.<sup>14</sup>

The United States' primary concern was the communist threat. In March 1965 the 303 Committee of the National Security Council approved a CIA-State Department political action programme to reduce the influence of the PKI and communist China and support non-communist elements in Indonesia.<sup>15</sup> As part of the programme the US would 'develop black and grey propaganda themes for use within Indonesia and via appropriate media assets outside Indonesia'.<sup>16</sup> The aim would be to 'Portray the PKI as an increasingly ambitious, dangerous opponent of Sukarno and legitimate nationalism and instrument of Chinese neo-imperialism'. The next month the United States effectively abandoned any attempt to work with Sukarno. The veteran American diplomat Ellsworth Bunker visited Sukarno in April but he could find no common ground - he came back convinced that the Indonesian leader 'was a Marxist at heart'.<sup>17</sup> Bunker warned President Lyndon Johnson that the large and widespread American presence in Indonesia gave the PKI political targets to attack and allowed it to portray those who were friendly to the US, such as the army, as defenders and stooges of the imperialists. He therefore recommended that 'U.S. visibility should be reduced so that those opposed to the communists and extremists may be free to handle a confrontation, which they believe will come, without the incubus of being attacked as defenders of the neo-colonialists and imperialists'.<sup>18</sup> The Americans should quietly keep in contact with 'the constructive elements of strength in Indonesia' and try to give these elements 'the most favourable conditions for confrontation [with the PKI]', although Bunker thought that Indonesia 'would essentially have to save itself'.

Washington put Bunker's recommendations into effect and adopted what one American official described as a 'low silhouette' policy.<sup>19</sup> American diplomats and aid workers were pulled out and the visible US presence reduced. At the same time Washington tried to find ways to influence opinion in Indonesia. Plans were drawn up to improve Voice of America (VOA)'s signal to Indonesia by erecting ten transmitters at Clark Field air base in the Philippines.<sup>20</sup> In August US officials also held talks with the Australians in Canberra to discuss possible cooperation in broadcasts to Indonesia.<sup>21</sup> It is clear, then, that by September 1965 the Western powers were hostile to Indonesia and trying to use propaganda to combat the PKI. But it was the coup attempt in Indonesia that gave them a real opportunity to do this. In the early hours of 1 October a group headed by Lieutenant Colonel Untung, a left-wing commander in the Presidential Guard, abducted and killed six leading Indonesian generals. Untung's troops also took over broadcasting facilities in Jakarta and announced the formation of a Revolutionary Council.

The Untung putsch swiftly collapsed. Its armed bands failed to capture the Defence Minister, General Naustion, although they did manage to fatally injure his six-year-old daughter, and Major General Suharto, commander of the army's strategic reserves, used his troops to regain control of the capital and crush the plotters. By 2 October the coup was effectively over.

What was less easily resolved and which remains a mystery to this day, is whether Untung was acting on behalf of other forces. There has been a welter of conflicting theories as to who was behind the coup attempt.<sup>22</sup> Some on the right have blamed the PKI, Red China, the pro-communist Indonesian Foreign Minister Subandrio or even Sukarno. Others, such as Scott, have constructed an elaborate conspiracy theory that the coup attempt was an army provocation, led by Suharto, to give a pretext for a crack-down on the communists.

There is insufficient space here to assess all the conflicting theories of the coup's origins but looking at American, British and Australian primary sources it is apparent that despite their interest in covert action and propaganda, the Western powers were surprised by the coup attempt. In the first few days of October American, Australian and British diplomats in Jakarta were shocked and confused and had trouble in finding out what was going on.<sup>23</sup> There is no evidence that the coup attempt was a Western-backed army provocation. Indeed, on 1 October the American Deputy Director of Central Intelligence, Richard Helms, told George Ball at the State Department that the CIA 'had had absolutely nothing to do with it'.<sup>24</sup> The immediate suspicion of Western officials was of a possible connection to the PKI.<sup>25</sup>

Yet evidence for PKI involvement in the coup was not clear-cut. Communist transport and communications unions helped Untung on 1 October by cutting communications in and out of Jakarta and the next day a communist newspaper endorsed the action he had taken. The coup attempt was centred on the Halim air force base and made use of communist cadres being given military training there. But the PKI did not try to mobilize its massive party membership behind the coup and an American 'clandestine source' reported that the PKI central committee only decided to give Untung military support after hearing his radio broadcast on 1 October.<sup>26</sup> After the

coup had failed the PKI denied any involvement and claimed it had been an internal army matter, with junior officers attacking senior officers.

Faced with this conflicting evidence, privately Western policymakers were uncertain how far the PKI was responsible for the abortive coup. US State Department officials believed that the PKI had not planned or engineered the coup attempt.<sup>27</sup> Instead they thought that Untung, without consulting the party, might have put into effect a communist contingency plan to seize power on the death of Sukarno. Certainly there had been a flurry of reports in August-September that the president was seriously ill and these could have sparked Untung into action. Once the coup was underway the PKI felt it had no choice but to get on board. Sir Andrew Gilchrist, the British Ambassador in Jakarta, suspected that the communists only became aware of Untung's plan at a late stage and joined in because they feared that if the army crushed Untung it would crush them as well.<sup>28</sup> The Australian Joint Intelligence Committee noted that while individual communist groups clearly participated in the coup, 'evidence of actual PKI involvement - that is of prior planning by the Central Committee - is largely circumstantial'.<sup>29</sup> By contrast, Marshall Green, the US Ambassador to Indonesia, was convinced that party chairman Aidit and other top PKI leaders 'were almost certainly in on planning' the coup although he conceded that the 'PKI decision to participate seems to have been hurried one'.<sup>30</sup>

If Western policymakers were unsure about the role of the communists the Indonesian army appeared to have no doubts and it pressed Sukarno for strong action against the PKI. However, the president tried to protect the PKI and he refused to ban the party. He promised a peaceful political settlement and called for national unity, warning that division would only benefit the Nekolim. Reportedly at a cabinet meeting on 6 October Sukarno and Subandrio blamed the coup attempt on the CIA and alleged that the CIA's aim was to spread confusion before an American and British invasion of Indonesia.<sup>31</sup> The army, though, was not diverted by Sukarno's appeals for unity and it began to move against the PKI. It arrested communist cadres and encouraged anti-PKI demonstrations in Jakarta. It also tried to mobilize public opinion by taking control of the mass media.<sup>32</sup> The army closed down the communist press while ensuring the continued publication of military newspapers such as Angkatan Bersendjaja, Berita Yudha and the English language Jakarta Daily Mail. It took control over Radio Indonesia and the Antara news agency, which was the main supplier of news carried by Indonesian radio stations and newspapers. Through these outlets the army attacked the PKI and linked it to Untung's coup attempt. On 4 October an editorial in Angkatan Bersendjaja lambasted the PKI as 'devils' who were 'injecting poison into the Indonesian nation and the revolution'.<sup>33</sup> Two days later the paper claimed the coup attempt was masterminded by the PKI and called on the government to declare the party illegal.<sup>34</sup> One prominent theme in this propaganda campaign was the murder of the six Indonesian generals. The army-controlled media alleged that members of the PKI youth organization, Pemuda Rakjat, and the communist women's group, Gerwani, had brutally tortured the generals before killing them.<sup>35</sup> For example, on 10 October Berita Yudha reported that the generals' eyes had been gouged out. These claims were untrue. Although the generals' bodies had partially decomposed after being dumped in a well by the rebels, autopsies showed they had not been tortured or mutilated after death.<sup>36</sup> Nonetheless this story became

a central feature of the army's propaganda campaign and a founding myth for the later Suharto regime.

In mid-October Suharto seems to have given approval for army units to deal with the PKI and the army rounded up and killed party members throughout the country. It also armed nationalist and Muslim groups, such as the Ansor Muslim youth organization, and encouraged them to eliminate the communists. The result was a wave of mass killings, spreading across Java, Sumatra, Sulawesi and into Bali by December and then onto Timor, Flores and Lombok. News of the slaughter slowly reached Western diplomats in Jakarta, who had only limited information on what was happening outside the capital. On 9 November an Australian teacher returning from central Java reported 'All manner of atrocities, stakes through heads, eye gouging, live burials being freely committed by both sides'.<sup>37</sup> On 14 November an American missionary told her embassy of the massacre of 3,400 PKI activists by Ansor at Kediri, in East Java.<sup>38</sup> An Indonesian source informed the British air attaché that PKI men and women were being executed in very large numbers.<sup>39</sup> Often they were given knives and told to kill themselves. If they refused they were shot in the back. An American observer in Bali reported 'many headless bodies encountered on roads' and a traveller in Sumatra saw Muslim youth group members stop a bus, drag out numerous communist passengers and hack them to death.<sup>40</sup> In February 1966 a visiting Australian diplomat learnt that 250 PKI members had been killed in the town of Kupang in Timor.<sup>41</sup> He was told by the chief of the Public Works Department in Kupang that torture was the customary prelude to death and was in fact carried out in the army establishment next door to his own home. The nightly executions, carried out just outside Kupang, were open to the public provided those who attended took part in the executions. The Army was in complete control of these operations.

Precisely how many were killed in the massacres is not known and may never be known. Estimates varied widely.<sup>42</sup> In January 1966 Colonel Stamboul, an army liaison officer, confided to the British military attaches that the army had no exact idea of the death toll but he estimated 500,000. Others in the army put the figure far higher. Major-General Adjie, the fiercely anti-communist commander of the Siliwangi division in West Java, told the Australian military attaché that nearly two million were killed. Short of hard evidence Western governments were cautious on the scale of the bloodletting. In April 1966 the State Department thought that around 300,000 had died.<sup>43</sup> Even so, the violence from October 1965 to January 1966 would still rank as one of the largest mass killings of the twentieth century.

The army-controlled media in Indonesia did not report the massacres. Instead the media stoked up hatred of the communists by portraying them as sadistic murderers, intent on killing their opponents. It alleged that the coup attempt and the murder of the generals had been only the start of the communists' plans for a reign of terror. Antara reported at the beginning of November that a list had been found in Garut of the names of hundreds of government officials the PKI had planned to kill if the coup had been a success.<sup>44</sup> In December the news agency ran a story that Aidit had offered party activists in Java 25 million rupiahs if they murdered more than 1,000 people on a PKI black-list.<sup>45</sup>



Communist atrocity stories were also a prominent feature in the media.<sup>46</sup> In November Antara claimed that Pemuda Rakjat members in Sumatra had kidnapped two youths and tortured them for five days, removing eyes and cutting off hands and testicles, before killing them. Another Pemuda Rakjat gang in Sumatra was alleged to have attacked Muslims praying on the bank of a river and again tortured and murdered them. The moral depravity of the communists was emphasized in other ways: Antara reported on 8 December that Aidit had encouraged the Gerwani and Pemuda Rakjat killers of the generals to take part in 'delirious sexual orgies' for six months before the coup.<sup>47</sup> In December the Jakarta Daily Mail denounced the communists as 'mentally and morally perverted creatures who consider slander, abduction, mutilation and murder their way of life'.<sup>48</sup> The paper declared that there was no place for the PKI in God-fearing Indonesia and called on people to 'Cast out this spawn of hell root and branch'. Such demonization of the PKI could only have fuelled the pogrom against the party. This is certainly what Sukarno feared. The Indonesian president tried to protect the communists from the massacres - he constantly called for calm and national unity, condemned the killings and threatened to punish by death those who used force against the PKI.<sup>49</sup> He also repeatedly warned the press not to incite the public with inflammatory articles and irresponsible reporting.<sup>50</sup> Sukarno and Subandrio both denied stories that the communists had tortured and mutilated the six generals during the coup.<sup>51</sup> They pointed out that the general's death certificates had not mentioned any 'abnormalities'.

These efforts were in vain though. The army retained control of most of the media and it ensured that Sukarno's message did not get through to the Indonesian public. Newspapers and Antara frequently failed to publish the text of speeches by the president.<sup>52</sup> Other papers, such as the Jakarta Daily Mail, carried commentaries which distorted Sukarno's remarks, to make them appear to add up to a case for destroying the PKI.<sup>53</sup> Sukarno was powerless in the face of the massacres. During the period of repression the West gave covert support to the army. The Western powers had been greatly heartened by the events in Indonesia after 1 October. A real chance had appeared to smash the PKI and perhaps remove Sukarno, and the West was anxious that the army leaders fully seized the opportunity. As both the Australian and American embassies put it in telegrams on 5 October, it was 'now or never' for the army.<sup>54</sup> The key question was how the West could best encourage and help Suharto and Nasution. Any overt support was likely to be counterproductive as Sukarno and Subandrio would immediately denounce Nekolim interference in Indonesia. The West would therefore have to be circumspect in its approach. For Green the priority was to smear the PKI's image through propaganda. On 5 October the ambassador had urged Washington to 'Spread the story of PKI's guilt, treachery and brutality', adding that this was 'perhaps the most needed immediate assistance we can give army if we can find way to do it without identifying it as sole or largely US effort'.<sup>55</sup> The State Department agreed. It had already begun a VOA and information programme connecting the PKI to the coup attempt.<sup>56</sup> Green appeared satisfied with the results. He cabled Washington on 7 November 'that VOA doing good job'.<sup>57</sup> There are also indications that the CIA carried out covert anti-PKI propaganda after the coup.<sup>58</sup>

The Australians were also active in this field. After 1 October the Department of External Affairs gave daily guidance to Radio Australia over its broadcasts to Indonesia.<sup>59</sup> The Department stressed that Radio Australia should not give information to the Indonesian people that the army-controlled internal media would withhold, such as disavowals by the PKI of responsibility for the coup. Instead the station should highlight reports discrediting the PKI and showing its involvement in the Untung coup attempt. The station seems to have faithfully followed these guidelines, for Keith Shann, the Australian Ambassador in Jakarta, was pleased with Radio Australia's output, describing it as 'generally good'.<sup>60</sup>

For their part the Malaysians tried to blame the putsch on the communists and inflame popular feeling in Indonesia. For example, on 13 October a news commentator on Radio Malaysia read out an editorial from the Beirut newspaper *Lissan Al-Hal* which claimed that, 'without the slightest shade of doubt', the coup was contrived by the PKI.<sup>61</sup> He recalled the murder of Naustion's daughter and 'the mutilated bodies of the six Muslim generals. who [were] dismembered, cut to small bits and thrown in a well'. Whipping up feelings further, the newsreader said 'Such atrocities against Muslims cannot but make the blood boil in every Muslim heart. they open every Muslim eye to the dirty work which no communist lackey would hesitate to do whenever the master dictates'. The British were working on similar lines. The Foreign Office hoped to 'encourage anti-Communist Indonesians to more vigorous action in the hope of crushing Communism in Indonesia altogether'.<sup>62</sup> The Information Research Department would stimulate broadcasts to Indonesia by the BBC, Radio Malaysia, Radio Australia and VOA. It would also try to disseminate propaganda through newspapers read in Indonesia such as the *Straits Times*. The same anti-PKI message was to be spread by more clandestine outlets, such as a 'black transmitter' (presumably Radio Free Indonesia) and 'IRD's regular newsletter', which seems to have been 'black' propaganda prepared in Singapore by the Information Research Department's South East Asia Monitoring Unit.<sup>63</sup> Suggested propaganda themes included 'PKI brutality in murdering Generals and families, Chinese interference, particularly arms shipments, PKI subverting Indonesia as the agents of foreign Communists'.<sup>64</sup> On 9 October the Foreign Office reported that it was mounting some 'short term unattributable ploys designed to keep the Indonesian pot boiling'.<sup>65</sup>

British propaganda efforts were strengthened by the arrival in November of Norman Reddaway as Political Warfare Coordinator in Singapore. Reddaway received news on the situation in Indonesia from the embassy in Jakarta and from intelligence sources, which seem to have included signals intelligence, as Britain had broken the Indonesian ciphers.<sup>66</sup> He would then supply information that suited British purposes to news agencies, newspapers and radio via contacts in Singapore, Kuala Lumpur and Hong Kong. This news would be carried out into the world's media and return to Indonesia, allowing Britain to influence Indonesian opinion. The reports were designed to damage the communists. A draft Foreign Office brief in late November explained that Britain had been 'blackening the PKI's reputation within Indonesia and outside, by feeding into the ordinary publicity media news from Indonesia that associates the PKI and the Chinese with Untung's treachery plus corresponding covert activity'. Thus, despite some private doubts over communist responsibility for

the coup attempt, all four Western powers used the media to pin the blame on the PKI and discredit the party in Indonesia. This propaganda offensive supported the army's own activities, as the stories on VOA, Radio Malaysia, Radio Australia and the BBC and in the press confirmed the stories in the army-controlled media. The synergy between the two publicity campaigns was not accidental. The British and Americans recycled reports from Radio Jakarta or the army newspapers by broadcasting them back to Indonesia.<sup>67</sup> For example, on 5 November the Jakarta Daily Mail claimed that on the day of the coup 100 women from Gerwani had tortured one of the generals by using razor blades and knives to slash his genitals before he was shot.<sup>68</sup> In December an Information Research Department official noted that this atrocity story would be included in the South East Asia Monitoring Unit's propaganda output.<sup>69</sup> Furthermore the Indonesian army actively advised the Western powers on the themes they should or should not use in their propaganda. On 2-3 November Indonesian Brigadier-General Sukendro had secret talks in Bangkok with Dato Ghazali Shafie, the Permanent Secretary at the Malaysian Ministry of External Affairs.<sup>70</sup> Sukendro said that Radio Malaysia should not give the army 'too much credit' or criticize Sukarno but should emphasize PKI atrocities and the party's role in the coup. Sukendro also asked for help in 'the character and political assassination' of Subandrio and offered to send background information on the Foreign Minister which could be used by the Malaysians. On 5 November an Indonesian military contact also approached the Americans and warned them against broadcasts that implied approval of army actions.<sup>71</sup> An officer in the army information section told Shann that Radio Australia should never suggest that the army was pro-Western or rightist and should mention other organizations, such as Muslim and youth groups, opposing the PKI.<sup>72</sup>

As well as using propaganda against the PKI the Western powers helped the army in other ways. The Americans set up a back-channel link to the army leaders through Colonel Willis Ethel, the US Army Attaché in Jakarta, who regularly met with an aide to Nasution. Through this channel the Americans reassured the Indonesian army about British activities and intentions, for although these two groups shared a common interest in the removal of the communists, because of the Confrontation the army was suspicious of Britain.

The mistrust could reach ludicrous levels. In mid-October Nasution's aide quizzed Ethel about reports of British arms shipments to the PKI and asked whether the coup could have been a plot by Britain and communist China.<sup>73</sup> To Washington these bizarre ideas showed the 'somewhat naïve international view' of the army leaders, but they genuinely seemed to suspect a conspiracy between London and Beijing.<sup>74</sup> Ethel had to assure them that Britain had not colluded with the Chinese and the PKI.<sup>75</sup>

Ethel also gave a broader assurance that Britain would not escalate the Confrontation while the army was dealing with the communists. With the approval of London, on 14 October Ethel told Nasution's aide that the British did not intend to start any offensive military action.<sup>76</sup> In early November the British and Australians reinforced this message.<sup>77</sup> Counsellor James Murray promised General Mokoginta, the Commander of Indonesian Armed Forces in Sumatra, that Britain had no intention of stepping up the Confrontation while the army was engaged with the PKI.

Gilchrist and Shann said the same thing to Helmi, an Under-Secretary at the Indonesian Ministry of Foreign Affairs who was close to the army. Shann declared that the army 'would be completely safe in using their forces for whatever purpose they saw fit'.<sup>78</sup> The Indonesian army could suppress the communists without worrying about British and Australian operations in the Confrontation. In addition, the Americans secretly gave the army material aid. At the end of October Sukendro asked the US for medical supplies, communications equipment, rice and small arms to support the army's campaign against the PKI.<sup>79</sup> Washington was willing to help but it knew that there were major political risks involved. If American aid was exposed Sukarno and Subandrio would have proof of Nekolim interference in Indonesian internal affairs and this would seriously embarrass both the United States and the army. So the Americans moved carefully. On 12 November the State Department informed the British and Australians that the US had agreed to send \$100,000-worth of medical supplies to the Indonesian army via covert channels.<sup>80</sup> The 303 Committee also agreed on 19 November to give the army leaders a secure communications system, to maintain contact with each other and with 'U.S. elements'.<sup>81</sup> In interviews in 1981-82 Sukendro confirmed that the US had secretly supplied medicines, radios and small arms through the Bangkok CIA station.<sup>82</sup> Money may have been provided as well - in December Green recommended a 'black bag' operation giving 50 million rupiahs to Adam Malik, a key figure in KAP-Gestapu, an army-inspired action group that organized anti-PKI demonstrations.<sup>83</sup>

Finally, the US supplied the army with intelligence.<sup>84</sup> The American embassy in Jakarta had compiled lists of names of the PKI leadership and senior cadres and, according to Green, this information was superior to anything held by the Indonesian army. After the coup attempt embassy officials passed on to the army lists of names of known PKI leaders. The army could use this information to round up key communists and dismantle the party structure.

The actions taken by the army in suppressing the communists did seem to trouble the consciences of some of the Western ambassadors in Jakarta. In a telegram to Canberra on 19 December Shann wrote that 'In many cases the massacre of entire families because one member spoke to the Communists, has occurred. Some of the methods adopted are unspeakable . [It has been] a blood-bath of savage intensity, remarkably unpublicised and locally regarded with a ghoulish cynicism'.<sup>85</sup> Gilchrist asked Reddaway in February 1966 'What have we to hope from the [Indonesian] generals? 400,000 people murdered, far more than total casualties in Vietnam+nobody cares. "They were communists." Were they? And are communists not human beings?'<sup>86</sup>

Yet the massacre of thousands of communists did not affect Western policy.

The logic of the Cold War meant that the army was fulfilling the Western interest by eliminating the PKI and removing the danger of Indonesia falling to communism. The army was also the only means to dispose of Sukarno and end the Confrontation. Therefore, despite distaste for the army's methods, the West still wanted to support it. The main problem for this policy was not ethical concerns but the fear that overt aid could embarrass the army in its power struggle with Sukarno and Subandrio. On 1-2 December 1965 American, Australian, British and New Zealand officials held secret

Quadripartite talks to coordinate policy towards Indonesia.<sup>87</sup> The mass killings were not even mentioned. Instead the officials discussed the difficulties in helping the army while Sukarno and Subandrio remained in power. The West still had to take care not to make the army appear to be Nekolim stooges and for this reason it was agreed at the meeting that 'except for some cautious propaganda (on lines already agreed) we should take no initiative at this moment to help the Generals'.

There was another reason why the West would not offer greater aid, especially economic aid: the army did not seem to want it. In November Sukendro had raised the possibility of the US and Malaysia giving rice, which was in short supply in some areas in Indonesia.<sup>88</sup> But by the middle of December the army leaders seemed to have abandoned this idea. On 13 December Malik told Green that there was an urgent need for food and clothing in Indonesia but Suharto and Nasution wanted to let Sukarno and Subandrio 'stew in their own juice'.<sup>89</sup> Economic mismanagement hurt the civilian government, not the army, and if the situation worsened Sukarno and Subandrio would be blamed. Malik advised the US not to give aid yet.

Malik's prediction about the effects of economic distress soon came true. To try and rescue the floundering economy in mid-December Sukarno's government devalued the rupiah by an order of 1,000 and then quadrupled fuel prices in early January.<sup>90</sup> These harsh fiscal measures provoked mass student protests. An Indonesian Student Action Front, composed mainly of Muslim and nationalist students, organized demonstrations. They linked economic discontent to political protest, demanding not just a reduction in prices but also the removal of left-wing ministers, such as Subandrio, and the formal banning of the PKI. The army gave covert assistance to the students, transporting them to demonstrations and protecting them. The army leaders saw the student protests as a way to undermine Sukarno's rule and ease him and Subandrio from office.

In their campaign the army and students again received propaganda support from the West. Reddaway reported on 11 February that: We have . stepped up our efforts. The Malaysian black radio is taking our tapes, material written by us in Djakarta is appearing in Middle East Muslim newspapers and being repeated by Radio Malaysia so that Indonesians hear it. The newsletter undoubtedly continues to get through and be read. We pick up anti-Subandrio propaganda circulated within Indonesia and get it published world-wide via news agencies in Hong Kong.<sup>91</sup>

On 21 February Sukarno tried to reassert his authority by reshuffling his cabinet and sacking Nasution as Defence Minister. But this move backfired. It triggered off even larger student demonstrations, again abetted by the army, and on 11 March troops mounted a show of force outside Sukarno's palace. Under this pressure Sukarno yielded and he signed a letter of authority handing over executive power to Suharto. Although Sukarno remained nominally in charge real power was now in the hands of the army. The Western allies were delighted with the army's seizure of power. An American official explained to President Johnson on 12 March that:

It is hard to overestimate the potential significance of the army's apparent victory over Sukarno (even though the latter remains as a figurehead). Indonesia has more people - and probably more resources - than all of mainland Southeast Asia. It was well on the way to becoming another expansionist Communist state, which would

have critically menaced the rear of the whole Western position in mainland Southeast Asia. Now, though the unforeseen can always happen, this trend has been sharply reversed.<sup>92</sup>

The pro-communist trend had indeed been reversed. During the remainder of 1966 and 1967 Suharto moved methodically to undo all of Sukarno's policies. He banned the PKI, detained Subandrio, ended Confrontation with Malaysia, rejoined the United Nations and froze relations with communist China. Sukarno was stripped of his remaining powers and died in obscurity.

### **Indonesia was saved for the West.**

The question remains of how far the Western powers were responsible for this outcome. Did Western covert intervention in Indonesia cause the destruction of the PKI and the removal of Sukarno? The origins of the coup attempt in October 1965 remain obscure but on the evidence from currently available American, Australian and British archives it does not seem to have been a Western-inspired or -supported plot. Certainly the West gave covert support to the army after the coup but it appears, as Brands argues, that the indigenous actors were the key to events in Indonesia from October 1965 to March 1966. It was the army that chose to crush the communists and topple Sukarno's government. While the attitude of the West may have encouraged the army to move against the PKI it probably did not need much encouragement. Nasution, for example, whose daughter had been murdered in the coup, had reasons enough of his own. The United States did help the army by providing radios, medicine, small arms and lists of names and by giving assurances that Britain would not escalate the Confrontation, but this support was not essential to the army's success.

Western propaganda may have been of more importance in bringing down Sukarno's regime and in inciting the massacre of the communists. The documentary sources do, for example, corroborate a lot of Lashmar and Oliver's revelations about British covert propaganda operations in 1965-66. The influence of the West on the anti-communist Terror should not be exaggerated though. The killings were not just political acts in the Cold War, they were also a complex sociological phenomenon and the perpetrators had a wide variety of local motives.<sup>93</sup> The PKI had supported land reform in rural areas and this had created bitter resentment between peasant party members and small landlords. Muslims and, in Bali, Hindus were driven by religious fervour to slaughter the atheist communists. The killings sometimes had racial overtones, such as attacks on ethnic Chinese in North Sumatra. In the frenzy of violence people saw a chance to satisfy personal vendettas. Other factors than propaganda drove civilians to murder suspected communists. The killings were not just a reaction to Western propaganda - they were the culmination of years of built up tension and hatred.

It can also be questioned how large the audience for Western propaganda actually was. Australian officials believed that the only about 60 per cent of the adult Indonesian population was literate and the number of newspaper readers was thought to be just 500,000.<sup>94</sup> Radio was a more important source of news but the number of listeners was still limited. Radio Indonesia estimated in 1963 that there were 3.5 million radio sets in the country with an effective listenership of 17 million,

but this might have been an underestimate, as one radio set could be listened to by a large number in a small village which had no other sources of information.

Of the foreign radio stations Radio Australia was generally agreed to be the most popular, indeed an army officer told the Australians in September 1965 that Radio Australia was more popular than Radio Indonesia.<sup>95</sup> It was listened to by the elite - Nasution was said to be a regular listener – and by students, who liked it because it played rock music, which had been officially banned in Indonesia. The BBC Indonesian service had far fewer listeners and was dismissed in an Information Research Department report in June 1965 as being 'probably only of marginal value'.<sup>96</sup> Voice of America suffered from having a weak signal and was difficult to hear.<sup>97</sup> Green complained to Washington on 19 October 1965 about the 'appalling inadequacy of VOA signal to Indonesia' and called for emergency measures to give a clear reception.<sup>98</sup> Radio Malaysia was audible, but in the opinion of Gilchrist it was not trusted by Indonesians and therefore had no great influence.<sup>99</sup> The audiences of the West's covert propaganda outlets are impossible to gauge, but judging by the relatively few newspaper readers and radio listeners in Indonesia, Western propaganda may have only been able to reach and affect a limited number of people.

Nevertheless, there are signs that Western propaganda may have had an impact. The Indonesian government seemed to notice the propaganda campaign and feel threatened by it. In a speech in January 1966 Sukarno declared those unhappy with his leadership should say so openly and 'not carry out campaigns of secret slander inspired by Nekolim to bring about his downfall'.<sup>100</sup> In February an editorial in the Indonesian Herald newspaper, which acted as the mouthpiece for Subandrio's Foreign Ministry, warned of a 'Necolim psywar' being used to 'subdue our revolution'.<sup>101</sup>

On the other side, British officials believed that their propaganda had been effective. Gilchrist wrote in April 1966 that military and political propaganda pressure on Indonesia 'has had no small effect in breaking up the Soekarno regime'.<sup>102</sup> Reportedly, Sir John Grandy, the British Commander in Chief in the Far East, thought Reddaway's propaganda work 'made an outstanding contribution to the campaign against the Indonesians'.<sup>103</sup>

The explanations ordinary Indonesians gave for the massacres also appeared to show the influence of propaganda. Western journalists travelling in Java and Bali in the spring and summer of 1966 observed that people repeatedly justified the killings as self-defence. Seymour Topping wrote in the New York Times that 'Many Indonesians say bluntly "It was them or us"'.<sup>104</sup> He heard rumours in the towns of the PKI digging mass graves prior to the coup and PKI files naming high-ranking army officers, local officials and religious leaders that were to be executed. Stanley Karnow reported in the Washington Post that 'Everywhere . people sought to justify the destruction of the Communists with the same phrase "If we hadn't done it to them they would have done it to us"'.<sup>105</sup> He believed this pervasive attitude was largely due to the 'the brutal fashion in which the Communists murdered [the] six army generals'. Dennis Warner, quoted an Indonesian in The Sydney Morning Herald as saying 'I think the murder of the generals and Nasution's daughter had such an



impact on us all, especially when we learnt what was in store for the rest of us, that no one had any sympathy for the PKI'.<sup>106</sup>

Clearly, some of the themes of the propaganda campaign are present here but there is a difficulty in separating out the effects of internal army propaganda from Western propaganda, as both were conveying the same message. It is likely that Western propaganda played a secondary, supporting role. The news coming from abroad would have confirmed the stories Indonesians were hearing at home - that the PKI had masterminded the coup, that communist women tortured and murdered the six generals, that the communists had planned to massacre their enemies. Western propaganda helped build up the picture of the communists as menacing, bloodthirsty killers that needed to be eradicated. The impact of this campaign was to dehumanize the communists and make it easier to murder them. As one Indonesian civilian, who executed 18 communists, put it to a journalist in 1966 'I did not kill people. I killed wild animals'.<sup>107</sup> To this extent Western covert intervention may have encouraged the massacres in Indonesia in the winter of 1965-66.

#### Notes

1. Scott, 'The United States and the Overthrow of Sukarno'
2. Scott, 'The United States and the Overthrow of Sukarno', 239
3. Brands, 'The Limits of Manipulation'
4. Brands, 'The Limits of Manipulation', 787.
5. Lashmar and Oliver, Britain's Secret Propaganda War, 1-10.
6. Lashmar and Oliver, Britain's Secret Propaganda War, 1.
7. Lashmar and Oliver allege that in 1962 the British Prime Minister Harold Macmillan and the American President John Kennedy secretly agreed to 'liquidate' Sukarno. This allegation was recently repeated in Blum, Killing Hope. The original basis for this claim is a partially declassified CIA document, Declassified Documents Referencing Service (DDRS), British Library of Political and Economic Science, 1975, Item 240A, CIA Report CS-3/522,563, 17 September 1962. In this document the writer does claim that Macmillan and Kennedy had agreed to liquidate Sukarno. However, although the document has been partially sanitized, it is fairly clear that it is a report from an Indonesian diplomat or intelligence officer which had been obtained by the CIA (the writer tells a Pakistani diplomat that Pakistan should leave the Western bloc and become neutralist; he interchangeably refers to Indonesia and 'we' buying parachutes from Pakistan). Furthermore the writer's claim about the Kennedy-Macmillan plot is, by his own admission, based on 'impressions I have received in conversations with Western diplomats' and not on hard evidence. The document might illustrate Indonesian fears about Western intentions but it offers no proof of an Anglo-American plot in 1962 to liquidate Sukarno.



8. The National Archives (TNA) (Public Records Office) CAB 148/19 OPD(65)25, 26 January 1965; National Intelligence Memorandum NIE 54/55-65, 1 July 1965, FRUS, Indonesia 1964-68, vol. 26, 270-71.
9. Easter, 'British and Malaysian Covert Support'.
10. Easter, 'British Intelligence and Propaganda'.
11. TNA FO 1101/1, Minute 'War of nerves Indonesia', not dated.
12. Easter, 'British Intelligence and Propaganda' , 93-4.
13. TNA FO 371/187587, Minute Stanley to Edmonds, 17 June 1966; TNA FO 371/181530, Telegram 2645 Commonwealth Relations Office (CRO) to Kuala Lumpur, 19 October 1965.
14. TNA DEFE 28/144, Minute Drew to PS/Minister, 19 December 1963; TNA FO 953/2140, Telegram 2380 Kuala Lumpur to CRO, 25 October 1963.
15. Political Action Paper, 19 November 1964; Memorandum for 303 Committee, 23 February 1965, FRUS, 'Indonesia', 181-84; 234-37.
16. Memorandum for 303 Committee, 23 February 1965, FRUS, 'Indonesia', 234-7.
17. TNA FO 371/180337, Despatch 10342/65 Stewart to Peck, 26 April 1965.
18. Report from Ambassador Ellsworth Bunker to President Johnson, not dated, FRUS, 'Indonesia', 256.
19. National Archives of Australia (NAA) A1838/555/1/9/1 Part 1, 'Overseas broadcasts to Indonesia. Discussions with United States' officials', Canberra 3-4 August 1965, not dated; Bunnell, 'American "Low Posture" Policy towards Indonesia'.
20. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Telegram 2122 Washington to Department of External Affairs (DEA), 22 June 1965.
21. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, 'Overseas Broadcasts to Indonesia. Discussions with United States' Officials', Canberra 3-4 August 1965, not dated.
22. For an examination of the different theories see Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 97-134, and Elson, Suharto, 110-18.
23. DDRS, Retrospective Collection, Item 605D, Telegram 800 Jakarta to Washington, 1 October 1965; NAA A6364/4 JA 1965/07, Telegram 1149, Jakarta to Canberra, 1 October 1965; TNA FO 371/180317, Gilchrist to Foreign Office (FO), 3 October 1965.
24. FRUS, 'Indonesia', 301 footnote.
25. TNA FO 371/180317, Telegram Guidance 398 CRO to Kuala Lumpur, 4 October 1965; NAA A1838/3034/2/18/8 Part 1, Telegram 3445 Washington to DEA, 4 October 1965.

26. DDRS, Retrospective Collection, Item 29C, CIA Office of Central Intelligence, OCI No 2342/65, 28 October 1965.
27. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 3445 Washington to DEA, 4 October 1965; Telegram 3442 Washington to DEA, 4 October 1965.
28. TNA FO 371/180320, Despatch DH1015/2/5 Gilchrist to Stewart, 19 October 1965.
29. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 7, Note 'Indonesia, PKI Responsibility for the Attempted Coup', 9 December 1965.
30. Telegram 1184 Jakarta to State Dept, 26 October 1965, FRUS, 'Indonesia', 335-7.
31. DDRS Retrospective Collection, Item 28E, Telegram CIA/OCI 12980 Jakarta to Washington, 6 October 1965; Retrospective Collection, Item 29A, Telegram CIA/OCI 13185 Jakarta to Washington, 8 October 1965.
32. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1156 Shann to DEA, 2 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 2, UPI report 274, 11 October 1965; NAA A6364/JA1965/015 Political Savingram 52, Jakarta to DEA, 15 October 1965; TNA FO 371/180317, Telegram 2083 Gilchrist to FO, 8 October 1965.
33. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1169 Jakarta to DEA, 5 October 1965.
34. TNA FO 371/180317, Telegram 2061 Gilchrist to FO, 6 October 1965.
35. Anderson, 'How did the Generals Die?'
36. Anderson, 'How did the Generals Die?'. Simons, Indonesia: The Long Oppression, 173-4.
37. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 5, Record of a conversation with Marietta Smith, 9 November 1965.
38. DDRS Retrospective Collection, Item 615C, Telegram 171 Surabaya to Jakarta, 14 November 1965.
39. TNA FO 371/180325, Letter by Charney, 24 November 1965.
40. Lyndon Johnson National Security Files (NSF), Kings College, London, Reel 8 634-6, Telegram 1814 Jakarta to State Dept, 21 December 1965; Sydney Morning Herald, 30 December 1965.
41. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 11, Despatch Starey to DEA, 25 February 1966.
42. NAA A1838/3034/1 Part 2, Visit to Indonesian Military Establishments 20-27 June 1966 by Warner, 30 June 1966. TNA FO 371/186027, Despatch 1011/66 Jakarta to FO, 13 January 1966.
43. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 13 Memo No 601/66 Birch to DEA, 19 April 1966.
44. TNA FO 371/180322, Telegram 2426 Jakarta to FO, 3 November 1965.

45. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 8, UPI report 284, 18 December 1965.
46. TNA FO 371/180323, Cambridge to Tonkin, 9 November 1965; Telegram 2528 Gilchrist to FO, 13 November 1965.
47. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 7, UPI report 264, 8 December 1965; UPI report 265, 8 December 1965.
48. TNA FO 371/180325, Jakarta Daily Mail, 11 December 1965.
49. NAA A1209/1965/6674 Part 1, Telegram 1278 Jakarta to DEA, 22 October 1965; Telegram 1294 Jakarta to DEA, 26 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 8, UPI report 10, 17 December 1965.
50. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 5, UPI report 96, 10 November 1965; NAA A6364/JA1965/015, Savingram 59, Jakarta to DEA, 25 November 1965.
51. NAA A1838/3006/4/9 Part 30, Interview Subandrio and Hastings, 15 December 1965; NAA A6364/JA1965/015, Savingram 62 Jakarta to DEA, 17 December 1965.
52. DDRS Retrospective Collection, Item 611C, Telegram 1195 Jakarta to State Dept, 25 October 1965; NAA A1838/3034/2/1 Part 48, Macdonnell to Ottawa, 18 November 1965.
53. NAA A6364/JA1965/015, Savingram 64 Jakarta to DEA, 23 December 1965.
54. DDRS Retrospective Collection, Item 28C, Telegram CIA/OCI 12848 Jakarta to Washington, 5 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1172, Shann to DEA, 5 October 1965.
55. Telegram 868 Green to State Dept, 5 October 1965, FRUS, 'Indonesia'" 307-8.
56. Telegram 400 State Dept to Jakarta, 6 October 1965, FRUS, 'Indonesia', 308-10.
57. DDRS Retrospective Collection, Item 613A, Telegram 1353 Jakarta to State Dept, 7 November 1965.
58. McGehee, Deadly Deceits , 57-8.
59. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 3, Minute Hay to Minister, 18 October 1965.
60. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 3, Minute Hay to Minister, 18 October 1965; Najjarine and Cottle, 'The Department of External Affairs'
61. TNA FO 371/180320, Radio Malaysia 2140 hours News Commentary, 13 October 1965.
62. TNA DEFE 25/170, Telegram 1863 FO to Singapore, 8 October 1965.
63. TNA FO 371/187587, Adams to de la Mare, attached diagram, 2 June 1966.
64. TNA FO 371/181455, Telegram 2679 CRO to Canberra, 13 October 1965.
65. TNA FO 371/181530, Telegram 1460 Stanley to Reddaway, 9 October 1965.

66. Easter, 'British Intelligence and Propaganda' , 85; TNA FO1101/5, Minute Reddaway to Tovey, 30 October 1965.
67. TNA FO 371/181455, Minute Stanley to Cable, 7 October 1965; Telegram 2679 CRO to Canberra, 13 October 1965.
68. TNA FO 371/180324, Despatch DH 1015/311 Jakarta to FO, 22 November 1965.
69. TNA FO 371/180324, Minute by Weilland, 22 December 1965.
70. TNA FO 371/181457, Record of meeting between Ghazali and Sukendro on 2-3 November 1965, 10 November 1965.
71. Lyndon Johnson NSF, Reel 8, 338-9, Telegram 1357 Jakarta to Washington, 5 November 1965.
72. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1340 Shann to Canberra, 5 November 1965.
73. DDRS Retrospective Collection, Item 610B, Telegram 497 State Dept to Jakarta, 21 October 1965; Johnson NSF, Reel 8, 251-2, Telegram 1139 Jakarta to State Dept, 22 October 1965.
74. Intelligence Memorandum OCI No 2942/65, 18 November 1965, FRUS, 'Indonesia', 372.
75. DDRS Retrospective Collection, Item 611D, Telegram 526 State Dept to Jakarta, 26 October 1965; Johnson NSF Reel 8, 288-289, Telegram 1201, Jakarta to State Dept, 26 October 1965.
76. Telegram unnumbered, Jakarta to State Dept, 10 October 1965; Telegram 1006 Jakarta to State Dept, 14 October 1965, FRUS, 'Indonesia', 317-18; 321-2.
77. TNA FO 371/181457, Record of Conversation with General Mokoginta by James Murray, 9 November 1965; Telegram 2509 Gilchrist to FO, 12 November 1965.
78. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1383 Shann to DEA, 12 November 1965.
79. Telegram 1288 Jakarta to State Dept, 1 November 1965, FRUS, 'Indonesia', 345-7.
80. Telegram 749 State Dept to Bangkok, 4 November 1965; Telegram 951 Bangkok to State Dept, 11 November 1965, FRUS, 'Indonesia', 357-8; 364-6.
81. Memorandum for 303 Committee, 17 November 1965, FRUS, 'Indonesia', 368-71.
82. Bunnell, 'American "Low Posture" Policy towards Indonesia', 59, footnote. On the supply of radios see also a letter from the journalist Kathy Kadane to the Editor, New York Review of Books, 10 April 1997.

83. Telegram 1628 Jakarta to State Dept, 2 December 1965, FRUS, 'Indonesia', 379-80.
84. Editorial Note, FRUS, 'Indonesia', 386-7; Article by Kathy Kadane in San Francisco Examiner, 20 May 1990.
85. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1503 Jakarta to DEA, 19 December 1965.
86. TNA FO 1101/30, Gilchrist to Reddaway, 9 February 1966.
87. NAA A1209/1968/9055, Memorandum by Eastman for DEA, 9 December 1966.
88. TNA FO 371/181457, Record of meeting Ghazali and Sukendro on 2-3 November 1965, 10 November 1965; Telegram 1288 Jakarta to State Dept, 1 November 1965, FRUS, 'Indonesia', 345-7.
89. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 8, Telegram 8 Washington to DEA, 4 January 1966; Memorandum of conversation, 14 February 1966, FRUS, 'Indonesia', 399-401.
90. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 7, UPI report 284, 14 December 1965. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 8, UPI report 230, 4 January 1966.
91. TNA FO 1101/23, Minute by Reddaway, 11 February 1966. Reddaway's comments suggest that the editorial in Lissan Al-Hal broadcast by Radio Malaysia on 13 October 1965 may have been British-inspired.
92. Memorandum Komer to Johnson, 12 March 1966, FRUS, 'Indonesia', 419.
93. Cribb, The Indonesian Killings 1965-1966
94. NAA A1838/3034/1 Part 2, 'Head of Mission Meeting, Bangkok, December 1965, Indonesia', not dated. NAA A1838/570/5/1/4 Part 1, Upton to DEA, not dated.
95. NAA A1838/555/1/9 Part 2, Conversation Sofjan and Jackson, 21 September 1965; NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Memorandum 'Radio Australia Indonesian Audience', by Barnett, not dated; TNA FO1101/1, Gilchrist to Reddaway, 11 August 1965.
96. TNA FO1101/1, Report by Drinkall, 3 June 1965. Audience figures were assessed by the number of letters the station received from Indonesian listeners. While Radio Australia received 16,000 letters a month, the BBC Indonesia service received 4,000 letters a year. NAA A1838 555/1/9 Part 2, Memorandum 'Australian information policy towards Indonesia', not dated; TNA FO1101/11, Reddaway to Commander in Chief, 3 March 1966.
97. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Telegram 2069 Washington to DEA, 17 June 1965.
98. DDRS Retrospective Collection, Item 609G, Telegram 1086 Jakarta to State Dept, 19 October 1965.

99. TNA FO1101/1, Gilchrist to Reddaway, 11 August 1965.
100. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 9, Savingram 3 Jakarta to DEA, 19 January 1965.
101. TNA FO1101/23, Indonesian Herald, 3 February 1966.
102. TNA FO 371/186044, Despatch 5 Gilchrist to Stewart, 12 April 1966.
103. TNA FO 1101/32, Telegram 205 POLAD Singapore to Bangkok, 26 September 1966.
104. New York Times, 24 August 1966.
105. Washington Post, 16 April 1966.
106. Sydney Morning Herald, 15 June 1966.
107. The Australian, 22 April 1966.

## References

- Anderson B. How Did the Generals Die?, Indonesia, 43 (1987) 109-34.
- Brands H.W. The Limits of Manipulation: How the United States didn't Topple Sukarno, Journal of American History, 76(3) (1989) 785-808.
- Blum William Killing Hope: US Military and CIA Interventions since World War 2. London: Zed Books (2003).
- Bunnell F. American "Low Posture" Policy towards Indonesia in the Months Leading Up to the 1965 Coup, Indonesia, 50 (1990) 29-60.
- Cribb R. The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University (1991).
- Crouch Harold The Army and Politics in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press (1978).
- Easter David, British and Malaysian Covert Support for Rebel Movements in Indonesia during the "Confrontation", 1963-66, The Clandestine Cold War in Asia 1945-65, R. Aldrich, G. Rawnsley and M. Rawnsley. London: Frank Cass (2000) 195-208.
- British Intelligence and Propaganda during the "Confrontation" 1963-66, Intelligence and National Security, 16(2) (2001) 83-102.
- Elson R. Suharto: A Political Biography. Cambridge: Cambridge University Press (2001).
- Lashmar Paul and Oliver James. Britain's Secret Propaganda War. Stroud: Sutton Publishing (1998).
- McGehee R. Deadly Deceits: My 25 Years in the CIA. New York: Sheridan Square Press (1983).
- Najjarine K. and D. Cottle. The Department of External Affairs, the ABC and Reporting of the Indonesian Crisis 1965-1969, Australian Journal of Politics and History, 49(1) (2003) 48-60.
- Scott Paul The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-67, Pacific Affairs, 58(2) (1985) 239-64.
- Simons G. Indonesia: The Long Oppression. Basingstoke: Macmillan (2000).
- TNA FO, 371/181457, Minute Stanley to Peck, 25 November 1965.

US Senate Foreign Relations of the United States (FRUS). Indonesia 1964-68, vol. 26. Washington: United States Government Printing Office (2001).

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Chomsky on Indonesia

### Securing the Anchor

"The problem of Indonesia" is "the most crucial issue of the moment in our struggle with the Kremlin," Kennan wrote in 1948. "Indonesia is the anchor in that chain of islands stretching from Hokkaido to Sumatra which we should develop as a politico-economic counter-force to communism" and a "base area" for possible military action beyond. A Communist Indonesia, he warned, would be an "infection" that "would sweep westward" through all of South Asia. Resource-rich Indonesia was also designated to be a critical part of the "Empire toward the South" that the US intended to recreate for Japan, now within the US-dominated system.

In accord with standard reasoning, "ultra-nationalism" Indonesia would prevent Southeast Asia from "fulfilling its main function" as a service area for the core industrial powers. Accordingly, the US urged the former Dutch rulers to grant independence, but under Dutch tutelage, an outcome critical to "Western Europe's economic rehabilitation, and to America's strategic well-being," Leffler observes, and to Japan's reconstruction as well. The principled antagonism to independent nationalism that animates US foreign policy took on particular significance in this case.<sup>4</sup>

After its liberation from the Dutch, Indonesia was ruled by the nationalist leader Sukarno. At first, the United States was willing to tolerate this arrangement, particularly after Sukarno and the army suppressed a land reform movement supported by the Indonesian Communist Party [PKI] in the Madiun region in 1948, virtually destroying the party's leadership and jailing 36,000 people. But Sukarno's nationalist and neutralist commitments soon proved entirely unacceptable.

The two major power centers in Indonesia were the army and the PKI, the only mass-based political force. Internal politics were dominated by Sukarno's balancing of these two forces. Western aims were largely shared by the army, who therefore qualified as moderates. To achieve these aims, it was necessary somehow to overcome the anti-American extremists. Other methods having failed, mass extermination remained as a last resort.

In the early 1950s, the CIA tried covert support of right-wing parties, and in 1957-1958 the US backed and participated in armed insurrection against Sukarno, possibly including assassination attempts. After the rebellions were put down, the US turned to a program of military aid and training coupled with a cutback of economic aid, a classic mode of pre-coup planning, followed in Chile a few years later, and attempted in Iran with the dispatch of arms via Israel from shortly after the Khomeini takeover --

one of the many crucial elements of the Iran-contra affair suppressed in the subsequent cover-up.<sup>5</sup> Universities and corporations also lent their willing hands.

In a RAND study published by Princeton University in 1962, Guy Pauker, closely involved with US policy-making through RAND and the CIA, urged his contacts in the Indonesian military to take "full responsibility" for their country, "fulfill a mission," and "strike, sweep their house clean." In 1963, former CIA staff officer William Kintner, then at a CIA-subsidized research institute at the University of Pennsylvania, warned that "If the PKI is able to maintain its legal existence and Soviet influence continues to grow, it is possible that Indonesia may be the first Southeast Asia country to be taken over by a popularly based, legally elected communist government... In the meantime, with Western help, free Asian political leaders -- together with the military - must not only hold on and manage, but reform and advance while liquidating the enemy's political and guerrilla armies." The prospects for liquidation of the popularly based political forces were regarded as uncertain, however. In a 1964 RAND memorandum, Pauker expressed his concern that the groups backed by the US "would probably lack the ruthlessness that made it possible for the Nazis to suppress the Communist Party of Germany... [These right-wing and military elements] are weaker than the Nazis, not only in numbers and in mass support, but also in unity, discipline, and leadership."

Pauker's pessimism proved unfounded. After an alleged Communist coup attempt on September 30, 1965, and the murder of six Indonesian generals, pro-American General Suharto took charge and launched a bloodbath in which hundreds of thousands of people, mostly landless peasants, were slaughtered. Reflecting on the matter in 1969, Pauker noted that the assassination of the generals "elicited the ruthlessness that I had not anticipated a year earlier and resulted in the death of large numbers of Communist cadres."

The scale of the massacre is unknown. The CIA estimates 250,000 killed. The head of the Indonesia state security system later estimated the toll at over half a million; Amnesty International gave the figure of "many more than one million." Whatever the numbers, no one doubts that there was incredible butchery. Seven-hundred-fifty-thousand more were arrested, according to official figures, many of them kept for years under miserable conditions without trial. President Sukarno was overthrown and the military ruled unchallenged. Meanwhile the country was opened to Western exploitation, hindered only by the rapacity of the rulers.

The US role in these events is uncertain, one reason being the gaps in the documentary record. Gabriel Kolko observes that "U.S. documents for the three months preceding September 30, 1965, and dealing with the convoluted background and intrigues, much less the embassy's and the CIA's roles, have been withheld from public scrutiny. Given the detailed materials available before and after July-September 1965, one can only assume that the release of these papers would embarrass the U.S. government." Ex-CIA officer Ralph McGehee reports that he is familiar with a highly classified CIA report on the agency's role in provoking the destruction of the PKI, and attributes the slaughter to the "C.I.A. [one word deleted] operation." The deletion was imposed by CIA censorship. Peter Dale Scott, who has carried out the most careful attempt to reconstruct the events, suggests that the



deleted word is "deception," referring to CIA propaganda that "creates the appropriate situations," in McGehee's uncensored words, for this and other mass murder operations (citing also Chile). McGehee referred specifically to atrocity fabrication by the CIA to lay the basis for violence against the PKI.<sup>6</sup>

There is no doubt that Washington was aware of the slaughter, and approved. Secretary of State Dean Rusk cabled to Ambassador Marshall Green on October 29 that the "campaign against PKI" must continue and that the military, who were orchestrating it, "are [the] only force capable of creating order in Indonesia" and must continue to do so with US help for a "major military campaign against PKI." The US moved quickly to provide aid to the army, but details have not been made public. Cables from the Jakarta Embassy on October 30 and November 4 indicate that deliveries of communications equipment to the Indonesian army were accelerated and the sale of US aircraft approved, while the Deputy Chief of Mission noted that "The embassy and the USG were generally sympathetic with and admiring of what the army was doing."<sup>7</sup>

For clarity, we must distinguish several issues. On the one hand, there are questions of historical fact: What took place in Indonesia and Washington in 1965-1966? There are also questions of cultural history: How did the US government, and articulate sectors at home, react to what they took to be the facts? The political history is murky. On the matter of cultural history, however, the public record provides ample evidence. The cultural history is by far the more informative with regard to the implications for the longer term. It is from the reactions that we draw lessons for the future.

There is no serious controversy about Washington's sympathy for "what the army was doing." An analysis by H.W. Brands is of particular interest in this connection.<sup>8</sup> Of the more careful studies of the events themselves, his is the most skeptical concerning the US role, which he regards as basically that of a confused observer, with "only a marginal ability to change a very dangerous situation for the better." But he leaves no doubt about Washington's enthusiasm about the turn "for the better" as the slaughter proceeded.

According to Brands's reconstruction of events, by early 1964 the US was engaged in "quiet efforts to encourage action by the army against the PKI," ensuring that when the expected conflict broke out, "the army [would know] it had friends in Washington." The goal of the continuing civic action and military training programs, Secretary of State Dean Rusk commented, was "strengthening anti-Communist elements in Indonesia in the continuing and coming struggle with the PKI." Chief of Staff Nasution, regarded by US Ambassador Howard Jones as "the strongest man in the country," informed Jones in March 1964 that "Madiun would be mild compared with an army crackdown today," referring to the bloody repression of 1948.

Through 1965, the main question in Washington was how to encourage army action against the PKI. US emissary Ellsworth Bunker felt that Washington should keep a low profile so that the generals could proceed "without the incubus of being attacked as defenders of the neo-colonialists and imperialists." The State Department agreed. Prospects, however, remained uncertain, and September 1965 ended, Brands continues, "with American officials anticipating little good news soon."

The September 30 strike against the army leadership came as a surprise to Washington, Brands concludes, and the CIA knew little about it. Ambassador Green, who had replaced Jones, told Washington he could not establish any PKI role, though the official story then and since is that it was a "Communist coup attempt." The "good news" was not long in coming. "American officials soon recognized that the situation in Indonesia was changing drastically and, from their perspective, for the better," Brands continues. "As information arrived from the countryside indicating that a purge of the PKI was beginning, the principal worry of American officials in Jakarta and in Washington was that the army would fail to take advantage of its opportunity," and when the army seemed to hesitate, Washington sought ways "to encourage the officers" to proceed. Green recommended covert efforts to "spread the story of the PKI's guilt, treachery, and brutality," though he knew of no PKI role. Such efforts were undertaken to good effect, according to McGehee's account of the internal CIA record. George Ball, the leading Administration dove, recommended that the US stay in the background because "the generals were doing quite well on their own" (Brands's paraphrase), and the military aid and training programs "should have established clearly in the minds of the army leaders that the US stands behind them if they should need help" (Ball). Ball instructed the Jakarta embassy to exercise "extreme caution lest our well-meaning efforts to offer assistance or steel their resolve may in fact play into the hands of Sukarno and [his political associate] Subandrio." Dean Rusk added that "If the army's willingness to follow through against the PKI is in anyway contingent on or subject to influence by the United States, we do not want to miss the opportunity to consider U.S. action."

Brands concludes that US covert aid "may have facilitated the liquidation of the PKI," but "at most it speeded what probably would have happened more slowly." "Whatever the American role in these developments," he continues, "the administration found the overall trend encouraging. In mid-December Ball reported with satisfaction that the army's campaign to destroy the PKI was 'moving fairly swiftly and smoothly.' At about the same time Green cabled from Jakarta: 'The elimination of the communists continues apace'." By early February 1966, President Johnson was informed that about 100,000 had been massacred. Shortly before, the CIA reported that Sukarno was finished, and "The army has virtually destroyed the PKI."

Nevertheless, Brands continues, "Despite that good news the administration remained reluctant to commit itself publicly to Suharto," fearing that the outcome was still uncertain. But doubts soon faded. Johnson's new National Security Adviser Walt Rostow "found Suharto's 'New Order' encouraging," US aid began to flow openly, and Washington officials began to take credit for the great success.

According to this skeptical view, then, "The United States did not overthrow Sukarno, and it was not responsible for the hundreds of thousands of deaths involved in the liquidation of the PKI," though it did what it could to encourage the army to liquidate the only mass popular organization in Indonesia, hesitated to become more directly involved only because it feared that these efforts would be counterproductive, greeted the "good news" with enthusiasm as the slaughter mounted, and turned enthusiastically to assisting the "New Order" that arose from the bloodshed as the moderates triumphed.

### 3. Celebration

The public Western reaction was one of relief and pride. Deputy Undersecretary of State Alexis Johnson celebrated "The reversal of the Communist tide in the great country of Indonesia" as "an event that will probably rank along with the Vietnamese war as perhaps the most historic turning point of Asia in this decade" (October 1966). Appearing before a Senate Committee, Secretary of Defense Robert McNamara was asked whether US military aid during the pre-coup period had "paid dividends." He agreed that it had, and was therefore justified -- the major dividend being a huge pile of corpses. In a private communication to President Johnson in March 1967, McNamara went further, saying that US military assistance to the Indonesian army had "encouraged it to move against the PKI when the opportunity was presented." Particularly valuable, he said, was the program bringing Indonesian military personnel to the United States for training at universities, where they learned the lessons they put to use so well. These were "very significant factors in determining the favorable orientation of the new Indonesian political elite" (the army), McNamara argued. A congressional report also held that training and continued communication with military officers paid "enormous dividends." The same reasoning has long been standard with regard to Latin America, with similar results.<sup>9</sup>

Across a broad spectrum, commentators credited the US intervention in Vietnam with having encouraged these welcome developments, providing a sign of American commitment to the anti-Communist cause and a "shield" behind which the generals could act without undue concern about Sukarno's Chinese ally. A Freedom House statement in November 1966 signed by "145 distinguished Americans" justified the US war in Vietnam for having "provided a shield for the sharp reversal of Indonesia's shift toward Communism," with no reservations concerning the means employed. Speaking to US troops in November 1966, President Johnson told them that their exploits in Indochina were the reason why "In Indonesia there are 100 million people that enjoy a measure of freedom today that they didn't enjoy yesterday." These reactions reflect the logic of the US war in Indochina.<sup>10</sup>

In line with his general skepticism, Brands believes these claims to be exaggerated. McNamara's "attempts to appropriate responsibility for the general's rise to power," he thinks, were a reaction to President Johnson's "enthusiasm for the Suharto regime." US assurances to the Indonesian military "certainly had some effect on Suharto's assessment of his prospects," but not much, because they "merely reiterated the obvious fact that the United States prefers rightists to leftists" -- including rightists who conduct a huge slaughter and install a terrorist "New Order." As for the war in Vietnam, the CIA doubted that "the US display of determination in Vietnam directly influenced the outcome of the Indonesian crisis in any significant way," CIA director Helms wrote to Walt Rostow in 1966. As Brands himself puts it, the Johnson administration had been concerned that Indonesia might suffer "the fate from which the United States was then attempting to rescue South Vietnam." Fortunately, Indonesia rescued itself.

There was no condemnation of the slaughter on the floor of Congress, and no major US relief agency offered aid. The World Bank restored Indonesia to favor, soon

making it the third largest borrower. Western governments and corporations followed along.

Those close at hand may have drawn further lessons about peasant massacre. Ambassador Green went on to the State Department, where he presided over the bombing of rural Cambodia, among other achievements. As the bombing was stepped up to historically unprecedented levels in 1973, slaughtering tens of thousands of peasants, Green testified before Congress that the massacre should continue because of our desire for peace: our experience with "these characters in Hanoi" teaches that only the rivers of blood of Cambodian peasants might bring them to the negotiating table. The "experience" to which he referred was the 1972 Christmas bombings of Hanoi, undertaken to force those characters in Hanoi to modify the agreements reached with the Nixon Administration in October but ejected by Washington, then restored without change after the US stopped the bombing because it proved too costly. The events and their remarkable aftermath having been concealed by the Free Press, Green could be confident that there would be no exposure of his colossal fabrications in the interest of continued mass murder.<sup>11</sup>

Returning to Indonesia, the media were pleased, even euphoric. As the army moved to take control, Times correspondent Max Frankel described the delight of Johnson Administration officials over the "dramatic new opportunity" in Indonesia. The "military showed power," so that "Indonesia can now be saved from what had appeared to be an inevitable drift towards a peaceful takeover from within" -- an unthinkable disaster, since internal politics was not under US control. US officials "believe the army will cripple and perhaps destroy the Communists as a significant political force," leading to "the elimination of Communist influences at all levels of Indonesian society." Consequently, there is now "hope where only two weeks ago there was despair."<sup>12</sup>

Not everyone was so enthusiastic about the opportunity to destroy the one popular political force in the country. Japan's leading newspaper, Asahi Shimbun, urged caution: "In view of the fact that the Communist influence is deeply entrenched among the Indonesian grassroots, it would cause further deterioration in the confused national state of affairs if a firm crackdown were carried out against them."<sup>13</sup> But such more somber reflections were rare.

In mid-1966, well after the results were known, U.S. News & World Report headlined a long and enthusiastic story "Indonesia: `HOPE...WHERE ONCE THERE WAS NONE.'" "Indonesians these days can talk and argue freely, no longer fearful of being denounced and imprisoned," the journal reported, describing an emerging totalitarian terror state with hundreds of thousands in prison and the blood still flowing. In a cover story, Time magazine celebrated "The West's best news for years in Asia" under the heading "Vengeance with a Smile," devoting 5 pages of text and 6 more of pictures to the "boiling bloodbath that almost unnoticed took 400,000 lives." The new army regime is "scrupulously constitutional," Time happily announced, "based on law not on mere power," in the words of its "quietly determined" leader Suharto with his "almost innocent face." The elimination of the 3 million-member PKI by its "only possible rival," the army, and the removal from power of the "genuine folk hero" Sukarno, may virtually be considered a triumph of democracy.<sup>14</sup>

The leading political thinker of the New York Times, James Reston, chimed in under the heading "A Gleam of Light in Asia." The regular channel for the State Department, Reston admonished Americans not to let the bad news in Vietnam displace "the more hopeful developments in Asia," primary among them being "the savage transformation of Indonesia from a pro-Chinese policy under Sukarno to a defiantly anti-Communist policy under General Suharto":

Washington is being careful not to claim any credit for this change in the sixth most populous and one of the richest nations in the world, but this does not mean that Washington had nothing to do with it. There was a great deal more contact between the anti-Communist forces in that country and at least one very high official in Washington before and during the Indonesian massacre than is generally realized. General Suharto's forces, at times severely short of food and munitions, have been getting aid from here through various third countries, and it is doubtful if the coup would ever have been attempted without the American show of strength in Vietnam or been sustained without the clandestine aid it has received indirectly from here. The news story on Indonesia the same day carried more glad tidings. Headlined "Indonesians View U.S. Films Again," it described "the biggest public social event in the Indonesian capital these days," the showing of American films to "smartly dressed Indonesians" who "alight from expensive limousines," "one sign of the country's rejection of the anti-American pro-Communist policy of the Indonesian Government" before the gleam of light broke through the clouds.<sup>15</sup>

Recall that according to the skeptical view of Brands and others, Reston's proud claim that the US government could fairly claim credit for the massacre and the establishment of the "New Order" was exaggerated, though understandable.

Editorial reaction to the bloodbath was judicious. The Times was pleased that the Indonesian army had "de-fused the country's political time-bomb, the powerful Indonesian Communist party," and praised Washington for having "wisely stayed in the background during the recent upheavals" instead of assisting openly and trumpeting its glee; the idea that Washington, or anyone, should have protested and sought to abort the useful slaughter was beyond the pale. Washington should continue this wise course, the editors urged, supporting international aid to the "Indonesian moderates" who had conducted the massacre. A February 1966 editorial outlined the likely advantages for the United States now that the Indonesian military had taken power and "proceeded to dismantle the entire P.K.I. apparatus." A follow-up in August recognized that there had been a "staggering mass slaughter of Communists and pro-Communists," with hundreds of thousands killed. This "situation...raises critical questions for the United States," which, fortunately, have been correctly answered: Washington "wisely has not intruded into the Indonesian turmoil" by "embrac[ing] the country's new rulers publicly," which "could well hurt them" -- the only "critical question" that comes to mind. A month later the editors described the relief in Washington over the fact that "Indonesia was lost and has been found again." The successes of the "moderates" had been rewarded "with generous pledges of rice, cotton and machinery" and preparations to resume the economic aid that was held back before the "staggering mass slaughter" set matters right. The US "has adequate reasons of state to come to terms with the new regime," not to speak of more than adequate reasons of profit.<sup>16</sup>

Within a few years, a complete role reversal had been achieved. George McArthur of the Los Angeles Times, a respected Asia hand, wrote in 1977 that the PKI had "attempted to seize power and subjected the country to a bloodbath," placing their necks under the knife in a major Communist atrocity.<sup>17</sup>

By then, the Indonesian generals, in addition to compiling one of the worst human rights records in the world at home, had escalated their 1975 attack on the former Portuguese colony of East Timor to near-genocidal levels, with another "staggering mass slaughter," which bears comparison to the atrocities of Pol Pot in the same years. In this case, the deed was done with the crucial support of the Human Rights Administration and its allies. They understand "reasons of state" as well as the Times editors, who, with their North American and European colleagues, did what they could to facilitate the slaughter by suppressing the readily available facts in favor of (occasional) fairy tales told by Indonesian generals and the State Department. US-Canadian reporting on Timor, which had been substantial before the invasion in the context of Western concerns over the collapse of the Portuguese empire, reduced to zero in 1978 as atrocities peaked along with the flow of US arms.<sup>18</sup>

Times editors were not alone in extolling the moderates who had stirred up the "boiling bloodbath." "Many in the West were keen to cultivate Jakarta's new moderate leader, Suharto," the Christian Science Monitor later reported. Times Southeast Asia correspondent Philip Shenon adds, more cautiously, that Suharto's human rights record is "checkered." The London Economist described this great mass murderer and torturer as "at heart benign," doubtless thinking of his compassion for TNCs. Unfortunately, there are those who try to impugn his benign nature: "propagandists for the guerrillas" in East Timor and West Papua (Irian Jaya) "talk of the army's savagery and use of torture" -- including the Bishop and other church sources, thousands of refugees in Australia and Portugal, Western diplomats and journalists who have chosen to see, Amnesty International and other human rights organizations. They are all "propagandists," rather than intrepid champions of human rights, because they have quite the wrong story to tell.<sup>19</sup>

In the Wall Street Journal, Barry Wain, editor of its Asia affiliate, described how General Suharto "moved boldly in defeating the coup makers and consolidating his power," using "strength and finesse" to take total control. "By most standards, he has done well," though there have been a few problems, specifically, government involvement in the killing of several thousand alleged criminals from 1982 to 1985. Some lingering questions about earlier years aside, a few weeks before Wain's laudatory column, Asiaweek reported another massacre in Sumatra, where armed troops burnt a village of 300 people to the ground, killing dozens of civilians, part of an operation to quell unrest in the province. Suharto is "a Figure of Stability," a Wall Street Journal headline reads, using the term in the PC sense already discussed. The upbeat story does not overlook the events of 1965. One sentence reads: Suharto "took command of the effort to crush the coup attempt, and succeeded."<sup>20</sup>

When the victims are classified as less than human -- wild beasts in the shape of men, Communists, terrorists, or whatever may be the contemporary term of art -- their extermination raises no moral qualms. And the agents of extermination are praiseworthy moderates -- our Nazis, to translate from Newspeak. The practice is

standard. Recall the "moderate" General Gramajo, to mention someone who might aspire to Suharto's league.

## 1. Closing the Books

In 1990-1991, several events elicited some uncharacteristic concern over US-backed Indonesian atrocities. In May 1990, States News Service released a study in Washington by Kathy Kadane, which found that the U.S. government played a significant role by supplying the names of thousands of Communist Party leaders to the Indonesian army, which hunted down the leftists and killed them, former U.S. diplomats say...As many as 5000 names were furnished to the Indonesian army, and the Americans later checked off the names of those who had been killed or captured, according to U.S. officials... The lists were a detailed who's-who of the leadership of the party of 3 million members, [foreign service officer Robert] Martens said. They included names of provincial, city and other local PKI committee members, and leaders of the "mass organizations," such as the PKI national labor federation, women's and youth groups. The names were passed on to the military, which used them as a "shooting list," according to Joseph Lazarsky, deputy CIA station chief in Jakarta at the time, who adds that some were kept for interrogation or "kangaroo courts" because the Indonesians "didn't have enough goon squads to zap them all." Kadane reports that top US Embassy officials acknowledged in interviews that they had approved of the release of the names. William Colby compared the operation to his Phoenix program in Vietnam, in exculpation of his own campaign of political assassination (which Phoenix clearly was, though he denies it).

"No one cared as long as they were Communists, that they were being butchered," said Howard Federspiel, then Indonesia expert for State Department intelligence; "No one was getting very worked up about it." "It really was a big help to the army," Martens said. "They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that's not all bad." "There's a time when you have to strike hard at a decisive moment."

The story was picked up by a few newspapers, though no one got worked up about it. Just more business as usual; after all, the US Embassy had done much the same in Guatemala a decade earlier, as another useful slaughter was getting underway.<sup>21</sup>

While ruffling some feathers briefly, the report was soon consigned to oblivion. The Newspaper of Record (the New York Times) waited almost two months to take notice, long enough to marshal the required denials. Reporter Michael Wines repeats every government propaganda cliché about the events themselves, however tenuous, as unquestioned fact. Ambassador Green dismisses the Kadane report as "garbage." He and others claim that the US had nothing to do with the list of names, which were of no significance anyway. Wines cites a Martens letter to the Washington Post saying that the names were publicly available in the Indonesian press, but not his amplification of this remark, in which he stressed the importance of handing over the list of names; Martens wrote that he "saw nothing wrong with helping out," and still doesn't, because "the pro-Communist terror leading to the final coup...against the non-Communist army leaders...had prevented systematic collection of data on the Communists" (a fanciful tale, but no matter). Wines says



nothing about the Times celebration of the slaughter, or the pride of their leading political commentator on the US role in expediting it.<sup>22</sup>

Stephen Rosenfeld of the Washington Post was one of the few in the national press to be troubled by the Kadane revelations. His reaction too is instructive.

After the Kadane story appeared, the Post carried a letter by Indonesian human rights activist Carmel Budiardjo, who pointed out that direct US complicity in the massacre was already known from the cable traffic between the US Embassy in Jakarta and the State Department published by Gabriel Kolko, specifically, the Green-Rusk interchange cited earlier. A month later, Rosenfeld expressed some concern, adding that "in the one account I read" -- namely, Kolko's book -- some doubts are raised about Communist complicity in the alleged coup attempt that served as the pretext for the massacres (note the evasion of the crucial issues, a deft stroke). But, Rosenfeld continued, Kolko's "typical revisionist blame-America-first point of view makes me distrust his conclusions." He expressed the hope that "someone whose politics are more mainstream would sift through the material and provide an independent account." His plea for rescue appears under the heading, "Indonesia 1965: Year of Living Cynically?"

Fortunately, relief was soon on its way. A week later, under the heading "Indonesia 1965: Year of U.S. Irrelevance," Rosenfeld wrote that he had received in the mail an "independent account" by a historian "without political bias" -- that is, one who could assure him that the state he loves had done no wrong. This antidote was "full of delights and surprises," concluding that the US had no responsibility for the deaths or the overthrow of Sukarno. It "clears Americans of the damaging lingering suspicion of responsibility for the Indonesian coup and massacre," Rosenfeld concludes happily: "For me, the question of the American role in Indonesia is closed."<sup>23</sup>

### **How easy is the life of the true believer.**

The article that closed the books, to Rosenfeld's immense relief, was the Brands study reviewed earlier. That Brands is an "independent" commentator "without political bias" is demonstrated throughout: The US war in Vietnam was an attempt "to rescue South Vietnam"; the information reaching Washington that "The army has virtually destroyed the PKI" in a huge massacre was "good news"; "the most serious deficiency of covert warfare" is "its inevitable tendency to poison the well of public opinion," that is, to tar the US with "bum raps" elsewhere; etc. Much more significant are the "delights and surprises" that put any lingering doubts to rest. Since the study closes all questions for good, we may now rest easy in the knowledge that Washington did all it could to encourage the greatest massacre since the days of Hitler and Stalin, welcomed the outcome with enthusiasm, and immediately turned to the task of supporting Suharto's aptly named "New Order." Thankfully, there is nothing to trouble the liberal conscience.

One interesting non-reaction to the Kadane report appeared in the lead article in the New York Review of Books by Senator Daniel Moynihan. He fears that "we are poisoning the wells of our historical memory," suppressing unpleasant features of our past. He contrasts these failures with the "extraordinary period of exhuming the worst crimes of its hideous history" now underway in the Soviet Union. Of course, "the



United States has no such history. To the contrary." Our history is quite pure. There are no crimes to "exhume" against the indigenous population or Africans in the 70 years following our revolution, or against Filipinos, Central Americans, Indochinese, and others later on. Still, even we are not perfect: "not everything we have done in this country has been done in the open," Moynihan observes, though "not everything could be. Or should have been." But we conceal too much, the gravest crime of our history.<sup>24</sup>

It is hard to believe that as he was writing these words, the Senator did not have the recent revelations about Indonesia in mind. He, after all, has a special personal relation to Indonesian atrocities. He was UN Ambassador at the time of the Indonesian invasion of East Timor, and takes pride, in his memoirs, in having forestalled any international reaction to the aggression and massacre. "The United States wished things to turn out as they did," he writes, "and worked to bring this about. The Department of State desired that the United Nations prove utterly ineffective in whatever measures it undertook. This task was given to me, and I carried it forward with no inconsiderable success." Moynihan was well aware of how things turned out, noting that within a few weeks some 60,000 people had been killed, "10 percent of the population, almost the proportion of casualties experienced by the Soviet Union during the Second World War." Thus he took credit for achievements that he compares to those of the Nazis. And he is surely familiar with the subsequent US government role in escalating the slaughter, and the contribution of the media and political class in concealing it. But the newly released information about the US role in mass slaughter did not stir his historical memory, or suggest some reflections on our practices, apart from our single blemish: insufficient candor.

Moynihan's successes at the UN have entered history in the conventional manner. Measures taken against Iraq and Libya "show again how the collapse of Communism has given the Security Council the cohesion needed to enforce its orders," Times UN correspondent Paul Lewis explains in a front-page story: "That was impossible in earlier cases like...Indonesia's annexation of East Timor."<sup>25</sup>

There was also a flicker of concern about Indonesia after Iraq invaded Kuwait in August 1990. It was hard not to notice the similarity to Indonesia's (vastly more murderous) aggression and annexation. A decade earlier, when glimmerings of what had happened finally began to break through, there had been occasional notice of the comparison between Suharto's exploits in Timor and the simultaneous Pol Pot slaughters. As in 1990, the US and its allies were charged at most with "ignoring" Indonesian atrocities. The truth was well concealed throughout: Indonesia was given critical military and diplomatic support for its monstrous war crimes; and crucially, unlike the case of Pol Pot and Saddam, these could readily have been halted, simply by withdrawal of Western aid and breaking the silence.

Ingenuous efforts have been made to explain away the radically different response to Suharto, on the one hand, and Pol Pot and Saddam, on the other, and to avoid the obvious explanation in terms of interest, which of course covers a vastly wider range. William Shawcross offered a "more structurally serious explanation" for the Timor-Cambodia case: "a comparative lack of sources" and lack of access to refugees, Lisbon and Australia being so inaccessible in comparison with the Thai-Cambodian

border. Gérard Chaliand dismissed France's active support for the Indonesian slaughter in the midst of a great show of anguish about Pol Pot on grounds that the Timorese are "geographically and historically marginal." The difference between Kuwait and Timor, according to Fred Halliday, is that Kuwait "has been up and running as an independent state since 1961"; to evaluate the proposal, recall that the US prevented the UN from interfering with Israel's invasion of Lebanon or following through on its condemnation of Israel's (virtual) annexation of the Syrian Golan Heights, and that, unlike Suharto in Timor, Saddam had offered to withdraw from Kuwait, how seriously we do not know, since the US rejected the offers instantly out of fear that they might "defuse the crisis." A common stance is that "American influence on [Indonesia's decision to invade] may easily be exaggerated," though the US "averted its eyes from East Timor" and "could have done far more than it did to distance itself from the carnage" (James Fallows). The fault, then, is failure to act, not the decisive contribution to the ongoing carnage by increasing the flow of arms as atrocities mounted and by rendering the UN "utterly ineffective" because "The United States wished things to turn out as they did" (Ambassador Moynihan), while the intellectual community preferred to denounce the crimes of official enemies. Others tried different techniques to evade the obvious, adding further footnotes to the inglorious story.<sup>26</sup>

The Australian government was more forthright. "There is no binding legal obligation not to recognize the acquisition of territory that was acquired by force," Foreign Minister Gareth Evans explained, adding that "The world is a pretty unfair place, littered with examples of acquisition by force..." (in the same breath, following the US-UK lead, he banned all official contacts with the PLO with proper indignation because of its "consistently defending and associating itself with Iraq's invasion of Kuwait"). Prime Minister Hawke declared that "big countries cannot invade small neighbors and get away with it" (referring to Iraq and Kuwait), proclaiming that in the "new order" established by the virtuous Anglo-Americans, "would-be aggressors will think twice before invading smaller neighbours." The weak will "feel more secure because they know that they will not stand alone if they are threatened," now that, at last, "all nations should know that the rule of law must prevail over the rule of force in International relations."

Australia has a special relation to Timor; tens of thousands of Timorese were killed during World War II protecting a few Australian guerrillas fighting in Timor to deter an impending Japanese invasion of Australia. Australia has been the most outspoken defender of the Indonesian invasion. One reason, known early on, is the rich natural gas and oil reserves in the Timor Gap, "a cold, hard, sobering reality that must be addressed," Foreign Minister Bill Hayden explained frankly in April 1984. In December 1989, Evans signed a treaty with the Indonesian conquerors dividing up Timor's wealth; through 1990, Australia received \$Aus. 31 million from sales of permits to oil companies for exploration. Evans's remarks, quoted above, were made in explanation of Australia's rejection of a protest against the treaty brought to the World Court by Portugal, generally regarded as the responsible authority.<sup>27</sup>

While British political figures and intellectuals lectured with due gravity on the values of their traditional culture, now at last to be imposed by the righteous in the "new world order" (referring to Iraq-Kuwait), British Aerospace entered into new

arrangements to sell Indonesia jet fighters and enter into co-production arrangements, "what could turn out to be one of the largest arms packages any company has sold to an Asian country," the Far Eastern Economic Review reported. Britain had become "one of Indonesia's major arms suppliers, selling £290 million worth of equipment in the 1986-1990 period alone," Oxford historian Peter Carey writes.<sup>28</sup>

The public has been protected from such undesirable facts, kept in the shadows along with a Fall 1990 Indonesian military offensive in Timor under the cover of the Gulf crisis, and the Western-backed Indonesian operations that may wipe out a million tribal people in West Papua, with thousands of victims of chemical weapons among the dead according to human rights activists and the few observers. Solemn discourse on international law, the crime of aggression, and our perhaps too-fervent idealism can therefore proceed, untroubled. The attention of the civilized West is to be focused, laser-like, on the crimes of official enemies, not on those it could readily mitigate or bring to an end.<sup>29</sup>

The Timor-Kuwait embarrassment, such as it was, quickly subsided; reasonably, since it is only one of a host of similar examples that demonstrate the utter cynicism of the posturing during the Gulf War. But problems arose again in November 1991, when Indonesia made a foolish error, carrying out a massacre in the capital city of Dili in front of TV cameras and severely beating two US reporters, Alan Naim and Amy Goodman. That is bad form, and requires the conventional remedy: an inquiry to whitewash the atrocity, a tap on the wrist for the authorities, mild punishment of subordinates, and applause from the rich men's club over this impressive proof that our moderate client is making still further progress. The script, familiar to the point of boredom, was followed routinely. Meanwhile Timorese were harshly punished and the atmosphere of terror deepened.

Business proceeded as usual. A few weeks after the Dili massacre, the Indonesia-Australia joint authority signed six contracts for oil exploration in the Timor Gap, with four more in January. Eleven contracts with 55 companies were reported by mid-1992, including Australian, British, Japanese, Dutch, and US. The naive might ask what the reaction would have been had 55 western companies joined with Iraq in exploiting Kuwaiti oil, though the analogy is imprecise, since Suharto's atrocities in Timor were a hundred times as great. Britain stepped up its arms sales, announcing plans in January to sell Indonesia a naval vessel. As Indonesian courts sentenced Timorese "subversives" to 15-year terms for having allegedly instigated the Dili massacre, British Aerospace and Rolls-Royce negotiated a multi-million pound deal for 40 Hawk fighter-trainers, adding to the 15 already in service, some used in crushing the Timorese. Meanwhile Indonesia was targeted for a new sales campaign by British firms because of its prospects for aerospace industries. As the slight tremor subsided, others followed suit.<sup>30</sup>

The "Gleam of Light in Asia" in 1965-1966 and the glow it has left until today illuminate the traditional attitudes towards human rights and democracy, the reasons for them, and the critical role of the educated classes. They reveal with equal brilliance the reach of the pragmatic criterion that effectively dismisses any human values in the culture of respectability.

- 
1. Thomas Friedman, *NYT*, Jan. 12, 1992; see p. 183. Taylor, *Swords*, 159. Pfaff and Hoopes, virtually identical commentary with no cross-reference, so it is unclear who should receive the credit; see *AWWA*, 297-300, *FRS*, 94-5. Wohlstetter, *WSJ*, Aug. 25, 1992. Hegel, *Philosophy*, 96.
  2. Schoultz, *Comparative Politics*, Jan. 1981. Herman, in *PEHR*, I, ch. 2.1.1; *Real Terror Network*, 126ff. *PEHR*, MC, for comparative analysis. And a huge literature on case studies.
  3. See *TNCW*, 73f., for further discussion. Also *NI*, *DD*, among others.
  4. Leffler, *Preponderance*, 260, 165. See ch. 10.4, and for the background, ch. 2.1-2. On Japan-SEA, see RC, ch. 2.1. Below, unless otherwise indicated, see Peter Dale Scott, "Exporting Military-Economic Development," in Caldwell, *Ten Years*, and "The United States and the Overthrow of Sukarno," *Pacific Affairs*, Summer 1985; *PEHR*, vol. I, ch. 4.1; Kolko, *Confronting*.
  5. *FTR*, 457ff.; *COT*, ch. 8. Marshall, et al., *Iran-Contra*, chs. 7, 8.
  6. McGehee, *Nation*, April 11, 1981. Also *News from Asia Watch*, June 21, 1990.
  7. *bid.* Rusk cited by Kolko.
  8. Brands, "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno," *J. of American History*, Dec. 1989.
  9. Johnson cited by Kolko, *Confronting*. McNamara and congressional report cited in Wolpin, *Military Aid*, 8, 128. McNamara to Johnson, Brands, *op. cit.* Ch. 7.3.
  10. *Public Papers of the Presidents*, 1966 (Washington, 1987), Book II, 563.
  11. *NYT*, March 29, 1973. See ch. 10, n. 64.
  1. Frankel, *NYT*, Oct. 11, 1965.
  2. Quoted in *NYT*, Oct. 17, 1965.
  1. Robert Martin, *U.S. News*, June 6, 1966. *Time*, July 15, 1966.
  1. *NYT*, June 19, 1966.
  1. Editorials, *NYT*, Dec. 22, 1965; Feb. 17, Aug. 25, Sept. 29, 1966.
  1. *IHT*, Dec. 5, 1977, from *LAT*.
  1. *PEHR*, I, ch. 3.4.4; *TNCW*, ch. 13; Peck, *Chomsky Reader*, 303-13. For an overview, Taylor, *Indonesia's Forgotten War*.
  1. John Murray Brown, *CSM*, Feb. 6, 1987; Shenon, *NYT*, Sept. 3, 1992; *Economist*, Aug. 15, 1987.
  1. Wain, *WSJ*, April 25, 1989; *Asia Week*, Feb. 24, 1989, cited in *TAPOL Bulletin*, April 1989. Richard Borsuk, *WSJ*, June 8, 1992.

- 1 Kadane, SFE, May 20, 1990. WP, May 21; AP, May 21; Guardian (London), May 22; BG, May 23, 1990. One exception to the general dismissal was the New Yorker, "Talk of the Town," July 2, 1990. Guatemala, ch. 7.7.
- 1 Wines, NYT, July 12; Martens, letter, WP, June 2, 1990.
- 1 Budiarjo, letters, WP, June 13; Rosenfeld, WP, July 13, July 20, 1990.
- 1 Moynihan, NYRB, June 28, 1990.
- 1 See TNCW, ch. 13. Lewis, NYT, April 16, 1992.
- 2 Shawcross, see MC, 284f.; for more detail, Peck, op. cit. Chaliand, *Nouvelles littéraires*, Nov. 10, 1981; Fallows, *Atlantic Monthly*, Feb., June 1982. Halliday, *Guardian Weekly*, Aug. 16, 1992.
- 1 Daily Hansard SENATE (Australia), 1 November, 1989, 2707. Indonesia News Service, Nov. 1, 1990. Green left mideast.gulf.346, electronic communication, Feb. 18, 1991. Monthly Record, Parliament (Australia), March 1991. Reuters, Canberra, Feb. 24; Communiqué, International Court of Justice, Feb. 22, 1991. PEHR, I, 163-6. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, 171.
- 1 FEER, 25 July, 1991. Carey, letter, *Guardian Weekly*, July 12, 1992.
- 1 ABC (Australia) radio, "Background briefing; East Timor," Feb. 17, 1991; Osborne, *Indonesia's Secret Wars*; Monbiot, *Poisoned Arrows*; Anti-Slavery Society, West Papua.
- 1 Age (Australia), Jan. 11, Feb. 18; IPS, Kupang, Jan. 20; Australian, July 6; Carey, op. cit.; *The Engineer*, March 26, 1992. See also TAPOL Bulletin, Aug. 1992.  
Source:  
Chomsky on Indonesia  
From Year 501 Copyright © 1993 by Noam Chomsky. Published by South End Press.  
Chapter 5: Human Rights: The Pragmatic Criterion Segment 2/9  
[http://www.infoshop.org/news2/chomsky\\_indo.html](http://www.infoshop.org/news2/chomsky_indo.html)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Author: anonymous  
Published: 2005/10/7  
Read 14 times  
Size 6.58 KB

## The Coup

By 1965 Indonesia had become a dangerous cockpit of social and political antagonisms. The PKI's rapid growth aroused the hostility of Islamic groups and the military. The ABRI-PKI balancing act, which supported Sukarno's Guided Democracy regime, was going awry. One of the most serious points of contention was the PKI's desire to establish a "fifth force" of armed peasants and workers in conjunction with

the four branches of the regular armed forces. Many officers were bitterly hostile, especially after Chinese premier Zhou Enlai offered to supply the "fifth force" with arms. By 1965 ABRI's highest ranks were divided into factions supporting Sukarno and the PKI and those opposed, the latter including ABRI chief of staff Nasution and Major General Suharto, commander of Kostrad. Sukarno's collapse at a speech and rumors that he was dying also added to the atmosphere of instability.

The circumstances surrounding the abortive coup d'état of September 30, 1965--an event that led to Sukarno's displacement from power; a bloody purge of PKI members on Java, Bali, and elsewhere; and the rise of Suharto as architect of the New Order regime--remain shrouded in mystery and controversy. The official and generally accepted account is that procommunist military officers, calling themselves the September 30 Movement (Gestapu), attempted to seize power. Capturing the Indonesian state radio station on October 1, 1965, they announced that they had formed the Revolutionary Council and a cabinet in order to avert a coup d'état by corrupt generals who were allegedly in the pay of the United States Central Intelligence Agency. The coup perpetrators murdered five generals on the night of September 30 and fatally wounded Nasution's daughter in an unsuccessful attempt to assassinate him. Contingents of the Diponegoro Division, based in Jawa Tengah Province, rallied in support of the September 30 Movement. Communist officials in various parts of Java also expressed their support.

The extent and nature of PKI involvement in the coup are unclear, however. Whereas the official accounts promulgated by the military describe the communists as having a "puppetmaster" role, some foreign scholars have suggested that PKI involvement was minimal and that the coup was the result of rivalry between military factions. Although evidence presented at trials of coup leaders by the military implicated the PKI, the testimony of witnesses may have been coerced. A pivotal figure seems to have been Syam, head of the PKI's secret operations, who was close to Aidit and allegedly had fostered close contacts with dissident elements within the military. But one scholar has suggested that Syam may have been an army agent provocateur who deceived the communist leadership into believing that sympathetic elements in the ranks were strong enough to conduct a successful bid for power. Another hypothesis is that Aidit and PKI leaders then in Beijing had seriously miscalculated Sukarno's medical problems and moved to consolidate their support in the military. Others believe that ironically Sukarno himself was responsible for masterminding the coup with the cooperation of the PKI.

In a series of papers written after the coup and published in 1971, Cornell University scholars Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey argued that it was an "internal army affair" and that the PKI was not involved. There was, they argued, no reason for the PKI to attempt to overthrow the regime when it had been steadily gaining power on the local level. More radical scenarios allege significant United States involvement. United States military assistance programs to Indonesia were substantial even during the Guided Democracy period and allegedly were designed to establish a pro-United States, anticommunist constituency within the armed forces.

In the wake of the September 30 coup's failure, there was a violent anticommunist reaction. By December 1965, mobs were engaged in large-scale killings, most

notably in Jawa Timur Province and on Bali, but also in parts of Sumatra. Members of Ansor, the Nahdatul Ulama's youth branch, were particularly zealous in carrying out a "holy war" against the PKI on the village level. Chinese were also targets of mob violence. Estimates of the number killed--both Chinese and others--vary widely, from a low of 78,000 to 2 million; probably somewhere around 300,000 is most likely. Whichever figure is true, the elimination of the PKI was the bloodiest event in postwar Southeast Asia until the Khmer Rouge established its regime in Cambodia a decade later.

The period from October 1965 to March 1966 witnessed the eclipse of Sukarno and the rise of Suharto to a position of supreme power. Born in the Yogyakarta region in 1921, Suharto came from a lower priyayi family and received military training in Peta during the Japanese occupation. During the war for independence, he distinguished himself by leading a lightning attack on Yogyakarta, seizing it on March 1, 1949, after the Dutch had captured it in their second "police action." Rising quickly through the ranks, he was placed in charge of the Diponegoro Division in 1962 and Kostrad the following year.

After the elimination of the PKI and purge of the armed forces of pro-Sukarno elements, the president was left in an isolated, defenseless position. By signing the executive order of March 11, 1966, Supersemar, he was obliged to transfer supreme authority to Suharto. On March 12, 1967, the MPRS stripped Sukarno of all political power and installed Suharto as acting president. Sukarno was kept under virtual house arrest, a lonely and tragic figure, until his death in June 1970.

The year 1966 marked the beginning of dramatic changes in Indonesian foreign policy. Friendly relations were restored with Western countries, Confrontation with Malaysia ended on August 11, and in September Indonesia rejoined the UN. In 1967 ties with Beijing were, in the words of Indonesian minister of foreign affairs Adam Malik, "frozen." This meant that although relations with Beijing were suspended, Jakarta did not seek to establish relations with the Republic of China on Taiwan. That same year, Indonesia joined Malaysia, Thailand, the Philippines, and Singapore to form a new regional and officially nonaligned grouping, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which was friendly to the West.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*